IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

PEMAHAMAN TENTANG PROFESIONALISME MILITER DI TINGKAT ELIT TNI-AD

(Studi Fenomenologi pada Perwira Menengah TNI-AD di Daerah Garnizun Malang)

MUHADJIR EFFENDY

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PEMAHAMAN TENTANG PROFESIONALISME MILITER DI TINGKAT ELIT TNI-AD

(Studi Fenomenologi pada Perwira Menengah TNI-AD di Daerah Garnizun Malang)

DISERTASI

Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Kamis
Tanggal : 24 Januari 2008
Pukul 10.^{00} WIB

Oleh :

MUHADJIR EFFENDY
NIM : 099911372 D

LEMBAR PERSETUJUAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 14 APRIL 2008

Oleh

Promotor

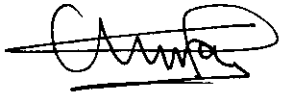

Prof. Dr. Hotman M. Siahaan

Ko. Promotor

Dr. Kusnanto Anggoro

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Telah diuji pada
Tanggal 29 Nopember 2007

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.

Anggota :

1. Prof. Dr. Hotman M. Siahaan
2. Dr. Kusnanto Anggoro
3. Prof. Ramlan Surbhakti, Drs., MA., Ph.D.
4. Dr. J. Kristiadi
5. Daniel Theodore Sparinga, Ph.D.
6. Dr. FX. Armada Rijanto CM.
7. Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 10724/J03/PP/2007
Tanggal 13 Desember 2007

Ucapan Terima Kasih

Pertama, saya bersyukur kepada Allah SWT dengan selesainya penulisan disertasi ini. Karena tanpa kehendak-Nya mana mungkin ada daya kekuatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan disertasi ini. Kedua, doa yang khusu' untuk kedua orang tua yang sudah almarhum, Ibu Hj. Sri Soebitah, dan ayah Soeroja. Terimakasih yang tak terhingga kepada beliau berdua. Khususnya terimakasih kepada ayah yang telah tidak mengizinkan saya menjadi tentara dan menganjurkan menjadi guru saja seperti dirinya. Seandainya tidak menuruti anjuran beliau belum tentu saya bisa membuat disertasi ini.

Kepada promotor Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, terima kasih atas kesabaran dan antusiasmenya dalam setiap memberi bimbingan dan kritiknya yang keras untuk kesempurnaan disertasi ini. Juga kepada ko-promotor Dr. Kusnanto Anggoro yang berusaha keras menyediakan waktu dicelah kesibukannya di Jakarta yang sangat padat, terima kasih atas koreksi beliau berdua yang sering "tidak kenal ampun" dan diskusi-diskusinya yang mencedaskan.

Kepada Ketua BPH-UMM, Prof. A. Malik Fadjar; Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fasichullisan, Apt., juga kepada Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, khususnya Prof. Dr. Drg. Ruslan Effendi yang tidak pernah bosan-bosan mengingatkan batas akhir penyelesaian disertasi ini. Kontak-kontak yang beliau lancarkan telah menjadi pembangkit motivasi agar segera terselesaikan disertasi ini. Juga kepada KPS Program Doktor Ilmu Sosial yang baru Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA., terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi anggota penguji mulai ujian tertutup.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran pihak lain yang tak mungkin disebut satu persatu dalam lembar ini saya harus mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ramlan Surbhakti, MA., Ph.D, karena sewaktu masih menjabat ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial FPS UNAIR, beliaulah yang memberi peluang dan dengan terus menerus mengobarkan semangat kepada saya dan kawan-kawan yang sebagian besar sudah tergolong "veteran" untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan studi ini.

Terima kasih kepada Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA dan DR. FX. Armada Rijanto, atas kemurahan hatinya berkali-kali memberi masukan untuk

disertasi ini. Juga kepada Daniel Theodore Sparinga, Ph.D; Dr. J. Kristiadi yang telah menyediakan waktu tenaga untuk megkritisi naskah akhir dan menjadi anggota penguji.

Kepada Prof. Dr. Imam Syafii, mantan Rektor Universitas Negeri Malang, (UM) dan Prof. Dr. Suparno, Rektor UM sekarang; Dr. Kusmintardjo, Dekan FIP-UM; Drs. Kentar Budoyo, Ketua jurusan PLS, adalah pejabat-pejabat atasan saya dalam kapasitas saya sebagai tenaga pengajar di lembaga tersebut yang kepada beliau lah saya berterima kasih atas kesempatan dan izin belajar yang diberikan.

Juga kepada Drs. Wakidi; Drs. Mursidi, MM; Drs. Joko Widodo, MSi; Ir. Ali Syaifullah; Prof. Dr. Ishomuddin Faiz; Drs. Syamsul Rizal Yazid, MA; Drs. Soeparto, MPd. adalah para Pembantu dan Asisten Rektor di Universitas Muhammadiyah Malang yang juga harus kami hargai atas toleransi dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih kepada Drs. Wahjoe Dwiprijono; Drs. Nasrullah, MSi.; Ir. Suyatno, MSi.; Drs. Hari Sunaryo, MSi.; Drs. Wahyu Hidayat Riyanto, MM, yang adalah jajaran rektorat, UMM Press, dan dosen UMM yang punya andil besar dalam memberikan bantuan teknis maupun pemikiran untuk menyelesaikan disertasi ini dan penerbitan buku "Profesionalisme Militer, Profesionalime TNI".

Disertasi ini sangat tertolong berkat bantuan para informan, yakni Letkol (Inf) Tri Suwandono (Wadan Rindam V/Brw) dan Letkol (Arm) Suko Purwantoro (Danyon Armed 1/105 Kodam V/Brw). Kepada beliau berdua saya harus mengucapkan terima kasih karena telah membukakan akses komunikasi dengan kolega-kolega militer lainnya. Kepada Kol. (Inf) Budihardjo (Danrem 083/BDJ); Kol. (Inf) Tatang Adi Cahyono (Danrindam V/Brw); Kol. (Inf) Aris Suhardiono (Kapuskopad "A"); Kol. (Arm) Dadang Danuardi (Kepala Lemjiantek Kodiklat TNI AD); Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan (Waas Ops Kodam V/Brw); Letkol (Inf) Bahman (Dandim 0833/ Kota Malang) dan Mayor Alton (Pusdik Arhanud), terima kasih atas informasi yang sangat lengkap. Mudah-mudahan temuan disertasi ini memberi konstribusi untuk kemajuan militer kita.

Yang bagi saya tak ternilai konstribusinya adalah "Perlawanan" yang dilancarkan Dr. Sanapiah Faisal dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi selama proses penyusunan, begitu juga atas kesediaan mendampingi dalam penelitian. Juga

Dr. Wahyudi, MSi. dan Drs. Asep Nurjaman, MSi., yang dengan senang hati memenuhi permintaan saya untuk membuat beberapa naskah pembanding, begitu juga Dr. Hamidi dan Dr. Ahmad Habib terima kasih atas diskusi-diskusinya.

Saya juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah kerajaan Inggris Raya melalui Dubesnya di Jakarta yang pada tahun 2005 memberi kesempatan saya melakukan studi banding pada *Department of War Studies* pada *King's College* London, *Royal College of Defence Studies,* London; dan *Royal Military Academy*, Shandurst, yang memungkinkan saya menambah wawasan, bertemu dan berdiskusi dengan para pakar dan pejabat militer yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih kepada *British Council* di Jakarta dan London yang telah mengatur perjalanan tersebut, khususnya Pak Aidinal Rasyid yang selalu mendampingi saya selama kunjungan.

Terakhir, saya merasa bersalah oleh sebab itu harus meminta maaf kepada keluarga: Wida (isteri) Zidan dan Hably (anak) yang sering menjadi tumpahan stres dan frustrasi dalam proses menyelesaikan disertasi ini. Karena itu saya ingin menjadikan disertasi ini sebagai hadiah istimewa untuk anak-anak dan isteri tercinta.

Akhirnya terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung atas disertasi ini.

RINGKASAN

PEMAHAMAN TENTANG PROFESIONALISME MILITER DI TINGKAT ELIT TNI-AD
(Studi Fenomenologi pada Perwira Menengah TNI-AD di Daerah Garnizun Malang)

Berdasar kajian literatur yang mendalam dapat disimpulkan bahwa sejak awal terbentuknya organisasi militer Indonesia yang sekarang bernama Tentara Nasional Indonesa (TNI), telah muncul isu, gagasan dan upaya untuk menjadikannya TNI sebagai militer yang profesional. Isu, gagasan dan upaya tersebut kian mencuat bersamaan dengan terjadinya peristiwa reformasi sosial di Indonesia pada akhir tahun 90-an yang mengakibatkan ambruknya kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama tiga dasa warsa lebih. Klimaks peristiwa tersebut adalah ditandai oleh "lengsernya" Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, yang akibatnya menciptakan efek domino, merembet pada semua kekuatan penyangga kekuasaannya. Termasuk merembet pada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang waktu itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Titik simpul yang dianggap paling sensitif untuk bisa memberi efek ubahan secara menyeluruh dalam mereformasi TNI waktu itu adalah terletak pada profesionalismenya. Dengan asumsi bahwa terjadinya perilaku patologis elit TNI maupun institusinya selama masa pemerintahan Orde Baru, termasuk bergesernya fungsi yang semula sebagai alat pertahanan negara menjadi alat kekuasaan rezim Orde Baru, adalah sebagai akibat dari rendahnya kadar profesionalitas dalam diri TNI.

Berikutnya, desakan untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004, khususnya Bab II Pasal 2. Dijadikan sebagai salah satu dari empat Jati Diri TNI, yang semula hanya tiga yaitu sebagai: "Tentara Rakyat", "Tentara Pejuang" dan "Tentara Nasional".

Bunyi pasal yang mensuratkan bahwa TNI adalah Tentara Profesional tersebut adalah sbb.:

> "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi

sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi".

Sebagaimana telah dikemukakan, kalau ditelisik dari sejarah mentalitas TNI – sebagaimana telah diungkap dalam disertasi ini—ternyata masalah profesionalisme TNI itu sudah muncul sejak awal pembentukannya. Setidak-tidaknya profesionalisme yang dimaksudkan sebagai keterdidikan dan keahlian militer. Bahkan telah terjadi pertarungan arus pemikiran di kalang perwira tentang profesionalisme TNI tersebut. Yaitu antara mereka yang lebih memberi penekanan pada pentingnya aspek semangat (patriotisme, kejuangan, dlsb) dengan yang lebih mementingkan pada aspek kemampuan teknis kemiliteran. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya reformasi sosial akhir tahun 90-an adalah sebagai faktor pencetus, dan bukan penyebab utama bagi terangkatnya isu profesionalisme TNI tersebut.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengkonstruksikan pemahaman serta makna tentang profesionalisme militer dalam dunia kesadaran para elit TNI-AD. Untuk kepentingan pelaksanaan, konsep tentang "Elit TNI AD" di atas diberi definisi operasional yaitu "Perwira-perwira menengah TNI AD yang menduduki pucuk-pucuk pimpinan atau komando di institusi-institusi militer yang ada di daerah garnizun Malang". Untuk agar sampai pada tujuan penelitian tersebut di atas dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Seperti apakah pola pembentukan pemahaman dan pemaknaan tentang profesionalisme militer itu? (2) Bagaimanakah konsep tentang TNI sebagai Tentara Profesional antara lain sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004 dipahami? (3) Apakah nilai-nilai yang mendasarinya sehingga muncul pemahaman tersebut?

Secara metodologis penelitian ini adalah termasuk penelitian fenomenologis sebagai bentuk kontras dari penelitian positivistis. Sedang dari segi metode adalah lebih mengarah kepada fenomenologi transendental *Edmund Husserl* yang antara lain menggunakan prinsip-prinsip: (1) Fenomenologi sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara realitas obyektif dengan realitas subyektif, (2) Bertujuan menemukan essensi suatu fenomena, (3) Memandang esensi bukan berada pada obyektifitasnya juga bukan pada subyektifitasnya melainkan berada pada interval intersubyektifitasnya yang tidak bervarean, (4) Menyelami relung kesadaran subyek

untuk mencari dan menemukan essensi dari pengalaman murni subyek atas sesuatu, (5) Menghindari kemungkinan pengaruh pandangan, keyakinan dan prasangka teoritis terhadap pengalaman murni Subyek tersebut, dengan cara menahannya terlebih dahulu (*bracketing*), (6) Membuka pandangan-pandangan dan prasangka-prasangka teoritik yang semula ditahan *(bracketed)* untuk disandingkan, dicari interelasi dan koherensinya dengan esensi fenomena yang telah ditemukan, agar darinya dapat dikonstruksikan makna-makna yang bersifat transendental.

Adapun prosedur penelitian ini adalah menggunakan acuan yang disusun oleh Bogdan & Taylor serta yang disusun oleh John Cresswell. Pengumpulan data dan informasi dari lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, angket terbuka, dan diskusi terfokus. Ploting penyajian dan analisis menggunakana: (1) Kerangka teori konstruksi sosial oleh Berger & Luckman; (2) Intaksionisme Simbolik oleh Mead (3) Strukturasi oleh Goddens, dan (4). Antropologi Pengalaman oleh Turner & Burner. Sedangkan yang menjadi Subyek Penelitian adalah para Perwira Menengah TNI AD di daerah garnizun Malang.

Pembahasan teoritis yang difungsikan sebagai "kompas" pertanda arah dalam penelitian fenomenologi ini ada dua yaitu bersifat nomotetis dan ideografis. Yang bersifat nomotetis adalah: (1) Thesis Prof. Samuel P Huntington tentang profesionalisme militer dalam bentuk konseptualisasi dan relasi antara *expertise-social responsibility-corporateness*. (2) Thesis Prof. Alfred Stepan tentang konspetualisasi dan relasi antara *State-political siciety-civil society*. Sedang kajian ideografis adalah tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menggunakan pendekatan sosiologi sejarah mentalitas *(historical sociology of mentality)* yang difokuskan mengenai gagasan dan perkembangan pemikiran profesionalisme TNI sejak terbentuknya TNI hingga saat ini.

Hasil dan analisis penelitian disajikan dalam tiga bab yaitu: bab IV mengkonstruksikan struktur realitas-realitas sosial obyektif yang membentuk konsep diri para elit TNI AD; Bab V, mengkonstruksikan apa yang penulis sebut sebagai ruang kesadaran mikro, yang berisi pemahaman elit TNI AD tentang essensi dari profesionalisme militer; Bab VI mengkonstruksikan apa yang penulis sebut ruang kesadaran mikro-makro yaitu berisi pemahaman elit TNI AD tentang berbagai isu

yang berkenaan dengan keberadaan TNI dalam kaitannya dengan pemaknaan terhadap isu-isu tersebut oleh aktor sosial di luar TNI.

Penelitian ini antara lain mengungkapkan:

1. Bahwa profesionalisasi TNI itu diinternalisasi melalui tiga realitas sosial yaitu (1) realitas sosial kekeluargaan. Di sini salah satu atau beberapa anggota keluarga berperan sebagai *siginigicant other,* (2) realitas sosial pendidikan. Khususnya pendidikan militer pertama (Dikma) di Akademi Militer di samping pendidikan pembetukan (Diktuk) dan pendidikan pengembangan baik pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) maupun pengembangan umum (Dikbangum). Di sini para pendiri TNI terutama Panglima Besar Jenderal Soedirman dijadikan *legendary significant other(s),* (3) realitas sosial penugasan di empat area yaitu di medan operasi, di markas pasukan, di lembaga pendidikan dan di kawasan teritorial. Di sini bukan lagi *significant other* yang berperan malainkan *generalize other(s)* yaitu aktor-aktor lain, baik sesama perwira TNI maupun aktor sosial di luar TNI.
2. Frofesionalisme dipahami oleh Subyek Penelitian sebagai ahli dibidangnya. Bagi TNI berarti keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya, yaitu "menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta melindungi dan menjamin keselamatan segenap bangsa Indonesia". Untuk itu menurut pemahamannya, pendidikan dan latihan adalah merupakan syarat mutlak, kesejahteraan prajurit dan biaya operasional adalah syarat utama sedang perlengkapan dan peralatan modern adalah syarat penunjang.
3. Subyek Penelitian memahami kedudukan dan fungsi profesionalisme sebagai berikut: (1) bukan merupakan bagian inheren dari jati diri TNI, akan tetapi penting karena memiliki fungsi pengganda *(multi-playing effect)* atas fungsi jati diri tersebut, (2) lebih bermakna sebagai pembentukan keahlian dan kedudukannya tidak lebih penting dibanding pembentukan watak dan semangat kejuangan.
4. Berdasar pengkajian literatur sejarah mentalitas TNI dan ditautkan dengan pengalaman Subyek Penelitian dapat disimpulkan bahwa landasan pembentukan watak dan semangat kejuangan TNI adalah bersumber dari nilai-nilai yang

berasal dari tradisi keprajuritan khas Indonesia yaitu apa yang disebut "Ksatriya". Maka profesionalisme TNI adalah merupakan perpaduan antara watak dan semangat yang mengadopsi dari nilai-nilai ksatriya dengan keahlian militer yang diadopsi dari prinsip-prinsip militer profesional pada umumnya.

SUMMARY

UNDERSTANDING OF MILITARY PROFESSIONALISM IN THE ELITE LEVEL OF TNI-AD (A Phenomenological Research on the Middle-Rank Officers of TNI-AD at Malang Garrison)

Based on thorough literary studies can be concluded that since the early time of military organization formation in Indonesia that currently named Indonesia National Army (Tentara Nasional Indonesia/ TNI), there had been issues, ideas and attempts to professionalize the army. Those issues, ideas and attempts once more resonated and escalated when Indonesia experienced social reformation in the end of 90s that has resulted in the collapse of New Order regime that had taken place during more than three decades. The climax of that event was signaled by Suharto's resignation from his power. This resignation has brought domino effects, including to the pillars on which Suharto's power was based. One of those pillars was Indonesian National Army that at that time was called Indonesian Armed Force (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ ABRI).

Professionalism serves as the most sensitive point in giving comprehensive change effects to TNI. It is assumed that the pathologic attitude of TNI elites and institutions during the New Order era, including functional shift from defense apparatus to New Order supporting power, was due to low quality of TNI's professionalism.

In turn, the pressure to professionalize TNI was stated in the Regulation No. 34/ 2004, which specifically mentioned in Chapter II Article 2. The Regulation stated the four TNI's Identity which was derived from three identities: "People's Army", "Warrior Army", and "National Army".

The article explicitly mentioned that TNI is Professional Army was:

> *"The Professional Army is the trained, educated, well-equipped, not being engaged in practical politics, not having business activities, and having secure prosperity, and following the country's political policy in line of democracy principles, civil supremacy, and the ratified international law".*

As has been stated, when TNI's mentality history is traced –as this dissertation did—the issue of professionalism has emerged in the early time of its formation, at least professionalism in the sense of military education and expertise. Furthermore, there has been ideological clash among elites on the concept of professionalism. One group emphasized on the importance of spirit keeping (patriotism and power to struggle), while other prioritized the mastery technical aspects of military expertise. Therefore, it can be asserted that social reformation in the end of 90s was only triggering factor and not main cause for the emergence of military professionalism discourse.

Based on this background, this research was aimed to construct the understanding and the meaning of military professionalism in TNI-AD elites' recognition. To limit the research, the concept of "TNI-AD Elites" was defined as "the middle-rank officers of TNI-AD who occupied top leader positions or commanders at military institutions in Malang Garrison". To reach the purpose of this research, the problems were stated as follows: (1) What were the patterns of understanding and meaning formation of military professionalism? (2) How was the concept of TNI on the professional army as mentioned in Regulation No. 34/ 2004 being perceived? (3) What were the values becoming the basic of the rise of the understanding?

Methodologically, this research is phenomenological one and is a contrast of positivistic research. From methodological point of view, this research adopts

Edmund Husserl's transcendental phenomenology that, among others, employs principles such as: (1) Phenomenology as a "bridge" that correlates objective realities and subjective realities; (2) Aiming at finding essence of a phenomenon; (3) Viewing that essence does not lie on its objectivity or subjectivity, rather it lies in the interval of its inter-subjectivity that has no variants; (4) Searching for awareness space of a subject in order to find essence of subject pure experience on certain things; (5) Avoiding the possibility of the influence of theoretical views, belief and prejudice on subject's pure experience, by bracketing method; (6) Revealing the bracketed theoretical views and prejudice in order to be parallelized, to be searched its interrelation and coherence with phenomenon essence that has been found, and from this, transcendental meanings can be constructed.

The research methodology applied Bogdan & Taylor's reference, supported by those of John W. Cresswell. Data was collected through in-depth interviews, open-ended questionnaires, and focused discussions. Presentation plotting and data analysis used: (1) social construction theory by Berger & Luckman, (2) anthropology of experience by Turner & Burner, (3) structuration theory by Giddens, and (4) symbolic interactionism by Mead. The research subjects were the middle-rank officers of TNI-AD in Malang garrison.

There are two theoretical discussions that functioned as "compass" that gives directions in this phenomenological research, namely nomothetical and ideographical. The nomothetical ones are: (1) Samuel P Huntington's thesis on military professionalism in the form of conceptualization and relation of expertise-social responsibility-corporateness; (2) Alfred Stephan's thesis on conceptualization and relation of state-political society-civil society. While ideographical study is

Indonesian National Army. In analyzing this, this research uses historical sociology of mentality that focused on ideas and development of thought on military professionalism since the formation of Indonesian military up to present.

Research findings and analysis were presented in three chapters: Chapter IV, Chapter V, and Chapter VI. Chapter IV constructed the structure of objective social reality which shaped the self-concept of TNI-AD elites. Chapter V constructed—what the writer called—micro recognition space, which consisted of the essentials of military professionalism. Chapter VI constructed—what the writer called—micro-macro, which consisted of the TNI-AD elites' understanding on issues related to TNI's existence in term of the explanation on the issues exposed by social agents outside of TNI's realm.

Furthermore, this research revealed that:

(1). TNI's professionalism was internalized through three social reality, they were: (1) Social reality on the basic of family, in which, one or some of the family member became the significant other; (2) Social reality on education, which is applied in the First Military Education (*Dikma*) in Military Academy, Formation Education (*Diktuk*), Development and Specialization Education (*Dikbangspes*), and Public Development (*Dikbangum*). In this case, the TNI founders, included Commander Gen. Soedirman was established as the *legendary significant other (s)*; (3) Social reality tour of duty, which were assigned in four area: operational area, troops' station, education institution, and territorial area. In this case, the *significant others* were not the dominant player any more, but *the*

generalize other(s) were; they could be the other actors, the same TNI officers or social actors outside TNI's realm.

(2). Professionalism was perceived by the research subjects as being expert on his/her field. In other words, TNI perceived professionalism as any competence needed in completing the main job perfectly; namely "keeping the sovereignty and unity of Unitarian State of Republic of Indonesian (NKRI), protecting and assured the safety of the Indonesians". Thus, based on the concept, education and training were the absolute requirement, whereas the soldiers' welfare and operational expense were the main requirement, and equipments and modern instruments were the supporting requirement.

(3). The research subjects perceived the position and professionalism function were: (1) not inherent part of TNI's identity, but it was important because of the multi-playing effect of the identity's function, (2) more meaningful for its role in shaping the competence and forming the characters and spirit of struggle.

(4). Based on literary studies of TNI's mentality history and the research subjects' experience can be concluded that the basis of character building and struggling spirit of TNI came from the values which were adopted from the tradition of Indonesian military called "*ksatriya*". Therefore, TNI's professionalism is the combination of both character and spirit that adopt *ksatriya* values with military expertise that is adopted from the principles of military professionalism in general.

ABSTRAK

PEMAHAMAN TENTANG PROFESIONALISME MILITER DI TINGKAT ELIT TNI-AD
(Studi Fenomenologi pada Perwira Menengah TNI-AD di Daerah Garnizun Malang)

Tujuan pokok penelitian ini adalah mengungkap pemahaman serta makna profesionalisme militer dalam dunia kesadaran para elit TNI-AD. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan kedalam tiga pertanyaan penelitian yaitu: (1) Seperti apakah pola pembentukan pemahaman itu?, (2) Bagaimanakah pemahamanya terhadap berbagai konsep mengenai TNI sebagai tentara profesional?, (3) Apakah nilai-nilai yang mendasarinya sehingga muncul pemahaman tersebut?

Secara metodologis penelitian ini menggunakan perspektif fenomenologi Edmund Husserl. Penelitian pustaka difokuskan pada pengkajian mengenai profesionalisme militer baik secara nomotetis maupun ideografis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengambil subyek penelitian para perwira menengah TNI AD Garnizun Malang. Prosedur penelitian fenomenologi yang digunakan sebagaimana yang disusun oleh Bogdan & Taylor (*Introduction to Qualitative Research Methods,* 1975) dan John W. Cresswel (*Qualitative Inquiry and Research Design, 1998).* Informasi dikumpulkan dengan melalui interview mendalam, diskusi terarah, serta angket terbuka. Sedangkan plotting penyajian dan analisis hasil penelitian menggunakan perpaduan kerangka Teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger & Thomas Luckman, Teori Interaksionisme Simbolik oleh George Herbert Mead, Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens, serta Teori Antropologi Pengalaman oleh Victor Turner & Edward Bruner.

Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa: (1) Pembentukan atau internalisasi pemahaman tentang profesionalisme militer bermula di dalam keluarga, di mana ada famili yang menjadi *significant other.* Pembentukan selanjutnya di dalam pendidikan-pendidikan militer terutama pendidikan pertama di Akademi Militer, di mana para pendiri TNI, terutama Jendaral Soedirman dijadikan *legendary significant other(s).* Di sini Subyek Penelitian lebih berperan sebagai individu yang diproduk oleh struktur sosial kemiliteran.

Sedang ekskternalisasi profesionalisasi militer terjadi ketika Subyek Penelitian berada di medan-medan tugas. Baik di bidang pendidikan militer, pasukan, operasi, maupun teritorial. Di mana Subyek Penelitian lebih banyak berperan sebagai aktor sosial yang ikut memproduk struktur sosial kemiliteran. Di medan tugas ini *siginificant other(s)* diganti dengan *generalized other(s)* yaitu adanya aktor lain selain dirinya baik dari kalanga perwira TNI maupun di luar TNI.

(2) Konstruksi pemahaman tentang TNI profesional, terdiri dari dua level: *pertama,* pemahaman *reflektif* atas realitas sosial militer "mikro". Yaitu realitas yang diciptakan terutama oleh aktor-aktor elit TNI sendiri, yang mengarah pada

pembentukan konsep diri *(self consept)*; *kedua* pemahaman *refleksif* atas realitas sosial militer "mikro-makro" yang diciptakan bukan hanya oleh elit TNI namun juga oleh aktor sosial lain, yang mengarah pada ekspresi atas berbagai persoalan di sekitar TNI.

(3) Nilai-nilai yang mendasari konstruksi pemahaman sebagaimana tersebut di atas adalah bersumber dari gagasan tentang "Ksatriya" yang berakar dalam tradisi keprajuritan kerajaan Jawa-Mataram. Oleh sebab itu TNI profesional dapat diberi label lebih spesifik sebagai "Tentara Profesional Ksatriya".

Implikasi teoritik penelitian ini antara lain menguatkan sekaligus juga memberi koreksi atas thesis Samuel P. Huntington yang sering disebut sebagai pandangan Profesionalisme Klasik *(Old Professionalism)* mengenai profesionalisme militer, serta menguatkan sekaligus memberi koreksi atas thesis Profesionaisme Baru *(New Professionalism)* mengenai profesionalisme militer yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan non-Huntingtonian.

Kata kunci: Fenomenologi, Militer, Profesionalisme.

ABSTRACT

UNDERSTANDING OF MILITARY PROFESSIONALISM IN THE ELITE LEVEL OF TNI-AD (A Phenomenological Research on the Middle-Rank Officers of TNI-AD at Malang Garrison)

The main goal of this research was revealing the understanding and meaning of military professionalism in the recognition of the TNI-AD (Indonesian National Armed Forces-Army Ground Forces) elites. Furthermore, the purpose was explained in three research problems stated as follows: (1) What were the patterns in understanding and giving meaning of military professionalism? (2) How was the concept of TNI the Professional Army as mentioned in Regulation No. 34/ 2004 being perceived? (3) What were the values becoming the basic of the rise of the understanding?

Methodologically, this research employed Edmund Husserl's phenomenological perspective. Literary research is focused on the study on military professionalism nomethetically and ideographically. Fieldwork is carried out by taking the middle-rank officers of TNI-AD in Malang Garrison as research subject. Phenomenological research procedures of Bogdan & Taylor were applied, supported by those of John W. Cresswell. Data was collected through profound in-depth interview, open-ended questionnaires, and focused group discussions. Presentation plotting and data analysis employed the combination of Peter L Berger & Thomas Luckman's social construction, Herbert Mead's symbolic interactionism, Anthony Giddens's structuration theory, and by Victor Turner & Edward Burner's anthropology of experience.

The study showed that: (1) Formation or internalization of military professionalism began in the family, in which, one or some of the family member became the *significant other*. The next formation was in the military educations, especially in the First Military Education, in which, the TNI founders, especially Gen. Soedirman was established as the *legendary significant other (s)*. In this point, the research subjects played as individuals who became the product of militarism social structure.

The externalization of military professionalism occurred when the research subjects were on their working area; whether they were in operational area, troops' station, education institutions, or territorial area. In this case, research subjects played as social actors participating in creating military social structure. In the fieldwork, significant other was replaced by significant other(s), namely other figure other than oneself, whether from military family or not.

(2) The construction of understanding TNI professionalism consisted of two levels. *First*, reflective understanding on the social reality of "micro military", which meant the reality created especially by the TNI elites itself. It led to the shaping of self-concept. *Second*, the reflective understanding on the social reality of "micro-

macro" was not only created by TNI elites but also other social actors, which led to the expression on various problems on TNI's body.

(3) Values on which construction of understanding were based were from the idea of "*ksatriya*" coming from the tradition of Javanese Mataram Imperial soldiers. Therefore, the professional TNI was specifically labeled as "*Tentara Profesional Ksatriya*" (Professional and Noble Army).

The theoretical implication of this research both strengthened and revised the Samuel P. Huntington's study on *old professionalism*, focusing on military professionalism. In addition, this research also strengthened and revised the thesis on *new professionalism*, focusing on military professionalism proposed by the non-Huntingtonian intellectuals.

Key terms: Phenomenology, military, professionalism.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan iv
Halaman Penetapan Panitia Penguji Disertasi v
Ucapan Terima Kasih vi
Ringkasan ix
Summary xiv
Abstrak xix
Abstract xxi
Daftar Isi xxiii
Daftar Tabel xxvi
Daftar Gambar xxvii
Daftar Matrik xxviii
Daftar Lampiran xxix
Glossary xxx

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
1. Gerakan Reformasi: Sebuah Prolog 1
2. Kejatuhan Presiden Soeharto 16
3. Tekanan Kelompok Reformis 22
B. Tujuan Penelitian dan Rumusan Masalah 32
C. Konstribusi Teoritis yang Diharapkan 33
D. Manfaat dan Keunikan Penelitian 34

BAB II : KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN 36
A. Kerangka Teori 36
1. Pengertian Profesionalisme 36
2. Profesionalisme Militer 39
a. Perwira sebagai Prajurit Profesional 39
b. Keahlian Perwira Militer 41
c. Tanggung Jawab Profesional Militer 45
d. Rasa Kesejawatan (Corporateness) 50
3. Kekerasan, Militer dan Negara 52
4. Profesionalisme Militer dan Civil Society 54
5. Cakupan Wilayah Tugas Militer: "Old Profession" dan "New Profession" 58
6. Pemikiran tentang Profesionalisme TNI 75
7. Sekitar Doktrin TNI 99
B. Rancangan Penelitian 106
1. Metodologi Penelitian 106
2. Metode Penelitian 109
a. Metode Fenomenologi 109
b. Metode Sosiologi Sejarah 114
3. Teori-teori Fenomenologi yang Digunakan 116
a. Teori Konstruksi Sosial Berger 117
b. Interaksionisme Simbolik Mead 120

c. Teori Antropologi Pengalaman dan Teori Strukturasi 121
4. Prosedur Penelitian 125
5. Fokus, Lingkup dan Lokasi Penelitian 128
6. Pengumpulan Data, Informan dan Partisipan 130

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN: TNI DAERAH GARNIZUN MALANG 134
A. Riwayat Kodam V / Brawijaya 135
B. TNI Daerah Garnizun Malang 143
1. Suasana Perjuangan Bersenjata di Malang 143
2. Hamid Rusdi dan Batalyon 512/Quratara Yudha 149
3. Garnizun Malang Dewasa Ini 153

BAB IV : GAMBARAN REALITAS SOSIAL OBYEKTIF: DI BALIK BAJU SERAGAM ADA KEANEKA-RAGAMAN 161
A. Jadi Tentara Itu Gagah: Sebuah Pemahaman Awal ke Arah Jati Diri 162
B. Pembentukan Profesionalisme TNI 167
a. Realitas Sosial Pendidikan Kemiliteran 173
b. Realitas Sosial Penugasan 177
1. Tugas di Pasukan 178
2. Tugas di Bidang Pendidikan 180
3. Tugas Teritorial 182
4. Tugas Operasi 183

BAB V : GAMBARAN RUANG KESADARAN MIKRO: MEMBANGGAKAN PENDIDIKAN, MEMPRIHATINKAN KESEJAHTERAAN 202
A. Jati Diri dan Profesionalisme 204
1. Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan Siapapun 207
2. Mengutamakan Tugas, Kehormatan, dan Negara 208
3. Sebagai Tentara Nasional: Apapun "Its my Indonesia" 209
B. Profesional itu Ahli di Bidangnya 211
C. Pendidikan dan Latihan Sebagai Syarat Mutlak 212
D. Kesejahteraan dan Biaya Operasional Sebagai Syarat Utama 223
E. Perlengkapan dan Persenjataan Sebagai Syarat Penunjang 227
1. Senjata Bukan Segala-galanya 227
2. Pentingnya Adopsi Teknologi 231

BAB VI : GAMBARAN RUANG KESADARAN MIKRO-MAKRO: "POKOKNYA" MENJALANKAN TUGAS POKOK 235
A. Tugas Pokok Suatu yang Tidak Bisa Ditawar 237

1. Menegakkan, Mempertahankan, Melindungi 237
2. Perluasan Mandat (Broader Mandate) 239
B. Masalah Peran Politik TNI 244
C. Masalah Peran Teritorial dan Keberadaan Komando Kewilayahan 251
1. Masalah peran teritorial 251
2. Masalah keberadaan komando kewilayahan 257
D. Masalah Supremasi Sipil 262
E. Masalah Bisnis dan Yayasan 264

BAB VII : TEMUAN, KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 267
A. Temuan Penelitian 267
1. Temuan I 268
2. Temuan II 269
3. Temuan III 271
4. Temuan IV 278
B. Kesimpulan 281
C. Implikasi Penelitian 290
1. Relasi: State-Political Society-Civil Society 291
2. Relasi: Expertise-Social Responsibility-Corporateness 298
3. Perwira Menengah Antara Dibentuk dan Membentuk 306
4. TNI sebagai Tentara Profesional Ksatria 309
5. Perlunya Level Studi "Mikro-Subyektif" 310
6. Jati Diri TNI Bersumber dari Nilai-nilai Ksatria 311

Daftar Pustaka 315

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Doktrin Etik TNI Ditimbang dengan Kriteria Profesionalisme Militer Huntington	103
Tabel	2	Subyek/Partisipan Penelitian	132
Tabel	3	Satuan dan Instalasi Militer Daerah Garnizun Malang	157
Tabel	4	Daftar Perwira Pejabat TNI AD Garnizun Malang Tahun 2005 s/d 2007	159
Tabel	5	Transformasi Nilai-nilai Ksatriya Dalam Diri TNI	280

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Diagram Pentagonal Profesionalisme TNI	98
Gambar	2	Skema Realitas Sosial Obyektif	269
Gambar	3	Model Pola Perkembangan Profesionalisme TNI	271
Gambar	4	Model Pemahaman Tentang Profesionalisme Militer (Dialektika "Realitas Sosial Obyektif" Dengan "Ruang Kesadaran Subyektif")	273
Gambar	5	Model In-Equilibrium State-Society	295
Gambar	6	Model Paradigma Keamanan Huntington	305
Gambar	7	Model Paradigma Keamanan Alternatif (Diajukan oleh Penulis) .	305

DAFTAR MATRIK

Matrik 1 Pemahaman Elit TNI AD Tentang Profesionalisme Kaitannya Dengan Tugas Pokok TNI 244

Matrik 2 Proses Penjelmaan Nilai-nilai Ksatriya Menjadi Tentara Profesional Ksatriya 281

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Instalasi Militer di Malang Raya	328
Lampiran	2	Struktur Organisasi Mabes TNI	329
Lampiran	3	Struktur Organisasi TNI AD	330

Glossary

AAL	:	Akademi Angkatan Laut
AAU	:	Akademi Angkatan Udara
ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Ajendam	:	Ajudan Jenderal Kodam
AKABRI	:	Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AKMIL	:	Akademi Militer
AM	:	Aktor Militer
AMN	:	Akademi Militer Nasional
Apter	:	Aparat Teritorial
Arhanud	:	Artileri Pertahanan Udara
Arhanudber	:	Artileri Pertahanan Udara Berat
Arhanudri	:	Artileri Pertahanan Udara Ringan
Arhanudse	:	Artileri Pertahanan Udara Sedang
Arm	:	Artileri Medan
Armed	:	Artileri Medan
Art	:	Artileri
Aspri	:	Asisten Presiden
Aster Kodam	:	Asisten Teritorial Komando Daerah Militer
ATEKAD	:	Akademi Tehnik Angkatan Darat
Babinsa	:	Badan Pembina Desa
Banmin	:	Bantuan Administrasi
Banpras Korem	:	Badan Prasarana Korem
Banpur	:	Bantuan Tempur
Bekang	:	Perbekalan dan Angkutan
BIA	:	Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Bilkam	:	Stabilitas dan Keamanan
Binsat	:	Pembinaan Satuan
Bintal Dam	:	Bimbingan Mental Kodam
Bintara	:	Golongan Pangkat di TNI dan POLRI yang lebih rendah dari Letnan Dua / Inspektur Polisi Dua dan lebih tinggi dari Kopral Kepala / Ajun Brigadir Polisi
BKR	:	Badan Keamanan Rakyat
BPKKP	:	Badan Penolong Keluarga Korban Perang
Brigif	:	Brigade Infanteri
Caduad	:	Cadangan Umum Angkatan Darat
CESDA	:	Center for the Study of Development and Democracy
CoG	:	Comando Gerilya
CORO	:	Corps Opleiding tot Reserve Officer
Dandenma	:	Komandan Detasemen Markas
Dandikkes	:	Komandan Pendidikan Kesehatan
Danrai	:	Komandan Baterai
Denal	:	Detasemen Angkatan Laut
Denpal	:	Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut
Denpom	:	Detasemen Polisi Militer
Dephan	:	Departemen Pertahanan
Dephankam	:	Departemen Pertahanan dan Keamanan

Depnikpal	:	Departemen Teknik dan Peralatan
Deptikstaf	:	Departemen Teknik dan Staf
Dikbang	:	Pendidikan Pengembangan
Dikbangspes	:	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
Dikbangum	:	Pendidikan Pengembangan Umum
Diklat	:	Pendidikan dan Latihan
Diklatsar	:	Pendidikan dan Latihan Dasar-dasar Kemiliteran
Dikma	:	Pendidikan Pertama
Dikmil	:	Pendidikan Militer
Diktuk	:	Pendidikan Pembentukan
Ditajenad Kasubdit Mindik	:	Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Kepala Sub Direktorat Administrasi Pendidikan
Ditbekang AD Pabandya Slog	:	Direktorat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat. Perwira Bantuan Madya Staf Logistik
DITKUAD	:	Direktorat Keuangan Angkatan Darat
Divif	:	Divisi Infanteri
Dodik	:	Depot Pendidikan
Dodikjur	:	Depot Pendidikan Kejuruan
Dodiklatpur	:	Depot Pendidikan dan Latihan Pertempuran
DOM	:	Daerah Operasi Militer
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRGR	:	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Dwikora	:	Nama kabinet pemerintahan di Indonesia dengan masa kerja 27 Agustus 1964 – 22 Pebruari 1966, 24 Pebruari – 28 Maret 1966, 28 Maret – 25 Juli 1966)
Eks	:	Bekas, mantan
Em-A	:	Militer Akademi
Forkot	:	Forum Kota
Golkar	:	Golongan Karya
Gumil	:	Guru Militer
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Hankam	:	Pertahanan dan Keamanan
Hansip	:	Pertahanan Sipil
Hubdam	:	Perhubungan Kodam
HUT	:	Hari Ulang Tahun
ICMI	:	Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia
IKUDAM	:	Inspeksi Keuangan Kodam
IMF	:	International Monetary Fund
Inf	:	Infanteri
IPK	:	Ikatan Perjuangan Kalimantan
IPPI	:	Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
ISA	:	Ideological State Apparatus
Jakker	:	Jaringan Kerja Kesenian Rakyat
Jasdam	:	Pendidikan Jasmani Kodam
Kabengpushub	:	Kepala Bengkel Pusat Perhubungan
Karumkit	:	Kepala Rumah Sakit
Kasad	:	Kepala Staf Angkatan Darat
Kasiops Rindam	:	Kepala Seksi Operasi Resimen Induk Kodam

Kasum	:	Kepala Staf Umum
Kemil	:	Keluarga Militer
Kesko TT	:	Kesatuan Komando Tentara Teritorium
KKN	:	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KMA	:	Koninklijk Militaire Academic (Akademi Militer Hindia-Belanda)
KNI	:	Komite Nasional Indonesia
KNIL	:	Koninklijk Nederlandshe Indishe Leger (Tentara Kerajaan Hindia-Belanda)
Kodam	:	Komando Daerah Militer
Kodim	:	Komando Distrik Militer
Kodiklat	:	Komando Pendidikan dan Latihan
KODIV	:	Komando Divisi
Kol.	:	Kolonel
Kopassus	:	Komando Pasukan Khusus
Korem	:	Komando Resort Militer
Kostrad	:	Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
Koter	:	Komando Teritorial
KRIS	:	Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
KSAD	:	Kepala Staf Angkatan Darat
Kumdam	:	Hukum Kodam
Lemhanas	:	Lembaga Ketahanan Nasional
Lemjiantek	:	Lembaga Pengkajian Teknologi
Letjen	:	Letnan Jenderal
Letkol	:	Letnan Kolonel
LP3ES	:	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mabad	:	Markas Besar Angkatan Darat
Mabak	:	Markas Besar Angkatan Kepolisian
Masyumi	:	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Mayjen	:	Mayor Jenderal
Menhankam	:	Menteri Pertahanan Keamanan
Menristek	:	Menteri Riset dan Teknologi
Milobs	:	Military Observers
MPR	:	Majelis Perwakilan Rakyat
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NMA	:	Nederlansche Militaire Ahlissie (Ahli Militer Kerajaan Hindia-Belanda)
OJT	:	On the Job Trainning
OMP	:	Operasi Militer Untuk Perang
OMSP	:	Operasi Militer Selain Perang
Opsir	:	Perwira dengan pangkat letnan dua
Orba	:	Orde Baru
P3	:	Pasukan Polisi Perjuangan
P3AD	:	Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat
Paban	:	Perwira Bantuan

Pabandya Binpers Suad	:	Perwira Bantuan Madya Pembinaan Personil Staf Umum Angkatan Darat
Pabung	:	Perwira Penghubung
Pajan Raipur	:	Perwira Peninjau Baterai Tempur
Pama	:	Perwira Pemantau
Pamen	:	Perwira Menengah
Pampres	:	Pengamanan Presiden
Pamtas	:	Pengamanan Terbatas
PAN	:	Partai Amanat Nasional
Pangab	:	Panglima Angkatan Bersenjata
Pangad	:	Panglima Angkatan Darat
Pangdam	:	Panglima Daerah Militer
Pangdivif	:	Panglima Divisi Infanteri
Pangkostrad	:	Panglima Komando Strategis Angkatan Darat
Pangsar	:	Panglima Besar
Pangti	:	Panglima Tertinggi
Parai	:	Perwira Baterai
Paskhas	:	Pasukan Khas
Paspampres	:	Pasukan Pengamanan Presiden
PBPOT	:	Panitia Besar Penyusunan Organisasi Tentara
PDIP	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pepolit	:	Pendidikan Politik Tentara
PERATA	:	Pertahanan Rakyat Semesta
Perwira	:	Golongan Pangkat di TNI dan POLRI yang berpangkat di atas Bintara yaitu dari Letnan Dua / Inspektur Polisi Dua sampai ke atas
Pesindo	:	Pemuda Sosialis Indonesia
PETA	:	Pembela Tanah Air
PIM	:	Pemuda Indonesia Maluku
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PNI	:	Partai Nasional Indonesia
PO	:	Perintah Operasi
PRD	:	Partai Rakyat Demokratik
PRRI/Permesta	:	Perjuangan Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Semesta
PSI	:	Partai Sosialis Indonesia
PTRI	:	Perwakilan Tetap Republik Indonesia
Purn.	:	Purnawirawan
Pusdikart	:	Pusat Pendidikan Artileri
Pusdikter	:	Pusat Pendidikan Teritorial
Pusjarah Musium	:	Pusat Sejarah dan Musium
Puskopad	:	Pusat Koperasi Angkatan Darat
Puslatpur	:	Pusat Latihan Tempur
RERA-APRI	:	Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia
Resdikmil	:	Realitas Sosial Pendidikan Militer
Reskel	:	Realitas Sosial Keluarga

Resopim	:	Revolusi Sosialis Pimpinan
Restu	:	Realitas Sosial Penugasan
Restudik	:	Realitas Tugas Pendidikan
Restupas	:	Realitas Tugas Pasukan
Restusop	:	Realitas Tugas Operasi
Restuter	:	Realitas Tugas Teritorial
Rindam	:	Resimen Induk Komando Daerah Militer
RKS	:	Ruang Kesadaran Subyektif
RSA	:	Repressive State Apparatus
RSO	:	Realitas Sosial Obyektif
S1	:	Strata Satu
Satgas	:	Satuan Tugas
Sdirbinsen	:	Staf Direktur Pembinaan Kesenjataan
Secaba	:	Sekolah Calon Bintara
Secaba PK	:	Sekolah Calon Bintara Prajurit Karir
Secapa PK	:	Sekolah Calon Perwira Prajurit Karir
Secata	:	Sekolah Calon Tamtama
Sekjen	:	Sekretaris Jenderal
Sesko	:	Sekolah Komando
Sesko	:	Sekolah Staf dan Komando
Sesosmil	:	Struktur Sosial Kemiliteran
Sishanrata	:	Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMID	:	Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
SPDT	:	Staf Pertahanan Djawa Timur
SPGi-AD	:	Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat
Susdandim	:	Kursus Komandan Kodim
Susdanyon	:	Kursus Komandan Batalyon
Suspatih	:	Kursus Perwira Pelatih
Tamtama	:	Golongan Pangkat di TNI dan POLRI yang lebih rendah, mulai dari Prajurit Dua / Kelasi Dua / Bhayangkara Dua sampai Kopral Kepala / Ajun Brigadir Polisi
Tibkam	:	Ketertiban dan Keamanan
TKR	:	Tentara Keamanan Rakyat
TLRI	:	Tentara Laut Republik Indonesia
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI-AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI-AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI-AU	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TOPDAM	:	Topografi Kodam
TRI	:	Tentara Republik Indonesia
Trikora	:	Tri Komando Rakyat
TRIP	:	Tentara Republik Indonesia Pelajar
Tumil	:	Penugasan Militer
UI	:	Universitas Indonesia
UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang Undang Dasar
VOC	:	Verenigde Oostindische Compagnie (Syarikat Hindia Timur

		Bersatu)
Waas	:	Wakil Asisten
Waas Ops Kasdam	:	Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kodam
Waas Ops Kodam	:	Wakil Asisten Operasi Kodam
Wadan Rindam	:	Wakil Komandan Resimen Induk Kodam
YKPK	:	Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan
Yon	:	Batalyon
Yon Armed	:	Batalyon Artileri Medan
Yon Kav	:	Batalyon Kavaleri
Yon Zibang	:	Batalyon Zeni Bangunan
Yon Zipur	:	Batalyon Zeni Tempur
Yonif	:	Batalyon Infanteri

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. *Gerakan Reformasi: Sebuah Prolog*

Kalau seorang Widji Thukul berkata dalam sebuah puisinya: "Hanya ada satu kata: lawan!"[1], maka untuk reformasi militer Indonesia pun hanya ada satu cara: "Profesionalkan!". Begitulah semangat yang terkandung dalam pesan atau tuntutan di balik hujatan yang dilontarkan kalangan kelompok-kelompok perlawanan, para mahasiswa dan kalangan pro-reformasi pada akhir tahun sembilan puluhan terhadap militer Indonesia. Tuntutan itu begitu gencar disuarakan sehingga menjadi salah satu agenda utama reformasi 1997-98 yang klimaksnya ditandai oleh *pelengseran* Jenderal Besar (Purn.) Soeharto dari kursi ke Presidenan Republik Indonesia, 21 Mei 1998.

Mereka berangggapan, hanya dengan cara itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa terhindar dari --apa yang mereka anggap sebagai-- godaan berperilaku menyimpang, sebagaimana yang telah dilakukannya selama pemerintahan Orde Baru. Bagi TNI hampir tidak ada pilihan selain menerima usulan itu. Beberapa konsep dan gagasan pun diolah dan disodorkan oleh TNI sebagai respon terhadap tuntutan reformasi itu. Tarik ulur antar berbagai pihak pun terjadi, tahap demi tahap pun dilewati hingga pada akhinya lahirlah Undang-undang Republik Indonesia

[1] Widji Thukul adalah penyair asal Solo Jawa Tengah, ketua Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker), juga salah seorang pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Baik Jakker maupun PRD dikenal sangat kritis terhadap militer, dan anti pemerintahan Orde Baru. Karena aktivitasnya itu Wiji sering berususan dengan, dan diburu aparat keamanan. Pertengahan 1998 Widji menghilang dan tidak pernah muncul kembali, diduga menjadi korban penculikan. Memperoleh penghargaan Yap Thiam Hien Award tahun 2002. Kalimat di atas dikutip dari puisinya yang berjudul: "Peringatan!"

nomer 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut, khususnya Bab II Pasal 2, disebutkan bahwa jati diri *(self identity)* Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu mencakup empat karakter yaitu: "Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional". Adapun mengenai Tentara Profesional dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

> "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi"[2].

Secara semantik, ada yang tidak lazim dalam rumusan tersebut di atas, yaitu penggunaan kata-kata negatif: "tidak berpolitik praktis" dan "tidak berbisnis". Terlepas dari adanya ketidak-laziman, rumusan itu secara fenomenologis dapat dimaknai betapa dua wilayah itu telah menjadi persoalan sangat serius dalam kaitannya dengan masalah keprofesionalan TNI.

Tentu dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan berkenaan dengan Undang-undang tersebut di atas, khususnya Bab II pasal 2, TNI tidak berada dalam posisi ikut menentukan. Mengingat, atas nama reformasi, kalangan politisi sipil kala itu telah menghilangkan keterwakilan TNI di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelumnya menjadi hak istimewa yang dinikmati para perwira militer selama pemerintahan Orde Baru. Namun menurut beberapa pihak yang ikut dalam perumusan atau mengetahui proses secara lebih luas, sebetulnya TNI masih memainkan peran di balik layar.

Terlepas dari kontroversi itu, yang bukan merupakan perhatian disertasi ini, ada pertanyaan besar, yaitu: Benarkah tuntutan agar TNI menjadi tentara profesional

[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, butir d, pasal 2, Bab II.

itu hanya karena ada gerakan reformasi 1998? Benarkah tuntutan itu hanya berasal dari pihak luar TNI? Jawabnya adalah bahwa jauh sebelum itu, sejak saat awal pembentukan TNI, yaitu segera setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, kehendak untuk membangun militer Republik Indonesia yang profesional sebenarnya sudah muncul. Kehendak itu berasal baik dari dalam tubuh militer itu sendiri maupun dari kalangan tokoh politisi sipil. Dari dalam, ada dua elemen utama dari tiga elemen embrional TNI yang mendukung profesionalisme TNI. Yaitu para perwira Eks PETA (Pembela Tanah Air) dan para perwira eks KNIL (*Koninlijk Nederlandshe Indishe Leger).* Sedang elemen ketiga yang kurang menyambut gagasan profesionalisme TNI adalah elemen satuan-satuan gerilya yang terdiri dari para gerombolan dan lasykar[3]. Di antara lasykar yang memiliki jumlah anggota yang besar dan merata hampir seluruh wilayah Indonesia adalah Hizbullah. Organisasi ini semula didirikan pada 2 Desember 1944 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada masa akhir pendudukan Jepang diperkirakan Hizbullah sudah mempunyai anggota 50.000 orang[4].

---

[3] C. van Dijk membuat katagori elemen satuan gerilya ini ke dalam tiga jenis:
Pertama, satuan gerilya murni lokal yang beroperasi di sekitar lokasi di mana ia bertempat tinggal. Sering satuan gerilya lokal ini terdiri dari gerombolan-gerombolan bersenjata liar yang di samping berjuang tetapi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan kriminal.
Kedua, satuan gerilya ideologis, yaitu satuan-satuan yang berafiliasi atau berada di bawah naungan partai politik tertentu. Misalnya yang paling besar dan terorganisasi dengan baik adalah lasykar *Hizbullah* merupakan organ bersenjata partai Masyumi; satuan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) organ bersenjata Partai Sosialis Indonesia (PSI); Barisan Pelopor organ Partai Nasionalis Indonesia, Lasykar Rakyat sebagai organ bersenjata Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketiga, satuan gerilya kesukuan, baik yang beroperasi di daerah asal maupun yang beroperasi di rantauan terutama Jawa, misalnya Kabaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), dan Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK), Pasukan Istimewa I didirikan oleh orang Batak (lihat C. van Dijk, Darul Islam, Jakarta: Grafiti Pers, 1983, hal. xx-xxi, juga lihat Ulf Sundhaussen, *The Road to Power*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982, hal.4). Mengenai pertentangan antara tentara Republik Indonesia dengan lasykar Hizbullah sebagai akibat perjanjian Renvile, 1948, lihat Van Dijk, hal. 9-10; juga hal. 61-65.
[4] *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949),* Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000, hal. 16.

Para Eks perwira bekas PETA[5] mulai mewarnai pembentukan institusi militer ketika mereka bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945. Meskipun banyak yang tidak puas dengan BKR, terutama mereka yang menghendaki segera dibentuk tentara kebangsaan, namun bagaimanapun BKR bisa dianggap sebagai *'cikal bakal'* bagi lahirnya institusi militer Indonesia modern yang kini disebut TNI. BKR sendiri adalah 'sayap bersenjata' dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang dibentuk oleh Komite Nasional Indonesia (KNI). Selama proses pelembagaan militer ini berlangsung setahap demi setahap telah menyingkirkan elemen satuan-satuan gerilya dari proses pembentukan tentara Indonesia[6].

Jalan menuju ke arah profesionalisme militer semakin menemukan bentuknya ketika para perwira eks serdadu KNIL (*Koninklijk Nederlandshe Indishe Leger*-Tentara Kerajaan Hindia Belanda)[7] bergabung di dalam Tentara Keamanan Rakyat

---

[5] PETA, didirikan 3 Oktober 1943. Adalah organisasi militer bentukan pemerintah pendudukan Jepang khususnya di Jawa. Pimpinan dan anggota pasukan terdiri dari pemuda-pemuda pribumi. Berfungsi sebagai kekuatan pertahanan lokal untuk menghadapi pasukan sekutu. Mengenai perpanjangan singkatan ada beberapa versi antara lain; yang dikenal umum adalah 'Pembela Tanah Air'. Ulf Sundhaussen menyebut 'Pasukan Sukarela untuk Membela Tanah Jawa', sedang Peter Britton menyebut 'Pasukan Suka Rela Pembela Tanah Air'. Organisasi sejenis dibentuk juga di Sumatera disebut *Gyugum* (lihat Peter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1996, hal. 37-39; Sundhaussen, hal. 6).

[6] Mengenai reorganisasi dan demobilisasi satuan-satuan gerilya oleh pucuk pimpinan TNI lihat Van Dijk , hal. 98-101.

[7] KNIL, tentara yang dibentuk tahun 1830 dibubarkan tahun 1950 di Semarang. Sesuai hasil konferensi "Meja Bundar" di Denhaag akhirnya personelnya dilebur kedalam TNI. KNIL diabdikan untuk kepentingan kerajaan Hindia Belanda. Pasukan KNIL terdiri dari warga pribumi yang berasal dari beberapa kelompok etnis yang terpilih, khususnya dari Indonesia Timur (Ambon) dan beragama Kristen. Sedangkan pejabatnya sebagian besar dari bangsa Belanda sendiri dengan sedikit sekali dari orang Indonesia asli. Semula pasukan ini khusus untuk keperluan keamanan dalam negeri --untuk menjalankan tugas polisionil-- namun ketika terjadi perang Pasifik Raya, kedudukan Belanda di Asia Tenggara mulai terancam, pasukan ini kemudian diperluas tugasnya menjadi kekuatan pertahanan eksternal.
Pada tahun 1942, 13 dari 15 perwira pribumi KNIL menyatakan mendukung pembentukan negara Republik di Hindia Belanda. Ketika embrio tentara Indonesia yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk pada 5 Oktober 1945, dari kelompok perwira KNIL yang berbeda, yaitu perwira lulusan sekolah kadet militer Bandung atau yang dikenal sebagai kelompok 'kadet Bandung' terang-terangan bergabung dengan TKR. (Penjelasan lebih jauh lihat: Ulf Sundhaussen, hal. 1 dan 7, juga Ken Conboy, *KOPASSUS Inside Indonesia Special Forces*, Singapore: Equinox, 2003, hal. 4-5; lihat juga Nasution, *Ideologi TNI,* Yogyakarta: Jurnal Media Inovasi, th. 1995. hal 39).

(TKR) sebuah institusi baru yang dimaksudkan sebagai langkah penyempurnaan dan sekaligus menggantikan BKR, pada 5 Oktober 1945.

Sekalipun dua elemen dari tiga elemen utama embrio TNI, yaitu eks PETA dan eks KNIL sepakat untuk membawa TNI ke arah militer yang profesional, namun mereka berangkat dari konsep dan orientasi profesionalisme militer yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan terutama oleh perbedaan faktor-faktor pembentuk karakter dasar perwira dari kedua kesatuan tersebut. Para perwira Eks PETA pada dasarnya tidak memperoleh dasar pendidikan teori dan teknik militer yang cukup. Mereka memperoleh latihan keprajuritan sekedarnya, khususnya di bidang ke-infanteri-an yang dipadukan dengan indoktrinasi *bushido* dan kepribadian samurai militer Jepang. Perpaduan antara indoktrinasi yang sangat kuat di satu sisi dan pendidikan teori dan teknik kemiliteran yang kurang memadai disisi lain berpengaruh kuat pada pola kepribadian umum perwira eks PETA. Mereka menjadi perwira yang memiliki ideologi dan semangat nasionalisme yang sengat kuat. Implikasinya mereka merasa terpanggil untuk berperan sebagai pejuang dalam arti yang luas.Bukan hanya berjuang di kancah pertahanan dan keamanan negara akan tetapi juga meliputi bidang sosial, politik bahkan ekonomi.

Sebaliknya yang terjadi pada para perwira eks KNIL, mereka memperoleh dasar-dasar teori dan teknik kemiliteran yang cukup memadai, dibentuk dalam pendidikan dan latihan yang bersuasana tradisi militer modern Barat, yaitu dengan menerapkan doktrin militer sebagai alat *coersive* negara dan mengakui adanya supremasi sipil. Beda dengan eks perwira PETA, para eks perwira KNIL cenderung menganggap keterlibatan militer cukup terbatas dalam lingkup pertahanan negara saja.

Perbedaan orientasi eks perwira PETA versus eks perwira KNIL ini pada berikutnya secara dialektik mewarnai proses perkembangan sejarah militer Indonesia modern, dari waktu kewaktu dari angkatan ke angkatan. Masing-masing pihak saling bersaing untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kepada perwira generasi selanjutnya. Perebutan pengaruh ini bersifat laten namun kadang menjadi manifes juga. Salah satu contoh adalah "Peristiwa 17 Oktober 1952", menurut penuturan Kol. Zulkifli Lubis peristiwa tersebut terutama dilatarbelakangi oleh konflik dan persaingan antara dua elemen utama TNI ini. Yaitu bermula dari pro-kontra masalah bantuan pelatihan dari pemerintah kerajaan Belanda (*Nederlansche Militaire Ahlissie* – NMA) untuk meningkatkan profesionalisme TNI yang ditentang oleh kelompok perwira eks PETA. Konflik pun tidak bisa dihindari, dengan melibatkan Nasution dan Simatupang tokoh eks KNIL berhadapan dengan kelompok eks PETA Bambang Soepeno dan kawan-kawan. Konflik ini merembet ke partai politik dimana Partai Sosialis Indonesia (PSI) menyokong Nasution sementara kubu Partai Nasional Indonesia (PNI) menyokong Bambang Soepeno[8].

Mengenai adanya konflik antara eks PETA versus eks KNIL, Letnan Jenderal (Purn.) TNI Sayidiman Soeryohadiprodjo dalam otobiografinya menuturkan sebagai berikut:

> "Di lingkungan TNI ada perbedaan pendapat antara mereka yang berasal dari PETA dan berasal dari KNIL. Perwira bekas KNIL terbagi dua lagi antara mereka yang relatif muda, umumnya dari CORO dan KMA Bandung, dengan mereka yang di zaman Belanda sudah aktif sebagai perwira... ".
>
> "Perbedaan pandangan dan sikap antara kalangan muda bekas KNIL, dan bekas PETA belum terlalu parah akibatnya selama perjuangan kemerdekaan. Baru setelah tahun 1950 itu berkembang; dan mungkin sekali peristiwa 17 Oktober 1952 dan perpecahan yang ditimbulkan dalam tubuh TNI-AD bersumber pada perbedaan antara dua kelompok itu sejak tahun 1946"[9].

[8] RZ. Leirissa, *PRRI Permesta*, Jakarta: Grafiti Pers, 1994, hal. 27-28.
[9] Sayidiman, *Mengabdi Negara Sebagai Prajurit TNI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 3940.

Di samping dua orientasi di atas, sebetulnya ada orientasi profesionalisme lain yang gagal berkembang, yaitu profesionalisme militer yang berpandangan bahwa militer itu harus berada di bawah kontrol partai sebagaimana terjadi di negara-negara Blok Timur (pada era Komunis). Orientasi ini pernah dicobakan pada era kabinet parlementer pertama di bawah perdana menteri Sutan Syahrir, segera setelah Syahrir mengambil alih kabinet Presidential dari tangan Presiden Soekarno.

Perdana Menteri Syahrir mengangkat Amir Syarifuddin sebagai Menteri Keamanan. Pada saat itulah Amir Syarifuddin yang condong kepada komunis membentuk lembaga Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) di tiap-tiap kesatuan dan tingkatan, guna memberi indoktrinasi ideologi para prajurit. Pejabat yang didudukkan dalam Pepolit ini adalah dari kalangan para politisi terutama yang sehaluan dengannya yaitu dari kalangan komunis[10].

Di samping itu Syarifuddin bersama Sekretaris Jenderalnya, Letnan Jenderal Soekono Djojopratignjo menghidupkan dan membangun satuan gerilya Pesindo[11] (Pemuda Sosialis Indonesia) yang pro komunis sebagai kekuatan militer yang terlatih dengan perlengkapan dan persenjataan sangat baik, bahkan lebih baik dari perlengkapan tentara Republik Indonesia yang resmi. Salah satu brigade andalannya adalah Brigade Pesindo B-29 yang kelak menjadi pasukan inti dalam pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun, 10 September 1948. Basis Pesindo

---

[10] Hendri Supriyatmono, *Nasution, Dwifungsi dan Konstribusi Kearah Reformasi Politik,* Surakarta: Univ. Sebelas Maret Press, 1994, hal. 17.

[11] Pesindo adalah salah satu badan perjuangan bersifat ideologis yang cukup besar dan berpengaruh. Organisasi ini dilahirkan dalam Kongres Pemuda 10 November 1945 di Yogyakarta. Kongres tersebut disponsori oleh Amir Syarifuddin. Markas besarnya semula di Surabaya kemudian dipindahkan di Madiun. Program umum Pesindo: (a) menggunakan tiap kesempatan untuk mempercepat terciptanya masyarakat sosialis di Indonesia dengan jalan radikal revolusioner, (b) mendesak pemerintah supaya memeperkuat hubungan dengan negara-negara yang sepaham.
Pertengahan Desember 1945, Pesindo menyusun program yang radikal, antara lain menuntut terciptanya tentara yang berideologi kerakyatan, dan menghapus "cara" militer yang mungkin memisahkan tentara dari rakyat (*Sejarah TNI Jilid I -1945-1949*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000, hal.16.).

memang sangat kuat di wilayah garis perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, terutama di sekitar Surakarta dan Madiun.

Namun langkah untuk membangun profesionalisme militer yang berorientasi pada pandangan bahwa militer harus di bawah kontrol dan sebagai alat partai ini ditentang oleh sebagaian besar pejabat militer, dan akhirnya gagal bersamaan dengan kegagalan mereka dalam melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948.

Selama diberlakukan sistem kabinet parlementer dan demokrasi liberal (1946-1959), ada dua pihak yang kekuasaan politiknya menjadi terbatasi dibandingkan jika seandainya tetap diberlakukan sistem kabinet Presidentil sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dua pihak yang terbatasi itu adalah Presiden Soekarno dan para perwira militer, khususnya Angkatan Darat.

Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan diambil alih oleh perdana menteri, sementara kekuasan perwira TNI dibatasi oleh doktrin "supremasi sipil atas militer" sesuai dengan sistem demokrasi liberal. Agaknya sistem itu pula yang akan menjadi bagian dari substansi seandainya undang-undang baru sebagai pengganti UUD 1945 oleh Majelis Konstituante tersusun. Hal itu akan dilakukan oleh pihak manapun meskipun dalam beberapa materi mereka saling tidak sepakat. Sehingga siapapun yang akan unggul dalam penyusunan undang-undang dasar baru pengganti UUD 1945 tersebut bisa dipastikan *pertama*, akan merubah sistem pemerintahan Presidential menjadi parlementer, *kedua* menjadikan militer di bawah kontrol sipil.

Realitas politik semacam itu telah membangkitkan rasa senasib dan rasa sama-sama dirugikan baik bagi Presiden Soekarno maupun bagi para petinggi militer khususnya Angkatan Darat, yang kemudian mendorong kedua pihak menjalin kolaborasi dengan memberlakukan Dekrit 5 Juli 1959, yang antara lain dimaksudkan

untuk membubarkan parlemen dan Majelis Konstituante serta memberlakukan kembali UUD 1945, yang tentu maksud tersiratnya adalah untuk memulihkan kembali kekuasaannya yang hilang. Kekuasan itu memang pada akhirnya dapat diraih kembali dan pada saatnya nanti menyebabkan Soekarno dan TNI menggenggam kekuasan politik yang luar biasa besar.

Dengan melalui apa Presiden Soekarno meraih kekuasaan politik yang luar biasa besar itu? Pertama, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang ia bentuk. Kedua, melalui doktrin: "Revolusi Sosialis Pimpinan" (Resopim), "Demokrasi Terpimpin" dan "Ekonomi Terpimpin" (1959-1965).

Setelah Soekarno jatuh bersama lembaga-lembaga politik seta doktrin bentukannya, kekuasan politik semi otoritarian pun berpindah kedalam genggaman TNI khususnya Angkatan Darat melalui doktrin *coersive* 'Stabilitas' dan doktrin hegemonik 'Dwifungsi' (1966-1997). Tatkala Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno (1966), kelak saat itu menjadi awal dari tampilnya militer Indonesia di atas panggung kekuasaan politik dengan sangat dominan dan berlangsung selama sekitar 30 tahun (1966–1997). Sejak saat itulah secara umum TNI bisa dikatakan sedang menjalankan praktek *pretorianisme*[12] dalam pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Huntington, yaitu militer yang seharusnya bertindak sebagai pengawal, akan tetapi yang terjadi malah menempatkan dirinya

[12] 'Pretorian' semula adalah sebutan bagi ajudan para jenderal Romawi pada dua abad sebelum Masehi. Sejak 27 tahun sebelum Masehi sebutan tersebut berubah diperuntukkan bagi korps pengawal para maharaja Romawi *(The American Jurnal,* Year book of the Encyclopedia Americana, 1998, hal. 514). Istilah 'Pretorianisme' mengacu pada situasi dimana tentara tampil sebagai aktor politik utama yang dominan yang secara langsung menggunakan kekuasaan atau mengancam dengan menggunakan kekuasaannya. Istilah tersebut diambil dari salah satu contoh campur tangan militer yang terawal dan termasyhur. Peristiwa saat mana para pengawal pretorian yang seharusnya bertugas melidungi maharaja namun dengan kekuasaan militernya malah menumbangkan maharaja dan menguasai pemilihan umum (Eric A Nordlinger, *Militer dalam Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 6-7).

sendiri pada tempat yang seharusnya hanya diduduki oleh orang yang mereka kawal[13].

Setelah 30 tahun menjalankan praktek *pretorianisme,* sekalipun datang desakan cukup keras dari pelbagai kalangan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) meninggalkan peran itu terutama dibidang politik praktis, --sebagai bagian dari agenda utama reformasi yang marak sejak awal tahun 1997-- akan tetapi tekanan dan desakan tersebut tidak dengan serta merta membuat TNI meninggalkan gelanggang perpolitikan Indonesia. Sekalipun istilah Dwifungsi sebagai doktrin pengabsah atas peranan di luar kemiliteran sudah tidak disebut-sebut lagi kecuali dalam makna *notorious.*

Sikap tersebut waktu itu sedikit banyak mengundang pertanyaan, apa gerangan yang tengah terjadi di dalam diri TNI, baik secara kelembagaan maupun di dalam pemahaman para elitnya? Lantas bagaimana hal tersebut harus dipahami dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan profesionalisme TNI sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2005? Sekalipun TNI tidak secara terbuka terlibat dalam perumusan UU tersebut, dapat dipastikan bahwa pengalaman pretorian yang mengendap selama puluhan tahun itu mempengaruhi proses politik yang berlangsung saat itu.

Sepak terjang militer Indonesia (ABRI/TNI) dapat dilihat dari perspektif yang agak berbeda, dengan menjadikan tahun 1966 sebagai titik tolak. Saat mana militer Indonesia khususnya Angkatan Darat muncul menjadi salah satu kekuatan dalam 'Tritunggal' bersama Presiden Soeharto dan Golkar (Golongan Karya) sebagai pemegang kendali politik Indonesia. Namun dalam perkembangannya pada

[13] Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI,* Jakarta: Gramedia, 1995, hal. 11.

pertengahan tahun 1980-an, ABRI berubah menjadi semacam "Kuda Troya" bagi Presiden Soeharto yang telah berhasil mengkonsolidasikan nyaris seluruh kekuatan politik ke dalam piramida kekuasaannya, di mana dalam piramida kekuasaan itu Presiden Soeharto bertengger di puncaknya. ABRI pun tidak lagi berfungsi menjadi alat negara, namun lebih sebagai alat kekuasaan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan Presiden Soeharto[14].

Hubungan erat antara militer dengan Presiden Soeharto sempat mengalami keretakan pada tahun 1988 saat pencalonan Soedharmono sebagai Wakil Presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1988[15]. Akan tetapi setelah Jenderal LB. Moerdani tidak lagi menempati posisi kunci dalam struktur komando militer hubungan Presiden Soeharto dengan institusi TNI kembali akrab. Salah satu pertandanya adalah dukungan militer yang sangat besar terhadap Presiden Soeharto untuk memenangkan Pemilu melalui Golkar. Bahkan pada 13 Maret 1996, KSAD Jenderal Hartono misalnya menyatakan secara eksplisit: "Setiap anggota ABRI adalah kader Golkar, ... serta wajib menerima petunjuk Ketua DPP Golkar, Mbak Tutut ...."[16].

---

[14] Salah satu faktor yang menyebabkan Soeharto dominan atas militer adalah karena jabatan Panglima Tertinggi (Pangti) yang mestinya hanya jabatan simbolis. Namun di tangan Presiden Soeharto menjadi jabatan yang sangat fungsional. Disamping itu Presiden Soeharto berhasil membangun hubungan dengan militer berdasarkan loyalitas 'bapak-anak' (Patrimonialistik). Salah satu bukti nyata bahwa tentara yang berkarier cemerlang adalah mereka yang pernah menjadi ajudan Presiden atau bertugas di lingkungan yang dekat dengan Presiden seperti Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Selain Pangab Jenderal Wiranto, sebut saja mantan KSAD dan mantan Pangab Try Soetrisno, mantan KSAD Jenderal Hartono, mantan KSAD Jenderal Subagyo, serta mantan Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal Syafrie Syamsudin, merupakan orang-orang yang meraih posisi strategis dalam jabatan militer dalam pemerintahan Soeharto. Ikatan emosional dalam relasi patrimonialistik semacam ini membuat Presiden Soeharto terlindung dari ancaman rival-rival politiknya, baik yang datang dari kalangan sipil maupun militer. (Lihat: Ikrar Nusa Bhakti et al., *Tentara Yang Gelisah*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 102).

[15] Merasa tidak lagi mendapat dukungan penuh dari militer atau dalam upaya membuat keseimbangan baru, Presiden Soeharto pun mendekati kelompok Islam. Pada masa inilah, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila didirikan. Kegiatan yayasan ini antara lain membangun masjid-masjid serta memberikan dana bagi kegiatan dakwah Islam. Pada masa ini juga Presiden Soeharto merestui dibentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia).

[16] Kompas, 14 Maret 1996. Ibid. 103. (Siti Hardiyanti yang nama panggilannya Mbak Tutut adalah putri sulung Presiden Soeharto).

Sebagian kalangan melihat pernyataan Jenderal R. Hartono tersebut merupakan hal yang lumrah, karena dari sisi legitimasi historis dan rasional, keberadaan Golkar tidak dapat dipisahkan dari ABRI. Namun, tidak sedikit yang berpandangan bahwa ungkapan Jenderal Hartono merupakan penegasan bahwa posisi ABRI adalah tetap menjaga loyalitasnya kepada Presiden Soeharto[17].

Citra ABRI sebagai "Kuda Troya" bahkan masih tercermin dalam manuver yang dilakukan oleh Jenderal Wiranto pada detik-detik menjelang runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto[18]. Tiga hari sebelum Presiden Soeharto jatuh, Wiranto menemui Presiden Soeharto. Beberapa sumber melukiskan kehadiran Wiranto di kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana adalah untuk merespon pernyataan Ketua MPR/DPR Harmoko yang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Wiranto meminta kepada Presiden Soeharto untuk tetap pada rancangan kompromi yang telah beredar, yakni Presiden Soeharto mundur secara perlahan-lahan atau bertahap dan kemudian menyerahkan jabatan itu kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Apa lagi saat itu di kalangan masyarakat juga beredar rumor bahwa Harmoko dan Habibie secara diam-diam berusaha melancarkan rencana pengambil-alihan tersebut dan berharap mendapat dukungan dari Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto[19]. Rencana ini jelas

---

[17] Dukungan terhadap Soeharto semakin dipertegas dengan berbagai tindakan yang dilakukan militer pada saat pra dan pasca pemilihan Soeharto sebagai Presiden yang ketujuh kalinya. Berbagai kasus penculikan aktivis prodemokrasi sampai dengan penanganan gerakan mahasiswa sebelum 21 Mei 1997, merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang diduga antara lain dilakukan militer untuk melindungi kekuasaan Presiden Soeharto.

[18] Tindakan yang dilakukan oleh Wiranto, menurut Richburg, didasari atas ketidaksukaan militer atas figur Habibie untuk menggantikan Soeharto. Karena: *Pertama,* Habibie bukan militer, atau tidak memiliki latar belakang militer. *Kedua,* di mata militer, Habibie saat menjadi menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dianggap ikut campur dalam soal pengadaan peralatan militer. Dia memaksa militer umtuk membeli produk militer dari perusahaannya (Keith B. Richburg, *Seven Days in May That Toppled a Titan*, The Washington Post, 23 Mei 1998. Berkenaan dengan manuver Wiranto sebelum maupun pasca lengsernya Presiden Soeharto bisa dilihat dalam : Sukardi Rinakit, *The Indonesia Military After The New Order*, Malaysia: NIAS Press, 2005).

[19] Lihat Ikrar Nusa Bhakti et al., *Tentara Yang Gelisah,* Bandung: Mizan, 1999, hal. 105.

akan mengganggu posisi Jenderal Wiranto di masa datang. Oleh karena itu, Jenderal Wiranto lantas mengambil tindakan cepat. Jenderal Wiranto sekali lagi menemui Presiden Soeharto dan meminta dukungan atas reformasi secara bertahap. Salain itu juga, Wiranto langsung mengadakan jumpa pers, dan mengatakan bahwa seruan Harmoko yang meminta Presiden Soeharto untuk mundur tidak mempunyai landasan hukum, sebaiknya pernyataan Harmoko itu dianggap sebagai pernyataan pribadi dan tidak mewakili suara MPR/DPR.

Tampaknya Presiden Soeharto melakukan apa yang disarankan Jenderal Wiranto. Pada 19 Mei 1998, ia mengumumkan langkah reformasi secara bertahap termasuk Pemilu yang akan berlangsung dalam berberapa bulan mendatang. Namun rencana untuk melakukan reformasi secara bertahap, termasuk perombakan kabinet dan langkah kompromi lain, dianggap oleh kalangan penggerak reformasi hanya sebagai upaya untuk mempertahankan posisinya. Kalangan mahasiswa dan intelektual pun menolak langkah itu. Penolakan dalam masyarakat serta serangkaian tindakan pembelotan yang dilakukan oleh orang-orang sekeliling Presiden menjadikan tidak ada jalan lain baginya selain mundur.

Pada 21 Mei 1998, segera setelah Presiden Soeharto mundur dan B.J. Habibie diangkat sumpah sebagai Presiden, Jenderal Wiranto membuat pernyataan bahwa ABRI siap melindungi keselamatan mantan Presiden dan keluarganya, meskipun tidak jelas bagaimana menafsirkan pernyataan 'melindungi keselamatan' itu. Pernyataan Wiranto tersebut dimaknai oleh sebagian kalangan sebagai upaya menghalangi tuntutan mengadili Presiden Soeharto atas tuduhan pelanggaran dan kesalahan yang selama ini dilakukan. Akibatnya Presiden Habibie dan militer pun menjadi target baru dari berbagai demonstrasi.

"....Therefore, there was no choice for Soeharto but to transfer the Presidential posistion to Habibie on 21 May 1998. However, the appointment of Habibie as the Presidential and Wiranto's statement on the military protection for the former President and his family, receive a negative response from the students and activists. This ignited the demonstrations again, with Habibie and the military as their new targets"[20].

Rangkaian tindakan Jenderal Wiranto pada detik-detik terakhir kekuasaan Presiden Soeharto makin memperburuk citra militer. Agenda aksi mahasiswa yang tadinya hanya menyoal tentang kekuasaan Presiden Soeharto, pertanggungjawaban militer atas kasus penembakan mahasiswa, dan penculikan aktivis; mulai bergeser kepada tuntutan agar Dwifungsi ABRI dihapus sampai keharusan kembali ke barak. Ironisnya, gugatan tersebut tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa saja, tetapi juga tokoh-tokoh pensiunan militer yang tergabung dalam YKPK.

Berbagai upaya dilakukan oleh ABRI/TNI, terutama Wiranto sebagai respon terhadap tuntutan yang dilakukan oleh kelompok reformis. Langkah penting yang mula-mula dilakukan Wiranto adalah menggeser posisi Letjen Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad menjadi komandan Sesko ABRI pada 25 Mei 1998. Di lain pihak dirinya diyakini membuat kesepakatan dengan Presiden Habibie bahwa ia akan mendukung pemerintahan yang baru dengan jaminan bahwa Presiden Habibie tidak akan ikut campur urusan ABRI, dan kedudukan Menhankam/Pangab tetap ditangannya. Hal tersebut sangat masuk akal karena sudah diketahui umum bahwa antara Wiranto dan Probowo telah terjadi rivalitas. Sehubungan dengan hal itu bagaimanapun Wiranto harus mengamankan posisinya karena Prabowo dikenal sangat dekat dengan Presiden Habibie dan Jenderal Feisal Tanjung.

[20] Sukardi Rinakit, ibid., hal. 91.

Selain itu Jenderal Wiranto juga memperkuat kontrolnya di tubuh ABRI dengan melakukan perombakan personel pada posisi-posisi penting secara besar-besaran[21]. Berbagai kalangan memandang bahwa apa yang dilakukan Jenderal Wiranto merupakan momen untuk pertama kalinya panglima ABRI memiliki komando penuh atas seluruh pasukannya, sekaligus memiliki posisi tawar yang sangat kuat terhadap presiden yang hal itu tidak pernah terjadi selama masa pemerintah Presiden Soeharto.

Berkenaan dengan reformasi, secara konseptual ABRI/TNI pada bulan Juli 1998 menerbitkan kertas posisi pertamanya yang disebarkan untuk kalangan terbatas. Kertas posisi pertama ini hanya membahas secara umum apa yang berkaitan dengan alasan ABRI melakukan reformasi dan bagaimana posisi ABRI dalam era reformasi terutama di bidang sosial politik. Sedangkan langkah-langkah yang sifatnya operasional belum ditampilkan.

Namun demikian, banyak kalangan berpendapat bahwa reformasi yang dilakukan oleh ABRI/TNI lebih didasari oleh adanya tekanan publik terutama yang dilakukan oleh mahasiswa, LSM, serta forum internasional. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencurigai kebijakan reformasi ABRI hanyalah sekadar muslihat

[21] Oleh beberapa kalangan, tindakan Wiranto itu dianggap sebagai upaya 'de-Prabowo-isasi' dan untuk memperkuat kontrol ABRI di bawah kendalinva. Hal itu terlihat dalam mutasi tersebut ia menempatkan teman-temannya pada posisi-posisi strategis dalam jajaran komando. Apa yang dilakukan oleh Wiranto agaknya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Feisal Tanjung saat de-Benny-isasi. Namun, tindakan Wiranto ternyata tidak semulus sebagaimana Feisal. Beberapa penentuan posisi penting di jajaran ABRI tidak jarang terjadi tarik-menarik antara Wiranto di satu kubu dengan Habibie di kubu lain. Ini terlihat saat penentuan Letjen Djoni Lumintang yang dikenal loyal pada Wiranto sebagai Panglima Kostrad untuk menggantikan Prabowo yang hanya bertahan 16 jam. Menurut beberapa sumber hal itu terjadi karena adanya penolakan dari orang-orang dekat Habibie. Posisi Djoni Lumintang akhirnya digantikan oleh Letjen Djamari Chaniago, yang dikenal dekat dengan kubu Habibie.
Posisi Kasum ABRI, Letjen Sugiono menggeser Letjen Fachrur Rozi, yang dianggap kubu Feisal Tandjung--Prabowo. Sugiono adalah orang yang menggantikan posisi ajudan Presiden Soeharto yang ditinggalkan Wiranto pada 1993, ketika meledak demonstrasi di Dresden yang memalukan Soeharto, Sugiono diangkat menjadi komandan Paspampres setelah komandan yang lama diberhentikan. Pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi mayor jenderal. Untuk pertama kalinya komandan Paspampres dijabat oleh jenderal bintang dua. Dari sini, dia naik menjadi Pangkostrad, sebuah lompatan yang tidak lazim dalam karir militer. Dengan latar belakang itu, Sugiono digolongkan sebagai orangnya Wiranto. Kasum lama, Fachrur Rozi lantas menempati pos Sekjen Dephankam, sebuah posisi yang dapat dikatakan kurang penting.

untuk memperbaiki citra ABRI yang kian merosot. Pada saat itu militer seakan-akan kehilangan pijakan legitimasi di tengah derasnya hujatan terhadapnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang populer yang bisa memuaskan kalangan reformis.

Kecurigaan pada niat baik ABRI/TNI ini adalah cukup wajar, dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Bukti-bukti menunjukkan bahwa di beberapa negara, kaum perwira militer cenderung enggan meninggalkan peran politik. Untuk dapat bertahan mereka melakukan berbagai cara agar tetap terlibat dan berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, banyak akademisi yang skeptis terhadap upaya yang dilakukan militer untuk membangun profesionalismenya, kalau untuk itu mereka harus meninggalkan peran dan fungsinya diluar tugas pertahanan dan keamanan.

Beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mendorong proses reformasi militer Indonesia khususnya terkait dengan kesadaran untuk menata kembali profesionalisme TNI antara lain adalah: kejatuhan Presdien Soeharto serta tekanan yang sangat kuat dari reformis.

2. *Kejatuhan Presiden Soeharto*

Rentetan peristiwa seperti penolakan sebagian kelompok intelektual atas pemilu 1997, krisis ekonomi-moneter dan sosial, tuntutan agar Presiden Soeharto tidak dicalonkan kembali untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, demontrasi mahasiswa, penembakan mahasiswa, kerusuhan 13-15 Mei 1998, pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa; adalah akumulasi dan turbulensi persoalan yang membuat Presiden Soeharto jatuh. Agaknya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa *lengsernya* Presiden Soeharto dari kursi kePresidenan adalah tonggak awal dari proses reformasi di Indonesia selanjutnya.

Tuntutan mahasiswa pada awalnya adalah berkisar pada penurunan harga kebutuhan bahan pokok yang membumbung tinggi sejak Juli 1997 dan tuntutan kepada MPR agar tidak mencalonkan kembali Presiden Soeharto untuk periode ketujuh. Akan tetapi nyatanya MPR tetap mencalonkan Presiden Soeharto sebagai Presiden, maka tuntutan mahasiswa pun semakin meluas mencakup reformasi total di bidang politik dan ekonomi.

Secara ringkas tuntutan reformasi tersebut dapat dilihat dalam tema-tema yang diangkat yaitu: turunkan Soeharto; turunkan 'harga' (juga akronim dari 'Soeharto dan keluarga'); adakan sidang istimewa MPR; berantas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme); tegakkan supremasi hukum; reformasi paket lima UU politik, hapus Undang-Undang Subversif, Undang-Undang Monopoli; adili Soeharto; usut kekayaan Soeharto, keluarga dan kroninya; serta hapus Dwifungsi ABRI.

Ada tiga faktor lain sebagai penyebab pendorong kejatuhan Presiden Soeharto yaitu: tekanan dari luar negeri, adanya konspirasi kelompok elit Jakarta, dan terjadinya keretakan di tubuh militer.

Amerika Serikat bisa dianggap merupakan faktor luar negeri yang paling besar pengaruhnya terhadap kejatuhan Presiden Soeharto. Isu pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus penculikan aktivis; operasi militer di Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya (Papua); dijadikan alasan Amerika Serikat untuk menekan IMF *(International Monetary Fund)* agar menunda pencairan hutang tahap kedua untuk Indonesia. Akibatnya, situasi ekonomi yang sudah terpuruk pun, semakin tertekan kondisi sosial-politik pun semakin berat. Karena Presiden Soeharto mendapatkan legitimasinya terutama dari keberhasilannya menjaga stabilitas ekonomi, maka

ketidakmampuannya menyelesaikan persoalan ekonomi ini telah secara langsung membuat Presiden Soeharto dan pemerintahannya kehilangan kredibilitas.

Dengan tanpa bermaksud menganggap kekuatan lain tidak ambil bagian, mungkin sekedar sebagai ilustrasi untuk melukiskan bagaimana kelompok-kelompok elit strategis yang berada di Jakarta melakukan manuver pada saat-saat menjelang kejatuhan Presiden Soeharto adalah apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh elit organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Mereka dapat dikatakan sebagai salah satu elemen yang berperan besar ketika terjadi kemelut politik akhir tahun 1990-an. Letjen (Purn.) Achmad Tirtosudiro dan Adi Sasono, sebagai ketua dan sekretaris ICMI, melakukan berbagai manuver yang tercermin dalam pernyataan-pernyataannya di media massa yang meminta kemunduran Presiden Soeharto lewat sidang istimewa MPR.

Dalam salah satu pertemuan mereka, sampai pada pembahasan mengenai kemungkinan mengorganisasikan mahasiswa untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Dalam beberapa pertemuan itu hadir juga Amin Rais, Akbar Tanjung, Emha Ainun Nadjib, dan Nurcholis Madjid. Lebih dari itu, para pemimpin ICMI itu juga mampu meyakinkan Harmoko dan Syarwan Hamid, sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR, untuk mendesak Presiden Soeharto agar bersedia turun. Karena Habibie sebagai ketua umum ICMI membuat apa yang dilakukan oleh para elit organisasi ini dianggap merupakan kehendak sang Ketua Umum, bahkan Habiebie dituduh sebagai sosok di belakang manuver politik ICMI tersebut.

Adapun gejala keretakan di tubuh ABRI kian tampak ketika situasi krisis politik memuncak. Keretakan sebenarnya sudah terjadi semenjak Jenderal L.B. Moerdani menjabat Menhankam/Pangab. Tatkala itu ada sekelompok perwira yang

merasa dirugikan oleh kebijakannya, dan menganggap kebijakan Moerdani. lebih menguntungkan kelompok perwira lain terutama yang non-muslim. Meskipun Moerdani pada kenyataannya juga banyak memberikan kepercayaan kepada perwira-perwira berlatar belakang muslim santri. Bahkan secara pribadi Moerdani juga menjalin hubungan sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Abdurrahman Wahid.

Kelompok perwira yang tersingkir ini kebetulan sebagian besar berlatar belakang santri, maka ada pihak yang menyebutnya sebagai "ABRI Hijau". Sungguhpun di dalam kelompok itu ada juga yang berlatar belakang non-muslim, atau paling tidak, sekuler. Sedang Probowo Subianto sebagai salah satu tokoh dari kelompok ini adalah berasal dari keluarga penganut agama campuran Islam dan Katolik.

Sehingga, menurut hemat kita, mereka lebih cocok disebut sebagai kelompok perwira yang mengalami deprivasi relatif *(relative deprivation)* karena kebijakan atasan, dari pada label yang berkonotasi ideologis. Kelompok perwira ini mendapatkan momentum baru pada saat Panglima ABRI/TNI dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung. Tampilnya Feisal menggantikan L.B. Moerdani adalah skenario Presiden Soeharto untuk menciptakan keseimbangan baru di dalam tubuh ABRI/TNI sekaligus upaya menghapus citra Benny sebagai "orang kuat" sejak ia diangkat sebagai Asisten Presiden (Aspri) --pada awal-awal Presiden Soeharto naik ke puncak kekuasaan-- bersama Letjen Ali Moertopo dan Letjen Soedjono Hoemardani. Ketiga orang tersebut kala itu dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan Presiden Soeharto, bahkan bisa memaksakan kehendak terhadapnya.

Ketegangan di dalam tubuh ABRI/TNI sendiri tidak begitu saja terhenti, justru kemudian muncul sebutan kelompok "ABRI Merah-Putih" yang secara superfisial tampak sebagai *counter* atas adanya "ABRI Hijau", --seperti tampak ada nuansa kompetisi antara faksi Islam diimbangi oleh faksi Pancasila-- akan tetapi yang lebih bisa dipahami sebetulnya adalah adanya kelompok perwira tinggi (senior) yang berusaha memanfaatkan kedekatan Jenderal Wiranto dengan Presiden Soeharto untuk mengimbangi Prabowo yang menantu Presiden Soeharto. Sebab apabila karir Probowo (Akmil 1974) melaju terlalu cepat dan menduduki puncak pimpinan ABRI/TNI dikuatirkan akan terjadi "potong generasi" di mana perwira-perwira tinggi yang lebih senior akan cepat terpental. Hal itu dapat dicermati dari nama-nama diantara para perwira tinggi yang disebut-sebut sebagai ABRI "Merah Putih" seperti Jenderal Wiranto (AMN 1968), Letjen Agum Gumelar (AMN 1968), Letjen A.M. Hendro Priyono (AMN 1967), Mayjen Farid Zainuddin (AMN 1967) sekalipun ada yang dari angkatan 70-an seperti Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara yang disebut-sebut sebagai kelompok "ABRI Hijau" kebanyakan Akmil angkatan tahun tujuh puluhan antara lain Letjen Prabowo Subianto (Akmil 1974), Mayjen Syafri Syamsuddin (Akmil 1974), Mayjen Muchdi PR (1970), Mayjen Kivlan Zen (Akmil 1971), dari luar Matra Darat ada Mayjen (Mar) Suharto.

Dikotomi "Hijau" dan "Merah Putih" ini menjadi semakin kabur ketika dalam kenyataannya, di sekitar Prabowo juga ada perwira-perwira non-muslim seperti J. Suryo Prabowo (Akmil 1976, kini Pangdam Bukit Barisan). Begitu juga tatkala Wiranto maju mencalonkan diri sebagi Presiden RI 2005-2010, justru yang dipercaya sebagai *event organizer* adalah jenderal-jenderal yang secara kultural

dikenal sebagai "ABRI Hijau" seperti Letjen Fachrul Razi (Akabri, '70) dan Letjen Suaidi Marasabessy (Akabri '71).

Agaknya penjelasan hipotetik yang lebih bisa diterima adalah bahwa yang terjadi pada pasca Menhankam/Pangab Benny Moerdani adalah rivalitas antara Jenderal Wiranto sebagai mantan ajudan Presiden Soeharto dengan Prabowo Soebianto sebagai menantu sang Presiden dan para perwira di sekitar keduanya. Kedua pihak berebut dan berlomba memberikan pelayanan terbaiknya untuk Presiden Soeharto hingga berujung pada keterlibatan militer dalam penculikan para aktivis penentang pemerintah, dalam tragedi Trisakti dan kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Dengan adanya fakta di atas paling tidak, ada dua hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, bahwa bagaimanapun, tampaknya tetap selalu ada potensi negatif berupa friksi yang dilatar-belakangi oleh sentimen dan solidaritas primordial maupun komunal di dalam tubuh TNI yang kalau hal semacam itu merebak akan menjadi kenyataan yang paradoks dengan klaimnya sebagai institusi yang paling bisa menenempatkan diri di atas semua golongan dan faham keagamaan. Di samping potensi friksi primordial-komunal tersebut, friksi juga terjadi antar matra, antar kesatuan dan tahun angkatan. Seberapa besar potensi friksi yang laten itu kemudian berubah menjadi termanifes kiranya dapat dijadikan indikasi akan seberapa tinggi kadar profesioalitas TNI yang ada.

Kedua, di samping itu juga dapat disimpulkan bahwa TNI memang selalu mengalami kerisauan di setiap titik kritis perubahan politik atau rezim. Ada kemungkinan sikap seperti itu tetap akan terjadi pada perwira-perwira militer generasi berikutnya. Bahwa di masa-masa mendatang kemungkinan mereka akan

tetap ingin memainkan peran politik tertentu, walau sekalipun secara formal kelembagaan tidak ikut serta dalam kegiatan politik praktis.

3. *Tekanan Kelompok Reformis*

Momentum reformasi telah mendorong dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan secara lebih keras kesalahan-kesalahan ABRI/TNI di masa lalu. Belum pernah dalam sejarah organisasi ini memperoleh kritikan sedemikian keras, bertubi-tubi dan berani. Hal tersebut dapat diamati terutama dari berita-berita yang muncul di media massa pada bulan-bulan sesudah Presiden Soeharto *lengser*. Setiap hari senantiasa ada saja berita-berita yang bernada miring ihwal ABRI/TNI. Daftar panjang yang berisi kesalahan-kesalahan dipublikasikan secara luas semakin membuat kalangan sipil yakin bahwa makna Dwifungsi ABRI telah mengalami distorsi yang sangat parah oleh sebab itu harus ditinjau kembali. Tuntutan reformasi terhadapnya pun semakin terfokus pada dua hal yaitu menegakkan otoritas sipil atas ABRI/TNI, dan menciptakan profesionalisme ABRI/TNI[22].

Ikrar Nusa Bhakti dkk. memberikan catatan yang sangat tajam mengenai tuntutan terhadap perlunya reposisi ABRI/TNI. Menurutnya bukan hanya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM sebagai ekses negatif dari operasi tugas mereka, melainkan layaknya persoalan yang dihadapi masyarakat modern yaitu menyangkut pembagian kerja (*division of labour*) juga.

> "...Figur-figur dari kalangan ABRI memiliki spesifikasi di bidang Hankam, namun dalam prakteknya selama Orde Baru mereka dapat memasuki jabatan-jabatan strategis tertentu yang bukan di bidangnya. Sudah tentu pola ini membawa dampak yang sangat merugikan, sebab figur-figur ABRI itu jelas tidak menguasai bidang non-hamkam, jauh di bawah kualitas para profesional sipil. Kecuali itu, anggota-

[22] Untuk lebih jelasnya lihat T.A. Legowo, *Menyelamatkan TNI, Mengembangkan Profesionalisme*, dalam *Military Without Militarism*, Suara Dari Daerah (Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001), hal. 291-322.

> anggota ABRI dalam kedudukan non-organik ABRI lebih sering merusak citra ABRI sendiri lantaran acap terjebak dalam tindak-tindak otoriterisme dan penyalahgunaan wewenang"[23].

Berbagai pendapat yang agak beragam bermunculan mengenai skenario nasib Dwifungsi, yaitu: Dwifungsi harus ditinggalkan, tidak ditinggalkan tapi direvisi, atau tidak perlu direvisi cukup disesuaikan saja. Bagi sebagian yang menghendaki Dwifungsi ditinggalkan ada yang menuntut ditinggalkan saat itu juga, ada pula yang mengusulkan agar dilaksanakan secara bertahap[24].

Namun arus pandangan umum yang paling kuat di masyarakat adalah bahwa penghapusan Dwifungsi ABRI hendaknya dilakukan secara bertahap. Hal ini didasarkan pada pengalaman sejarah, faktor empiris, dan realitas politik. Dalam sejarahnya, Dwifungsi ABRI muncul adalah sebagai alternatif utama pengganti paradigma Orde Lama, bukan demokrasi atau demokratisasi. Justru kala itu, partai politik sebagai pilar utama demokrasi dihujat lantaran dianggap sebagai biang keladi ketidak-stabilan politik dengan terlalu mendewa-dewakan politik dan mengabaikan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, kala itu yang hendak dikembangkan ialah suatu stabilitas politik demi memperlaju proses pembangunan. Di sini, Dwifungsi ABRI justru dianggap sebagai 'obat mujarab' untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan alasan sudah jenuh terhadap konflik ideologis yang tidak berkesudahan dan kegagalan

[23] Ikrar Nusa Bhakti et al., ibid., hal. 111.

[24] Dalam suatu survei yang dilakukan oleh Cesda *(Center for the Study of Development and Democracy)* dan LP3ES pada Agustus 1998 ditemukan bahwa 74,3% dari total responden (1.000 orang) menghendaki agar ABRI hanya berperan dalam mempertahankan negara. Hanya 3,8% responden yang menilai ABRI berpihak kepada rakyat, sementara 56,1% melihat ABRI lebih berpihak kepada penguasa. Data juga menunjukkan, semakin jauh dari Jakarta, rakyat semakin kurang percaya terhadap fungsi ABRI sebagai pelindung rakyat, misalnya 72,0% di Medan dibanding dengan 42,5% di Jakarta. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan masyarakat mereka semakin menghendaki agar ABRI hanya melaksanakan fungsi pertahanan saja (83,3% tingkat S1; 68,8% tingkat SLTP, dan 68,2% bagi yang tak bersekolah). Hasil jajak pendapat lain yang diadakan oleh *Kompas* (1.329 responden, via telepon) pada awal Oktober memberi hasil yang tidak jauh berbeda. Sebanyak 81% setuju jika ABRI hanya menjaga pertahanan dan keamanan, serta 62% melihat citra ABRI secara umum buruk. (Ikrar Nusa Bhakti, ibid. Hal. 112).

politisi sipil membangun pemerintahan yang stabil, masyarakat menerima tanpa *reserve* dominasi militer dalam pemerintahan negara.

Kelompok moderat pengkritik ABRI/TNI[25] ini mempertimbangkan aspek kesejarahan di Indonesia, dimana militer lahir dari rakyat yang secara bersama-sama melakukan gerilya, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Itu pulalah yang mendasari memori segenap unsur Angkatan '45 atas motto "ABRI adalah tentara yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat". Atas dasar alasan kesejarahan itu pulalah, golongan militer yang merasa telah mengucurkan keringat dan darah bagi kemerdekaan bangsa ini, dikemudian hari merasa mempunyai hak yang lebih daripada golongan lain di masyarakat. Salah satu hak yang mereka merasa miliki adalah hak untuk ikut bertanggung jawab (baca: terlibat), bahkan menentukan, dalam segenap aspek kehidupan sosial dan politik.

Masa transisi menurut kelompok moderat adalah saat untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem politik. Kehadiran militer di masa transisi masih dibutuhkan, terutama untuk mengamankan negara dari kemungkinan perpecahan. Di lain pihak ABRI/TNI diharapkan bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian di tengah transisi, konsolidasi, dan institusionalisasi demokrasi. Sehingga proyek-proyek transformasi sipil akhirnya didukung oleh militer, termasuk bagaimana membangun kontrol sipil atas militer.

Sementara arus keras penuntut dilaksanakannya reposisi ABRI/TNI terutama datang dari kalangan kritis di masyarakat, aktivis, maupun kelompok pro-

[25] Bagi pendukung pemikiran tersebut, ABRI adalah sebuah realitas politik yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Sekalipun institusinya dipojokkan oleh gelombang kritik akibat kesalahan-kesalahannya di masa Orde Baru, ABRI tetap memiliki posisi tawar-menawar penting di tengah instabilitas politik. Berangkat dari pertimbangan semacam itu, pembatalan peran sosial-politik ABRI mestinya dilaksanakan secara bijaksana dan bertahap. Jika dilakukan secara drastis justru riskan sehubungan dengan kemungkinan terjadinya kudeta militer akibat munculnya perasaan kecewa kelompok militer atas diambilnya tindakan drastis terhadap mereka.

demokrasi dan mahasiswa[26]. Pada intinya mereka menuntut segera dikembalikannya ABRI/TNI kepada fungsi utamanya yaitu fungsi pertahanan, pencegah dan penangkal ancaman serangan dari luar maupun dari dalam negeri.

Para pengecam keras ABRI/TNI sebagian adalah berasal dari penyandang trauma historis atas pelbagai penyelewengan yang dilakukan oleh ABRI/TNI. Melalui peran gandanya, ABRI/TNI dianggap banyak melakuan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, misalnya kekerasan yang terjadi pada insiden Dili (12 November 1991) yang mengakibatkan 50 orang tewas dan puluhan lainnya hilang, tindak kekerasan yang terjadi selama Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1997), dan kasus di Papua. Intensitas koreksi dan kritik menjadi semakin tinggi menyusul terjadinya kasus-kasus kekerasan mutakhir, mulai dari penculikan para aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, sampai kerusuhan 13-14 Mei 1998[27].

Penyelewengan oleh ABRI/TNI semasa Orde Baru sangat dimungkinkan karena ia menjadi pelindung utama Presidien Soeharto yang nota bene berpangkat Jenderal Besar sekaligus sebagai Presiden. Terlebih pada saat itu pengaruh kekuasaan Soeharto sebagai Presiden tidak hanya menghegemoni lembaga yudikatif dan lembaga legislatif di samping –sudah pasti lembaga eksekutif- Presiden Soeharto juga berkedudukan sebagai Panglima Tertinggi (Pangti) Angkatan Bersenjata. Melalui itu, Presiden Soeharto menggenggam sepenuhnya kontrol atas militer,

---

[26] Kelompok yang mewakili garis paling radikal dari gerakan-gerakan mahasiswa adalah Forum Kota (Forkot), Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), dan Persatuan Rakyat Demokrarik (PRD). Yang terakhir, bahkan belakangan menjelma menjadi sebuah partai dengan nama Partai Rakyat Demokratik. Dalam kampanye-kampanyenya menjelang Pemilu 1999, PRD dengan tegas menolak kompromi dengan gagasan Dwifungsi ABRI. Dalam salah satu pasal dari selebaran "10 Musuh Bersama dan Cara Melawannya", ialah ABRI/TNI yang masih mempertahankan Dwifungsi ABRI. (Lihat: Sukardi Rinakit, ibid. hal. 69-70).

[27] Ikrar Nusa Bhakti et al., ibid , hal. 115-116.

sehingga militer senantiasa tunduk termasuk menabukan perbedaan pendapat dengan Presiden Soeharto.

Gagasan menjadikan Presiden sekaligus sebagai Panglima Tertinggi (Pangti) Angkatan Bersenjata sebetulnya bukan dari Presiden Soeharto. Ia hanya meneruskan apa yang diterapkan oleh Presiden Soekarno yang menjadikan dirinya Pangti ABRI dalam memimpin operasi militer Dwikora dan Trikora. Beda dengan Presiden Soeharto yang selama tiga dekade lebih menjadi Pangti negara tidak sedang mengalami perang terbuka melawan kekuatan luar mana pun. Akibatnya pun jauh lebih luas, yaitu fungsi sosial politik militer Indonesia pun menjadi milik Presiden Soeharto, oleh karenanya penggunaannya pun sangat bergantung kepadanya. Di sini kontrol yang dapat menjamin bahwa penggunaan militer tetap berada dalam garis semestinya, yaitu demi kepentingan bangsa dan negara sukar dilakukan sebaliknya besar kemungkinan diselewengkan untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan politik sang Presiden.

Strategi untuk menguasai militer, termasuk loyalitas individual para perwiranya, Presiden Soeharto menerapkan pemberian insentif jabatan dan sekaligus materi sehingga tercipta pola hubungan yang subordinatif dan sentripetalistis di mana Presiden Soeharto sebagai titik pusat pemegang kekuasaan dapat terus berlangsung tanpa ada perlawanan dari ABRI/TNI sendiri. Sebagaimana diketahui, keputusan mengkaryakan anggota ABRI/TNI misalnya, dilakukan atas petunjuk Presiden, dengan alasan demi menjaga stabilitas. Dalam konteks ini, ABRI menjadi salah satu pilar penyangga kekuasaan Soeharto melalui berbagai bentuk aktivitas sosial politik bahkan ekonomi.

Serangan-serangan yang ditujukan kepada institusi ABRI/TNI sebagaimana telah dipaparkan di atas kemudian mendapatkan sejumlah respons. Salah satunya respons terpenting adalah seminar tentang "Peran ABRI Abad XXI" yang diselenggarakan di Sesko ABRI Bandung pada 22-24 September 1998. Di dalam tubuh ABRI sendiri, sesungguhnya dipercaya ada kelompok-kelompok perwira tinggi yang idealis dan getol dengan semangat reformasi ABRI/TNI.

Adapun sikap akomodatif dan kesediaan menampung setiap kritik yang masuk, seraya berupaya merekonstruksi posisi dan peran ABRI/TNI di masa mendatang, menjadi kesan awal yang sangat positif. Akan tetapi kesan awal itu segera berubah dikarenakan ABRI semakin menunjukkan sikap defensif terhadap berbagai tuntutan dan kritikan yang terus berkembang. Bahkan besarnya gelombang kritik ini justru dicurigai oleh pihak ABRI.[28] Tanggapan kalangan pucuk pimpinan di ABRI/TNI dan Presiden Habibie atas desakan reformasi semakin menunjukkan bahwa mereka belum siap melakukan reformasi secara ikhlas. Di bagian lain, bahkan "serangan balasan" dilontarkan kepada kelompok reformis. Pada HUT ke-53 ABRI, 5 Oktober 1998, Presiden Habibie menyebut adanya kecenderungan sekelompok kecil masyarakat melakukan gerakan radikal dan revolusioner dengan mengatasnamakan gerakan reformasi. Presiden Habibie yang tampaknya tengah mengarahkan serangannya kepada mahasiswa --menggambarkan sekelompok kecil itu telah merencanakan aksi untuk memaksakan kehendak dengan kekerasan, sehingga berpotensi destruktif, disintegrasi, dan inskonstitusional.

---

[28] Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto waktu itu mempertanyakan, benarkah wajah ABRI sudah begitu jelek, bengis, sehingga layak menerima berbagai tudingan kasar. Menurut Wiranto, yang dilakukan pihak ABRI di masa-masa lalu itu mestinya tidak dilihat dengan konteks sekarang. Alasannya, semua yang terjadi itu berawal dari penugasan negara untuk menjaga keselamatan dan integritas bangsa. Itu karena kondisinya keras dan membutuhkan tindakan cepat sebab bisa-bisa pihaknya sendiri yang menjadi korban. "Banyak prajurit jadi korban mati atau cacat. Banyak istri tentara jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim karena kehilangan bapaknya", tukasnya.

Cara-cara pucuk pimpinan ABRI/TNI menanggapi gelombang kritik merupakan pertanda bahwa ABRI memang belum rela mengadakan perubahan dalam arti sebenarnya sebagaimana dituntut oleh masyarakat. Artinya, kendati di luar ABRI/TNI berteriak lantang sudah berubah dan menjadi pendukung reformasi, dalam kenyataannya justru bertindak sebaliknya. Setidak-tidaknya tercermin dalam sikap defensif para pemimpinnya.

Sikap defensif yang ditunjukkan Jenderal Wiranto misalnya:

> "Saya kira zaman dahulu kalau dikatakan salah, belum tentu. Sebab di zaman revolusi, waktu kita pertama kali merdeka belum ada yang menjadi lurah, maka tentara harus menjadi lurah. Jadi, itu tuntutan sejarah dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya itu berkembang menjadi suatu doktrin sekarang. Orang membuat doktrin tentu belajar dari sejarah. Jadi, kalau pada waktu itu benar, ya memang pada waktu itu benar. Kalau salah, mengapa pada waktu zaman setelah kita merdeka tentara harus mengisi kekosongan pemimpin pemerintahan, melalui sejarah yang cukup panjang. Jadi kalau kita selanjutnya berjalan dengan perjalan sejarah itu, saya kira, kalau mau dikatakan salah ya pada saat itu benar"[29].

Oleh karena itu sebagian besar petinggi militer berpendirian bahwa di masa transisi saat ini, ABRI/TNI justru semakin dibutuhkan. Bukan hanya dibutuhkan untuk mengawal keutuhan bangsa dan negara, tapi ABRI/TNI juga dibutuhkan untuk mengawal agar tercipta suatu masyarakat yang demokratis. Untuk menuju proses demokratisasi maka mustahil mencabut peran sosial-politik ABRI/TNI yang tepat adalah mengurangi secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisinya. Seperti diutarakan oleh Mayjen Kiki Syahnakri:

> "... Secara faktual pluralisme (kebhinekaan) dari sisi geografis, budaya, dan agama mengandung potensi perpecahan. Di sinilah komitmen ABRI untuk menjaga keutuhan bangsa. Di sinilah hakikat Dwifungsi ABRI untuk menjaga komitmen tadi ... Yang terjadi pada masa lalu adalah implementasinya yang banyak penyimpangan, bahkan kebablasan pada peran politik. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki adalah implementasinya, bukan dwifungsinya. Rakyat Indonesia akan rugi bila tidak menerima hal itu, yakni komitmen ABRI dalam menjaga keutuhan negara"[30].

---

[29] Lihat Ikrar Nusa Bhakti et al., ibid., hal. 123.
[30] M. Reifqi, 'Persepsi ABRI dan Sipil Terhadap Dwifungsi ABRI: Mengukur Dua Kategori Ganda", Makalah Pada Seminar CSIS, 1999. dalam ibid. 124.

Momentum krisis ekonomi ini telah melahirkan berbagai gerakan, terutama dikalangan mahasiswa yang menuntut adanya reformasi total, dengan mengusung isu demokratisasi. Agenda pendemokratisasian ini sangat terkait dengan upaya mereduksi peran militer dalam tanggung jawab sosial dan politik, kalau tidak malah menghilangkan sama sekali, yaitu mengembalikan TNI kedalam fungsinya yaitu sebagai alat pertahanan semata, tidak ikut memfungsikan diri dalam urusan sosial dan politik. Namun dalam praktek, mengurangi peran TNI dalam bidang sosial politik ini tidak lah gampang karena sudah terlanjur lama dan menyatu dengan fungsi kemiliterannya. Dengan demikian, upaya melakukan reposisi TNI itu tidak bisa dilakukan secara drastis, melaikan harus bertahap. Hal ini juga terkait dengan kesiapan mental dari TNI untuk dapat kembali keposisi semula sebagai tentara yang profesional.

Tekad untuk kembali kepada posisi semula sebagai alat pertahanan dan keamanan negara sudah banyak dirumuskan oleh para petinggi TNI maupun oleh para pemimpin sipil di Jakarta. Beberapa langkah yang bisa kita lihat adalah dikuranginya perwakilan TNI di parlemen, sampai pada akhirnya pada tahun 2004 dihilangkan sama sekali. Di samping itu juga muncul adanya upaya mengkaji kembali peranan Komando Teritorial (Koter) yang ada di daerah-daerah, seperti Kodam, Kodim, Koramil, dan Babinsa. Kalau kita amati sepintas, secara struktural konseptual reposisi TNI tampak sudah tidak ada masalah, namun dalam implementasi di lapangan apakah hal ini sudah sepenuhnya terjadi? Hal itu masih menjadi pertanyaan besar.

Sikap skeptis terhadap reposisi tentara ini bukan tanpa alasan. Berdasar hasil pengkajian yang dilakukan Sundhaussen ada beberapa syarat reposisi militer yaitu:

Pertama, mundurnya militer kebarak harus ada jaminan tidak akan ada aksi sepihak dari militer sendiri; *Kedua*, rezim sipil sebagai pengganti, harus respek terhadap individu, kelompok, dan kepentingan idiologis para perwira militer. Misalnya, pemimpin rezim yang baru harus memastikan tidak akan secara drastis memotong pengeluaran anggaran pertahanan. *Ketiga*, keberadaan pemimpin sipil harus tangguh dan mempunyai tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Sundhaussen memperkirakan apabila tiga syarat tersebut tidak terpenuhi, intervensi militer ke dalam pemerintahan kemungkinan besar akan terjadi kembali.[31]

Bagi kasus di Indonesia, pada saat ini sebenarnya kemungkinan kembalinya tentara ke gelanggang politik bisa saja terjadi, walau kemungkinan tersebut untuk saat-saat sekarang kecil. Apalagi kalau kita bercermin kepada sejarah militer Indonesia itu sendiri[32], sejak sebelum kemerdekaan hingga masa revolusi dari tahun 1945-1949 tentara sudah terlibat dalam perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dimana pada saat itu urusan militer dan politik tidak bisa dipisahkan (*unseverable*). Hal ini terus berlanjut sehingga ketika militer secara prinsip menerima supremasi sipil setelah penyerahan kedaulatan di akhir tahun 1949, namun ketika keadaan politik memburuk akibat konflik yang berlarut-larut di dalam tubuh parlemen tahun 1957, tentara mengajukan Undang-undang Darurat Perang yang membuat mereka memasuki kembali fungsi politik, adminsitrasi pemerintahan dan ekonomi yang dari waktu ke waktu kian meluas.

---

[31] Ulf Sundhaussen, "*The Inner Contradiction of The Soeharto Regime: A Starting Poimt For A Withdrawal To The Barracks*", dalam "*Democracy in Indonesia* 1950-1990", Australia: Aristoc Press, 1994, hal. 117.

[32] Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah militer dan politik di Indonesia antara lain bisa dibaca dalam: Harrold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, United Kingdom: Cornell University Press, 1978.

Cukup banyak indikasi yang menguatkan dugaan bahwa dimasa-masa yang akan datang keterlibatan militer diluar bidang kemiliteran, terutama politik akan masih terus berlangsung dengan beberapa improvisasi. Di antara indikasi tersebut adalah masih cukup banyaknya perwira tinggi dan pensiunan perwira yang memperoleh posisi --bahkan stretagis-- dalam jajaran kabinet pemerintahan transisional sejak pemerintahan B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), K.H. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001), Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-2004), hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004). Komposisi itu hampir tidak ada bedanya dengan ketika presiden Soeharto berkuasa (27 Maret 1967 - 21 Mei 1998). Begitu juga cukup banyak perwira dan pensiunan perwira yang terpilih sebagai kepala daerah baik ditingkat propinsi maupun kabupaten dan kota.

Pada awal tahun 2000-an (saat mana penelitian ini dilaksanakan) telah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di sekitar organisasi TNI yang hal tersebut secara dialektik tampaknya tidak lepas dari adanya perubahan kesadaran para perwira TNI di dalam memaknai profesinya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ruang dan jarak waktu yang cukup jauh para perwira tersebut dengan perwira-perwira seniornya, yaitu perwira angkatan 1945. Di sisi lain adanya realitas eksternal-obyektif yang berubah terutama mengenai tuntutan perubahan peran dan posisi TNI dari masyarakat luas yang membuat realitas subyektif TNI mengubah kesadaran profesionalismenya. Dengan demikian kesadaran profesionalisme militer TNI saat ini –pasca reformasi- diperkirakan memiliki keunikan-keunikan dibandingkan dengan pemahaman profesionalisme militer oleh perwira-perwira pendahulunya, khususnya perwira angkatan 1945 dan pasca angkatan 1945.

B. Tujuan Penelitian dan Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, melalui telaah terhadap sejarah perkembangan militer Indonesia tampak jelas bahwa secara embrional profesionalisme militer itu sudah ada --walaupun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit formal-- dan mengalami pergeseran pemahaman dari waktu ke waktu. Dalam konteks kumparan waktu maka tujuan penelitian ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menggali pemahaman tentang profesionalisme militer Indonesia yang mutakhir. Dan lantaran subyek penelitian adalah para perwira menengah, maka penelitian ini juga berpotensi prediktif setidak-tidaknya untuk sepuluh tahun ke depan dengan anggapan bahwa para subyek penelitian kelak akan mencapai jenjang kepangkatan sebagai perwira tinggi dan menduduki posisi pucuk pimpinan TNI, khususnya TNI AD.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkonstruksikan pemahaman serta makna *(meaning)*[33] tentang profesionalisme militer di kalangan elit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)[34].

---

[33] *Meaning,* atau *meaningful social action.* Dimaksudkan di sini adalah konsep kerangka kerja Max Weber yang membedakannya dengan tingkah laku *(behavior)* yang hanya bersifat gerakan fisik semata, di mana si 'aktor' tidak mengaitkannya dengan suatu arti tertentu (misalnya mata berkedip). Menurut Weber tindakan sosial bermakna *(meaningful sosial action)* sebaliknya adalah tindakan yang diarahkan atau terarah kepada sesuatu obyek. Di mana kita dapat meyakini akan adanya kaitan dengan suatu makna subyektif didalamnya. Dalam pengetian ini, orang yang sembahyang di gereja sendirian pun adalah suatu tindakan bermakna, sebagaimana halnya berpartisipasi dalam pelayanan gereja. (Baca lebih lanjut: Gordon Marshal Ed.., *Oxford Dictionary of Sociology,* New York: Oxford University Press, 1998. hal. 404).

[34] Militer Indonesia saat ini bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana organisasi militer pada umumnya terbagi ke dalam tiga wilayah tugas atau Matra yaitu Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL) dan Angkatan Udara (TNI-AU).

Adapun secara hirarkhis masing-masing matra dibagi dalam tiga kohort (mulai dari jenjang terbawah) adalah sebagai berikut: Tamtama, Bintara, dan Perwira. Pada jenjang Perwira terbagi ke dalam tiga kohort yaitu (mulai dari bawah): Perwira Pertama, Perwira Menengah dan Perwira Tinggi.

Nama pangkat pada masing-masing matra terdapat perbedaan. Khusus untuk pangkat pada TNI-AD adalah sbb.: (1) Perwira Pertama: Letnan II, Letnan I, dan Kapten; (2) Perwira Menengah: Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel; (3) Perwira Tinggi: Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal dan Jenderal.

Untuk kepentingan operasionalisasi gagasan penelitian tersebut di atas maka konsep "elit TNI AD" tersebut di atas diberi definisi operasional yaitu "perwira menengah TNI AD yang menduduki pucuk pimpinan/komando di daerah garnizun Malang". Untuk agar sampai pada tujuan penelitian tersebut di atas, masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan tersebut, baik berupa data yang berasal dari sumber bacaan melalui penelitian pustaka *(leterer research)* maupun informasi yang diperoleh dari Subyek Penelitian dari penelitian lapangan *(field research)* akan diolah untuk dimaknai, sebagaimana dimaksud tujuan penelitian ini.

Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

1. Seperti apakah pola pembentukan pemahaman mengenai profesionalisme militer yang terjadi dalam ruang kesadaran para elit TNI AD?
2. Bagaimanakah para elit TNI AD memahami profesionalisme militer? Fenomen-fenomen apa sajakah yang mensiratkan adanya pemahaman tersebut?
3. Apakah nilai-nilai yang mendasari ata yang ada di baliknya sehingga muncul pemahaman tersebut?

C. Konstribusi Teoritis yang Diharapkan

Penelitian ini memiliki peluang untuk menyempurnakan atau melengkapi teori yang pernah dikemukakan oleh teoritisi-teoritisi di bidang kajian militer *(Military studies)*, dalam bidang pemikiran militer khususnya mengenai profesionalisme militer. Perlu sedikit disinggung di sini bahwa perdebatan konsep dan teori mengenai profesionalisme militer sudah cukup intensif terjadi. Secara kasar peta perdebatan adalah merentang dari satu kutub –apa yang disebut- profesionalisme lama *(old professionalism)* dengan profesionalisme baru *(new professionalism)* di kutup yang

lain. Penjelasan panjang lebar mengenai dua konsep tersebut di atas lebih lanjut dibahas di dalam bab kerangka teori.

D. Manfaat dan Keunikan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan penelitian yang dapat:

1. Digunakan sebagai bahan bandingan, kritik dan koreksi terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai militer khususnya TNI seiring dengan perubahan-perubahan yang niscaya terjadi. Khusus dalam kaitannya dengan TNI, bahwa rentetan peristiwa yang menyertai gerakan reformasi pada akhir tahun sembilan puluhan diyakini telah berimbas kuat yang pada gilirannya menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat berarti di dalam TNI baik secara institusional maupun personal.
2. Menjadi bahan masukan untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kelembagaan TNI dan perannya di masa-masa yang akan datang. Peluang untuk itu cukup besar mengingat pada saat ini telah muncul sikap yang lebih terbuka di kalangan para perwira TNI terhadap berbagai gagasan dan pemikiran mengenai TNI yang datang dari luar.

Adapun keunikan penelitian ini adalah terletak pada:

1. Pengambilan level penelitian pada tataran "mikro-subyektif" yang menurut pengetahuan penulis masih tergolong langka untuk penelitian mengenai militer.
2. Menjadikan Perwira Menengah sebagai subyek penelitian. Kebanyakan penelitian militer yang ada adalah menjadikan Perwira Tinggi sebagai subyek penelitian. Dengan menjadikan perwira menengah sebagai subyek penelitian maka hasil penelitian ini potensial memberi perspektif masa depan yaitu bagaimana kira-kira

keadaan TNI sepuluh tahun yang akan datang ketika para perwira menengah tersebut kelak menjadi perwira tinggi dan menduduki posisi yang lebih strategis.

3. Mengambil lokasi di tingkat daerah. Kebanyakan penelitian militer mengambil lokasi di pusat pemerintahan, ataupun mengabaikan masalah lokasi penelitian dengan anggapan bahwa sebagai *total institution*[35], di manapun berada, militer itu seragam. Dengan menetapkan lokasi penelitian secara lebih spesisfik ini akan potensial mengungkap kemungkinan adanya vareasi yang berdemensi spasial di balik keserba-seragaman di dalam pola kehidupan militer.

[35] *Total institution*, adalah istilah yang dikenalkan oleh Erving Goffman untuk menganalisis sebuah institusi di dalam mana seluruh kompleks dan orang yang berada di dalamnya diproses secara birokrasi, sementara itu secara pisik mereka terisolasi dari aktivitas normal di sekitarnya. Goffman menyebut misal adalah penjara, rumah sakit mental, dan juga barak militer. (lihat: Gordon Marshal, *Oxford Dictionary of Sociology*, Oxford University Press, 1998).

BAB II

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Teori

1. *Pengertian Profesionalisme*

Pembahasan dalam bab ini akan diawali dengan pemaparan mengenai pengertian profesionalisme secara umum dengan menyisipkan beberapa pendapat dari beberapa ahli. Pemaparan secara elementer tersebut sangat diperlukan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan lebih jauh yaitu tentang profesionalisme militer.

Di dalam *Webster Dictionary*, kata *profession* adalah berasal dari kata *profess.* Dari bahasa Yunani berarti "ikrar". Kata *Profes* berarti "pengikrar laki-laki", *professe* "pengikrar perempuan", *Professed* berarti "Rahib" atau "Biarawati" yang sudah mengucapkan *kaul.*

Kemudian banyak sekali arti dari *profess* ini beberapa di antaranya:

1. *To admit to membership in religious order on taking the required vows*; (mengaku sebagai pemeluk agama tertentu untuk syarat pengambilan sumpah).
2. *To declare or admit openly or freely, to a vow or acknowledge; to confess* (ikrar, atau pengakuan terbuka, atau pengakuan bebas, untuk sebuah sumpah atau pernyataan).
3. *To make profession of (a feeling, a quality, a belief etc);* (membuat pengakuan tentang suatu perasaan, suatu sifat atau suatu keyakinan dlsb);
4. *To Proclaim oneself versed in; to follow a calling in which one is or claims to be an expert*; (menyatakan dirinya sendiri bahwa ia mumpuni, untuk menunaikan sebuah panggilan suatu pekerjaan, dalam mana ia mengklaim sebagai ahli pada pekerjaan itu).

Selanjutnya dari kata *profess* timbul kata bentukan, *profession* yang di dalam bahasa Latin *Professio,* yang memiliki beberapa arti. Adapun beberapa arti yang dipandang memiliki kaitan dengan pembahasan ini antara lain:

5. *An occupation, if not purely commercial, to wihich one devotes oneself.* (Suatu pekerjaan yang tidak murni komersial, di mana seseorang mencurahkan seluruh dirinya).
0. *A calling in which one profess to have acquired some special knowledge used by way either of instructing, guidening, or advising others of serving them in some art; as profession of arms, profession of teaching, profession of chemist.* (Suatu pekerjaan dalam mana seseorang berikrar untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan khusus melalui pelatihan, pembimbingan, atau kepenasehatan yang ia abdikan bagi orang lain dalam beberapa bidang kiat; misalnya profesi militer, profesi guru, profesi ahli kimia dlsb);
0. *The collective body of persons engaged in a calling* (Badan kolektif dari orang orang yang memenuhi panggilan untuk suatu pekerjaan).

Kata bentukan berikutnya adalah *Professionalism* antara lain berarti:

0. *Conduct, aims, qualities, etc. characteristic of, peculiar to, a profession or professional man* (tingkah laku, tujuan, sifat-sifat; karakteristik mengenai keistimewaan --suatu profesi; atau manusia professional).
0. *The characteristics, standards or methods of professionals* (karakteristik, standar atau metode professional)

Di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* kata "*Profession*" antara lain berarti "suatu jenis pekerjaan yang memerlukan latihan dan ketrampilan khusus, terutama memerlukan pendidikan tingkat tinggi" (*a type of job that needs special training or skill, especially one needs a high level of education*). Adapun kata "profesional", sebagai kata sifat, berarti hal-hal yang berhubungan dengan profesi, sedang sebagai kata benda, berarti orang yang melibakan diri dalam profesi tertentu. Adapun "Professionalism" berarti "standar yang tinggi yang diberlakukan bagi seseorang yang dilatih dengan baik di dalam pekerjaan tertentu" (*The high standard that you expect from a person who is well trained in a particular job*). Juga bisa berarti "Kemampuan dan ketrampilan yang luar biasa" (*Great skill and ability*)[36].

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, berikut ini penulis mengajukan rumusan pengertian istilah profesionalisme yang lebih lengkap dan dipandang sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu: "Profesionalisme adalah standar yang dikenakan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dengan **lebih** dilandasi oleh

[36] Sally Wehmeier (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 6th ed., 2002.

keyakinan akan adanya nilai-nilai kebenaran, kehormatan, kecintaan dan keterpanggilan di dalam pekerjaan itu; baik dalam hal menguasai keahlian yang diperlukan maupun pelayanan atas nama pekerjaan itu kepada orang lain, **dari pada** sekedar, atau semata-mata untuk memperoleh bayaran".

Sedangkan di antara para ahli, Samuel P. Huntington mengajukan tiga sifat profesionalisme yaitu: keahlian *(expertise)*, tanggung jawab *(responsibility)*, dan adanya organisasi kesejawatan yang mengikat *(corporateness)*[37]. Adapun Morris Janowitz sebagaimana dikutip oleh Segal dan Schwartz[38], mengajukan empat sifat yaitu: "Sebagai suatu keahlian yang sangat spesifik yang diperoleh melalui latihan yang intensif, adanya standar etika[39] dan kinerja, adanya rasa identitas kelompok, dan adanya sistem administrasi internal" (*special skill acquired through intensive training, standards of ethics and performance, a sense of group identity, system of internal administration*).

Berdasarkan beberapa pengertian istilah serta pendapat Huntington dan Janowitz tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya keahlian yang spesifik adalah bukan satu-satunya kriteria yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Memang kriteria itu mutlak karena berkenaan dengan "bagaimana" pekerjaan itu dilaksanakan, namun ada kriteria yang tidak kalah penting adalah bahwa seorang profesional harus memiliki tanggung jawab sosial, memiliki standar etika dan kinerja

---

[37] Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, The Belknap Press of Harvard University Press, 1956, hal. 8.

[38] lihat: Segal, David R. and Janet S. Schawart, 1981, *Professional Autonomy of Military in the United States and the Soviet Union*, www.airpower.maxwell.af.mi

[39] Etika adalah aturan atau standar yang menjadi pedoman tingkah laku anggota suatu organisasi atau manajemen profesi. Etik didefinisikan di dalam filsafat moral sebagai: "cabang dari filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai, yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, yang menentukan benar-salah-nya suatu tindakan dan baik-buruk-nya suatu motif dan tujuan dari tindakan tertentu". Ada empat madzhab dalam etika: (1) *empirical theory*, (2) *rational theory*, (3) *intuitive theory*, dan (4) *revelation theory*. (lebih lanjut lihat: Ralp C. Chandler & Jack Plano, *The Public Administration Dictionary*, edisi II, ABC-Clio, Santa Barbara, Cal. 1988, hal.17).

yang secara aksiologis sebagai rambu-rambu yang memberi batas dan arah mengenai "untuk apa" pekerjaan itu dilaksanakan, dan bilamana pekerjaan itu harus, boleh, atau tidak boleh dilakukan.

2. *Profesionalisme Militer*

. Perwira sebagai Prajurit Profesional

Sejalan dengan pengertian profesi dan profesionalisme secara umum sebagaimana telah dibahas tersebut di atas maka dapat dibuat analogi bahwa yang dimaksud profesionalisme militer adalah: "Standar yang diberlakukan bagi organisasi dan para personel militer dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar tersebut meliputi tingkat keahlian dan pelayanan yang diberikan, landasan keyakinan bahwa di dalam pekerjaanya bidang kemiliteran yang ditekuni itu terkandung nilai kebenaran, yang membuat baginya pekerjaan itu lebih sebagai panggilan dan kehormatan dari pada untuk memperoleh bayaran".

Karena adanya nilai-nilai kebenaran yang diyakini tersebut lah yang menyebabkan setiap profesi militer akan dengan sendirinya menjadi suatu "isme" atau sebagai suatu profesionalisme militer. Nilai-nilai tersebut di samping universal juga memiliki sifat partikular karena setiap militer profesional adalah merupakan bagian dari suatu masyarakat bernegara tertentu. Demikian pula nilai-nilai kebenaran yang diyakini pasti tidak terlepas dari ideologi yang diberlakukan oleh negara itu. Padahal setiap negara itu mempunyai nilai kebenaran atau ideologi yang berbeda-beda pula.

Lantas siapakah militer profesional itu? Dalam hal ini beberapa ahli militer berpendapat bahwa hanya para prajurit yang memiliki kualifikasi perwira *(comisioned Officer)* saja yang bisa disebut militer profesional. Sedangkan para

prajurit yang berada pada tingkatan yang lebih rendah –yaitu bintara dan tamtama— adalah bukan kelompok profesional militer melainkan adalah kelompok vokasional atau petrampil militer.*"The modern officer corps is a professional body and the modern military officer is a professional man"* (Korps perwira modern adalah merupakan suatu badan professional, dan perwira militer modern itu adalah seorang profesional)[40]. Katagori yang diajukan oleh Huntington tersebut di atas oleh Amos Perlmutter disebut sebagai "Dasar pembentukan profesionalisme militer"[41].

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Perlmutter menyatakan bahwa landasan profesionalisme militer itu bertumpu pada dua pilar yaitu profesionalisme personil dan profesionalisme korps. Profesionalisme personil meliputi: keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan pada korps, yang didukung adanya sifat ulet, tekun, tegar, patuh, tulus, disiplin dan mencintai pekerjaannya. Sedangkan profesionalisme korps: meliputi adanya spesialisasi fungsi dan peran yang didukung oleh adanya satu sumber otoritas kekuasaan yang berasal dari masyarakat yang ada di dalam suatu negara *(nation state)* yang demokratis.

Hubungan antara profesionalisme personil dan profesionalisme korps militer bersifat koheren dan saling mempengaruhi. Pandangan ini didasarkan alasan bahwa personil yang profesional akan membuat korpsnya menjadi lebih profesional dalam menjalankan perannya, demikian juga sebaliknya korps yang profesional akan meningkatkan profesionalisme personilnya.

Pergeseran makna profesional menjadi sama dengan bekerja untuk mendapat bayaran juga kadang terjadi, yaitu tatkala para tamtama juga disebut

[40] Huntington, *The Soldier and The State*, hal. 1.
[41] Amos Perlmutter, Militer dan Politik, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hal. 29-31.

prajurit profesional. Ungkapan "prajurit profesional" telah mengaburkan perbedaan antara karir tamtama profesional dalam arti seseorang yang bekerja di birokrasi militer dengan mendapatkan bayaran, dengan karir perwira profesional yang mengejar sebuah kehormatan dan "panggilan mulia" dalam melayani masyarakat[42]. Dalam hal ini Huntington menegaskan, para tamtama adalah merupakan bagian dari birokrasi "organisasi" militer tetapi bukan merupakan bagian dari birokrasi "profesi" militer. Tamtama dan bintara relatif tidak memiliki keahlian dalam arti kompetensi intelektual dan juga tidak memiliki tanggung jawab profesional sebagaimana perwira. Tamtama dan bintara adalah para juru terampil dalam penerapan kekerasan bersenjata tetapi bukan manajer kekerasan itu sendiri.

Jadi korps perwira dan para perwira lah yang memenuhi kriteria-kriteria profesional. Bahwa memang dalam prakteknya tidak ada satupun pekerjaan yang memiliki semua sifat profesional yang ideal termasuk perwira, namun menurut Huntington, justru keperwiraan *(officership)*-lah sepertinya yang lebih mendekati kriteria ideal dibandingkan dengan profesi lainnya. Sifat-sifat dasar keperwiraan sebagai sebuah profesi tidak dapat disangkal lagi. Dalam prakteknya keperwiraan menjadi kuat dan sangat efektif jika lebih memenuhi sifat profesional yang ideal; sebaliknya keperwiraan menjadi lemah dan tidak efektif jika semakin menjauhi sifat-sifat profesional yang ideal itu[43].

b. Keahlian Perwira Militer

Sebagaimana dikupas pada bagian terdahulu bahwa jenis pekerjaan profesional dilihat dari aspek manapun adalah jenis pekerjaan yang istimewa dan

[42] Huntington, hal. 3-4.
[43] Huntington, *The Soldier and The State,* hal. 7.

spesifik. Lantas jenis pekerjaaan seperti apa yang ditangani oleh militer profesional? Atau keahlian khusus apakah yang dimiliki oleh perwira militer? Apakah ada keahlian yang biasa dimiliki oleh para perwira militer, namun tidak dimiliki oleh professional yang lain? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian dapat diperoleh dalam deskripsi berikut ini.

Korps perwira memiliki begitu banyak spesialisasi, termasuk spesialisasi yang sama atau mirip dengan yang dimiliki oleh profesi-profesi sipil. Misalnya di dunia militer juga terdapat pekerjaan ke-insinyur-an, dokter, pilot, ahli peralatan, ahli personalia, ahli komunikasi dlsb. —yang pada kenyataanya semua itu bisa ditemukan baik dalam organisasi sipil maupun dalam satuan organisasi militer. Di dalam satuan organisasi militer keahlian tersebut sangat dibutuhkan sebagai apa yang disebut dengan bantuan tempur (*combat support*) maupun bantuan administrasi (*non-combat support*).

Adapun yang paling kontras profesi militer di banding profesi sipil adalah dalam hal manajemen kekerasan. Di dalam organisasi militer terdapat berbagai sumber kekuatan kekerasan baik berupa personel, peralatan dan persenjataan. Kekuatan-kekuatan tersebut dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu: kekuatan tempur, bantuan tempur, dan bantuan adminsitrasi. Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam hirarkhi yang sangat ketat dengan berbagai jenis kemahiran dan ketrampilan, penggunaan alat dan persenjataan, yang satu sama lain saling tergantung. Pembagian tugas dimulai pada masing-masing angkatan, yang di dalam organisasi TNI misalnya, disebut "Matra", yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara[44]. Di dalam masing-masing

[44] Untuk beberapa negara, militer Amerika Serikat misalnya, tiga matra tersebut ditambah satu satuan yaitu Korps Marinir sebagai satuan tersendiri.

matra dipecah dalam beberapa kecabangan; masing-masing kecabangan dipecah menjadi sub-sub kecabangan, dan seterusnya.

Di dalam Matra Darat misalnya ada empat kecabangan satuan tempur yaitu Infanteri, Kavaleri, Artileri, dan Zeni-tempur. Di dalam satuan Artileri terdapat: Artileri Medan (Armed) dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Di dalam Arhanud masih terbagi lagi dalam Artileri Pertahanan Udara Ringan (Arhanudri), Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse), dan Artileri Pertahanan Udara Berat (Arhanudber).

Dengan adanya beragam jenis spesialisasi keahlian dan ketrampilan baik secara lateral maupun hirarkhikal sebagaimana diilustrasikan di atas menjadikan pekerjaan militer itu sangat unik. Maka untuk mengelolanya pun memerlukan kemampuan yang sangat khusus. Kemampuan itulah yang menjadi kompetensi utama para prajurit perwira. Kemampuan itu pula yang membedakan mereka dengan para prajurit yang berada pada jenjang dibawahnya yaitu prajurit bintara dan tamtama.

Apa yang telah dideskripsikan di atas oleh Harold D. Lasswell[45] disebut sebagai pekerjaan militer, yaitu spesialis di bidang kekerasan. Sedangkan para perwira pada dasarnya adalah seorang manajer kekerasan *(the manager of violence)*[46]. Kemampuan dalam bidang manajemen kekerasan ini dapat dikatakan sebagai bagian inti dari perangkat kekuatan militer, yang tujuan utamanya adalah berhasil dalam, atau memenangi pertempuran. Untuk itu tugas perwira sebagai

[45] Harold Dwight Lasswell (1902-1978) adalah ilmuwan sosiologi politik. Dikenal sebagai tokoh madzhab Sosiologi Chicago *(Chicago School of Sociology)* bersama G. Herbert Mead. Tulisannya dalam *American Journal of Sociology* yang berjudul *"The Garrison State"* (1941) ia menyebut militer sebagai *"the specialists in violence"*, dengan mengambil analog dari istilah tersebut lantas para perwira disebut sebagai *"the manager of violence"*.

[46] Burhan Magenda, dalam Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hal. vi.

militer profesional adalah meliputi: (1) mengorganisasi, memperlengkapi dan melatih angkatan bersenjata, (2) merencanakan operasinya, (3) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasinya baik dalam pertempuran maupun di luar pertempuran[47]. Hasil akhir dari tugas tersebut adalah terciptanya keamanan umum--Huntington menyebut lebih spesifik sebagai "keamanan militer" *(military security)*.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimanakah keamanan umum tersebut diproduksi atau diciptakan? Secara spesifik keamanan umum tersebut diciptakan melalui tiga tingkatan yaitu dengan menjadikan kekerasan sebagai alat penangkalan *(deterrent)*, alat pencegahan *(prevention)*, alat pertempuran, dan alat pemulihan. Jadi diperlukannya personel militer, peralatan dan persenjataan yang besar dan bermutu adalah pertama-tama untuk keperluan penangkalan dan pencegahan. Namun demikian memang juga dimaksudkan untuk agar dapat memenangi suatu pertempuran. Oleh sebab itu setiap organisasi militer didesain dan dipersiapkan untuk suatu keadaan tidak normal yaitu keadaan perang. Sedangkan yang tadak kalah penting adalah juga dipersiapkan untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi setelah pertempuran atau perang yang tidak terhindarkan terjadi.

Jadi tujuan tingkat pertama penggunaan potensi kekerasan dalam militer adalah untuk menangkal dan mencegah bagaimana agar tidak perlu terjadi perang atau pertempuran. Untuk itu keberadaan kekuatan kekerasan pertama-tama harus menghasilkan efek tangkal *(detterence effects)*, yaitu untuk ke dalam mampu membangkitkan kebanggaan, percaya diri serta keberanian sedang efek keluar

[47] Huntington, ibid., hal. 8.

bisa menimbulkan rasa segan, takut dan jera kepada pihak musuh. Untuk negara-negara bangsa yang memiliki kecenderungan agresif *(belligerent nation)* atau yang memiliki musuh potensial, efek tangkal ini biasanya diciptakan dengan melalui praktek *"spectator sport militarism"* (pamer kekuatan militer) atau operasi militer dalam bentuk insiden kecil terhadap musuh potensialnya.

Lantas siapakah yang menjadi sasaran penggunaan kekerasan? Tidak bisa disangkal lagi penggunaan kekerasan itu adalah diarahkan terhadap mereka yang terkategori sebagai musuh. Musuh yang dimaksud adalah bisa berasal dari luar yaitu negara lain yang berdaulat yang dengan alasan-alasan tertentu, nyata-nyata atau potensial mengancam kedaulatan negara; atau dari dalam negeri berupa pemberotakan atau kekuatan-kekuatan bersenjata yang lain.

c. Tanggung Jawab Profesional Militer

Keahlian perwira professional yaitu di bidang manajemen kekerasan adalah tergolong sangat unik dan memiliki implikasi pada keharusan adanya tanggung jawab sosial yang sangat besar, sebab produk dari keahlian ini adalah berupa barang publik *(public goods)* yaitu berupa keamanan umum[48]. Sebagaimana halnya barang publik, keamanan umum yang dihasilkan oleh profesi militer ini juga memiliki dua karakteristik yaitu *non-rivalry* dan *non-excludability.*

Yang dimaksud *non-rivalry* adalah bahwa jasa keamanan umum ini tidak dapat dipersaingkan melalui mekanisme pasar. Karena hampir bisa dipastikan, tidak bisa diberlakukan hukum permintaan-penawaran *(demand and supply)* atas jasa publik semacam ini. Sekalipun semua orang butuh dan ingin mengambil manfaat atas produk keamanan umum namun semua orang juga ingin menjadi

[48] Huntington menyebutnya sebagai keamanan militer *(military security).*

penumpang gratis *(free raiders).* Padahal adanya keamanan umum adalah mutlak, maka mau tidak mau tanggung jawab atas pengadaannya harus diambil alih oleh negara. Oleh karena itu institusi militer termasuk di dalamnya organisasi profesi (korps perwira) yang menyediakan jasa ini adalah bagian dari birokrasi negara, sedangkan tenaga profesional yang memproduknya (para perwira) juga adalah sebagai aparatus negara.

Adapun yang dimaksudkan dengan *non-excludability* yaitu bahwa jasa keamanan umum ini tidak bisa diperkecualikan untuk orang atau kalangan tertentu saja melainkan semua orang memiliki peluang yang sama untuk mengambil manfaat darinya. Kalau toh harus diperkecualikan, secara teknis akan sangat sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar[49]. Sama-sama sebagai *public goods* barangkali jasa jalan umum lebih mudah dan murah untuk dibuat perkecualian dibanding dengan jasa keamanan umum. Misalnya melalui pembangunan jalan *toll,* yang bisa memberi peluang bagi kalangan pengendara tertentu untuk dikecualikan, mereka bisa mengambil manfaatnya melalui mekanisme pasar dan persaingan terbatas.

Jasa keamanan umum sebagai *public goods* yang diproduksi oleh profesi militer ini lebih berbeda lagi jika dibandingkan dengan *private goods* yang diproduksi oleh profesi lain seperti dokter ataupun *lawyer.* Dalam profesi dokter, pengambil manfaat atas jasa yang mereka produk bisa diperkecualikan yaitu hanya pasiennya saja. Begitu juga jasa pengacara bisa hanya *client*-nya saja.

Perbandingan resiko dari ke dua karakter jasa tersebut adalah, untuk profesi militer manakala terjadi malpraktek maka akibatnya tidak hanya menimpa orang

[49] Lebih jauh mengenai "barang publik", lihat: Goeritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, edisi III, Yogyakarta: BPFE, 1993, hal. 5. Juga, *Ekonomi Kebijakan Publik di Indonesia* oleh penulis dan penerbit yang sama.

perorang melainkan semua orang tanpa kecuali. Ketika para perwira dalam mengelola kekerasan gagal menciptakan keamanan umum maka ketidak amanan dengan segala akibatnya akan menimpa kepada siapa saja, bahkan sampai pada mengancam kedaulatan negara. Maka dari itu manakala para perwira menerapkan keahliannya secara serampangan --termasuk demi untuk mencari keuntungan pribadi-- akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan kedaulatan suatu negara.

Berbeda dengan profesi yang hanya menghasilkan barang privat (*private goods*), misalnya kesembuhan yang diproduksi oleh profesi dokter. Di samping memungkinkan terjadinya persaingan antar para pasien untuk mendapatkan manfaat pelayanan, suatu kesembuhan sebagai produk juga bisa diperkecualikan, yakni hanya bagi pasien yang berobat. Manakala terjadi malpraktek, yang menanggung akibat langsung juga hanya si pasien tersebut. Begitu juga jasa *lawyer* manakala terjadi malpraktek hanya *client* lah yang menanggung akibat langsung.

Dengan memperbandingkan profesi militer dengan dua profesi tersebut di atas, setidak-tidaknya, secara tidak langsung dapat disimpulkan betapa jauh lebih besar tanggung jawab sosial profesi militer dibandingkan profesi yang lain.

Untuk memperkuat argumen mengenai sangat besarnya tanggung jawab sosial perwira dapat juga dilihat dari tingkat campur tangan negara. Hampir untuk semua profesi, negara hanya bertindak sebatas membuat aturan dan mengawasi berlakunya aturan itu bagi badan ataupun anggota profesi. Namun untuk profesi militer ini negara bertindak lebih jauh: yaitu melakukan monopoli.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah: apakah perwira militer memiliki motivasi profesional? Menurut Huntington, motivasi profesional militer adalah bahwa ia tidak bertindak lantaran insentif ekonomi. Tingkah lakunya dalam menjalankan profesinya tidak diatur oleh imbalan ekonomis ataupun hukuman. Perwira bukanlah prajurit upahan, yang –seperti pemain bola profesional- bisa memindahkan jasa pelayanannya kepada pihak mana saja yang bisa memberi upah lebih menguntungkan. Juga bukan tentara suka-rela yang tindakannya terinspirasi oleh semangat juang dan patriotisme semata, tanpa ada upaya yang sistematis terencana untuk peningkatan dan penyempurnaan kemampuan diri secara terus menerus dalam hal keahlian mengelola kekerasan[50].

Motivasi seorang militer profesional didasari oleh adanya keyakinan akan adanya suatu nilai kebenaran serta rasa cinta terhadap pekerjaan, keahlian yang ia kuasai serta rasa memiliki tanggung jawab sosial untuk menggunakan ketrampilan itu demi kepentingan masyarakat luas. Di pihak lain masyarakat -- melalui agennya yaitu negara-- harus bisa menjamin bahwa motivasi seperti ini akan terus terpelihara dengan memberikan *honorarium* sebagai penghargaan atas pengorbanan mereka, baik pada saat sedang aktif bertugas maupun ketika ia sudah purna tugas kelak[51].

Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Huntington yang banyak dikutip di atas, Sarkesian berpendapat sebagai berikut:

> *"Professional military are motivated by a sense of service and responsibility to society. Military professionals are expected to be prepared to give their lives to serve the profession and the state"* [52].

[50] Huntington, ibid., hal.16.
[51] Huntington, ibid., hal. 12.
[52] Trevor N Dupuy, *International Military and Defense Encyclopedia*, Vol. 5, hal. 2194.

Bagi Sarkesian seorang militer profesional itu dimotivasi oleh rasa cinta dan panggilan jiwa akan pekerjaannya sebagai prajurit dan tanggung jawab kepada masyarakat. Mereka dengan suka rela siap mengabdikan diri selama hidupnya untuk profesinya itu dan untuk negara.

Ujian terhadap kemampuan profesional perwira adalah berupa penerapan pengetahuan dan keahlian teknisnya dalam konteks kehidupan masyarakat. Akan tetapi hal itu tidak cukup tanpa disertai dengan disiplin yang tinggi serta mematuhi kode etik yang ketat, mengingat keahliannya yang sangat berbahaya apabila disalah terapkan, maka seorang perwira memerlukan panduan baik yang bersifat etis normatif maupun hukum positif yang menjabarkan kewajiban dan tanggung jawabnya; baik terhadap teman-teman sejawat (sesama perwira), anak buah atau bawahan, serta negara yang dilayani. Oleh sebab itulah segala tingkah laku perwira sebagai prajurit profesional diatur dengan sekumpulan peraturan, kebiasaan, dan tradisi yang dirumuskan dalam bentuk kode etik perwira.

Disamping itu karena pada dasarnya penerapan keahliannya itu tidak diatur dengan instrumen ekonomis (bandingkan dengan pekerjaan profesional dalam arti untuk memperoleh uang), perilaku perwira dalam hubungannya dengan masyarakat dipandu oleh sebuah kesadaran bahwa keahliannya hanya dapat dipergunakan untuk maksud dan tujuan yang diizinkan oleh masyarakat melalui agennya yaitu negara. Jika tanggung jawab dokter adalah pada pasiennya, tanggung jawab pengacara pada kliennya, maka tanggung jawab perwira militer adalah terhadap negara[53].

[53] Huntington, ibid., hal. 13.

d. Rasa Kesejawatan (Corporateness)

Keperwiraan adalah merupakan profesi yang bersifat birokrasi[54] publik. Produk yang dihasilkan juga berupa barang publik *(public goods),* yaitu jasa keamanan umum. Pentingnya produk berupa jasa keamanan umum ini bagi masyarakat secara fungsional telah membuat muncul dan berkembangnya institusi dan pekerjaan keahlian yang kompleks. Hal itu membuat korps perwira berada dalam sebuah unit sosial yang eksklusif mandiri. Unit ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki pendidikan dan keterlatihan tertentu yang diwajibkan. Struktur kesatuan korps perwira tidak hanya meliputi birokrasi resmi, tetapi juga berupa lingkungan masyarakat yang ekskulusif, perkumpulan, lembaga pendidikan dan latihan, serta kebiasaan dan tradisi.

Para perwira biasanya tinggal dan bekerja terpisah dari lingkungan masyarakat yang lain, secara pisik dan sosial ia mungkin memiliki hubungan non-profesional yang sangat sedikit dibading dengan para profesional lainya. Batasan antara dirinya dan awam atau warga sipil secara umum dilambangkan dengan seragam, pangkat, dan tata cara hidup mereka[55].

Di samping merupakan profesi yang bersifat birokratis sebagaimana disinggung di atas, organisasinya yaitu korps perwira juga sekaligus sebagai organisasi yang bersifat birokratis pula. Dalam hal profesi yang birokratis,

---

[54] Birokrasi adalah suatu sistem hubungan kewenangan yang ditetapkan dengan kaedah-kaedah rasional. Birokrasi sebagai istilah pertama-tama dikenalkan oleh Vincent de Gournay, seorang fisiokrat Perancis, 1745. Untuk menggambarkan keadaan pemerintah Prusia. Ia semula mengandung makna hinaan terhadap bentuk pemerintahan dimana kekuasan terletak di tangan para pegawai. Istilah ini kemudian dikembangkan oleh Max Weber, (1864-1920) sebagai *"ideal type"* organisasi yang bekerja berdasarkan: (1) tugas diorganisasikan dengan kaedah-kaedah atau aturan, (2) spesialisasi dalam pembagian kerja atau tugas, (3) berjenjang, dalam arti terdapat hubungan atasan-bawahan, (4) semua keputusan didasarkan pada standar hukum dan teknis, (5) administrasi didasarkan pada arsip dan pencatatan, (6) adminisitrasi sebagai pekerjaan. (lebih lanjut lihat: Ralp C Chandler & Jack Plano, *The Public Administration Dictionary*, edisi II, ABC-Clio, Santa Barbara, Cal. 1988, hal. 168-169).

[55] Huntington, hal. 14.

tingkat kemampuan dibedakan dengan hirarkhi kepangkatan; sedang dalam hal organisasi yang birokratis tugas pekerjaan dibedakan dalam hirarkhi jabatan. Setiap pangkat yang disandang yang melekat pada pribadi perwira mencerminkan keberhasilan dan derajat keprofesionalan yang telah dicapai yang diukur berdasarkan pengalaman, senioritas, pendidikan dan kemampuan. Penentuan pangkat dan jabatan biasanya dilakukan oleh korps perwira itu sendiri.

Sifat pekerjaan profesi militer adalah tergolong "korporasional" sebagai lawan dari "asosiasional". Tingkat keberhasilan kinerjanya sangat ditentukan oleh kerjasama, kohesivitas dan solidaritas antar anggotanya. Dalam dunia militer tidak dikenal "bekerja sendirian". Karena itu satuan terkecil organisasi militer adalah bukan individu-individu, tetapi regu atau group (sekitar 7 sampai dengan 10 anggota) di mana dalam menjalankan pekerjaannya, mereka sangat tergantung satu sama lain.

Misalnya dalam dunia militer pasukan infanteri memiliki posisi khusus. Hal itu tercermin dalam sebutannya sebagai *"the queen of the battle"* (ratu pertempuran) atau petempur utama *(main combatant)*. Karena salah satu bukti kemenangan dalam sebuah pertempuran adalah apabila daerah musuh sudah dikuasai oleh satuan infanteri ini. Kendati begitu di medan pertempuran pasukan infanteri sangat tergantung adanya kerjasama antar satuan *combat support* yang lain yaitu satuan artileri, kavaleri, dan zeni tempur di samping unsur kekuatan administrasi seperti perbekalan, angkutan, komunikasi, medis, zeni konstruksi dlsb. Ikhwal kerjasama dan saling ketergantungan dalam pekerjaan militer ini sangat penting karena bukan hanya berkenaan dengan masalah kegagalan-keberhasilan sebuah tugas semata tetapi juga menyangkut hidup-mati. Oleh sebab

itu profesi militer –jika dibandingkan dengan profesi lain- lebih sangat memerlukan kuatnya rasa kesejawatan atau *"Esprit de corp"* yaitu perasaan setia dan bela teman serta saling menghormati antar anggota kesatuan[56].

Berbeda halnya dengan profesi yang bersifat "asosiasional" dimana hasil pekerjaan lebih ditentukan oleh capaian kerja orang perorang. Dokter misalnya, dalam melayani pasien bisa -bahkan kadang harus- sendirian. Ketika itu kerjasama antar sejawat relatif tidak diperlukan. Demikian pula kebutuhan akan saling ketergantungan relatif kecil. Kerjasama memang kadang diperlukan namun itu sangat jarang. Oleh sebab itu organisasi perwira lebih tepat disebut "korps perwira" sebaliknya organisasi dokter lebih tepat disebut "asosiasi dokter" atau ikatan dokter.

2. *Kekerasan, Militer dan Negara*

Apabila dicermati kembali uraian mengenai definisi profesionalisme militer tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pengguaan kekerasan, militer dan negara. Untuk itu pada bagian tulisan berikut ini akan menyingkap asal muasal keterkaitan tersebut dengan memaparkan beberapa thesis yang diajukan oleh para pemikir awal seperti John Locke, Engels dan Max Weber, dan pemikir terkemudian seperti Althusser dan Alfred Stepan. Max Weber (1864-1920) antara lain menyatakan bahwa "memonopoli atas penggunaan kekerasan yang sah", adalah merupakan bagian dari definisi negara modern[57]. Dengan demikian, pada dasarnya adalah hak negara untuk menggunakan kekerasan terhadap warganya ataupun terhadap siapa pun dikarenakan sebab-sebab dan alasan tertentu. Dalam kaitan ini keberadaan militer boleh dikatakan merupakan

[56] Lihat: Peter Salim, *Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, 2000.
[57] Alfred Stepan, Militer dan Demokrasi, Jakarta: Grafiti Pers, 1996, hal.1.

konsekuensi dari kebutuhan negara akan perangkat kekerasan *(coercive apparatus)* tersebut, dan oleh karenanya militer itu adalah institusi yang menjalankan tugas negara dalam hal pengelolaan kekerasan *(Management of violence in the service of the state)*[58].

Sedang menurut pemikir Marxis yaitu Friedrich Engels (1820-1895) munculnya negara dengan *repressive apparatus*-nya adalah suatu keterpaksaan, karena adanya kepentingan-kepentingan kelas ekonomi di masyarakat yang saling berlawanan yang memunculkan organisasi-organisasi bersenjata yang bertindak sendiri-sendiri[59]. Argumen tersebut diperkeras oleh ilmuwan Marxis terkemudian yaitu Louis Althusser (1918-1990), menurutnya negara itu pada dasarnya adalah mesin penindas yang menjamin kelas penguasa dapat tetap mempertahankan dominasinya atas klas pekerja *(The State is a "machine" of repression, which enables the ruling classes to ensure their domination over the working class).* Untuk memenuhi hajat itu maka negara merekrut dua jenis apparatus yaitu *Repressive State Apparatus* (RSA), dan *Ideological State Apparatus* (ISA)[60]. Termasuk di dalam RSA ini adalah militer dan juga polisi.

Sebagaimana thesis yang dikemukakan oleh Althusser di atas, maka bisa jadi kekuasaan absolut negara untuk mengatur masyarakat dengan kekerasan hasilnya tidak seperti sebagaimana yang diinginkan. Bahkan bisa sebaliknya, kemungkinan terjadi apa yang disebut *"state abuse"* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara

---

[58] Sam C. Sarkesian, *"Military Professionalism"*, dalam Trevor N. Dupuy, *International Military and Defense Encyclopedia*, Brassey's (US) Inc., Th. 1993, hal 2193-97

[59] W.I Lenin, (Sulang Sahun, penerjemah), *Negara dan Revolusi,* penerbit: FUSPAD, 2000, ibid., hal. 10.

[60] Althusser, Louis. *"Lenin and Philosophy" and Other Essays*. London: New Left Books, Th. 1977., Hal. 137.

dengan memperalat militer untuk -atau militer itu sendiri- melakukan tindak kekerasan.

Tentu apabila hal itu dilakukan akan jauh lebih berbahaya dibanding seandainya dilakukan oleh pihak warga biasa, mengingat militer sudah semestinya mahir dan sekaligus menguasai segala alat-alat kekerasan. Jenis penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit sudah banyak tercatat dalam sejarah peradaban kuno hingga zaman modern. Pada zaman Yunani misalnya dikenal praktek pretorianisme, sedang zaman modern dikenal praktek fasisme di Italia dan Jepang. Dengan demikian dalam relasi militer dan negara tampak akan adanya kemungkinan kelemahan yang sangat berbahaya bagi kepentingan masyarakat luas, oleh sebab itu muncul gagasan apa yang disebut *civil society.*

2. *Profesionalisme Militer dan Civil Society*

Persoalan lebih lanjut dalam kaitannya dengan *civil society* adalah tumbuhnya profesionalisme militer sebagai respon terhadap *civil society*, dan posisi militer dalam tatanan *civil society.*

Mengenai yang pertama, yaitu pertumbuhan profesionalisme militer, pandangan Hutington bertitik tolak dari sejarah Eropa. Ia menyatakan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, militer sebagai alat negara tidak serta merta mengadopsi nilai-nilai profesionalisme. Sebelum itu terlebih dahulu ia mengalami metamorfosis di lingkungan internalnya, yaitu terjadinya perubahan fungsi korps perwira militer, yang semula sebagai tentara sewaan, kemudian berubah menjadi *warrior* (pejuang) dan lantas berubah menjadi kelompok elite *profesional*[61].

[61] Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-Military Relation,* Cambridge: Harvard University Press, 1998, hal. 47.

Meskipun banyak militer di kawasan Eropa telah memberlakukan unsur-unsur profesional sejak awal abad 17, (misalnya dengan munculnya ahli teknik dan ahli artileri) namun konsep militer profesional baru benar-benar menjadi fenomena adalah pada masa pasca perang dunia II. Sebelum itu tentara angkatan darat sangat tergantung pada besar-kecilnya jumlah personil untuk mengisi kekuatan di berbagai jajaran mereka dengan tidak mempedulikan keahlian yang dimiliki oleh mereka. Setelah itu besar-kecilnya jumlah personil diganti dengan pembagian kedalam berbagai cabang keahlian yang diperlukan dalam perang.

Di kalangan Angkatan Laut mulai mencari nilai-nilai profesional karena mereka mulai menyadari pentingnya kemahiran sebagai pelaut dan berbagai keahlian lain yang dibutuhkan sesuai "sub-kultur" kapal seiring dengan berkembangnya jenis-jenis kapal. Sementara itu Angkatan udara pada abad 20 juga menetapkan nilai-nilai profesional didasarkan yang didasarkan pada tuntutan akan tugas para awak penerbangan maupun personel di pangkalan udara yang semua itu membutuhkan latihan yang ekstensif.

Mengenai yang kedua, yaitu institusi dan perwira militer sebagai *coercieve apparatus,* John Locke (1632-1704) menganggap kedua-duanya tidak berada dalam posisi superior dalam kaitannya dengan fungsi negara. Sebab, menurut Locke, berbeda dengan pandangan Weber, fungsi utama negara adalah bukan dalam hal memonopoli penggunaan kekerasan melainkan lebih sebagai pelindung hak-hak asasi manusia. Pandangan Locke inilah yang sedikit banyak telah mempengaruhi munculnya gagasan *Civil Society.*

Adapun hak-hak asasi yang dimaksud Locke adalah meliputi: (1) hak untuk hidup, (2) hak kebebasan dan (3) hak kepemilikan. Jika negara gagal melindungi

hak-hak asasi manusia tersebut maka rakyat berhak untuk menjatuhkan negara itu. Guna menjamin terlindungi hak-hak asasi tersebut maka hukum harus di tempatkan di atas segalanya[62].

Dalam hal hubungan antara *Political Society* dan *Civil Society,* Arief Budiman memperkuat pandangan Locke:

> *"... Civil Society is not the same as Natural Society. It is more than Natural Society. Neither is it a Political Society, because it is not a state with power over the society. It is a society with basic rights. Civil society is where the power of the state ends. The task of the state, according to this concept, is to replace natural society and to protect sivil society"*[63].

Menurut Arief Budiman *civil society* tidak sama dengan *natural society.* Ia lebih dari sekedar *natural society.* Tapi juga bukan *political society,* karena dalam *civil society* negara dengan kekuasaannya tidak berada di atas masyarakat. Ia adalah masyarakat dengan hak-hak asasinya. *Civil society* adalah saat berakhirnya kekuasaan negara. Tugas Negara, menurut konsep ini adalah menggantikan *natural society* sekaligus melindungi *civil society.*

Kalau kritik dan koreksi atas paradigma *political society* sudah sangat gencar, sebaliknya tidak demikian halnya terhadap paradigma *civil society.* Ada kesan umum yang cenderung mengangap bahwa *civil society* adalah pilihan paradigma tatanan sosial yang paling sempurna. Seakan keberadaannya adalah tanpa cacat serta tidak adanya kemungkinan terjadinya *"society abuse".* Tapi benarkah demikian? Kalau kemungkinan itu ada lantas bagaimana formula tentang, bahwa *political society* itu menggantikan *natural society* sekaligus melindungi *civil society?*

---

[62] Arief Budiman, loc.cit.

[63] Ibid., hal. 3. Sekedar catatan, Arief Budiman mengadopsi gagasan Thomas Hobes dalam membuat katagori mengenai tiga karakteristik *social order,* yaitu *Natural Society, Political Society* dan *Civil Society*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan mengikuti jalan pikiran Satjipto Rahardjo mengenai *civil society* dengan bertolak dari konsep dasar yang memisahkan antara negara dan masyarakat. Menurutnya, konsep ini menolak gagasan integralistik, di mana masyarakat sepenuhnya ditelan oleh negara.

> "Menyatukan negara dengan masyarakat untuk kemudian masyarakat ditelan oleh negara adalah pencerminan dari penggunaan paradigma kekuasaan, yaitu pemerintahan otoriter, sentralistik, tidak mentolerir perbedaan pendapat dan kekuatan-kekuatan serta wilayah-wilayah otonom lain dalam masyarakat. Dalam masyarakat warga [*civil society*], kekuatan-kekuatan dalam masyarakat diterima sebagai kenyataan dan diperlukan juga untuk menggerakkan jalannya mesin kehidupan sosial. Oleh karena itu menerima kehadiran wilayah kekuasaan dan kekuatan lain di dalam negara merupakan ciri penting dari masyarakat warga"[64].

Apa yang dikemukakan Satjipto mungkin benar bahwa dalam perspektif integralisme telah terjadi kecenderungan kuat negara "menelan"masyarakat, namun di dalam *civil society* sangat mungkin terjadi yang sebaliknya yaitu masyarakat "menelan" negara. Bila itu terjadi maka negara akan mengalami deligitimasi, tidak berdaya untuk menjalankan fungsinya. Padahal, bagaimanapun, di dalam *civil society,* kehadiran negara dengan kekuasan dan kekuatannya juga tetap dibutuhkan. Kalau menurut Satjipto manakala negara menelan masyarakat maka yang terjadi adalah pemerintahan otoriter sentralistik, maka demikian pula sebaliknya, apabila masyarakat "menelan" negara yang terjadi adalah praktrek anarkhi dan mobokratik. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut, diperlukan adanya sebuah paradigma masyarakat-negara dalam keseimbangan *(in-equilibrium state-society)* yang intinya di dalam masyarakat harus ada unsur yang secara dinamis menjaga keseimbangan berlakunya kekuasaan, fungsi dan peran negara di satu pihak dan kekuasaan, fungsi dan peran masyarakat di pihak yang lain. Dan *in-equilibrium state-society* ini adalah hakekat demokrasi partisipatif, yaitu demokrasi yang bukan hanya

---

[64] Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Indonsia,* Jakarta: Penerbit Kompas, 2002, hal. 45-46.

diukur dari kuantitas penggunaan suara, akan tetapi lebih ditekankan pada kualitas peran serta langsung dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai urusan sehari-hari atau "*day to day politics*".

2. *Cakupan Wilayah Tugas Militer: "Old Profession" dan "New Profession"*

Mengenai cakupan wilayah tugas militer, agaknya masalah inilah yang menjadi perdebatan yang sangat rumit. Sebagaimana telah dibahas terdahulu bahwa pekerjaan pokok perwira sebagai profesional militer adalah dalam bidang pengelolaan kekerasan. Produk pokok dari pekerjaan tersebut adalah keamanan umum. Namun tidak semua keamanan umum itu adalah merupakan produk dari pengelolaan kekerasan. Paling tidak hal itu dikemukakan oleh Huntington dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan di bidang keamanan. Huntington membagi jenis keamanan ke dalam tiga katagori yaitu; (1) keamanan militer *(military security)*, (2) keamanan internal *(internal security)*, dan (3) keamanan situasional *(situational security)*[65].

Pertama, keamanan militer meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk mengurangi atau menetralkan berbagai usaha yang akan melemahkan atau menghancurkan negara dengan menggunakan kekuatan senjata yang dioperasikan dari luar batas-batas institusional dan teritorialnya.

Kedua, keamanan internal yaitu kegiatan yang berhubungan dengan upaya menetralkan ancaman subversi, yaitu usaha untuk melemahkan atau menghancurkan negara dengan berbagai kekuatan yang dioperasikan di dalam batas-batas institusional dan teritorial negara itu.

[65] Huntington, hal. ix.

Ketiga, keamanan situasional adalah menyangkut ancaman penghancuran yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu sebagai akibat dari adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan politik dengan cara menggerogoti dan merongrong kekuatan negara.

Dengan mengetengahkan tiga katagori tersebut secara implisit Huntington membatasi wilayah tugas pokok militer adalah hanya terbatas pada "keamanan militer" *(military security)* saja. Yaitu menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi ancaman keamanan yang berasal dari luar atau ancaman dari negara merdeka yang lain. Pandangan ini jelas beda dengan mereka yang berkeyakinan bahwa munculnya militer sebagai aparatur negara adalah pertama-tama memiliki tugas domestik, yaitu menciptakan keamanan umum dengan cara mengatasi, memonopoli dan menetralisasi kekerasan yang ada di masyarakat baik secara individu maupun bersama. Pandangan semacam itu antara lain dikemukakan Anthony Giddens.[66]

Menurut Giddens, negara dan kekerasan memiliki hubungan yang sangat intim. Namun berdasar pada teori-teori sosial klasik, hubungan negara dengan kekerasan itu hanya terbatas sebagai masalah sosial yang bersifat internal dan terkait dengan memelihara ketertiban sosial. Kekerasan dengan berbagai maknanya jarang sekali dikaitkan dengan soal peperangan ataupun hubungan antar negara-negara secara lebih luas.

Lebih lanjut Giddens melihat bahwa perjuangan klas, perkembangan kekuatan produksi, pembagian kerja, penyebaran penduduk dan agama dikonseptualisasikannya sebagai motor terjadinya transformasi penggunaan

[66] Geoff Boucher, *The Nation State and Violence,* Blackwood Project, 2001, hal.1-5.

kekerasan internal dalam masyarakat. Adapun mengenai pentingnya pengkajian peperangan antar negara atau ataupun hubungan antar negara yang lebih umum, baik berupa kerjasama ataupun konflik sering diabaikan. Begitu juga halnya tentang perkembangan militer dalam proses modernitas. Menurut Giddens, untuk merubah fungsi dan peran domestik militer sebagai alat kekerasan negara itu perlu rekonseptualisasi agar masyarakat tidak terus-menerus dikonseptualisasikan sebagai entitas yang tertutup. Untuk merubah semua itu diperlukan konsep baru tentang negara, termasuk di dalamnya tentang makna kekerasan.

Sekalipun Giddens mengkritik teori-teori klasik yang *inward looking* dalam masalah ini, namun bagaimanapun ia melihat bahwa peranan keamanan yang bersifat eksternal adalah bukan asal-muasal tugas militer, dan jika pada akhirnya tugas itu harus dibebankan kepadanya maka juga dimungkinkan akan adanya bagian tugas militer di dalam memproduksi keamaan dalam arti yang lebih luas termasuk keamanan internal dan keamanan situasional. Hal ini beda dengan Huntington yang memposisikan militer hanya memproduksi keamanan militer yang bersifat eksternal. Sungguh pun demikian Giddens menekankan bahwa fenomena semacam itu biasanya terjadi terutama pada negara pra-modern *(pre-modern state)* dengan ciri: (1) meningkatnya pengawasan dan pengendalian oleh kekuatan negara, (2) monopoli penggunaan kekerasan melalui kontrol oleh tentara dan polisi, (3) intensifikasi industrialisasi yang kadang disubsidi oleh negara dan (4) meluasnya kapitalisme[67].

Persoalan yang paling rumit dalam membahasan peran atau cakupan wilayah tugas militer di bidang keamanan adalah pada wilayah keamanan situasional, yaitu keamanan yang berkaitan dengan ancaman penghancuran masyarakat atau negara

[67] Geoff Boucher, ibid., hal. 3-4.

yang diakibatkan oleh perubahan jangka panjang dibidang sosial, ekonomi, demografi dan politik. Dalam hal ini secara lebih khusus terutama adalah keterlibatan militer dalam politik, dengan asumsi bahwa di antara tiga elemen dalam sistem keamanan situasional yaitu sosial, ekonomi dan politik, maka elemen politik lah yang paling diterminan sebagai faktor ubahan.

Pertanyaan yang timbul adalah: Apakah –dalam upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan keamanan situasional- kehadiran peran militer, khususnya di bidang politik dibolehkan? Secara garis besar ada dua pendapat yang berbeda di antara para ahli. Pendapat pertama dianggap mewakili pandangan "profesionalisme militer lama" atau klasik, yaitu terutama pandangan yang digagas oleh Samuel P. Huntington dan beberapa ilmuwan pendukungnya. Sedangkan pandangan yang kedua pendapat yang dianggap mewakili pandangan "profesionalisme militer baru" yang dilontarkan oleh para ilmuwan militer yang umumnya diilhami oleh fenomena militer di negara-negara sedang berkembang, dan non-Barat. Di mana profesionalisme militer Barat oleh Sarkesian dilukiskan memiliki dua karakteristik tambahan yaitu orientasi eksternal, dan pemisahan dari lingkaran pembuatan kebijakan dan politik domestik.

> *"Western military professionalism is also characterized by two additional factors: external orientation, and separation from policymaking circles and domestic politics"*[68].

Berikut ini adalah argumen Huntington mengapa menolak peran militer di luar tugas keamanan militer (eksternal). Ia menyatakan bahwa syarat agar korps militer menjadi profesional adalah: *pertama*, adanya spesialisasi fungsi dan pembagian kerja. Sebab, adalah tidak mungkin menjadi seorang yang ahli dalam bidang pengelolaan

[68] Ibid., hal. 2195.

kekerasan (militer) untuk pertahanan dan pada saat yang bersamaan ahli dalam bidang politik dan kenegaraan atau keamanan dalam negeri. Merujuk pada pendapat tersebut, secara tidak langsung ia menyatakan bahwa korps militer akan profesional apabila hanya menjalankan satu peran yang spesial, yaitu hanya dipertahanan negara atau keamanan militer dan tidak ditambah dengan fungsi lain. Bahkan dengan tegas ia katakan apabila militer dibiarkan ikut campur dalam dunia politik, akan menyebabkan *"political decay"*.

Kedua, keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan. Seorang perwira yang profesional dikaruniai kekuatan pemikiran untuk melayani negara. Dalam prakteknya, ia harus setia pada satu institusi tertentu yang pada umumnya diterima sebagai perwujudan dari otoritas suatu bangsa. Ketika ada otoritas-otoritas yang saling bersaing dan militer menjadi bagian dari salah satu pihak, atau terpecah ke beberapa pihak, atau bahkan ke semua pihak, maka profesionalisme akan menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, dalam profesionalisme militer perlu ditiadakan perselisihan antar pihak dan konflik politis, sebagai langkah pencegahan agar otoritas yang saling bersaing tidak memaksakan diri untuk membangun kekuatan militer, atau kemungkinan terjadi penyaluran pengaruh politik kedalam militer dilakukan melalui beberapa lembaga formal pemerintahan. Singkatnya, argumen di atas menekankan bahwa agar korps militer dan personilnya menjadi profesional maka mereka harus bersikap netral dalam politik dan tidak memihak pihak-pihak tertentu.

Ketiga, terkait dengan pertumbuhan negara-bangsa, sebagai bagian dari birokrasi negara, korps perwira hanya bisa dipertahankan oleh lingkungan masyarakat yang memiliki badan pemerintahan yang maju. Pendapat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa korps militer akan lebih profesional bila berada dalam pemerintahan

yang maju dengan asumsi dalam negara yang maju dan modern akan tersedia anggaran yang cukup untuk militer baik untuk pengadaan peralatan, pelatihan ataupun meningkatan kesejahteraan personilnya.

Keempat, bangkitnya berbagai pemikiran dan partai-partai demokratis, dimana ide demokrasi itu sendiri pada dasarnya merupakan sistem untuk mengorganisasikan institusi-institusi politik. Namun, sering para pendukungnya berusaha membentuk institusi-institusi militeristis atau menarik elemen militer ke dalamnya. Oleh karena itu, korps militer jangan sampai menjadi sebuah partai politik, bertujuan politik, dan menjadi bagian partai politik tertentu. Selain itu, personilnya juga tidak boleh menjadi anggota partai politik atau mendukung partai tertentu.

Di antara pendukung pandangan profesionalisme militer lama adalah Morris Janowitz. Sama-sama pendukung pandangan profesionalisme militer lama, dalam banyak hal antara Huntington dan Janowitz memang memiliki pandangan yang sama, namun juga terdapat beberapa perbedaan.

Dalam masalah tugas pokok, bahwa militer itu memiliki tugas utama sebagai kekuatan pertahanan-keamanan eksternal, Janowitz sependapat dengan Huntington. Perbedaan mereka berdua tampak dalam mensikapi masalah otonomi profesional dengan merujuk pada definisi misi dan kontrol sipil atas militer. Huntington berpendapat bahwa efektifitas militer dapat terjamin hanya melalui otonomi profesional dan bahwa pemerkosaan terhadap otonomi itu akan merugikan nilai-nilai kebebasan pemerintah sipil dan membahayakan efektivitas militer. Menurut Huntington, keahlian tentara profesional adalah bertempur dalam peperangan. Profesionalisme itu akan terganggu dengan adanya pemberlakuan nilai-nilai sipil pada militer.

Sebaliknya, Janowitz tidak melihat adanya keharusan membatasi sama sekali pengaruh nilai-nilai sipil terhadap otonomi profesional militer. Militer dewasa ini tidak berada dalam pilihan dikotomis antara aktivitas perdamaian dan peperangan. Militer lebih merupakan instrumen hubungan internasional, dimana pembedaan antara masa damai dan perang, antara aktivitas politik dan militer kian sulit untuk dipisah-pisahkan[69].

Menurut Janowitz, karena militer kian terlibat jauh kedalam pengambilan kebijakan di dalam pemerintahan sipil, membuat keahlian militer sebagai tentara professional juga harus diperlengkapi dengan peningkatan sensitifitas politik. Perubahan definisi mengenai misi penugasan ini menjadi penghalang bagi pandangan bahwa militer itu adalah hanya ahli bertempur dalam perang. Kenyataan tersebut berpadu dengan peningkatan birokratisasi dalam tubuh organisasi militer. Kedua faktor tersebut menjadi penghalang bagi otonomi profesi militer sebagaimana yang dimaksud Huntington.

Pandangan senada dengan Janowitz adalah berasal dari Sarkesian. Menurut Sarkesian bahwa profesi militer pada saat ini merupakan kombinasi antara elemen-elemen profesional militer klasik dengan pandangan yang lebih realistis akan adanya hubungan militer dengan sistem politik. Konsep profesi militer menjadi lebih rumit daripada pandangan klasik yang hanya mengaitkannya dengan pengelolaan kekerasan dalam menjalankan tugas negara. Kerumitan itu tampak misalnya dalam masalahmkeamanan lingkungan nuklir yang harus diatasi dengan lebih mengedepankan pada upaya penangkalan dan pencegahan konflik. Dengan demikian dalam semua sistem, profesi militer itu memiliki dimensi politik.

[69] Ibid., hal. 3.

"The concept of today's military profession combines these classic elements with a realistic view of the military's relationship to the political system. The concept of military profession is more complex than the classic view that it is the management of violence in the service of the state. From the complexities of the nuclear security environment with its emphasis on deterrence and prevention of conflict, the military profession in all systems has a political dimension"[70].

Pendapat tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat Janowitz, yang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan profesionalisme militer yang harus diperhatikan adalah keberadaan militer di bidang politik. Tidak menampik kemungkinan bahwa pemerintahan militer akan menolak memberlakukan kembali pemerintahan sipil dan akan lebih memilih tetap memerintah dengan lebih menggunakan paksaan ketimbang atas dasar keabsahan[71].

Pandangan Huntington tersebut kontras dengan para ilmuwan yang memiliki pandangan profesionalisme militer baru. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat antara lain: Yazid Syaigh, Amos Perlmutter, Eric A. Nodlinger.

Yazid Syaigh, misalnya, dalam bukunya yang berjudul "*Confronting the 1990's: Security in the Developing Contries*",[72] jelas-jelas memberi ruang yang luas bagi peran para militer profesional ini. Ia menyatakan bahwa keahlian militer profesional mencakup juga: kemampuan memelihara kelangsungan kehidupan teritorial dan politik, kelangsungan kehidupan penduduk, penciptaan prakondisi untuk mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi, dan melihara keharmonisan hubungan antar komunitas.

Menurut Perlmutter di samping ciri-ciri yang ada sebagaimana telah dikupas dibagian terdahulu, ia berpendapat bahwa militer profesional juga dimungkinkan

---

[70] Dupuy, Trevor N, *International Military and Defense Encyclopedia*, Vol 5.p.2197

[71] M. Janowitz, *Military Institutions and Coercion in the Developing Nations*, (Chicago and London: University of Chicago Press, 1977)

[72] Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di Peter Britton, *Profesionalisme dan IdeologiMiliter Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1996).

mempunyai orientasi politik tertentu. Karena bagaimanapun posisi militer yang sedemikian rupa menyebabkan ia mempunyai titik singgung atau berhubungan secara erat dengan *'policy formation"*,[73] terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan nasional. Pada tataran pembuatan kebijakan ini berkaitan dengan masalah sampai sejauh mana rekomendasi dari militer mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan nasional dipakai. Sehingga meminjam konsep Perlmutter ini, militer profesional adalah militer yang tidak steril dari urusan politik. Artinya, militer masih mempunyai ruang untuk bersinggungan dengan wilayah politik.

Sama dengan Perlmutter, Eric A. Nodlinger, melihat kemungkinan adanya peran politik yang dimainkan oleh korps perwira. Dalam hal ini Nodlinger membagi kedalam tiga kategori peran yaitu apa yang dia sebut sebagai; *moderator, guardians,* dan *rulers.*

Militer berkarakter *moderator* adalah keadaan manakala hubungan antara militer dan sipil sangat cair. Bidang politik dan pemerintahan dipegang oleh sipil yang mempunyai patron atau *back-up* dari militer. *Guardians* mengacu pada peran militer sebagai pengawal dan pengawas jalannya pemerintahan. Militer terlibat dalam bidang politik hanya pada tataran yang makro-strategis. Sedang kategori *rulers* adalah keadaan ketika militer menguasai semua bidang kehidupan, terutama pada bidang politik. Dalam konteks yang terakhir inilah terjadi apa yang disebut sebagai rejim militer[74].

---

[73] Dr. Burhan D. Magenda, dalam Kata Pengantar buku Amos Perlmutter; 2000, hal. xi-xii

[74]Dalam hal dua peran terakhir ini yaitu sebagai *guardians* dan *rulers* Salim Said membahasakan dengan istilah "P" besar manakala militer berperan dalam bidang politik namun tidak terlibat langsung dalam tataran mikro-teknis, sedang "p" kecil untuk yang sebaliknya yaitu manakala militer terlibat pada tataran politik praktis atau *day to day politics*. Lebih lanjut lihat Salim Said, *Wawancara Tentang Tentara dan politik,* Pustaka Sinar narapan, 2001, hal. 30-31

Di samping itu ada beberapa ilmuwan militer yang melihat kemungkinan keterlibatan militer dalam politik dengan kondisi-kondisi yang lain. Antara lain Alfred Stepan, Claude E. Welch.

Alfred Stepan[75], mengajukan thesis berdasar penelitiannya tentang peranan politik militer di Brazil dikaitkan dengan proses demokratisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban, apakah keterlibatan militer didalam politik dapat mendorong terjadinya proses demokratisasi? Khususnya bagi negara-negara yang sedang membangun sistem politik yang lebih demokratis? Dalam hasil penelitiannya Stepan mengelompokkan militer kedalam tiga kategori: militer sebagai pemerintah, militer sebagai lembaga, dan militer sebagai komunitas profesional keamanan.

Menurut Stepan, peran politik militer kecil kemungkinan mendorong kearah berlakunya sistem politik yang lebih demokratis manakala di dalam militer didominasi kelompok perwira yang mempersepsi dirinya sebagai pemerintah; sedang sistem politik yang lebih demokratis masih mungkin bisa tercapai dengan keterlibatan militer manakala kelompok perwira yang dominan adalah perwira-perwira lebih menghargai fungsi institusi militer, terutama dalam kaitannya dengan fungsi lembaga-lembaga lain di dalam sistem pemerintahan; sedangkan sistem politik yang demokratis mudah tercapai manakala keterlibatan kaum perwira dalam peran politiknya lebih memposisikan dan memerankan diri sebagai sebuah komunitas atau kelompok profesional. Yaitu komunitas keamanan sebagaimana halnya dan setara dengan komunitas-komunitas profesional yang lain di dalam arena *civil society.*

---

[75] Alfred Stepan, *Militer dan Demokratisasi, Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara Lain*, Jakarta: Grafiti, th. 1996, hal. 13-16

Perlu dijelaskan di sini Stepan mengintrodusir istilah *civil society, political society* dan *state,* di mana *civil society* dan *political society* dimaknai sebagai arena, - di tempat mana warga masyarakat dalam bernegara melakukan suatu kiprah tertentu. *Civil society* menurut Stepan adalah arena berkiprahnya berbagai gerakan sosial seperti kelompok keagamaan, kelompok wanita, organisasi sipil semua kelas, termasuk kelompok-kelompok profesional, di mana mereka dapat mengekspresikan diri dan memajukan kepentingan-kepentingannya. Sedangkan *political society* adalah arena tempat berkiprahnya warga masyarakat dalam bernegara yang secara khusus melibatkan diri dalam kontestasi politik guna memperoleh kendali atas kekuasaan pemerintahan dan aparatur negara.

Adapun *state* oleh Stepan dimaknai bukan sekedar pemerintah, melainkan suatu sistem administratif, legal, birokratis dan memaksa yang berkesinambungan, peranannya tidak hanya mengelola aparat negara tetapi juga menyusun hubungan "antara" kekuasaan sipil dan pemerintah, serta menyusun tata hubungan "dalam" *political society* maupun *civil society.*

Claude E. Welch melihat campur tangan militer dalam politik bersifat kondisional. Menurut Welch, terjadi tidaknya ditentukan oleh bersedia tidaknya para perwira dan anggota militer mengakui keunggulan pemerintahan sipil bagaimanapun keadaan pemerintahan sipil itu. Welch menyebutkan terdapat 8 (delapan) faktor pendorong keterlibatan militer di ranah politik --yang tidak menutup kemungkinan sampai pada titik ektrim, yaitu kudeta[76]. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) kemerosotan legitimasi partai politik, (2) perpecahan diantara politisi terkemuka, (3) terbatasnya kemungkinan campur tangan pihak luar, (4) penularan, (5) kondisi sosial

[76] M. Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik, CV. H.* Masagung, 1986, hal. 46-47. Salim Said menggambarkan hal yang sama dalam konteks Indonesia dalam buku *Genesis*of *Power,* Pustaka sinar Harapan, 1993, hal. 101

yang tidak stabil, (6) korupsi yang merajalela, (7) kemacetan suksesi, (8) kesadaran, militer akan kekuatan yang dimiliki.

Di samping ada yang menganggap bahwa keterlibatan militer dalam politik, juga ada yang melihat hal itu sebagai kecenderungan mutakhir militer sebagai akibat perubahan konflik militer berskala global. Louis W. Goodman[77] misalnya melihat bahwa setelah Perang Dunia II, dan perang dingin berlalu, militer yang terlatih dengan baik, dapat digunakan untuk tujuan non-militer[78]. Akan tetapi peran itu tetap mendukung kontrol sipil dan menghargai hak asasi manusia dan aturan hukum. Dengan kata lain, peran baru militer harus dilaksanakan dalam rangka mendukung otoritas sipil[79]. Presiden Clinton dalam menjelaskan peran baru militer saat ini, mengatakan bahwa: militer harus berperan sebagai penengah konflik etnis; pengawas pengembang-biakan senjata pemusnah massal; pengawas terhadap degradasi lingkungan hidup; dan penolong utama dalam menanggulangi bencana alam.

Akademi Militer Amerika serikat juga melatih banyak insinyur dari kalangan militer, untuk melaksanakan tugas-tugas non-militer, seperti membangun terusan Panama, dan bertanggung jawab atas kerja publik dan pembangunan, memelihara pengairan bagi ibu kota negara, dan mengawasi korps konservasi sipil.

Militer Amerika Serikat juga membantu perkembangan ekonomi nasional misalnya dengan melakukan eksplorasi dan survei, membangun jalan, bendungan,

---

[77] Louis W. Goodman, "Peran Militer di Masa Lalu dan Sekarang," dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner (eds), *Hubungan Sipil-Militer*... hal 44-68.

[78] Di Pakistan militer terlibat aktif dalam pembangunan jalan dan konstruksi bendungan. Di Cote d'Ivoire dan beberap negara di Afrika, militer melatih penduduk sipil untuk bekerja di sektor pertanian dan industri. Di Chili Kolombia, Peru dan beberapa negara Amerika Latin, militer terlibat secara ekstensif dalam pelatihan pertanian, pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan berbagai bentuk kegiatan sipil lainnya. Lihat Morris Janowits, *The Military in the Political Development of New Nations* (Chicago: University Press, 1964), bab 3.

[79] Peran baru militer Amerika Serikat terutama wilayah selatan dan di beberapa negara Amerika Latin, yaitu memerangi perdagangan obat bius dan terorisme sebagai ancaman transnasional yang sangat berbahaya.

dan saluran air. Mereka juga berperan aktif dalam eksplorasi dan penelitian ilmu pengetahuan; kapal-kapalnya melakukan survei di seluruh perairan di muka bumi, mengeksplorasi Amazon, memasang kabel, dan mengumpulkan spesies dan data dari seluruh dunia untuk kepentingan ilmu pengetahuan[80]. Sepanjang abad kesembilan belas, angkatan laut juga berperan dalam mengamankan perdagangan budak, menangani pemogokan dan kekerasan yang dilakukan oleh buruh. Prajurit Amerika juga sering dipanggil untuk memadamkan kerusuhan di wilayah urban, memberi pertolongan di wilayah yang terlanda banjir, gempa bumi, angin ribut, atau badai. Di luar negeri memerangi penyakit, kelaparan, dan buta huruf, mengorganisasikan pemilihan umum, mempromosikan demokrasi, memelihra atau penjaga perdamaian dan kemanusiaan, serta membantu program luar angkasa[81].

Militer Amerika serikat, sebagai kiblat profesionalisme militer dalam melakukan *civic missions,* sebagai peran non-tempur[82] tidak membuat mereka tergoda untuk melakukan intervensi di bidang politik atau mengurangi kemampuan militer untuk mempertahankan negara dari serangan pihak luar. Hal ini jauh berbeda dengan militer Indonesia di masa-masa pemerintahan Orde Baru (1965-1998) yang peranan *civic missions* ini malah diperluas dan disatukan dengan tugas pertahanan sehingga tampak bahwa militer Indonesia tidak bisa terlepas dari godaan untuk secara formal memiliki peran sosial-politik[83].

---

[80] Untuk diskusi yang mendalam mengenai peran non-tempur yang dilakukan oleh militer AS, lihat Edward B. Glick, *Peacefull Conflict: The Non-Militery Use of the Military* (Harrisburg, Pa: Stackpole Books, 1967) Bab 3-4.

[81] James R. Graham, (eds), *Non-Combat Roles for US. Military in the Post Cold War Era* (Washington DC: National Defence University Press, 1993)

[82] Peran nontempur, misalnya bantuan bencana alam, keamanan dan kebijakan internal, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lihat Larry Diamon dan Mare F. Plattner (eds.) *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hal Pendahuluan xviii.

[83] Dalam UU No. 20 tahun 1982 tentang Hankam, TNI baru dinyatakan sebagai kekuatan sosial. Namun, lewat UU No. 2 tahun 1988 mengenai prajurit TNI, secara tegas disebutkan bahwa TNI

Lain lagi peran baru militer di Rusia setelah negara dan Uni Soviet bubar. Tekanan diarahkan pada militer untuk terlibat dalam isu-isu keamanan publik, gerakan separatisme (*secessionism*) dan meredam konflik dan intrik politik. Sedang di beberapa negara Timur Tengah, peran baru militer lebih dipusatkan untuk meredam munculnya kelompok-kelompok radikal keagamaan[84].

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa profesionalisme militer dewasa ini cenderung memperluwes fungsi dan memperluas cakupan tugas dan tanggungjawab profesionalnya, dari pada mempersempit cakupan tugas sebagaimana dikonseptualisasikan dalam pandangan profesionalisme klasik Huntingtonian. Namun demkian profesionalisme baru tetap menempatkan fungsi keamanan militer, atau pertahahan, yang bersifat eksternal, orientasi keluar *(outward looking)* sebagai fungsi utama yang betujuan untuk menjaga kelangsungan hidup negara.

Komentar dan kritik perlu dimajukan di bagian akhir sub bagian pembahasan ini terutama pada pengkatagorian Huntington tentang keamanan yaitu: Keamanan militer, keamanan internal dan keamanan situasional. Penggunaan istilah "keamanan militer" secara tidak langsung Huntington ingin membuat batasan yang tegas mengenai tugas dan peran militer dengan hanya memproduksi jasa keamanan yang spesifik yaitu "keamanan militer". Militer tidak memiliki kewenangan untuk memasuki wilayah katagori ke dua (keamanan internal) maupun wilayah ke tiga (keamanan situasional). Di samping itu Huntington menganggap bahwa ketiga katagori tersebut bersifat lateral, berada dalam posisi sejajar, tanpa memiliki keterkaitan satu sama lain atau seandainya ada keterkaitan maka secara teoritik

---

merupakan kekuatan sosial-politik juga di samping sebagai kekuatan Hankam. Baca lebih lanjut Indria Samego, *TNI di Era Perubahan.* (Jakarta: Erlangga, 1999) hal. 3.

[84] Joseph S. Nye jr, "Epilog: Tradisi Liberal," dalam Larry Diamon dan Mare F. Plattner (eds.) *Hubungan Sipil-Militer...* hal. 235-243.

dianggap tidak memiliki siginifikansi. Hubungan ketiganya bersifat ko-aksi *(co-action)*, yang secara parsial (sendiri-sendiri) memberikan sumbangan kumulatif bagi terciptanya keamanan nasional bagi suatu negara.

Memang ketika Huntington menempatkan "keamanan" dalam posisi sentral adalah tepat, namun dalam pengkatagoriannya tidak paralel. Model yang diajukan juga kurang bisa menjelaskan persoalan yang ada. Oleh sebab itu dalam tulisan ini dicoba diajukan bentuk katagori yang lain (baru) mengenai istilah keamanan. Argumen yang disampikan diharapkan bisa lebih memperjelas pandangan mengenai istilah keamanan, atau setidak-tidaknya memunculkan pemaknaan baru terhadap istilah tersebut.

Pertama, "keamanan" *(Security)*[85] seharusnya difahami sebagai hasil atau produk, yang bagaimanapun keadaannya sangat ditentukan oleh adanya tiga fungsi: yaitu fungsi pertahanan *(defence)* pemeran utama fungsi ini adalah militer, fungsi ketertiban *(order)* dengan pemeran utama polisi[86] dan aparat penegak hukum yang lain, dan stabilitas *(stability)*[87] pemeran utamanya alat-alat negara yang membidangi ekonomi, sosial dan politik.

---

[85] Istilah *Security* (keamanan) didifinisikan sebagai: (1) *The state of being secure.* Sedangkan kata *secure* diartikan sebagai: *safe, protected against danger or risk Having no doubt, fear, or anxiety.* (2) *Protection against lawbreaking, violence, enemy act...(Longman Dictionary of Contemporary English,* Longman Group Limited, 1978) hal 107. Dengan diskripsi tersebut terlihat bahwa cakupan makna keamanan sangat luas. Dan pengertian tersebut yang dijadikan landasan konsep keamaman dalam tulisan ini.

[86] Katagori ini sangat sesuai dengan doktrin Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu "Tri Brata". Khususnya Brata III, yang berbunyi: *"Jana Anu Vacana Dharma"*, artinya Wajib menjaga ketertiban rakyat. Baca:Sejarah TNI Jilid II 1950-1959, *Pusat Sejarah dan Tradisi TNI,* th. 2000, 140-142. Baca juga: Kunarto, *Tri Brata, catur Prasetya, Sejarah Perspektif dan Prospeknya,* Jakarta: Cipta Manunggal, th. 1997, hal. 115-116.

[87] Kata *Stability* berasal dari kata *Stable,* artinya : *(1) firmly fixed, not likely to move , changing or fail (2) Steady, (3) balanced .*
Adapun *Security* didefinisikan sebagai : *"the quality or state of being steady and not changing or being disturbed in any way (= the quality of being stable): political/ economic/social stability.*(Lihat: Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner 's Dictionary*, Oxford University Press, th. 2000, hal 1258).

Fungsi Pertahanan adalah gelar atau pengerahan kekuatan terutama dengan alat kekerasan guna mencegah ataupun mengatasi ancaman keamanan. Biasanya ancaman itu berasal dari luar, bersifat eksternal namun juga bisa berasal dari dalam. Eksternal adalah –biasanya- kekuatan bersenjata yang berasal dari negara lain, namun juga bisa berasal dari organisasi bersenjata trans-nasional. Pilihan tindakan terakhir dari fungsi ini adalah berupa peperangan. Pemeran utama fungsi ini adalah militer.

Fungsi ketertiban, yaitu gelar kekuatan kekerasan, namun lebih diutamakan penggunaan alat pemaksa yang lain guna mencegah dan mengatasi ancaman keamanan yang bersumber dari pembangkangan ataupun pelanggaran atas undang-undang, peraturan dan tatanan yang berlaku. Biasanya lebih bersifat internal. Pemeran utama fungsi ini adalah polisi dan aparat hukum yang lain.

Ketiga, fungsi stabilitas, adalah penggunaan kekuatan bukan kekerasan, ataupun kekuatan kekerasan jika terpaksa untuk mencegah ataupun mengatasi adanya ancaman keamanan yang menggerogoti daya tahan, serta menggoncangkan keseimbangan; kehidupan sosial, ekonomi dan politik baik ancaman itu berasal dari dalam dalam maupun dari luar. Pemeran utama adalah alat-alat negara yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, dan politik. Di samping kelompok-kelompok strategis[88] yang ada di masyarakat, antara lain para pelaku bisnis; Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama, pekerja sosial; dan politisi.

[88] Yang dimaksud Kelompok Strategis disini sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Hans Dieter Evers & Tilman Schiel. Untuk mengetahuinya baca tulisan yang yang bersangkutan, *Kelompok-Kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga,* Jakarta: Yayasan Obor, Edisi kedua, 1992, khususnya bagian pendahuluan.

Ketiga fungsi tersebut di atas, sama-sama memproduk keamanan yaitu: Pertahanan-keamanan (Hankam), ketertiban-keamanan (Tibkam) dan stabilitas keamanan (Bilkam).

Kedua, antara ketiganya –pertahanan-ketertiban-stabilitas— memiliki hubungan yang bersifat inter-aksi *(inter-action)* dan berjalin-berkelindan *(coherence)*. Karena itu terciptanya keamanan nasional adalah bukan merupakan akumulasi, tetapi hasil agregasi dari ketiga fungsi tersebut. Keadaan keamanan nasional suatu negara adalah bukan ditentukan oleh karena ketiga fungsi tersebut "sama-sama" memberi konsrtibusi dalam aksi bersama *(co-action)*[89], melainkan ditentukan oleh karena "kerjasama" dari ketiga fungsi tersebut.

Dengan diketengahkannya konseptualisasi alternatif mengenai makna "keamanan" tersebut di atas, sebagai bandingan terhadap konsep "keamanan" yang dikemukakan oleh Huntington, berimplikasi pula adanya kesimpulan yang berbeda. Konsep "Keamanan" Huntington membawa kepada kesimpulan bahwa membatasi peran militer hanya dalam bidang keamanan militer (pertahanan) adalah suatu keharusan, sebaliknya konsep baru tersebut berimplikasi pada kesimpulan bahwa keterlibatan militer pada wilayah di luar pertahahan adalah suatu keniscayaan, terlepas dari hal: dalam wujud seperti apa, serta seberapa besar dan jauh keterlibatan itu.

Konsep keamanan baru ini juga tidak sama-sebangun dengan pandangan profesionalisme baru sebagaimana argumentasi dan rumusan yang dikemukakan oleh Syaigh, Perlmutter, Nordlinger, Stepan dan Welch. Profesionalisme baru mengandaikan keterlibatan militer di luar fungsi pertahahan atau keamanan militer

[89] Anatoly A. Piskoppel, *Relativization Of The Conflict Space,* (abstract), Department of Psychology Moscow State University, tt.

(dalam istilah Huntington) lebih bersifat ideografis, bukan suatu hal yang umum berlaku pada sembarang tempat dimana institusi militer berada. Syaigh, Perlmutter, dan Nordlinger menganggap sebagai ciri khas negara-bangsa dunia ke tiga. Sedang Stepan dan Welch melihatnya sebagai keadaan upnormal atau darurat dikarenakan adanya kondisi-kondisi tertentu. Maka apabila kondisi atau syarat-syarat keterlibatan militer di luar urusan pertahanan tersebut hilang maka dengan sendirinya militer akan hanya berada dalam fungsi aslinya di bidang pertahanan. Dengan konseptualisasi baru "keamanan" argumen-argumen tersebut tidak untuk menafikan keterlibatan militer dalam dua fungsi selain pertahanan, yaitu fungsi ketertiban, dan stabilitas, melainkan berlaku dalam hal: keterlibatan macam apa, serta seberapa luas dan besar keterlibatan itu? Kiranya akan lebih jelas perbandingan antara konsep keamanan Huntington, dengan konsep keamanan baru yang ditawarkan dalam tulisan ini dengan melihat gambar sebagai tercantum dalam bab VII bagian kesimpulan dalam disertasi ini.

2. *Pemikiran tentang Profesionalisme TNI*

Pada awal lahirnya tentara Indonesia modern (1946) wacana tentang tentara profesional bisa dipastikan belum ada. Karena saat itu di negara-negara Barat pun, dimana gagasan profesionalisme militer itu pertama kali muncul, masih baru bersifat embrional. Namun demikian gagasan ke arah pembentukan militer Indonesia yang profesional dalam arti terdidik dan terlatih agaknya tidak perlu menunggu terlalu lama lantaran segera setelah terbentuk embrio militer Indonesia modern, mulai muncul keinginan kuat para perintis militer Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan formal militer khususnya untuk mencetak calon "opsir" yang kelak mengambil alih kepempimpinan pasca tentara angkatan 1945. Gagasan maju tersebut tidak lepas dari

adanya para pemimpin militer angkatan '45 yang sempat mengenyam pendidikan militer kolonial, terutama para perwira eks KNIL dan juga perwira eks Peta. Bahkan hal itu kadang dilakukan lebih sebagai inisiatif pribadi, seperti yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Djatikusumo. Sebagaimana dituturkan oleh Hardijono[90], Djatikusumo, waktu itu menjabat Komandan devisi IV, yang pernah mengenyam pendidikan CORO[91] *(Corps Opleiding tot Reserve Officer)*, merekrut pelajar yang tergabung dalam pasukan "T" Ronggo Lawe untuk dididik dan dilatih sebagai perwira cadangan. Hal itu terjadi setelah pertempuran Ambarawa (1946). Dalam pendidikan itu mereka antara lain dilatih dan diajarkan ilmu perang, pengetahuan senjata, taktik infantri, hukum internasional, dan hukum perang. Di antara yang ikut pendidikan ini adalah Letjen (Purn.) Sudharmono yang kelak menjadi wakil presiden RI.

Sebelum itu, tanggal 10 Nopember 1945 beberapa perwira yaitu Letkol Singgih, Komandan Resimen 40/Tangerang, Mayor Daan Mogot, Mayor Daan Yahya, Mayor Kemal Idris dan Letnan Taswin telah memprakarsai berdirinya Sekolah Tinggi Militer. Sebuah sekolah bagi calon perwira yang lebih dikenal dengan nama Em-A (Militer Akademi) sempat menghasilkan satu angkatan kemudian bubar. Di Jawa Timur (Devisi VII) didirikan Sekolah Kader Perwira oleh pemuda-pemuda bekas *Shodanco Jugekitai,* antara lain Ronokusumo, Sobiran, Jamal, Abdulgani, Ronopuspito dan Suhadi.

Di Malang pada bulan Nopember 1945, berdiri Sekolah Kadet Malang, mula-mula bernama Sekolah Tinggi Devisi VIII/Suropati. Didirikan atas inisiatif Panglima Divisi Suropati Jenderal Mayor Sudjai. Selanjutnya lembaga pendidikan ini lebih dikenal sebagai Sekolah Tentara Malang (STM). Sekolah ini hanya sempat meluluskan satu angkatan saja dengan pangkat Letnan Dua, sebelum kemudian dilebur dengan

[90] Ant. P. Degraaff, *Napak Tilas Tentara Belanda dan TNI*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 60.
[91] Pusat latihan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mereka yang akan menjadi opsir (perwira) cadangan.

Militer Akademi (MA) di Yogyakarta[92].

Adapun Militer Akademi *(Militaire Academie)* sendiri didirikan tanggal 31 Oktober 1945 bersama-sama dengan Sekolah Kader, adalah atas prakarsa Letjen Oerip Sumohardjo. Di Militer Akademi, para siswa didik untuk menjadi calon opsir (Letnan Dua) selama 33 bulan; 19 bulan di sekolah dan 14 bulan praktek di pasukan. Sedang di *Sekolah Kader* pendidikan berlangsung enam bulan untuk memperoleh pangkat Sersan Kelas II, dan satu tahun untuk pangkat Sersan Kelas I. Pada tahun 1948, tatkala Kol. G.P.H Djati Kusumo menjabat sebagai direktur, nama Militer Akademi di ubah menjadi Akademi Militer[93].

Pendirian pusat pendidikan militer secara melembaga --bukan prakarsa perorangan-- baru dimulai awal tahun 50-an. Tahun 1951 didirikan Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat (SPGi-AD), dan Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat (P3AD) keduanya di Bandung. Pada tahun 1956 SPGi-AD berubah nama menjadi Akademi Tehnik Angkatan Darat (ATEKAD)[94].

Pada tahun 1957 diresmikan Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang. Tahun 1961 ATEKAD diintegrasikan kedalam AMN. Pada tahun 1965 AMN, AAL (Akademi Angkatan Laut), AAU (Akademi Angkatan Udara) dan Akademi Angkatan Kepolisian yang sudah ada diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Pada tahun 1984, AKABRI berubah kembali menjadi Akademi Militer (AKMIL)[95].

Pada ranah wacana, profesionalisme TNI kian gencar diperbincangkan pada awal tahun sembilan puluhan, di mana isu profesionalisme militer berjalin dengan

---

[92] _____, *Sejarah TNI (jilid I, 1945-1949)*(Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, th. 2000) hal. 69-73.
[93] Ibid, hal 75-76.
[94] _____, *Wikipedia Indonesia,* t.th. , t. hal.
[95] Ibid., *Wikipedia Indonesia,* t.th., t.hal.

upaya membangun militer Indonesia yang efektif, efisien dan modern yang sering disingkat menjadi PEEM. Gerakan profesionalisasi militer tersebut antara lain dipelopori oleh para perwira Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) angkatan 1973, salah seorang di antaranya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (kini presiden RI). Di dalam sebuah buku "ABRI Profesional dan Dedikatif", yang berisi kumpulan karangan para alumni Akabri '73 tersebut Yudhoyono, menulis:

> "Kita harus mengambil dan menjadi bagian dari upaya memperteguh eksistensi diri sebagai prajurit yang senantiasa teguh dan konsisten dalam pengabdian. Melalui tampilan yang mencerminkan postur ABRI yang Profesional, Efektif, Efisisen, dan Modern (PEEM), untuk masa ke depan, ABRI tetap menjadi salah satu komponen bangsa yang dapat diandalkan....."[96].

Kajian ilmiah mengenai profesionalisme militer Indonesia dilakukan oleh Peter Britton, yang dalam pengkajiannya itu ia lebih melihat dari perspektif antropologis, dan mencoba membuat rekonstruksi tentang profesionalisme TNI dengan mendasarkan pada hasil telaahnya terhadap Tentara Nasional Indonesia terutama Angkatan Darat.

Britton dalam pembahasannya tidak menempatkan aspek keterdidikan dan keterlatihan sebagai elemen utama profesionalisme sebagai fokus kajiannya. Ia lebih mencurahkan perhatiannya terhadap karakteristik militer profesional *a la* Indonesia.
Ia mendiskripsikan *ideal type* organisasi tentara profesional *a la* Indonesia sebagai: "Tentara yang memposisikan dirinya di atas semua golongan, berperan sebagai penyelamat nasional yang bertugas untuk memulihkan integritas nasional dan sekaligus sebagai suatu kekuatan modernisasi yang efisien. Para perwiranya bertindak sebagai satria yang merupakan perwujudan dari sifat bijaksana dan integritas moral yang

[96] Yusuf Solichien (ed. , et. al), *ABRI Profesional dedikatif,* (Jakarta: Yayasan Cadaka Dharma, 1998), hal vii

tinggi"[97].

Britton juga mencermati adanya pengaruh budaya Jawa yang sangat kuat dalam pemikiran militer *(military mind)* Indonesia. Budaya Jawa yang dimaksud adalah budaya yang dipelihara dan dikembangkan di sekitar wilayah "Mataraman"[98]. Sekalipun Kerajaan Sriwijaya (684-1377 M) yang berpusat di Sumatera bagian selatan dan Kerajaan Majapahit (1293-1520 M) yang berpusat di Jawa Timur dianggap dua kerajaan yang pernah berjaya menguasai Nusantara yang sekarang bernama Indonesia, namun pemikiran militer Indonesia modern lebih dipengaruhi oleh tradisi militer Kerajaan Mataram Kuno (abad 8 dan 10 M) dan kerajaan Mataram Islam yang dimulai sejak Panembahan Senopati naik tahta (1582) hingga Perjanjian Gianti (1775) yang membuat Mataram Islam terpecah menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab: *pertama*, Mataram adalah kerajaan besar yang era berdirinya paling terakhir sebelum Indonesia memasuki era pemerintahan modern; *kedua*, Mataram adalah salah satu kerajaan yang berada pada awal era kolonialisme di Indonesia dan pasukannya terlibat peperangan melawan pihak penjajah. Dimulai oleh Sultan Agung (1613-1645) yang melakukan perang besar-besaran melawan VOC *(Vereenigde Oost Indische Compagnie)* hingga pemberontakan Pangeran Diponegoro (1825-1830). *Ketiga*, pada saat perang kemerdekaan (1945-1950) wilayah bekas pusat kerajaan Mataram ini menjadi salah satu basis pasukan pejuang kemerdekaan terpenting, dan berkali-kali menjadi medan pertempuran besar antara para tentara pejuang Republik Indonesia melawan tentara penjajah.

---

[97] Baca Lebih lanjut: Peter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1996) khusunya Bab II yang membahas "Warisan Kemiliteran Jawa," hal, 239

[98] Istilah yang merujuk pada wilayah petilasan yang pernah menjadi pusat kerajaan Mataram kuno yang Hindu-Budha (Abad 8 dan 10 M) serta kerajaan Mataram Islam (1582-1775). Pusat kerajaan ini berada di pulau Jawa bagian tengah selatan. Meliputi Yogyakarta, sebelah barat meliputi Banyumas, Purwokerto, Purworejo, di sebelah utara Magelang, dibagian timur hingga Madiun, Ponorogo dan Kediri.

Ketiga sebab tersebut membuat pemuda di wilayah Mataraman seolah ditakdirkan mewarisi tradisi militer yang kuat. Oleh karenanya wilayah ini menjadi sumber utama perekrutan tentara sejak –sudah barang tentu-- zaman kerajaan Mataram, hingga era tentara Indonesia modern. Bahwa prajurit yang meraih puncak karir sebagai petinggi militer Indonesia, terutama di jajaran Angkatan Darat, sebagian besar berasal dari wilayah Mataraman adalah menjadi bukti sekaligus jawaban atas pertanyaan mengapa budaya Jawa khususnya tradisi militer Mataraman sangat berpengaruh dalam *military mind* TNI[99].

Pengaruh tradisi militer Jawa dapat juga dicermati lewat banyaknya penggunaan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Jawa klasik yang kadang maknanya sudah mengalami rekonseptualisasi, begitu juga banyak *pitutur* dan *pasemon* yang diambil dari cerita-cerita atau *lakon* pewayangan yang dinukilkan dari ephos Mahabarata dan sedikit dari kisah Ramayana yang sebagian besar sudah mengalami akulturasi dengan tradisi Jawa dan Islam[100].

Di antara istilah yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini adalah kata "Ksatriya", "Satria" atau "kesatriya"[101]. Di dalam doktrin TNI, "Sapta Marga", ksatriya adalah sebagai salah satu sebutan *(julukan)* lain dari TNI, yaitu dalam kalimat butir tiga (3) Sapta Marga berbunyi sbb.: "Kami kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran kebenaran

---

[99] Sejak tahun 1974 hingga 2007, dari 14 jenderal yang menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) separuhnya adalah berasal dari wilayah Mataraman ini (Lihat: *Sejarah TNI AD 1974-2004,* Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, th 2005, hal

[100] Di dalam kisah pewayangan ada dua jenis cerita yaitu 'pakem' dan 'carangan'. Pakem adalah cerita yang skenario dan plot ceritanya asli dari Mahabrata dan Ramayana, sedangkan 'carangan' adalah cerita buatan yang disesuaikan, dulu terkait dengan misi dakwah agama Islam, sekarang lebih terkait dengan selera pasar.

[101] Kata-kata yang adalah: 'prajurit' untuk sebutan lain dari tentara; 'Perwira', 'Tamtama', 'Bintara', sebutan untuk tiga kelompok jenjang kepangkatan. (2) 'Sapta Marga' sebutan bagi nilai dasar perjuangan TNI, (3) 'Ing arsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, Waspada purba wisesa, Hambeg parama arta, Satya, prasaja, gemi nastiti, Belaka, legawa' dalam asas kepemimpinan TNI; (4) dan 'Budi bakti wira tama' sebutan untuk kode etik perwira.

keadilan".

Peter Britton menegaskan bahwa di dalam istilah ksatriya tersebut memuat nilai-nilai ideal yang dijadikan rujukan bagi pembantukan kepribadian TNI. Ksatriya, didiskripsikan oleh Britton sebagai: (1) ksatriya itu memiliki disiplin diri yang kuat untuk mencapai sikap tidak terpengaruh oleh apapun manakala peranannya diperlukan; (2) harus mengesampingkan kesetiaannya kepada keluarga demi tugas dan kewajibannya; (3) harus mampu mengalahkan keinginan-keinginan pribadi demi kemuliaan tugas-kewajibannya; harus menguasai keterampilan manajemen dan seni peperangan; (4) harus sanggup menguasai batinnya sendiri, menjauhkan diri dari *pamrih*, mengalahkan nafsu dan hasrat yang tidak pada tempatnya[102].

Untuk memahami lebih jauh tentang konsep ksatriya, pembahasan selanjutnya dalam bagian ini akan mengulas perihal ksatriya ini dalam porsi yang cukup. Mulai dari soal siapakah kstariya itu? Bagaimana ksatriya memperoleh dan memelihara kekuasaan/kekuatan? Digunakan untuk apa kekuasaan/kekuatannya itu?

Jika ditelusuri lebih jauh, kata ksatriya adalah memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar sifat-sifat kepribadian yang tergambar dalam diskripsi Britton. P.J. Zoetmulder[103] mendifinisikan ksatriya bukan hanya anggota golongan militer, tetapi juga sekaligus yang memerintah. Jika demikian halnya maka kecenderungan TNI memposisikan diri sebagai ---atau setidak-tidaknya ingin turut terlibat-- dalam pemerintahan, dalam arti bukan sekedar sebagai alat negara di bidang pertahanan, berarti memiliki akar di dalam kesadaran citra dirinya sebagai ksatriya itu. *"lungguh keprabon"* (duduk sebagai kepala pemerintahan) adalah prestasi puncak bagi seorang ksatriya, sedang *"madeg pandita"* (penobatan dirinya sebagai panutan bagi bangsa)

[102] Peter Britton, Ibid , hal 11-16.
[103] P.J. Zoetmulder & S.O Robson, *Kamus Jawa Kuna- Indonesia I,* Jakarta: PT Gramedia, cetakan ke 2, th 1997 Hal 523.

adalah puncak kematangan seorang ksatriya setelah *lengser keprabon* (berhenti dari menjabat).

Di dalam ajaran stratifikasi sosial Hindu sebagaimana disebut oleh Zoetmulder, Ksatriya (prajurit dan bangsawan) adalah kasta kedua setelah Brahmana (pemuka agama), di atas kasta Waisa (kaum pedagang) dan Sudra (kaum rendahan). Namun ketika istilah tersebut diadopsi dalam budaya Jawa-Islam justru bukan kasta brahmana yang dinomorsatukan melainkan ksatriya. Hal ini terjadi barangkali karena terhapusnya kasta Brahmana (pemuka agama Hindu) ketika konsep itu diserap kedalam khasanah budaya Jawa seiring dengan menguatnya pengaruh Islam. Indikasi akan hal itu terdapat dalam sebuah naskah kuno yang tegas-tegas menempatkan prajurit pada urutan pertama dari empat pilar kekuatan kerajaan, yaitu: prajurit, agamawan, petani dan pedagang. Di dalam "Serat Margawirya" yang berisi pedoman sikap dan perilaku bagi para pejabat kerajaan antara lain berbunnyi:[104]

> *"...Lan ana patang prakara / kagunganing kang prajadi / prajurit lawan pandita / tri sudagar catur tani"..*
> *"Prajurit pagering ratu / tani bujaning praja / sudagar busananing nagri / sang pandita weh raharjaning pamuja..."*
>
> Artinya:
> Ada empat hal yang menjadi modal kekuatan kerajaan: *pertama*, prajurit ; *kedua*, rohaniwan; *ketiga*, pedagang; *keempat*, petani.
> Prajurit adalah pagar kerajaan, petani adalah makanan negeri, pedagang adalah pakaian negara, rohaniwan memberi kesentausaan lewat doanya.

Di dalam kisah pewayangan –sebagai salah satu sumber nilai budaya Jawa— di samping sebagai komandan dan panglima perang, ksatriya adalah juga pemimpin dan kepala pemerintahan. Daerah atau wilayah di mana ia berdaulat disebut "kaksatryan" atau "ksatriyan". Sebutan ksatriya ini agaknya lebih diarahkan untuk para prajurit golongan perwira daripada para prajurit yang berada dibawahnya, jadi

[104] *"Serat Margawirya"* dikarang oleh R.M. Hariya Jayadiningrat I. Lebih lanjut lihat: Soemarsaid Moertono, "Budi dan Kekuasaan dalam Konteks Kesejarahan", dalam Miriam Budiardjo, , *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991. hal 153.

bukan untuk tamtama ataupun bintara. Oleh karena itu hingga sekarang kompleks-kompleks di mana para perwira bertempat tinggal disebut "kompleks kesatriyan".

Gambaran tentang asal usul, siapa, dan bagaimana konsep ksatriya yang cukup lengkap dideskripsikan oleh Prof. Soedjarwo. Dalam sebuah essainya yang berjudul "Satriyo" yang dimuat di sebuah surat kabar[105] yang ditulis dalam bahasa Jawa, sbb:

> *"Sing nglungguhi kasta ksatria iku para prajurit, para senapati lan manggalaning yuda. ....satriya iku sing akeh para pangeran lan sentananing nata. Mula satriya iku dipratelakake kadidene 'trahing kusuma rembesing madu'. Sekolah Kasatriyan iku dhek biyen siswane para putra-wayah lan sentana dalem. Kompleks perumahan perwira iku uga asring disebut kasatriyan".*

Kutipan di atas apabila diterjemahkan secara agak bebas akan berbunyi sebagai berikut: Bahwa yang menduduki golongan kstariya itu adalah para prajurit, komandan dan penglima perang. Dahulu yang menjadi ksatriya itu kebanyakan adalah para anak raja dan pegawai tinggi kerajaan. Oleh sebab itu diibaratkan ksatriya itu sebagai "Darahnya campuran antara sari bunga dan air madu". Atau berdarah biru. Pada zaman dahulu siswa-siswa lembaga pendidikan ksatriya adalah terdiri dari anak keturunan dan kerabat raja.

Tentu sumber ksatriya dalam perspektif militer Indonesia modern tidak lagi didominasi anak keturunan bangsawan atau kerajaan. Meskipun hal itu masih ada. Istilah *"trahing kusuma rembesing madu"* (berdarah biru), namun lebih berarti bahwa calon-calon perwira TNI itu terseleksi dengan sangat ketat untuk bisa memasuki pendidikan perwira yang ada, di samping sebagian darinya memang memiliki tradisi militer yang kuat karena berasal dari keluarga militer.

Lantas bagaimanakah ksatriya memperoleh dan memelihara kekuatannya? Merujuk pada analisis Benedict ROG Anderson mengenai gagasan kekuasaan dalam

[105] Surat Kabar *Suara Merdeka,* dalam rubrik "Blencong", th. 2004.

kebudayaan Jawa, kekuatan itu diperoleh dan dipelihara dengan dua cara. *Pertama*, pemusatan dan penyerapan energi yang terpencar, *kedua* penyatukan dua pasangan yang berlawanan (oposisi biner).

Pertama, pemusatan dan penyerapan energi yang terpencar (sentripetal-integralistik). Manurut gagasan ini, usaha memperoleh kekuasaan dilakukan melalui praktek yoga dan bertapa. Menurut Anderson, walaupun praktik-praktik yoga berbeda beda bentuknya di berbagai daerah di Jawa, termasuk berpuasa, *melekan* atau tidak tidur, bersemedi, tidak melakukan hubungan seksual, dan mempersembahkan berbagai sesaji. Seiring dengan datangnya pengaruh ajaran Islam, tindakan spiritual tersebut mengalami perubahan bentuk misalnya berupa berhalwat (bersemedi versi Islam) menjalani puasa senin-kamis, puasa Nabi Daud (sehari puasa sehari tidak), sholat malam, berdzikir, dlsb.

Terdapat suatu gagasan pokok yang mendasari tindakan spiritual semacam itu, yaitu semuanya dimaksudkan untuk menfokuskan atau memusatkan kemurnian hakekat. Tuntunan terbaik untuk menghayati garis-garis besar konsepsi itu menurut Anderson adalah gambaran suatu suryakanta dalam sinar laser, di mana pemusatan cahaya yang luar biasa akan menciptakan curahan panas yang luar biasa. Analog ini sangat tepat karena dalam pelukisan klasik dalam kepustakaan Jawa bertapa yang amat keras memang mempunyai kemampuaan untuk menimbulkan panas pisik. Menurut Rassers, sebagaimana dikutip Anderson menyatakan: orang percaya bahwa para pembuat keris legendaris di zaman dahulu mampu menempa mata keris yang terbuat dari besi denga *pamor* yang indah hanya dengan panas yang terpusat dalam ibu jari mereka[106].

[106] W.R Rassers, *"Panji: The Culture Hero, Struktural Study of Religion in Java,* Nijhoff, 1959, hal 219-297

Gagasan kekuasaan sentripetal-integralistik tersebut di atas telah tertransformasikan kedalam nilai-nilai militer Indonesia modern berupa jati diri, yaitu "TNI sebagai Tentara Nasional". Substansi jati diri ini adalah realitas keanekaragaman bangsa Indonesia dari segi suku, budaya, agama dll. yang tersebar dan berpencar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Realitas tersebut dipandang sebagai energi. Agar TNI memperoleh kekuatnnya sekaligus dapat memelihara kekuatan itu maka ia harus menyerap, memusatkan dan menyatukannya, yang dalam wujud lahiriahnya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu keutuhan NKRI bagi TNI "harga mati" karena pada hakekatnya NKRI itu adalah kekuatan dan jati dirinya sendiri.

Kedua, mempersatukan dua pasang yang berlawanan (unifikasi - oposisi biner). Cara kedua dalam memperoleh dan memelihara kekuatan dalam gagasan kekuasaan ksatriya adalah dengan cara mempersatukan dua pasangan yang berlawanan. Jika merujuk pada hasil temuan Claudeu Levi-Strauss, seorang antropolog strukturalis tampaknya gagasan kekuasaan semacam ini berlaku di banyak masyarakat termasuk masyarakat primitif. Levi-Strauss, juga telah memperkenalkan teori mengenai pasangan berlawanan (oposisi biner *[binary opposition]*) sebagai cara pengintegrasian suatu pemikiran. Menurut Levi-Straus, sebagaimana dikutip oleh Octavio Paz:

> "Tidak ada perbedaan esensial cara-cara yang ditempuh masyarakat primitif dengan masyaraka kita (modern-pen.) dalam menetapkan suatu relasi antara apa yang tercerap oleh indera dengan apa yang terpahamkan oleh pikiran. Yang tercerap mengacu pada katagori penanda *(signifier)* dan yang terpahamkan berada pada katagori petanda *(signified)*. Adapun kualitas adalah merupakan tanda-tanda yang diintegrasikan kedalam sistem-sistem yang penting dan penuh makna, dengan sarana berupa relasi pertentangan (*opposition*) , di samping relasi kemiripan *(similarity)* "[107].

[107] Octavio Paz, *Claude Levi-Strauss: An Introduction*, dalam edisi terjemahan "Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural", Yogyakarta: LKiS, th. 1997, hal 62.

Mengacu pada pandangan Levi-Straus tersebut, cara berpikir integratif dengan metode oposisi biner juga sangat menonjol dalam kaitannya dengan gagasan tentang bagaimana suatu kekuatan atau kekuasaan diperoleh dan dipertahankan dalam berbagai sub-kultur Indonesia. Bukan hanya terdapat dalam kultur Jawa[108]. Konsep ini adalah bentuk derivat dari konsep *"manunggaling kawulo lawan gusti"*, atau menyatunya hamba dengan Tuhan, yang juga bisa berati menyatunya rakyat dengan raja.

Gagasan ini mengandung unsur dialektika. Hanya beda dengan dialektika Marxis yang menabrakkan dua klas yang berlawanan untuk melahirkan kekuatan baru yaitu masyarakat tanpa klas, namun didalam dialektika "ksatriya" ini justru sebaliknya, dua energi yang memiliki sifat berlawanan itu harus dipasangkan (unifikasi) untuk bisa melahirkan kekuatan yang dahsyat.

Wujud lahiriah penyatuan pasangan energi yang berlawan (unifikasi oposisi biner) dalam militer Indonesia modern adalah tercermin dalam jati diri "TNI sebagai Tentara Rakyat". Dalam frasa "tentara rakyat" ini bukan berarti keduanya lebur dalam satu, akan tetapi "manunggal", dalam arti keduanya tetap sebabagai dirinya masing-masing akan tetapi membangun relasi yang intens dan intim antara rakyat (hamba) dengan TNI (pemimpin). Makna kemanunggalan dari tugas dan peran TNI bisa berarti bahwa dengan melindungi keselamatan segenap rakyat Indonesia pada hakekatnya adalah melindungi kekuatan TNI itu sendiri. Ancaman terhadap keselamatan rakyat pada hakekatnya adalah ancaman terhadap keselamatan TNI itu sendiri. Untuk memperoleh kekuatan dan memeliharanya secara doktrinal TNI mengharuskan dirinya: bersikap ramah tamah sopan dan santun terhadap rakyat, tidak sekali-kali merugikan,

[108] Penggunaan pola pemikiran oposisi biner tentang kekuasaan juga terdapat dalam kultur Bugis dan Makassar. Hal itu dapat dilihat pada penampilan *Bissu*, yaitu julukan para penjaga lambing kekuasaan dalam tradisi para penguasa bugis dan Makassar. Para *Bissu* ini diberi pakaian gabungan antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki (lihat Anderson, dalam Meriam Budiardjo, ibid., hal. 61).

menakuti, dan menyakiti hati rakyat; menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi rakyat[109].

Gagasan yang terkandung di dalam "TNI tentara rakyat" ini pernah diterjemahkan secara lebih konkrit oleh Jenderal M. Yusuf, tatkala menjabat Panglima ABRI di dalam program-programnya yang dikemas dalam tema "ABRI Manunggal dengan Rakyat".

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia sangat berharap pada pasangan-berlawanan "Dwi-Tunggal", yaitu pasangan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muh. Hatta, --dua sosok yang memiliki watak dan kepribadian yang berlawanan-- yang dipandang mampu menjadi kekuatan yang dahsyat untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia. Dan sebagian masyarakat percaya bahwa perpecahan pasangan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta lah yang menjadi penyebab bangsa Indonesia mengalami kebangkrutan politik dan ekonomi yang klimaksnya terjadi peristiwa G-30S/PKI tahun 1965, dan kurang berhasil tumbuh menjadi bangsa yang besar.

Lantas bagaimanakah sifat dan watak ksatriya itu? Mengenai sifat-sifat istimewa ksatriya, Soedjarwo melukiskan sebagai bertikut:

> *"..... mungsuhe satriya iku buta utawa raseksa. Sifating satriya iku kosokbalen karo sifating raseksa. Satriya iku anteng lan alus tindak-tanduke, dene raseksa iku sapari polahe sarwa kasar. Sanajan katone ora mitayani, nanging satriya iku nduweni watak tangguh, tanggon, lan sembada.... Satriya iku kulina mesu raga, mesu budi, lan gentur tapane".*

Makna yang terkandung dalam kutipan di atas adalah bahwa di dalam dunia pewayangan, musuh ksatriya adalah "buta" atau "raksasa". Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Sosok buta, segala sifat dan tingkah lakunya serba kasar, bengis, secara pisik tampak kuat dan perkasa. Sebaliknya, ksatriya memiliki sifat tenang, berperangai halus, tindakannya efisien. Dalam hal penampilan pisik seorang satriya itu *"ora mitayani"* atau tidak tampak kuat. Namun begitu, sebetulnya ia tangguh,

[109] Lihat dalam "Delapan Wajib TNI", butir 1, 2, 6, 7 dan 8.

menguasai persoalan dan penuh tanggung jawab. Tidak takut menghadapi segala kesulitan. Membiasakan diri bukan hanya berolah pisik tetapi terutama berolah budi atau batin. Gemar bertapa.

Mengapa faktor pisik seperti gagah, kekar dan berotot, tidak dipandang istimewa? Hal tersebut secara simbolik mencerminkan makna penggunaan kekuatan serta makna kemenangan yang harus dicapai oleh ksatriya bukanlah semata-mata bersifat keunggulan kekerasan pisik semata. Bahwa kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan yang diperoleh tidak dengan cara menggunakan kekuatan kekerasan, menghancurkan, dan merendahkan martabat musuh. Prinsip tersebut dalam istilah Jawa disebut: *"nglurug tanpo bolo menang tanpa ngasorake"* (menyerbu tanpa dengan bala kekuatan, menang tanpa dengan mengalahkan)[110].

Mengenai watak ksatriya, Soedjarwo mendiskripsikan sbb:

> *"Wataking satriya iku perwira. Watak perwira iku nengenake kuwajiban lan tanggung jawabe salaras karo kalungguhane.... Watak perwira iku wedi wirang wani mati. ..... alus, ruruh, anteng, tur jatmika, ora seneng sesongaran utawa 'arogan', nanging mrantasi yen ana gawe parigawe"*
>
> Artinya:
> Watak Ksatriya itu adalah perwira, yaitu mengutamakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukanya. Lebih baik mati dari pada dipermalukan. Berpembawaan halus, penuh empati, tenang, dan intelek. Tidak pongah atau arogan. Namun dalam soal tugas selalu ia selesaikan dengan tuntas.

Dalam kaitannya dengan watak, ksatriya adalah makna simbolik mengenai watak manusia. Begitu juga lawan ksatriya yaitu "Buta" atau "Rasaksa". Keturunan orang terpandang tidak pasti ksatriya, begitu juga sebaliknya, bisa saja dari rakyat jelata bisa lahir seorang ksatriya. Karena: *"Watak satriya utawa watak buta iku bisa didarbeni dening sadhengah uwong"* (watak ksatriya ataupun watak buta itu bisa melekat pada diri siapa saja). Anderson mempunyai pandangan yang sama tentang hal ini.

---

[110] Pangsar Jend. Soedirman tatkala menjadi Komandan TRI Divisi V/Kedu-Banyumas berhasil membujuk tentara Jepang menyerahkan seluruh perlengkapan dan persenjataannya dengan tanpa ada pertumpahan darah di kedua belah pihak. Hal tersebut oleh para pengikutnya dipandang sebagai "memenangi" pertempuran dengan menggunakan prinsip ini. Waktu itu Soedirman adalah satu-satunya komandan yang bisa merebut persenjataan tentara Jepang tanpa lewat pertempuran.

Menurut Anderson, golongan lawan ksatriya juga bisa berhasil memperoleh kekuatan dengan cara-cara yang ditempuh kstariya. Perbedaan apakah ia ksatriya apakah bukan adalah pada akhir penggunaan kekuatan itu. Biasanya yang bukan ksatriya atau ksatriya yang gagal akan tidak tahan godaan sehingga menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk maksud tujuan yang menyimpang dari watak dan prinsip ksatriya. Mereka membiarkan kekuasaannya kacau balau, karena mereka menuruti hawa nafsu tanpa kekangan, sedangkan para ksatria mempertahankan kebulatan tekad dan kesatuan tujuan secara ketat, yang menjamin dapat dipertahankannya dan dihimpunnya kekuatan itu secara terus menerus[111].

Di dalam cerita *"pakem"* (baku) dunia pewayangan, secara simbolik tipe ksatriya ideal tercermin dalam sosok Raden Janaka yang memiliki nama lain Permadi. Yaitu anak ke tiga dari lima bersaudara dari keluarga Pandawa. Dilihat secara pisik Janaka tampak *ringkih*[112], *"ora mitayani"*. Namun di balik yang tampak itu tersimpan daya kekuatan yang dahsyat *(ngedap-edapi)* oleh sebab itu ia dijuluki sebagai *"Lelananging jagad"* (lelaki terpilih). Tokoh antagonis sebagai lawan Arjuna (nama lain dari Janaka) adalah pasukan para Buta atau Rasaksa dengan perangai dan tampilan yang sebaliknya. Dalam perang tanding antara kedua belah pihak biasanya para Buta selalu kalah dengan tragis dan ironis: tewas terkena senjata bertuahnya sendiri. Kisah tersebut mengandung makna *pasemon* (sindiran) betapa pentingnya faktor mentalitas kepribadian prajurit itu melebihi faktor kecanggihan

[111] Benedict R.O'G Anderson, "Gagasan Tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa", dalam, Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hal. 54.

[112] Ciri ksatriya adalah memiliki banyak nama yang biasanya nama-nama itu terkait dengan suatu keistimewaan atau prestasi yang pernah dicapai. Bandingkan dengan TNI dengan jati dirinya dan perubahan nama-nama TNI dari waktu ke waktu.

dan kelengkapan senjata. Apabila mental kepribadiannya rapuh bisa membuat kecanggihan dan keampuhan senjata yang dimiliki malah membunuh dirinya sendiri.

Lantas untuk apa kekuatan yang dimiliki kstariya digunakan? Untuk menjawab hal tersebut dapat mengacu pada deskripsi yang dikemukakan Soedjarwo:

> *"Saliyane ora mingkuh ing karya, satriya iku ngugemi bebener, lan tansah siyaga mbelani negara lan para kawula. Satriya iku nengenake lelabuhan tanpa ngarep-arep ganjaran. Cekake, satriya iku sepi ing pamrih rame ing gawe".*
>
> Artinya:
> "Selain pantang menolak tugas, satriya itu memegang teguh kebenaran dan selalu siap siaga membela negara dan rakyat. Ksatriya juga mengedepankan pengabdian, sebaliknya mengenyampingkan keinginan mendapat imbalan".

Sikap teguh membela negara *(telatahing projo)* dan rakyat *(kawulo)* ini tercermin dalam sesanti: *"Sadumuk bathuk sanyari bumi, den tohi ataker pati"* ([pelanggaran dan ancaman itu] ibaratnya sekalipun hanya sekedar menyentuh jidat atau mengambil sejengkal tanah, maka nyawalah yang menjadi taruhannya).

Tugas dan peran ideal ksatriya adalah sebagaimana tercermin dalam gelar yang diberikan kepada raja-raja Jawa khususnya pada era kerajaan Mataram Islam yaitu: *"Senopati ing alogo kalipatullah sayidin panoto gomo"* yaitu di samping sebagai pemimpin pertempuran dalam perang, juga sebagai raja dan sekaligus sebagai penegak aturan.

Konsep Prajurit ksatriya sebagaimana disebutkan di atas di era ketentaraan Indonesia modern di pandang oleh sementara pihak telah menjelma di dalam sosok dan kepribadian Jenderal Soedirman. Kepribadian Soedirman tersebut lantas diidealisasikan sebagai *"legendary role-model"* bagi TNI yang bersumber dari sejarah TNI itu sendiri.

Pribadi Ksatriya Soedirman antara lain tercermin dari diskripsi sebagai berikut:

> "Dalam kehidupan sehari-hari cara berpakaian Soedirman sangat sederhana....Sejak kecil Soedirman senang hidup prihatin, sehingga setiap malam tidak pernah tidur di atas tilam (kasur)....Pada masa sekolah di Wiworotomo, Soedirman mulai terjun dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah.... Di kalangan Kepanduan Hizbul Wathon [organisasi kepanduan Muhammadiyah] Soedirman besar pengaruhnya terhadap kawan-kawannya sehingga dipilih sebagai pemimpin. Sikapnya yang pendiam tetapi tegas, patuh dan taat pada kebenaran dan dapat *ngemong* kawan-kawannya.... Sikap ini terus terbawa hingga menjadi Panglima Besar"[113].

Pada bagian lain, dalam hal persiapan bekal ilmu pengetahuan dan kepribadian yang kelak kemudian diperlukan Soedirman ketika menjadi pemimpin besar digambarkan sebagai berikut:

> "Di sekolah Soedirman termasuk murid yang maju dan rajin.... Soedirman menunjukkan minatnya yang besar pada pelajaran-pelajaran: bahasa Inggris, Ilmu Tata Negara, Sejarah Dunia, Sejarah Kebangsaan dan Agama Islam. Demikian tekunnya Soedirman mempelajari agama Islam oleh kawan-kawannya mendapat julukan 'Haji'"[114].

Dalam hal kegemarannya melakukan "olah kanuragan" tercermin dalam penuturan sbb:

> ".... Ketika Hisbul Wathon mengadakan jambore di desa Batur yang terletak di lereng gunung Slamet yang terkenal sangat dingin lebih-lebih di malam hari. Soedirman sendiri pada saat itu ikut memimpin kelompoknya. Ketika malam tiba.... kawan-kawannya banyak yang meninggalkan kemahnya dan mengungsi ke rumah-rumah penduduk....Tetapi Soedirman pantang mundur dan tetap bertahan di kemahnya. Kepada kawan-kawannya dikatakan: 'Ini adalah latihan ketahanan yang perlu sekali untuk menyiapkan diri apabila mengalami keadaan melebihi dari pada sekarang'. Siapakah yang mengira bahwa ucapannya itu seakan-akan meramalkan dirinya sendiri. Kawan-kawannyapun tidak seorangpun yang mengira bahwa di kemudian hari dia akan menjadi seorang Jenderal yang tak kenal menyerah dan dipatuhi anak buahnya"[115].

Jenderal Soedirman, yang juga Panglima Besar TNI pertama, memang bukan hanya terlahir dari suku Jawa, namun asal-usulnya yang lahir di dukuh Rembang, desa Bantar Barang, kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah[116], secara geografis adalah termasuk wilayah Mataraman dan merupakan

---

[113] S. Sulistyo Atmodjo, *Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman*, Jakarta: Badan Penerbit yayasan Jenderal Soedirman, tt. hal. 2.
[114] Ibid, hal. 2
[115] Ibid, hal. 3
[116] Ibid, hal. 1

punjer tradisi agung *(great tradition)*[117] tradisi Jawa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Pertahanan pertama Republik Indonesia menegaskan akan adanya pengaruh yang sangat kuat dari kepribadian (pikiran, sikap dan perilaku) Soedirman di dalam *military mind* TNI:

> ".... Ketetapan dan ketabahan hati beliau, kesetiaan beliau terhadap perjuangan rakyat Indonesia, usaha-usaha beliau untuk menyusun angkatan perang yang sempurna hendaklah menjadi pedoman dalam hidup tiap prajurit Indonesia, dan dalam perkembangan angkatan perang Indonesia dalam waktu yang akan datang, Panglima Besar Jenderal Soedirman telah memberikan sifat dan arah yang terang kepada angkatan perang Indonesia yakni angkatan perang adalah pelindung rakyat dan abdi rakyat"[118].

Di samping dirinya telah dijadikan model ideal kepribadian prajurit TNI, Soedirmanlah yang meletakkan dasar-dasar identitas institusional TNI yang kini lebih dikenal sebagai "Jati Diri" TNI. Dalam amanat "Order Harian Pangsar"yang disampaikan pada 4 Oktober 1949, ditujukan untuk seluruh anggota Angkatan Perang RI dan rakyat Indonesia antara lain Soedirman menyatakan:

> "Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti sekarang ini, segala tipu muslihat dan provokasi-povokasi yang tampak atau tersembunnyi dapat dilalui dengan selamat, kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Angkatan Perang Republik Indonesia lahir di medan perjuangan kemerdekaan nasional di tengah-tengah dan dari revolusi rakyat dalam pergolakan membela kemerdekaan itu, karena itu, Angkatan Perang Republik Indonesia adalah: tentara nasional, tentara rakyat dan tentara revolusi"[119].

Bagian terakhir dari paragraf pidato Soedirman tersebut di atas telah mengilhami lahirnya konsep "Jti Dri" TNI sekarang, yaitu TNI sebagai: Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional. Dari aslinya terdapat sedikit perubahan dari kata "tentara revolusi" menjadi "tentara pejuang".

---

[117] Konsep "tradisi agung" *(great tradition)* untuk melukiskan adanya tata nilai, sistem keyakinan, pandangan hidup, adat kebiasaan, yang dipancarkan dari tempat tertentu dan oleh komunitas tertentu yang menjadi pusat sumber peradaban. Pancaran tata nilai, sistem keyakinan dan adat kebiasaan itu mengalami perubahan dan penurunan kadar keasliannya manakala sampai di masyarakat luas fenomena ini disebut "budaya cilik" *(little tradition")* . Lebih lanjut dapat dibaca: Laila Shukry El Hamamsy, "Belief System and Family Planning in Peasant Society" dalam Harrison Brown (ed) *Are Our Descendants Doomed?*, (New York: The Viking Press, 1973) hal 336.

[118] Susilo Bambang Yudoyono, 1996, *Ceramah Kepemimpinan pada Kursus Reguler Angakatan XXIII Sesko ABRI* Th 1996/1997 Bandung, 4 Juli 1996.

[119] ____, *Setia dan Menepati Janji Serta Sumpah Prajurit*, Jakarta: Markas Besar Angkatan Darat, th 2006, hal. hal 7-8.

Setelah figur Soedirman, dengan tanpa bermaksud mengecilkan andil para perintis TNI yang bukan berasal dari suku Jawa, seperti misalnya Nasution, T.B. Simatupang, Alex Kawilarang, Andi Aziz dlsb. namun agaknya Jenderal (Purn) Soeharto lah figur yang memiliki pengaruh kuat dalam mewarnai pemikiran militer Indonesia. Terutama pemikiran dan pandangannya tatkala memegang tampuk kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia (1966-1997). Kebetulan Soeharto juga berasal dari daerah pusat tradisi agung budaya Jawa, yaitu Jogjakarta.

Soedirman dan Soeharto sama-sama meraih puncak reputasi yang nyaris melegenda dalam sejarah awal proses pertumbuhan TNI. Reputasi itu membuat keduanya memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan sebagai *'the significant other'* dalam organisasi TNI secara umum, dan korps perwira pada khususnya. Soedirman meraih puncak reputasi itu tatkala berhasil memimpin pertempuran melawan pasukan gabungan Belanda-Inggris dalam apa yang dikenal dengan "Palagan Ambarawa"[120]. Sedangkan Soeharto meraihnya tatkala memimpin "Serangan Oemoem" 1 Maret 1949, untuk mengusir pasukan Belanda dari Jogjakarta yang dikenal dengan sandi "Janur Kuning"[121]. Meskipun seusai Soeharto tidak lagi berkuasa mulai dipersoalkan mengenai siapa penggagas serangan itu. Berdasar catatan Mgr. Soegijopranoto S.J., Hamengku Buwono IX lah penggagasnya[122].

Salah satu dari gagasan pemikiran "besar" Soeharto adalah reinterpretasinya atas konsep "Politik Jalan Tengah" yang pernah digagas oleh Jenderal Nasution pada awal tahun 50-an sebagai respon atas konsepsi "Demokrasi Terpimpin" di dalam konsep tersebut antara lain 50% anggota DPR diisi oleh golongan-golongan fungsonal,

---

[120] Pertempuran Ambarawa terjadi sekitar Nopember-Desember 1945. Pasukan Kol. Soedirman meraih kemenangan dari pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945, kelak tanggal itu dijadikan sebagai Hari Infanteri dan sejak tahun 1999 dirubah menjadi "Hari Juang Kartika". (_____, *Sejarah TNI Jilid I*, ibid. hal. 117-118).

[121] _____, *Sejarah TNI Jilid I*, ibid. hal. 208-212

[122] Harian "Suara Merdeka", Sabtu 2 Maret 2002.

termasuk di dalamnya TNI. Dalam persaksiannya Nasution menyatakan: [123]

> "Dalam suasana gawat politik akibat konsepsi Presiden berseberangan dengan terjadinya kup-kup militer di berbagai negara, maka pada Dies Akademi Militer tanggal 11 Nopember 1958 KSAD menjelaskan bahwa TNI tidak bisa memonopoli kekuasaan (rezim militer), tetapi juga tidak bisa jadi alat sipil *tok* seperti di Barat. TNI adalah salah satu kekuatan perjuangan yang bahu membahu dengan kekuatan-kekuatan lain".

Selanjutnya di tangan Soeharto "Politik Jalan Tengah" lantas mengalami metamorfosis menjadi "Dwifungsi" dan menjadi landasan ideologis yang kuat bagi Soeharto bersama perwira-perwira tinggi seangkatan dengannya untuk meraih kekuasaan politik, sekaligus oleh Soeharto digunakan untuk mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun lebih sebagai sebagai presiden RI (1966-1997).

Makna lahiriah "Dwifungsi" adalah bahwa TNI bukan hanya memiliki fungsi pertahanan tetapi sekaligus juga fungsi sosial dan politik. Dalam perspektif budaya Jawa, 'Dwifungsi' juga memiliki makna batiniah, yaitu sebagai bentuk penyatuan antara dua pasang fungsi yang berlawanan *(binary oposition)*, yaitu fungsi keras (militer) dan fungsi halus (sosial-politik). Dalam gagasan kekuasaan Jawa, apabila dua hal yang berlawanan bisa disatukan menjadi sebuah pasangan maka akan bisa melahirkan kekuatan yang dahsyat. Sebaliknya apabila gagal menyatukan dua berlawanan yang seharusnya berpasangan maka akan melemah bahkan lenyap kekuatan itu.

Maka oleh sebab itu, secara ideologis adalah bukan tanpa alat pembenar tatkala Soeharto memegang tampuk kekuasaan, profesionalisme militer Indonesia ditafsirkan sedemikian rupa sehingga makna dari konsep Dwifungsi dan "tentara rakyat" bisa *compatible* dan dijadikan landasan ideologis bagi strategi politik rezim yang dipimpinnya.

---

[123] Nasution, *Ideologi TNI Menuju Tujuan UUD Proklamasi,* Yogyakarta: Jurnal Media Inovasi Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, th. 1995, hal. 42. Istilah "Jalan Tengah" menurut penuturan Nasution diberikan oleh Prof. Djokosutono, rektor AHM.

Seiring dengan makna yang terkandung dalam istilah Dwifungsi, Soeharto waktu itu juga mengetengahkan beberapa gagasan mengenai profesionalisme ABRI di mana dalam gagasan tersebut meyakinkan akan adanya kecocokan antara profesionalisme TNI dengan doktrin Dwifungsi. Dengan bersumber dari beberapa pernyataannya yang pernah tersiar, setidaknya ada tujuh pandangan:

1) ABRI yang profesional adalah ABRI yang mampu mengabdikan diri dalam kehidupan militer, sosial, dan politik;[124]
2) Profesionalitas ABRI bukan terletak pada persenjataan yang dimilikinya, melainkan pada pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu melindungi rakyat, bangsa dan negaranya terhadap segala ancaman;
3) ABRI yang profesional harus memahami tugas pokoknya dengan baik dengan demikian ia tetap melekat di hati rakyat;[125]
4) ABRI yang profesional harus mempunyai sikap mental teguh dan tegas dibarengi dengan amal perbuatan nyata untuk mempertahankan dan mencapai cita-cita bangsa;
5) ABRI yang profesional harus terus menjaga dan meningkatkan kemampuan tempur di satu sisi, dan di sisi lain harus menjalankan tugas pokok sebagai kekuatan sosial-politik, di mana secara aktif turut serta dalam segala usaha dan kegiatan rakyat serta negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945;
6) ABRI yang profesional harus memiliki keyakinan ideologi, watak ksatria sebagai perwira, dan mental yang tangguh sebagai prajurit;[126]

---

[124] Pidato Presiden Soeharto pada saat melantik Jend. M. Panggabean menjadi Pangad bertempat di Mabad. Dalam Pidato itu Presiden juga mengatakan, kalau dewasa ini ABRI secara aktif mengabdikan dirinya, dalam berbagai kehidupan, tidaklah berarti bahwa ABRI haus kekuasaan, apalagi menyeleweng ke arah sistem diktator militer. Konsep itu juga disampaikan Presiden Soeharto ketika memperingati ulang Tahun ABRI ke-23, "Bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan peranan ABRI yang besar dalam berbagai bidang pemerintahan sekarang ini." Presiden mengatakan bahwa peranan yang besar itu, sama sekali bukan didorong oleh karena ABRI haus kekuasaan, melainkan semata-mata untuk memenuhi kehendak rakyat sebagaimana naluri ABRI yang sejak dilahirkan, yang lalu selalu tunduk kepada rakyat. Sikap yang sama juga disampaikan Soeharto pada saat menyampaikan amanat tertulis pada upacara Prasetya Perwira Wajib Militer ABRI Periode 1968/1969 di Dermaga Ujung Surabaya, ABRI tidak akan menjurus ke arah militerisme, diktator militer, atau diktator dalam bentuk apa pun. *Jejak Langkah Pak Harto*, (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).

[125] Hal ini dikatakan Soeharto ketika menjadi inspektur upacara pada peringatan hari Bhayangkara di Lapangan Mabak, Kebayoran Baru Jakarta tanggal 1 Juli 1968. Selanjutnya disebutkan bahwa ABRI sebagai alat Hankam, ABRI bertugas mengatasi ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sebagai Golkar, ABRI ikut memecahkan masalah-masalah besar bersama potensi lainnya.

[126] Pendapat ini disampaikan Presiden Soeharto pada saat melantik Perwira-perwira remaja lulusan AKABRI, tanggal 10 Desember 1970 di Jakarta. Selanjutnya dijelaskan bahwa, ABRI yang profesional dituntut syarat-syarat yang lebih berat dari pada seorang warganegara biasa, dan setiap prajurit memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada warga negara biasa. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa prajurit ABRI boleh menuntut hak-hak yang lebih besar daripada warganegara yang lain.

7) ABRI yang profesional harus menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi, dan turut serta dalam kegiatan politik, pemerintahan, dan pembangunan, dengan cara bersama-sama dengan rakyat menggerakkan pembangunan dan membina kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila, juga tidak hanya mampu menyingkirkan bahaya yang mengancam, melainkan sekaligus harus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan masa depan bangsa[127].

Seiring dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto (1997) doktrin Dwifungsi pun serta merta kehilangan tuahnya. Para perwira TNI yang tergolong pemikir pun segera melakukan rekonseptualisasi terhadap arti profesionalisme. Jenderal A.C. Mantiri misalnya[128], dalam membuat rumusan militer yang profesional sama sekali tidak menyinggung Dwifungsi. Secara lebih rinci Mantiri mengemukakan lima aspek yang menentukan terwujud-tidaknya profesionalisme TNI yaitu: (1) adanya potensi kemampuan intelektual personil; (2) memiliki kemampuan berkomunikasi, disamping bahasa juga teknologi komunikasi; (3) kemampuan kepemimpinan, karena pada dasarnya setiap personil militer harus mampu menjadi pemimpin dari tingkat terbawah hingga teratas; (4) memiliki kondisi kesamaptaan dan kesehatan yang prima sesuai dengan standar umur bagi personil militer; (5) memiliki motivasi yang kuat dari sanubari setiap personil untuk ingin menjadi personel yang profesional.

Dari kelima aspek tersebut, menurut Mantiri, aspek motivasi menjadi hal yang mengemuka mengingat aspek yang lain sebagian besar porsinya menjadi tanggung jawab dinas, sedangkan motivasi merupakan aspek yang harus dibangun oleh setiap pribadi prajurit.

---

[127] Pernyataan Presiden Soeharto, tanggal 11 Oktober 1971 pada saat membuka *Commander's Call* terbatas ABRI yang berlangsung di Aula Departemen Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan pada saat upacara peringatan Hari ABRI yang ke-25, Presiden mengatakan bahwa 25 tahun ABRI telah banyak berbuat dalam menegakkan prinsip dan cita-cita kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil untuk kita semuanya. Hal ini dilakukan berdasarkan keyakinan ABRI pada Pancasila dan UUD 2945 serta kecintaannya kepada negara kesatuan RI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, ABRI selalu mendapatkan dukungan rakyat, karena rakyat tahu bahwa ABRI berjuang untuk kepentingan rakyat. Unsur dukungan rakyat ini merupakan salah satu modal ABRI yang terpenting yang tidak bolah terlepas dari tangannya.

[128] A.C. Mantiri, "Memelihara Profesionalisme Sepanjang Masa Penugasan," dalam *Majalah Akademi Tentara Nasional Indonesia*, Edisi Desember 2000, hal 15.

Lebih tegas dari semua pengertian di atas, adalah pandangan dari Endriartono Sutarto[129], yang mendefiniskan profesionalisme sebagai berikut.

> "Profesionalisme sangat terkait dengan kemampuan untuk menjalankan tugas pokoknya, patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,...lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,...senantiasa mendorong berlangsungnya proses demokrasi bangsa,...menjalankan peran dominan di bidang pertahanan dan keamanan,...tidak terlibat langsung dalam bidang politik."

Tidak berbeda secara esensial adalah pemahaman yang dikemukakan oleh Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (1996) yang menyatakan bahwa seorang prajurit yang profesional mempunyai kriteria sebagai berikut. Apabila bertindak (dalam ukuran tertentu) ia akan sebagai: (1) seorang patriot, (2) seorang komandan, (3) seorang pembina (manajer), (4) seorang pemikir (*strategist and tactician,*), dan (5) seorang yang ahli pada bidangnya atau kecabangannya. Selain itu, sosok dan kriteria seorang prajurit TNI yang profesional sesuai dengan hakikat dan filsafat "Tri Sakti Wiratama", yaitu (1) harus mempunyai mental yang tangguh, (2) intelegensi yang tinggi, dan (3) fisik yang kuat.

Berdasar pendapat tersebut, selanjutnya Yudhoyono mengemukakan tolok ukur profesionalisme prajurit yaitu apabila mampu mengemban tugas pertahanan negara dengan baik, disiplin, loyal, dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan setiap tugas yang dipercayakannya. Hal itu dilakukan hanya karena motivasi panggilan, pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok, dan atau kepentingan politik tertentu. Mengenai kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang Prajurit, TNI harus: (1) memiliki kemampuan tangkal, (2) memiliki kekuatan yang cukup (*Minimal Essential Force*) untuk tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara,

[129] Endriartono Sutarto, *Memahami TNI dan Netralitasnya,* (Jakarta: Puspen TNI, 2002) hal 13

dan (3) mampu mengemban tugas menghadapi ancaman dari luar dan gangguan keamanan dari dalam suatu negara.

Dengan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, konsep profesionalisme militer meskipun sangat berbeda antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, akan tetapi mempunyai beberapa titik temu. Apabila berbagai arus pemahaman tentang profesionalisme militer Indonesia yang muncul pada era setelah era Orde Bareu tersebut di atas disarikan dan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-undang no. 34 tahun 2004, tentang TNI; khususnya pasal 2 ayat 2, maka profesionalisme TNI dapat diikhtisarkan dalam bentuk diagram segi lima (pentagonal) sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 1

DIAGRAM PENTAGONAL PROFESIONALISME TNI

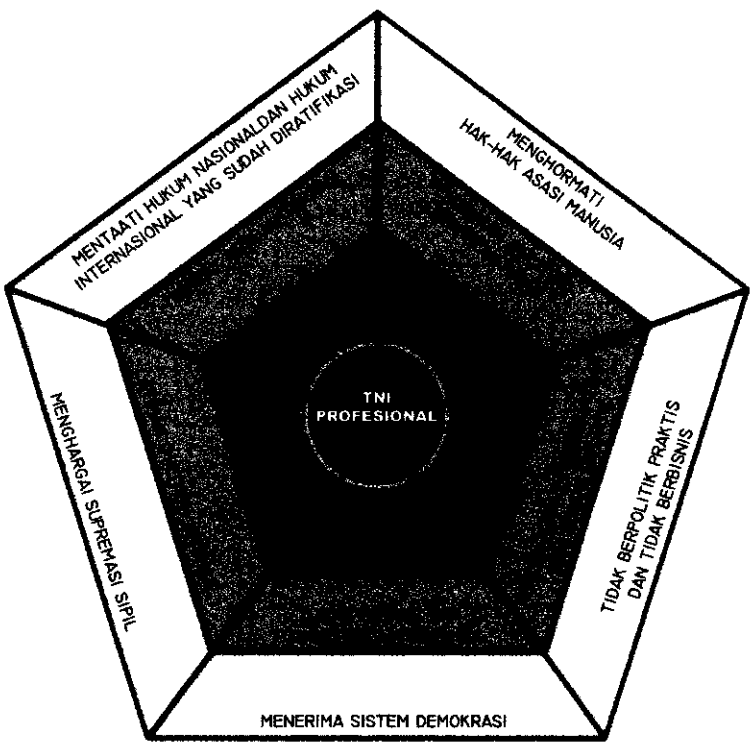

Dalam diagram tersebut terdapat tiga tandan *(cluster)* landasan substantif pembentukan profesionalisme TNI yaitu; Tandan I, norma pokok profesionalisme

TNI; Tandan II, pra-syarat profesionalisme TNI; dan Tandan III, komponen kepribadian TNI yang profesional. Selanjutnya, pada masing-masing tandan tersebut terdapat lima aspek.

Tandan terluar (I) berisi landasan-landasan normatif yang dijadikan pedoman institusi maupun individu guna terwujudnya profesionalisme TNI, yaitu: TNI harus menerima diberlakukanya sistem demokrasi, menghargai supremasi sipil, mentaati hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi, menghormati hak-hak asasi manusia, tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis.

Tandan II adalah berisi lima prasyarat mutlak yang diperlukan bagi pembentukan TNI profesional yaitu: terdidik dengan baik dalam program pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan, terlatih dengan baik dalam medan latihan yang intensif, dipersenjatai dengan baik didukung dengan adanya alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang memadai dan modern, menjalani penugasan-penugasan baik tempur maupun non tempur, baik dalam perang maupun selain perang; dan kesejahteraan terjamin baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Tandan terdalam (III) adalah memuat lima komponen kemampuan dan sikap mental yang harus dimiliki oleh pribadi TNI yang profesonal yaitu: memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, memiliki kesamaptaan yang relatif sempurna, memiliki motivasi yang kuat, memiliki kemampuan memimpin yang baik, lancar dan mahir dalam melakukan komukasi berikut menggunakan teknologi komunikasinya.

6. *Sekitar Doktrin TNI*

Pembahasan selanjutnya dalam sub-bagian ini adalah mengenai doktrin TNI. Kata Doktrin adalah merupakan derivat dari bahasa Inggris abad pertengahan yang diambil dari bahasa latin *doctrina* yang berarti: ajaran, pelajaran, atau perintah, salah

satu kata jadiannya adalah kata *Doctor* berarti orang terpelajar. Dalam perkembangan terakhir, doktrin memiliki banyak arti yaitu: (1) pemikiran, pengajaran, (2) suatu ajaran yang dianggap prinsip atau sakral, (3) teori atau prinsip-prinsip hukum, dan (4) pernyataan resmi mengenai kebijakan nasional suatu negara[130].

Tidak ada definisi formal yang diterima secara internasional mengenai konsep doktrin. Di dalam militer, doktrin dilihat dalam kaitannya dengan strategi dan taktik, yang dijadikan dasar atau landasan bagi pelaksanaan pendidikan militer dan latihan lapangan. Namun doktrin kadang diartikan sebagai *"military's forecast"* yang berisi tentang ramalan scenario peristiwa yang bakal terjadi yang berkaitan dengan masalah keamanan. Di samping itu doktrin juga bisa diartikan sebagai aplikasi organisasimiliter dalam hal bagaimana pasukan akan dikerahkan dalam suatu operasi pertempuran[131].

Dasar organisasi dan operasi militer adalah lebih terkait dengan *group*, ketimbang tindakan individual. Misalnya anggota terkecil infantri adalah *squad* atau peleton. Mereka bekerja sebagai *team*. Dengan demikian penggunaan setiap formula suatu doktrin adalah *"This is the way we do it"*.

Adapun Donald S. dan Marshal Trevor N. Dupuy menyebutkan:

> *"Doctrine is defined in the Dictionary of Military Terms as: "Fundamental principles by which the military forces or elements thereof guide their actions in support of national objectives"*[132].

Dari beberapa arti istilah doktrin tersebut di atas, untuk kepentingan pembahasan ini akan lebih dititik beratkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Donald S. dan Trevor N. Dupuy tersebut di atas. Dan ada tiga doktrin yang menjadi

---

[130] Donald S. & Marshal Trevor N Dupuy, (editor), *International Military and Defense Encyclopedia,* hal. 773.
[131] Ibid, hal. 774.
[132] Ibid. hal. 775.

pegangan setiap prajurit TNI yaitu: (1) Sapta Marga, (2) Sumpah Prajurit, (3) Wajib TNI, sedang bagi Perwira, di samping ketiga tersebut ditambah dua lagi yaitu: Sebelas Azas Kepemimpinan TNI dan Kode Etik Perwira.

(1) "Sapta Marga" adalah berarti tujuh jalan atau semacam garis perjuangan TNI. Terdiri dari tujuh butir kalimat yang berbunyi:

1. Kami warga Negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran kebenaran keadilan,
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari Negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

(2) "Sumpah Prajurit" adalah sumpah yang diberlakukan bagi setiap anggota TNI baik Tamtama, Bintara maupun Perwira. Terdiri dari lima butir dan berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah / berjanji:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dengan tidak membantah perintah atau keputusan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuih rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

(3) "Delapan Wajib TNI", kalau Sapta Marga adalah norma-norma yang mengatur hubungan pribadi prajurit dengan institusi TNI, maka Delapan Wajib TNI adalah norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap prajurit TNI dalam berhubungan dengan masyarakat luar. Sesuai dengan namanya, Delapan Wajib TNI terdiri dari delapan butir:

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

(4) "Sebelas Azas Kepemimpinan TNI" adalah berisi asas-asas kepemimpinan di dalam TNI yang terdiri dari 11 butir:

1. **Taqwa**
   Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya.
2. **Ing ngarsa sung tulada**
   Memberi suri tauladan dihadapan anak buah.
3. **Ing madya mangun karsa**
   Ikut bergiat serta menggugah semangat ditengah-tengah anak buah.
4. **Tut wuri handayani**
   Mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
5. **Waspada purba wisesa**
   Selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
6. **Ambeg parama arta**
   Dapat memilih dengan tepat mana yang harus dilakukan.
7. **Prasaja**
   Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
8. **Satya**
   Sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan, dari bawahan terhadap atasan dan ke samping.
9. **Gemi nastiti**
   Kesabaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.
10. **Belaka**
    Kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan- tindakan.
11. **Legawa**
    Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.

(5) Kode Etik Perwira (Budi Bakti Wira Utama), adalah kode etik profesi yang hanya berlaku bagi para perwira TNI, yang berbunyi sebagai berikut:

Budi: Perwira Tentara Nasional Indonesia berbuat luhur, bersendikan:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Membela kebenaran dan keadilan.
3. Memiliki sifat-sifat kesederhanaan.

Bakti: Perwira Tentara Nasional Indonesia berbakti untuk.
1. Mendukung cita-cita nasional.
2. Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.

3. Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia.
4. Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan rakyat Indonesia.

Wira: Perwira Tentara Nasional Indonesia adalah kesatria:
1. Memegang teguh kesetiaan dan ketaatan.
2. Pemimpin (soko guru) dari bawahannya.
3. Berani bertanggungjawab atas tindakannya.

Utama: Perwira Tentara Nasional Indonesia adalah.
1. Penegak persaudaraan dan kemanusiaan.
2. Penjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira Tentara Nasional Indonesia.

Dengan menganalisis isi yang terkandung di dalam kalimat dari ke lima doktrin TNI tersebut dan tiga aspek profesionalisme (expertaise, social responsibility, dan corporateness) dari Huntington digunakan sebagai instrumen penimbang maka akan terlihat sebagaimana tertuang di dalam tabel berikut.

Tabel 1

DOKTRIN ETIK TNI
DITIMBANG DENGAN
KRITERIA PROFESIONALISME MILITER HUNTINGTON

Doktrin TNI	Jabaran Masing-masing Doktrin	KRITERIA HUNTINGTON		
		EXPERTISE	SOCIAL RESPONSI-BILITY	CORPORA-TENESS
Sapta Marga	1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila		V	
	2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah		V	
	3. Kami kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran kebenaran keadilan		V	
	4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia		V	
	5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit			V
	6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa		V	V

	7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit			V
Sumpah Prajurit	Demi Allah saya bersumpah / berjanji:			
	1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945		V	
	2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan			V
	3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan			V
	4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia		V	V
	5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya			V
Delapan Wajib TNI	1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat		V	
	2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat		V	
	3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita		V	
	4. Menjaga kehormatan diri di muka umum			V
	5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan			V
	6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat		V	
	7. Tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat		V	
	8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya		V	
Sebelas Asas Kepemimpinan TNI	1. *Taqwa:* Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya			V
	2. *Ing ngarsa sung tulada:* Memberi suri tauladan dihadapan anak buah			V
	3. *Ing madya mangun karsa:* Ikut bergiat serta menggugah semangat ditengah-tengah anak buah			V
	4. *Tut wuri handayani:* Mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah			V
	5. *Waspada purba wisesa:* Selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah			V

	6. *Ambeg parama arta:* Dapat memilih dengan tepat mana yang harus dilakukan		V	
	7. *Prasaja:* Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan		V	
	8. *Satya:* Sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan, dari bawahan terhadap atasan dan ke samping			V
	9. *Gemi nastiti:* Kesabaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan		V	
	10. *Belaka:* Kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan		V	
	11. *Legawa:* Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya		V	V
Kode Etik Perwira (Budi Bakti Wira Utama)	*Budi:* Perwira Tentara Nasional Indonesia berbuat luhur bersendikan:			
	1. Ketuhanan Yang Maha Esa			V
	2. Membela kebenaran dan keadilan		V	
	3. Memiliki sifat-sifat kesederhanaan			V
	Bakti: Perwira Tentara Nasional Indonesia berbakti untuk:			
	1. Mendukung cita-cita nasional		V	
	2. Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia		V	
	3. Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia		V	
	4. Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan rakyat Indonesia		V	
	Wira: Perwira Tentara Nasional Indonesia adalah ksatria:			
	1. Memegang teguh kesetiaan dan ketaatan			V
	2. Pemimpin (soko guru) dari bawahannya			V
	3. Berani bertanggungjawab atas tindakannya		V	
	Utama: Perwira Tentara Nasional Indonesia adalah:			
	1. Penegak persaudaraan dan kemanusiaan		V	
	2. Penjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira Tentara Nasional Indonesia			V

Setelah diadakan analisis secara seksama terhadap ke lima doktrin TNI berikut butir-butir pernyataan yang ada didalamnya, tampak sebagian besar (25 butir) adalah berisi tentang tanggung jawab sosial *(social responcibility)*, sedang sebagian lagi (21 butir) berisi tentang jiwa korsa *(corporateness)* dan kepribadian. Selain itu terdapat beberapa butir pernyataan yang kandungan maknanya memiliki lebih dari satu katagori, yakni tanggung jawab sosial sekaligus jiwa korsa dan kepribadian. Adalah sangat menarik bahwa tidak ada satu butir pernyataan pun di dalam doktrin-doktrin tersebut yang isinya secara tersurat merujuk pada aspek-aspek keahlian *(expertise)*.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian ini sejak semula dirancang sebagai sebuah penelitian fenomenologis. Dalam usaha menjaga konsistensi terhadap rancangan penelitian tersebut penulis berusaha menskemakannya secara runtut yaitu mulai dari metodologi penelitian, pendekatan, prosedur hingga metode penelitian.

Agar tidak terjebak ke dalam berbagai perbedaan skematik dalam memposisikan beberapa istilah konseptual-teknis, penulis membuat skema dengan memulai dari: (1) Metodologi Fenomenologis, (2) Metode fenomenologis, (3) Prosedur penelitian fenomenologis.

0. *Metodologi Penelitian*

Sering terdapat kerancuan semantik antara pengertian "metodologi" dengan "metode" penelitian, sebagaimana halnya penggunaan istilah perspektif *(perspective)* dan pendekatan *(approach)* penelitian. Bogdan dan Taylor misalnya tidak terlalu menaruh peduli akan perbedaan dua kata tersebut. Sering dua kata tersebut digunakan secara bergantian untuk maksud dan arti yang sama. Meski

demikian Bogdan dan Taylor juga membuat rumusan tentang metodologi atau metode sebagai berikut:

> "Dalam arti yang luas, istilah **metodologi** menunjuk kepada proses, prinsip, serta prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari masalah tersebut. Dalam ilmu-ilmu sosial istilah tersebut [metodologi] diartikan sebagai cara seseorang melakukan penelitian. Seperti dalam apa saja yang kita lakukan, asumsi, minat, serta tujuan kita sangat mempengaruhi pilihan prosedur metodologis kita Secara ringkas sebagaian besar perdebatan tentang **metode** adalah perdebatan tentang asumsi dan tujuan, teori dan perspektif (huruf cetak tebal adalah dari penulis)[133].

Namun demikian ada juga yang mencoba melakukan klarifikasi antara kata 'metodologi' dan 'metode'. T.D. Wilson misalnya menyatakan: *"Metodology, however, is prior to method and more fundamental, it provides the philosophical groundwork for methode*[134]. Metodologi adalah berada lebih dahulu dan lebih mendasar dari pada metode. Metodologi menyediakan landasan filosofis bagi bekerjanya metode-metode. Hal sama dikemukakan Michelle M. Byrne, bahwa metodologi itu mengkaitkan suatu filsafat tertentu dengan metode-metode penelitian yang cocok; serta menjembatani ide-ide filosofis yang ada dengan praktek penelitian dan strategi penelitian yang dapat diterapkan[135].

Metodologi, menurut Wilson, bertitik tolak dari pandangan tentang hakekat realitas sosial yang secara garis besar terdapat dua pandangan yaitu pandangan positivisme dan pandangan fenomenologis. Posisi metodologis pihak positivisme adalah bahwa dunia itu adalah obyek nyata yang ditandai dengan adanya fakta-fakta sementara itu posisi metodologis bagi pihak fenomenologis adalah bahwa dunia itu adalah sebuah inter-subyektifitas yang terdiri makna-makna yang dikonstruksikan.

---

[133] Robert Bogdan & Steven J Taylor (Arif Furchan, penerjemah.), *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif,* Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1992, hal 17.
[134] T.D. Wilson,*"Alfred Schutz, Phenomenology and Research Methodology for Information Behaviour Research"*, t.d.wilson@shef.ac.uk, 2002.
[135] Michelle M. Byrne, *Understanding Life Experience Through a Phenomenological Approach to Research,* AORN Journal, April, 2001.

Pandangan serupa disampaikan Irwin Deutscher yang menyebutnya sebagai dua "perspektif-teoritis utama" yang telah menguasaai dunia ilmu sosial. Positivisme, berasal dari para teoritisi sosial besar abad sembilan belas dan awal abad ke dua puluh, terutama August Comte dan Emile Durkheim. Penganut paham positivisme ini mencari fakta atau sebab musabab gejala sosial dengan tidak banyak mempertimbangkan keadaan subyektif individu. Sedang fenomenologi terutama berasal dari Max Weber yaitu ingin memahami perlaku manusia dari kerangka berpikir pelaku itu sendiri.

Karena persoalan yang didekati serta jawaban yang dicari oleh kaum positivis dan kaum fenomenologis itu berbeda maka penelitian mereka pun pada umumnya memerlukan metodologi yang berlainan. Kaum positivis mencari "fakta" dan "sebab" musabab melalui metode seperti kuesioner, survai, inventori dan analisis demografis, yang menghasilkan data kuantitatif dan memungkinkan mereka secara statistik membuktikan adannya hubugan antara variable-variabel yang telah dirumuskan secara operasional. Sebaliknya kaum fenomenologis mencari pemahaman lewat metode kualitaif seperti pengamatan peserta *(participant observation),* wawancara terbuka-mendalam dan dokumen pribadi. Metode-metode ini menghasilkan data deskriptif yang memungkinkan mereka melihat dunia ini seperti yang dilihat subyek .

Pemaparan pada bagian "Metodologi Penelitian" tersebut di atas dimaksudkan untuk mempertegas posisi penelitian ini. Yaitu bahwa pada level metodologis, penelitian ini adalah bersifat fenomenologis. Data yang dicari adalah bersifat kualitatif sudah barang tentu untuk mendapatkan data tersebut diperlukan

teknik-teknik yang sesuai. Dengan demikian realitas yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah makna-makna yang dikonstruksikan secara intersubyektif[136].

0. *Metode Penelitian*

Sebagaimana Metodologi penelitiannya, metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode fenomenologis. Namun karena masalah penelitian ini memiliki aspek-aspek historis yang harus diungkap maka penelitian ini juga menggunakan metode *Historical Sociology* atau Sosiologi Sejarah, yang lebih ditekankan pada aspek Sejarah Mentalitas (*History of Mentality*).

d. Metode Fenomenologi

Fenomenologi sebagai metode penelitian telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang pada sisi yang lain juga telah memunculkan beberapa perspektif fenomenologi, salah satu di antaranya adalah fenomenologi reflektif atau fenomenologi transendental[137]. Tentu membahas perkembangan aliran dan perbedaan metode fenomonelogi adalah bukan menjadi maksud penelitian ini. Sebaliknya untuk kepentingan penelitian ini perlu ditegaskan bahwa metode fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada fenomenologi yang digagas oleh Edmund Husserl (1859-1938) yang pada intinya, sebagaimana disimpulkan oleh J.J. Kockelmans dalam bagian pengantar bukunya *"The Philosophy of Edmund Husserl"* dinyatakan bahwa gagasan pokok *(mean idea)*

---

[136] Intersubyektivitas atau *intersubjectivity*, adalah istilah yang digunakan di dalam Sosiologi Fenomenologi, untuk menunjukkan adanya *'the mutual constitution'* di dalam relasi sosial. Didalamnya mengandung konsep bahwa orang dapat mencapai konsensus mengenai pengetahuan atau mengenai apa yang mereka alami bersama di dalam dunia kehidupannya —setidak-tidaknya istilah itu sudah dijadikan kesepakatan kerja *(working agreement)* untuk tidak melakukan klaim akan adanya obyektivitas. (Gordon Marshal Ed., *Oxford Dictionary of Sociology*, New York: Oxford University Press, th. 1998 , hal. 328).

[137] Di samping fenomenologi transendental *(transcendental phenomenology)* juga ada *dialogical phenomenology, existential phenomenology, hermeneutic phenomenology*, dan *empirical phenomenology* (lihat John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, SAGE Publication, 1998, hal. 53).

fenomenologi Husserl adalah memandang tugas ilmu-ilmu sosial itu berada pada bentangan garis (interval) yang memiliki dua kutub ekstrem. Di satu pihak, ilmu-ilmu sosial bertugas melukiskan realitas sosial setepat mungkin serta menjelaskannya sebagai obyek, di pihak lain bertugas untuk memahami realitas sosial sebagaimana adanya dalam subyek. Di antara dua kutub itu, fenomenologi bertindak sebagai "jembatan" (*bridging*) yang menghubungkan realitas subyektif "di sini" dengan realita obyektif yang ada "di luar sana", sehingga dengan peranannya sebagai jembatan itu --sebagaimana dikemukakan oleh Max Scheler, fenomenologi menjadi jalan yang mengarah pada penyingkapan suatu hakekat atau esensi[138]. Jadi realitas subyektif dan realitas obyektif itu bukan ibarat dua sisi sebuah kepingan. Tugas ilmu-ilmu sosial juga bukan untuk memilih salah satu sisi dari sesuatu kepingan itu.

Dengan bertitik tolak dari jalan pikiran Kockelmans dan Scheler di atas secara sederhana perlu dinyatakan di sini bahwa "hakekat" yang akan disingkap dalam penelitian ini pada intinya adalah tentang "bagaimana makna profesionalisme yang ada dalam alam kesadaran perwira menengah TNI Angkatan Darat".

Untuk menuju kearah penyingkapan hakekat tersebut, di samping menetapkan metode-metode yang bisa berfungsi sebagai jembatan, langkah yang harus dilakukan adalah *Bracketing*[139] atau tahap reduksi fenomenologi yang dalam metode Fenomenologi berarti "menangguhkan lebih dulu" keyakinan, anggapan-anggapan umum, dan prasangka-prasangka teoritik di sekitar fenomena yang akan

[138] J.J. Kockelmans (ed). *The Philosophy of Edmund Huserl*, New York, 1967.

[139] Sekedar sebagai bahan bandingan, istilah "Bracketing" digunakan juga dalam fotografi: yaitu memotret dengan beberapa kali pengukuran pencahayaan yang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil pemotretan dengan pencahayaan yang akurat. Semula pemotretan dilakukan sesuai ukuran cahaya normal yang diterima oleh kamera. Pemotretan kedua dengan mengurangi kekuatan cahaya satu tingkat. Pemotretan ketiga melebihkannya satu tingkat. Semua dilakukan dengan cara membuka atau mengubah besaran diafragma dan kecepatan rana. (Atok Sugiarto, "Bracketing Pada Kamera Digital", *Suara Pembaharuan Minggu*, 17 Oktober, 2004).

diungkap sehingga fenomena tersebut terlepas dari penilaian-penilaian tertentu sampai ditemukan landasannya berupa pengalaman-pengalaman murni dari Subyek Penelitian. Penangguhan inilah yang oleh Husserl disebut *epoche*[140].

Di dalam penelitian ini *bracketing* akan dilakukan terhadap pandangan-pandangan dan asumsi-asumsi teoritik yang berkaitan erat dengan masalah profesionalisme militer sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu. Pandangan-pandangan dan prasangka-prasangka teoritik yang dimaksud tersebut telah direkonstruksi melalui kajian pustaka, yang dikelompokkan pada dua katagori, yaitu bersifat nomotetik dan ideografis. Yang bersifat nomotetis adalah postulat-postulat teoritik yang dikemukakan para ahli militer terutama oleh Huntington mengenai profesionalisme militer yang di dalam khazanah studi militer disebut *Old professionalism,* apabila diderivasikan (diturunkan) untuk memberi penilaian *(judgment)* masalah profesionalisme TNI pernyataan akan berbunyi sbb:

1) Bahwa keahlian utama perwira adalah manajemen kekerasan, oleh sebab itu seorang perwira pada dasarnya adalah seorang manajer kekerasan.
2) Bahwa wilayah peran militer itu hanya di bidang keamanan militer dan berfungsi sebagai alat pertahanan.
3) Bahwa perwira itu dididik dan dilatih untuk memimpin pertempuran dalam perang (saja).

Sedangkan yang tergolong ideografis adalah deskripsi sejarah dari perpektif sosiologis mengenai tradisi ketentaraan di Indonesia, berbagai pandangan dan pemikiran para pendiri dan perintis TNI, serta UU No 34 Th. 2004 mengenai TNI, yang antara lain dalam pasal 2 ayat (d) Bab II Undang-Undang RI no 34 tahun 2004, yang berbunyi:

> "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta

[140] John Creswell, Ibid, hal. 52.

mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi"[141].

Kiranya perlu dijelaskan di sini *Bracketing* adalah tidak sama dengan hipotetis dalam tradisi penelitian kuantitatif positivistik dimana dalam pendekatan penelitian semacam itu hipotesis adalah menjadi sasaran pembuktian penelitian. Adapun *Bracketing* adalah lebih merupakan sebuah "giro kompas" atau "mercu suar", yang memberi informasi mengenai ancar-ancar di mana posisi "petualangan" penelitian fenomenlogis dilakukan atau ke mana haluan "biduk" penelitian harus diarahkan. Jadi membuktikan benar tidaknya atau cocok tidaknya pandangan dan asumsi teoritik yang ditahan di dalam kurung dengan pemahaman Subyek Penelitian adalah bukan tujuan sejatinya dari penelitian ini.

Oleh sebab itu masalah jarak antara masa pendidikan militer pertama Subyek Penelitian dengan waktu disahkannya Undang Undang No 34 tahun 2004, misalnya, juga bisa dikesampingkan. Memang Subyek Penelitian adalah lulusan Akademi Militer paruh kedua tahun 80-an, sedangkan Undang-Undang tersebut baru disahkan pada tahun 2004, terpaut sekitar 15 tahun. Hal tersebut secara teoritik bisa berarti penyelenggaran pendidikan yang dilaksanakan di akademi militer waktu itu belum dijiwai oleh semangat Undang-Undang tersebut. Namun demikian, rentang waktu antara saat Undang-Undang tersebut disahkan (2004) dengan saat penelitian dilaksanakan (2006-2007) adalah waktu yang dipandang cukup bagi proses sosialisasi Undang-Undang tersebut bagi perwira Subyek Penelitian lagi pula selama dalam penugasan setamat dari akademi militer pertama (Dikma) mereka juga menempuh berbagai pendidikan pengembangan. Lagi pula sebagaimana sudah dibahas panjang lebar dalam bagian pendahuluan bahwa kehendak untuk

[141] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia.

membangun TNI sebagai militer profesional itu sudah muncul sejak awal pembentukannya.

Tahap selanjutnya adalah menggali dan mengumpulkan data dari para informan dengan melalui teknik-teknik yang relevan antara lain wawancara yang mendalam *(indepht interview),* angket terbuka, dan diskusi kelompok terfokus. Dari data yang terkumpul dibuat kompilasi tematik, data dipilah-pilah ke dalam sub-sub tema sesuai dengan tema umum penelitian. Termasuk pada tahap ini peneliti berusaha keras melakukan "penyelaman" ke dalam alam kesadaran subyek (*contemplating the content of mind*) yang berupa aktivitas-aktivitas mengingati (*remembering*), meresapi (*perceiving*), dan mengingini (*desiring*) di mana ketiga jenis aktivitas kesadaran tersebut memiliki keterarahan (*directedness*) pada "sesuatu" yang di dalam metode fenomenologi disebut intensionalitas (*intentionality*). Dan "sesuatu" dalam penelitian ini itu adalah tema penelitian itu sendiri yaitu profesionalisme TNI.

Dengan mengikuti jalan pikiran tersebut di atas, maka yang dimaksud alam kesadaran subyek dalam penelitian ini adalah alam kesadaran para perwira menengah TNI yang menjadi Subyek Pelitian, yaitu aktivitas (1) kenangan atas pengalaman mereka, (2) kesan dan penghayatan atas yang dialami dan (3) keinginan serta harapan mereka yang mengarah kepada soal profesionalisme TNI.

Proses terakhir dari metode fenomenologi ini adalah *transendensi fenomenologi* yaitu mencari dan menemukan interelasi dan koherensi data dari lapangan yang digali dari Subyek Penelitian dengan keyakinan, pandangan-pandangan dan prasangka-prasangka teoritik yang sebelumnya ditangguhkan *(bracketed).* Dari tahap ini, melalui pemikiran reflektif dan spekulatif diharapkan

akan diketemukan nilai-nilai dibalik makna-makna (*meanings*) yang ditemukan di sekitar profesionalisme TNI.

b. Metode Sosiologi Sejarah

Secara umum yang dimaksud Metode Sosiologi Sejarah *(Historical Sociology)* adalah suatu telaah sosiologis yang didasarkan pada sumber-sumber data sejarah, baik itu menggunakan data dokumen orisinal dari arsip ataupun menggunakan tulisan-tulisan sejarah yang disusun oleh sejarawan[142]. Sedangkan Sejarah Mentalitas *(History of Mentality)* sebagaimana dinyatakan oleh Kuntowijoyo[143] adalah salah satu bentuk metode penelitian (sejarah) yang lebih memusatkan perhatian mengenai keadaan, perilaku, dan bawah sadar kolektif. Dengan demikian ia tidak sepenuhnya tergantung pada adanya peristiwa-peristiwa spektakular dan "orang besar" pembuat sejarah.

Metode ini menggunakan alat bantu teori-teori ilmu lain terutama sosiologi, dan antropologi sosial. Kuntowijoyo menyatakan, pendekatan sejarah mentalitas memandang sangat penting adanya sistem simbol. Karena sebagaimana pendapat Mary Douglas, sistem simbol yang terstruktur secara sosial adalah sebagai sumber pengalaman. Keterkaitan antara pendekatan Sejarah Mentalitas dengan pendekatan fenomenologi antara lain karena Sejarah Mentalitas memandang sangat penting

---

[142] Gordon Marshal, *Dictionary of Sociology*, Oxford University Press, 1998, hal.277-278.

[143] Kuntowijoyo, *Raja Priyayi dan Kawula,* Yogyakarta: Penerbit Ombak, th 2006, hal. 1-2 dan 10. Perlu sedikit dijelaskan di sini, istilah "Sejarah Mentalitas" diperkenalkan oleh Fernand Braudel, sejarawan Prancis yang bersama, antara lain, dengan Jacques Legoff, membentuk madzhab sejarawan *Les Annales*. Ia membagi tiga lapisan sejarah atas dasar 'kecepatan'; yakni 'Sejarah Peristiwa-Peristiwa', 'Sejarah Geologi', dan 'Sejarah Mentalitas'.

Sejarah Peristiwa berjalan paling cepat, sedangkan Sejarah Geologi berjalan lambat sekali. Kemudian Sejarah Mentalitas, berjalan lambat yang perubahannya kadang harus dihitung dengan ukuran abad.

Yang dimaksud mentalitas *(mentalite)* di sini adalah sesuatu yang tertanam dalam lubuk budaya suatu masyarakat yang bentuk keluarannya adalah reaksi otomatis terhadap masalah-masalah sosisal, politik, dan ekonomi. Pemikiran Braudel antara lain, terdapat dalam bukunya (terjemahan dari Bahasa Prancis) *The Mediterranea and the Mediterranean World in Age of Philip II* (1949 dan 1966).

penggunaan kerangka penjelas teori konstruksi sosial *(Social Construction Theory)* Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut perspektif Sejarah Mentalitas, masyarakat itu melihat realitas sosial --dengan disposisi mentalnya-- adalah dengan tidak secara langsung melainkan melalui sebuah konstruksi sosial[144].

Dalam kaitannya dengan manfaat pendekatan sejarah mentalitas, menguatkan pendapat Kuntowijoyo, J. Kadjat Hartojo menyatakan bahwa dengan pendekatan tersebut, sejarah masa lalu akan jauh lebih bisa dipahami dari pada sekedar sejarah serba peristiwa yang menjelaskan peristiwa dalam hubungan kausal dengan peristiwa lain[145].

Penggunaan *Historical Sociology* dalam penelitian ini adalah sebagai penyempurna atas pendekatan fenomenologi. Fungsinya sangat fital sebab rasanya tidak mungkin mengungkap fenomen-fenomen yang berkenaaan dengan profesionalisme militer (TNI) tanpa mempertautkannya dengan dimensi ruang-waktu masa lalu. Lebih spesifik lagi, tidak mungkin menyingkap esensi pemahaman tentang profesionalisme militer tanpa mengkaitkannya dengan sejarah mentalitas yang ada. Pentingnya pendekatan *Historical Sociology* dalam penelitian ini dapat diresapi dari substansi yang ada dalam pemaparan latar belakang masalah serta diskripsi wilayah penelitian.

Sedikit kembali ke *Historical Sociology,* memang penggunaan pendekatan ini masih mengundang kontroversi. Sejarawan Charles Wilson, guru besar sejarah dari *University of Cambridge* misalnya, menyebut sosiolog yang menggunakan pendekatan *Historical Sociology* sebagai ilmuwan yang tidak pernah yakin dengan caranya sendiri. Namun E.H. Carr, penulis buku *"What is History"* menyatakan

[144] Kunto Wijoyo, loc.cit.
[145] Kadjat Hartoyo, dalam Kuntowijayo, ibid. hal xix.

bahwa dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan penggunaan pendekatan *Sociological History* dalam studi sejarah sebagaimana juga semakin dibutuhkan penggunaan pendekatan *Historical Sociology* dalam sosiologi. Katanya lebih lanjut: *"Let the frontier between them be kept open for two-way traffic"*[146]. Malahan, Anthoni Giddens (dalam *"Central Problem in Social Theory", 1979)* menyatakan bahwa tidak ada perbedaan logika bahkan metodologi antara ilmu-ilmu sosial dengan sejarah. Praktisi dari ke dua disiplin ilmu tersebut mempunyai tujuan sama yaitu menganalisis tingkah laku yang bermakna dari individu ataupun kelompok, memahami secara tepat tentang proses, hubungan, dan perubahannya.

3. *Teori-teori Fenomenologi yang Digunakan*

Di dalam bagian terdahulu sudah disinggung bahwa gagasan pokok metode fenomenologi adalah menjembatani tugas ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya berada pada bentangan garis yang memiliki dua kutub ekstrem. Yaitu realitas subyektif yang ada "di sini" di satu kutub, dengan realita obyektif yang ada "di luar sana" di kutub yang lain. Oleh sebab itu semua teori sosial yang dikembangkan dengan maksud untuk menemukan esensi dengan jalan merujukkan dua kutub ekstrem tersebut pada dasarnya adalah tergolong metode fenomenologi. Sekalipun teori-teori tersebut tidak betul-betul berada di dalam posisi tengah, karena bisa jadi masing-masing teori memiliki kecondongan ke arah salah satu kutub tertentu.

Di antara teori-teori fenomenologi yanga ada, yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah: Teori Konstruksi Sosial *(Social Construction)* oleh Peter L. Berger & Thomas Luckmann; dan Teori Interaksionisme Simbolik *(Symbolic Interactionism)* oleh George Herbert Mead;

---

[146] Gordon Marshal, Ibid. hal. 279.

Masing-masing teori dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

a. Teori Konstruksi Sosial Berger

Sebagaimana dinyatakan oleh Margaret Poloma, bahwa "darah" fenomenologi yang mengalir dalam teori yang dikembangkan oleh Peter L. Berger adalah diwarisi dari gurunya seorang fenomenolog, yaitu Alfred Schutz. Dari ide-ide Schutz ini, dua muridnya yaitu Berger dan Garfinkel mengembangkan teori-teori sosialnya. Berger – bersama Thomas Luckmann-- mengembangkan teori Konstruksi Sosial dan Garfinkel mengembangkan teori Etno Metodologi[147]. Mengenai Etno Metodologi, Bogdan & Taylor menyebutnya sebagi salah satu dari dua teori utama dalam perspektif fenomenologi di samping teori Interaksionisme Simbolik[148].

Gagasan pokok (*mean idea*) teori konstruksi sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann[149] adalah bahwa manusia itu pada hakekatnya adalah memproduksi dirinya sendiri. Tidak ada tempat bagi individu untuk memencilkan diri atau terkurung. Dalam melakukan produksi diri selalu memerlukan suatu 'perkongsian sosial' (*social enterprice*). Mereka secara bersama-sama menciptakan lingkungan manusia, dengan segala bentuk sosio-budaya dan psikologisnya. Tidak ada seorang pun dalam bentukan ini bisa dimengerti sebagai bentukan dari raga biologisnya semata yang hanya menyediakan batas-batas luar untuk aktivitas produktif manusia.

Lebih lanjut Berger menyatakan, adalah tidak mungkin manusia mengembangkan dirinya sebagai manusia dalam keterisolasian melainkan harus berada dalam sebuah struktur, juga tidak mungkin seseorang dalam keterisolasiannya

---

[147] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kotemporer*, Penerbit CV Rajawali Pers, Th 1992, hal 301-302.
[148] Bogdan & Taylor (Arif Furchan, penerjemah), *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Penerbit Usaha Nasional, th. 1992, hal. 35-41.
[149]Charles Lemert ed., *Social Theory the Multicultural and Classic Reading*, Westview Press, 1999, hal 384-388).

sebagai agensi yang memproduksi sebuah lingkungan kemanusiaan[150]. Peter L. Berger meyakini bahwa hubungan antara struktur dan agensi sebagai sebuah dialektika. Masyarakat membentuk individu-individu, sebaliknya individu-individu juga membentuk masyarakat, demikian itu terjadi secara timbal balik berbentuk ikal dalam putaran terus menerus (*a continous loop*). Dalam hal ini Berger manyatakan bahwa konstruksi sosial itu terjadi dalam proses dialektik yang melibatkan tiga tahap yaitu apa yang ia sebut: eksternalisasi-obyektivasi-internalisasi (*externalization-objectivation-internalization*).

Mengenai eksternalisasi, menurut Berger, manusia melakukan eksternalisasi sepanjang ia menggunakan raga, energi dan gagasannya untuk membentuk atau membangun dunia sosialnya. 'Membangun dunia sosial' (*build social world*) adalah bagian esensial dari kehidupan manusia. Keadaan biologis manusia perlu diperlengkapi. Karena tidak seperti binatang, manusia tidak hadir dengan sempurna yang dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan untuk bertahan hidup. Eksternalisasi adalah menciptakan struktur yang stabil yang diperlukan untuk bertahan hidup itu. Struktur itu adalah sebuah produksi bersama (*a collective production*) yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama[151].

Adapun obyektivasi Berger menggambarkan sebagai penciptaan berbagai lembaga, bahasa, benda, peralatan, ilmu pengetahuan, kesenian, dalam aktivitas terstruktur. Segala struktur itu memiliki aturan yang harus ditaati. Agar penciptaan itu menjadi obyektif maka harus ada aturan yang dibuat bersama. Struktur di mana manusia itu hidup, akan memberi arah, peranan dan makna didalam sebuah totalitas. Dengan adanya struktur akan memberi kepastian mengenai berbagai tindakan dan

[150] Charles Lemert, ibid. hal 285.
[151] Tim Knepper (reviewer), *Berger The Sacred Canopy: Elements of Sociological Theory of Religion*, Religious Experience Resources Review of Books and Articles, http://people.bu.edu./wwildman

kemungkinan tindakan, peranan, identitas dan makna. Singkat kata, obyektivasi adalah pada saat mana sebuah totalitas pemaknaan sedang diproduksi. Jadi obyektivasi adalah tahap berikut manakala para "aktor sosial" secara simultan melakukan eksternalisasi, atau melakukan tindakan sosial yang pada gilirannya membentuk sebuah realitas sosial obyektif. Atau dalam perpektif fenomenologi realitas obyektif yang dimaksud dianggap tidak akan pernah ada, yang ada adalah inter-subyektif[152].

Internalisasi bagi Berger adalah kurang lebih sama dengan sosialisasi. Dalam internalisasi, peran (*role*) dan identitas (*identity*) sangat penting. Dengan peranan dan identitas tertentu anggota-anggota dari suatu struktur melakukan internalisasi. Manusia itu sendiri adalah terstruktur oleh realitas obyektif. Masing-masing orang memiliki peranan dalam struktur. Memainkan sebuah peran berarti menjadi sebuah pribadi (*be that person*). Kesadaran individual akan diri dan dunianya akan terbentuk sesuai dengan peran tadi. Struktur obyektif akan membuat seseorang tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan (*play a role*) melainkan juga "menjadi". Misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keprajuritan (*military values*), 'menjadi' seorang komandan adalah menjadi, sepanjang sebagai komandan itu didefinisikan oleh struktur. Sang komandan tadi akan menginterpretasikan seluruh kehidupan, diri, dan dunia sosialnya menurut identitas yang diberikan oleh struktur sosial kemiliteran. Secara empiris keberadaan seseorang selalu mengambil tempat di dalam konteks keteraturan, keterarahan, dan stabilitas yang diperolehnya lewat tatanan sosial (*social order*). Tatanan sosial adalah suatu produk manusia, atau

---

[152] *Inter-subjectivity* adalah istilah di dalam metode fenomenologi, yang dijadikan kesepakatan kerja *(working agreement)* agar tidak boleh ada klaim akan adanya *"objectivity"*. (Penjelasan selanjutnya lihat pada catatan kaki nomer 135).
[152] Tim Knepper, ibid. Hal. 1-2.

persisnya adalah yang sedang dan terus menurus diproduksi manusia. Ia diciptakan manusia dalam sebuah perjalanan 'eksternalisasi' yang terus menerus[153].

Penggunaan teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckmann sebagai landasan analisis tidak akan bisa berhasil memberi perspektif yang memadahi tanpa dikombinasikan dengan alat analisis yang lain. Untuk itu teori strukturasi oleh Anthony Giddens juga akan menjadi landasan analisis penelitian ini.

b. Interaksionisme Simbolik Mead

Masalah penelitian ini adalah berkisar tentang profesionalisme TNI yang di dalam Undang-undang No. 34 tentang TNI dikonseptualisasikan sebagai bagian dari Jati Diri *(self identity)* TNI. Oleh sebab itu pemakaian teori Interaksionisme Simbolik Herbert Mead sebagai alat penjelas adalah suatu yang tidak terelakkan. Sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu bahwa teori ini adalah merupakan teori utama dalam perspektif fenomenologi, di samping teori Etno Metodologi[154].

Herbert Mead dengan Interaksionisme Simboliknya[155] menempatkan *"self"* sebagai kata kunci. Menurut Mead, *self*-lah yang membuat masyarakat manusia menjadi istimewa. Dalam kerangka kerja Mead, *self* dibayangkan sebagai ruangan bagi terjadinya dua fase proses diri, yaitu *"I"* yang memiliki sifat spontan, dari

---

[153] Charles Lemert, ibid. hal 287.

[154] Bogdan & Taylor, Op.cit.

[155] "Self" menjadi konsep ilmiah dikemukakan oleh Charles Horton Cooley, dengan teorinya *"Looking Glass Self"*. Lantas oleh William James dan George Herbert Mead dijadikan sebagai dasar dari teori "Interaksionisme Simbolik". "Self" ini menggambarkan kemampuan *reflective* (berpikir mendalam) dan *reflexive* (berpikir memantul) manusia dengan mengambil dirinya sendiri sebagai obyek berpikirnya. Pandangan "self" dari James dan Mead adalah representasi pandangan pragmatisme.

Sebetulnya masih ada pandangan lain tentang "self" ini, yaitu dari Abraham Maslow dan Carl Rogers yang memberi pengertian "self" lebih menekankan sebagai perkembangan individual kearah aktualisasi diri *(self actualization)* yaitu *"the desire to become everything that one can become"*. Juga ada pendapat dari Post-modernisme yang menyebut "self" sebagai suatu pandangan relasional yang selalu didefinisikan dan dinegosiasikan seseorang dengan masyarakatnya (Gordon Marshal [editor], *A Dictionary of Sociology,* New York: Oxford University Press, 1998 hal. 589-591, juga lihat, Terrence A. Doyle, Ph.D., dalam tdoyle@nvcc.edu).

dalam *(inner)*, subyektif, tidak terkekang[156]. Dan *"Me"* yang adalah sikap-sikap yang terorganisir dan terarah kepada orang-orang lain; yang menghubungkan orang itu dengan masyarakat luas; memiliki sifat sosial dan terkekang (*determinated*). *Me* inilah yang sering disebut *self-concept* (konsep diri) atau juga disebut *Self-identity* (jati diri)[157]. Mead melukiskannya sebagai *"How people see themselves through the eyes of others"* (Bagaimana seseorang memandang dirinya melalui mata orang lain). Apa yang dikonseptualisasikan oleh Mead dalam *Self-identity* inilah yang akan dijadikan landasan untuk memberi interpretasi mengenai proses-proses pembentukan serta hakekat dari profesionalisme TNI sebagai Jati Diri TNI.

Self berkembang melalui komunikasi dan simbol-simbol. Mead menunjukkan perkembangan ini terjadi melalui dua fase yaitu *play stage* (tahap main-main), dan *game stage* (tahap permainan). Dalam fase main-main, mengandaikan adanya *significant other* sebagai *role-model*[158] dan pada fase permainan mengandaikan adanya *generalized other* yang pengertiannya mengacu pada sikap-sikap yang terorganisir dan terarahkan kepada masyarakat keseluruhan, yang dengan demikian memungkinkan seseorang memasukkan nilai-nilai yang menopang masyarakat tersebut ke dalam konsepsi mengenai dirinya[159].

c. Teori Antropologi Pengalaman dan Teori Strukturasi

Di samping menggunakan dua teori tersebut (konstruksi sosial dan interaksionisme simbolik) dalam penelitian ini juga meminjam konsep-konsep dari Teori Antropologi

---

[156] Relasi Self – I – Me oleh Mead ini secara konseptual berbeda dengan Id - Ego - Super Ego dalam psikoanalisa Freud. Untuk penjelasan ini lihat Robert Hagedorn (editor), *Sociology*, Toronto: Holt, Rinehart & Winston of Canada, Limited, 1983, hal. 72.

[157] Wikipedia Free Encyclopedia.

[158] Role-model adalah seorang *significant other*, yang memiliki pola-pola tingkah laku individual dalam suatu peran sosial tertentu, termasuk dalam hal kecocokannya dalam mengadopsi sikap-sikap. *Role model* tidak harus seorang yang dikenal secara pribadi. Beberapa orang meneladankan tingkah lakunya dalam peran tertentu pada yang nyata, tapi juga pada figur legendaris dalam sejarah (Gordon Marshal, ibid. hal 572).

[159] Robert Hagedorn, ibid. hal. 75-76.

Pengalaman Edward Bruner dan Teori Strukturasi Anthony Giddens, sebab ada sudut-sudut *(angle)* dari persoalan penelitian yang penulis anggap akan lebih bisa dijelaskan dengan konsep-konsep yang berasal dari kedua teori tersebut. Untuk memberikan gambaran sekilas mengenai kedua teori tersebut berikut ini deskripsi singkat mengenai Teori Antropologi Pengalaman dan Teori Strukturasi.

Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Teori Antropologi Pengalaman -- sebagai salah satu teori dalam perspektif fenomenologi-- adalah ketegasannya menyatakan ketidakidentikan antara **realitas, pengalaman** dan **ekspresi**. Di samping menekankan pentingnya pengalaman sebagai bagian sentral dari mata rantai proses produksi realitas kebudayaan. Ketegasan ini penulis pandang perlu sebagai penguat analisis pada bagian-bagian atau tema-tema tertentu dari penelitian ini. Dalam buku *"The Anthropology of Experience"*, Turner dan Bruner[160] membuat skema hubungan sirkuler dialektik: realita-pengalaman-ekspresi, yang di antara ketiganya dipandangnya memiliki jarak yang membuat satu sama lain tidak identik. Lebih lanjut Turner dan Bruner mengkonseptualisasikannya sebagai berikut: (1) realitas adalah yang senyatanya ada "di luar sana", apapun status ontologisnya, (2) pengalaman, adalah bagaimana realitas tersebut menghampiri kesadaran manusia. Atau lebih tepatnya, bagaimana seseorang menautkan diri dan menginternalisasi

[160] Victor W. Turner and Edward M. Bruner, *The Antropology of Experience,* Urbana: University of Illinois Press, 1986. Turner meninggal tahun 1983 tatkala sedang mempersiapkan buku ini. Adapun Bruner adalah professor emeritus di *University of Illinois,* AS. Beberapa tulisan monograf mengenai Indonesia dituliasnnya antara lain: *The Expression of Ethnicity in Indonesia* (1974), *Kinship Organization among the Urban Batak of Sumatra* (1959), *Anthropology Perspectives on Primary Education in Indonesia* (1969). Kunjungannya terakhir ke Indonesia adalah pada tahun 1989.

Kutipan mengenai skema Bruner tidak langsung diambil dari buku tersebut melainkan dari G.R. Lono Lastoro Simatupang, *"Menulis dalam Tradisi Cultural Studies"*, makalah di sampaikan dalam diskusi *"Bengkel Budaya: Belajar Menulis Sejarah Sosial Masyarakat"*, Sleman, Yogyakata, 25 Juli 2006.

realitas tersebut, dan (3) ekspresi, yaitu bagaimana pengalaman seseorang tersebut dibingkai dan diartikulasikan[161].

Realitas adalah bersifat umum, general, dalam arti bahwa realitas yang sama dapat dialami oleh banyak orang. Namun realitas yang sama itu selalu dialami oleh orang-perorang dengan disposisi mental serta ketubuhan *(physical)*-nya sendiri. Dengan kata lain, pengalaman itu selalu bersifat individual, subyektif. Disposisi mental (pikiran dan emosi yang ada dalam diri) dan ketubuhan (kondisi pisik dan posisinya dalam lingkungan pisik) telah mengarahkan momentum sesaat tadi kepada sebuah pengalaman yang unik dan membekas. Realitas yang sama ketika dialami seseorang akan 'disaring' lewat disposisi mental dan pisiknya menjadi pengalaman diri. Maka terciptalah perbedaan antara realitas dengan pengalaman. Oleh sebab itu pengalaman selalu tidak akan lagi identik dengan realitas[162].

Lebih lanjut, menurut Bruner, antara realita, pengalaman, dan ekspresi itu bersifat dialogis dan dialektis. Ketika pengalaman seseorang diekspresikan, artinya dicurahkan ke dalam bentuk atau tingkah-laku yang ter-indra (terdengar, terlihat, tercecap, terasa, terbaui) maka hasil interpretasi dan pemaknaan atas realita tadi terlahir kembali ke dalam realita. Oleh karena itulah, dengan mensitir pendapat Giddens, ada dua fungsi realita yaitu realita sebagai obyek di mana individu melakukan internalisasi dan realita sebagai medium di mana individu mengekspresikan (melakukan eksternalisasi-Berger) pengalamannya. Dalam mengajukan skema dialektika yaitu: realitas, pengalaman dan ekspresi, Bruner menganggap pengalamanlah yang menempati posisi sentral di antara ketiganya.

[161] GR Lono Lastono Simatupang, ibid. hal. 2.
[162] Loc.cit.

Adapun dalam memahami Teori Strukturasi Giddens dapat dimulai dari adanya berdebatan ilmu sosial klasik mengenai mana yang lebih penting dan menentukan, apakah "struktur" ataukah "agensi"[163], dalam perdebatan tersebut, Giddens –begitu juga Berger— termasuk teoritisi sosial modern yang berusaha menemukan titik keseimbangan *(a point of balance)* terlebih dahulu di antara keduanya. Keduanya melihat kekuatan struktur dan kekuatan agensi sama-sama saling melengkapi *(complementary forces).* Struktur mempengaruhi tingkah laku manusia dan manusia memiliki kemampuan merubah struktur sosial yang mereka diami.

Teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens dalam *"The constitution of society"* menunjukkan adanya faktor lain yang bekerja dibalik dualisme yang terjadi antara struktur dan agensi itu. Giddens mengusulkan sebutan faktor tersebut adalah "dualitas struktur" *(the duality of structure)*, dengan bekerjanya dualitas struktut membuat fungsi struktur sosial itu menjadi berganda. Satu sisi sebagai perantara *(medium)* untuk mencipta di sisi lain sebagai hasil dari tindakan sosial yang siap di-reinternalisasi.

Dengan digunakannya kombinasi ke dua teori fenomenologi (konstruksi sosial dan interaksionisme simbolik) untuk analisis penelitian, pada dasarnya adalah sebagai usaha agar penelitian ini tetap konsisten sebagai penelitian fenomenologi yang mencari kesahihan dengan mencari titik temu antara realitas obyektif dengan realitas subyektif. Sedangkan pemakaian konsep-konsep dari ke dua teori pendukung

[163] Debat sekitar pengaruh 'struktur' dan 'agensi' dalam pikiran dan perilaku manusia adalah merupakan isu sentral dalam sosiologi. Dalam hal ini istilah 'agensi' mengacu pada kapasitas manusia sebagai individu-individu untuk bertindak secara bebas dan membuat pilihan bebas mereka sendiri. Istilah 'struktur' mengacau pada faktor luaran individu misalnya klas sosial, agama, jender, etnisitas, adat kebiasaan dll. yang nampaknya membatasi atau mempengaruhi kesempatan yang dimiliki individu-individu itu. (J M.Baldwin, *Encyclopedia of Philosophy and Psychology*, Cosmos Publications, India, 2002).

(Antropologi Pengalaman dan Strukturasi) diharapkan bisa lebih memperjelas jawaban dari bagian-bagian tertentu dari pertanyaan penelitian.

4. *Prosedur Penelitian*

Sebagai rujukan pokok untuk prosedur penelitian tentang "Pemahaman Elit TNI AD terhadap Profesionalisme Militer" ini adalah dengan mengkombinasikan dua sumber yaitu prosedur penelitian yang disusun oleh Bogdan dan Taylor dalam bukunya "*Introduction to Qualitative Research Method: A Phenomenological Approach to the Social Science*"[164] dan prosedur penelitian oleh John W. Cresswell dalam buku yang disusunnya *"Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Traditions"*[165].

Prosedur penelitian fanomenologis ini pada dasarnya adalah bertitik tolak dari upaya menyingkap fenomen-fenomen yang dapat ditemukan di balik data mentah yang diperoleh melalui proses penggalian informasi. Data mentah dalam penelitian antara lain berupa pandangan, penuturan pengalaman dan lontaran fikiran para Subyek Penelitian yang terarahkan (*directedness*) kepada masalah profesionalisme TNI. Namun karena pada dasarnya penelitian fenomenologi harus mengelak dan bebas dari *common sense,* maupun prasangka-praangka teoritis yang ada, maka keberadaan rumusan mengenai TNI sebagai tentara profesional sebagaimana dalam UU No 34 tahun 2004, ataupun rumusan-rumusan yang lainnya adalah hanya --tidak ubahnya semacam kegunaan kompas bagi petualang atau mercu suar bagi pelaut -- sebagai acuan untuk mengetahui posisi serta arah penelitian. Sama sekali bukan tujuan penelitian itu sendiri. Adapun arah tujuan penelitian adalah apa adanya yang

[164]Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods. A Phenomenological Approach to the Social Science*, New York, 1975.
[165]Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, California. Sage Publications, Inc 1998.

terdapat dalam realitas subyektif yaitu berupa pandangan, pengalaman dan pikiran perwira menengah Subyek Penelitian.

Pandangan, pikiran dan kesan mengenai profesionalisme militer disampaikan oleh Subyek Penelitian dalam bentuk pernyataan lisan dan tertulis. Pernyataan lisan adalah merupakan hasil wawancara mendalam *(indepth interview)* individual maupun dalam diskusi kelompok terfokus *(focused group discussion)*. Sedangkan penyataan tertulis merupakan jawaban atas angket terbuka yang disodorkan oleh peneliti (untuk yang tertulis ini tidak semua subyek penelitian bersedia melakukannya). Data mentah dari hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, deskripsi aslinya berupa transkripsi yang sudah melalui proses penyutingan. Sedangkan data mentah dari jawaban tertulis (berupa *pointers*) Subyek Penelitian adalah berupa tulisan asli sebagaimana adanya.

Pernyataan-pernyataan penting yang terkandung dalam masing-masing deskripsi asli atau data mentah dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu tentang profesionalisme TNI. Dalam hubungan ini, pernyataan-pernyataan yang sama atau memiliki makna relatif sama dieliminasi, karena yang dipentingkan bukanlah jumlah kali sesuatu pernyataan dilontarkan, melainkan tentang keseluruhan pernyataan-pernyataan penting yang terlontarkan, sehingga dari padanya bisa ditemukan struktur essensial, yaitu "sari tak bervarian" tentang "profesionalisme TNI" berdasarkan apa yang terkandung dalam pemahaman Subyek Penelitian.

Adapun cantoh identifikasi penyataan-pernyataan penting yang dimaksud adalah seperti berikut ini:

1. Bagaimana mungkin profesional kalau tingkat kesejahteraannya rendah, peralatan dan persenjataannya tidak memadai.

2. Profesional itu artinya ahli di bidangnya.
3. Setiap tentara memiliki ciri organisasi dan tradisinya sendiri.
4. Jadi pejuang dulu baru profesional.
5. Senjata penting tetapi yang lebih penting adalah jiwa kstariya dan mental kejuangan.
6. Profesional adalah bukan asli Jati Diri TNI namun sangat penting sebagai fungsi pengganda *(multi-playing)* bagi Jati Diri TNI..

Setelah daftar pernyataan-pernyataan penting tersebut diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah memformulasikan makna-makna yang terkandung di dalamnya dengan cara membaca berulang-ulang dan melakukan refleksi terhadap deskripsi asli (data mentah), untuk menemukan adanya hubungan dan sangkut paut antar masing-masing pernyataan.

Kumpulan makna-makna yang telah diformulasikan selanjutnya diorganisasikan ke dalam kelompok tema-tema yang mencerminkan gambaran utuh aspek-aspek tentang TNI profesional dalam pemahaman elit AD. Kumpulan kelompok tema-tema yang diorganisasikan itu juga dicek kesesuaiannya dengan deskripsi asli dalam data mentah, sekaligus sebagai bentuk upaya untuk memvalidasikannya

Hasil rumusan tema-tema beserta formulasi makna-makna yang ada dalamnya –secara teknis-- akan dicantumkan di bagian awal dari setiap bab yang yang menyajikan hasil dan analisis penelitian, yakni Bab IV, Bab V, dan Bab VI. Temuan penelitian yang akan dinarasikan dalam disertasi ini merupakan produk akhir dari keseluruhan proses analisis fenomenologis tersebut di atas. Keseluruhan proses analisis fenomenologis sebagaimana dipaparkan di atas adalah mengacu pada prosedur analisis fenomenologis yang disarankan John W. Creswell[166].

[166] John W. Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, California. Sage Publications, Inc 1998.

5. *Fokus, Lingkup dan Lokasi Penelitian*

Di dalam bagian latar belakang sudah dijelaskan agak panjang lebar bahwa isu utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah masalah profesionalisme TNI yang dalam perjalanan sejarah telah mengalami penafsiran bahkan pemaknaan kembali secara terus menerus, sebagai konsekuensi dari adanya proses dialektik yang melibatkan para elit yang ada dalam internal TNI maupun pihak luar. Pembaharuan makna itu akan terus terjadi baik dalam alam kesadaran berupa pemahaman sebagai realitas subyektif maupun termanifestasikan dalam bentuk anggapan, prasangka umum terhadap TNI sebagai realitas obyektif. Dalam kaitan tersebut di atas level dan lingkup penelitian ini akan terfokus pada –apa yang dalam sosiologi disebut sebagai- mikro-subyektif[167] mutakhir mengenai profesionalisme TNI.

Adapun subyek penelitian adalah Perwira Menengah TNI AD. Sengaja penelitian ini mengambil lingkup perwira, karena kelompok perwiralah yang dipandang memenuhi kriteria sebagai elit militer, dibanding kelompok pada level yang lebih rendah yaitu Bintara dan Tamtama. Dengan demikian penelitian ini bisa dikatakan telah menjadikan *elite theory* sebagai salah satu alat penjelas terhadap persolan yang diteliti. Sedang dari kelompok perwira dikerucutkan kearah para perwira menengah yaitu perwira yang memiliki pangkat Mayor hingga Kolonel. Di antara sekitar 30 perwira menengah di Garnizun Malang (daftar nama-nama selengkapnya terlampir) tidak seluruhnya terliput sebagai informan dan menjadi Subyek Penelitian. Hal itu terjadi karena:

Pertama, bidikan perhatian penelitian ini diarahkan kepada sedikit perwira menengah yang memang berada pada pucuk piramida herarkhi pada masing-masing

[167] Level dan lingkup studi Sosiologi adalah terbagi menjadi empat yaitu: mikro-subyektif, makro-subyektif, mikro-obyektif, dan makro-obyektif.

unit atau satuan tugasnya. Mereka dianggap memiliki posisi strategis di dalam jajarannya, yaitu sebagai komandan, wakil komandan atau jabatan lain yang dianggap sangat menentukan, dengan demikian subyek penelitian ini memenuhi kriteria sebagai "elit militer". Di samping itu, para perwira menengah terutama yang sekarang berada dalam jabatan strategis kemungkinan besar akan ikut menentukan keadaan TNI di masa depan seiring dengan proyeksi promosi dan perjalanan karir yang kelak bakal dilalui oleh yang bersangkutan, dengan demikian subyek penelitian memenuhi kriteria dari maksud penelitian ini yaitu membuat proyeksi sosok TNI ke depan.

Sedang pemberian perhatian secara khusus kepada TNI Angkatan Darat pertama-tama didasari oleh pertimbangan teknis pelaksanaan penelitian, kendatipun begitu secara metodologis bisa dipertangungjawabkan sebab Angkatan Darat adalah merupakan matra yang paling dominan --dibandingkan dengan dua matra yang lain, yaitu Angkatan Laut maupun Angkatan Udara— sebab, matra ini memiliki jumlah personil paling besar yaitu mencapai 233,000 personel, dibandingkan dengan jumlah personel Angkatan Laut termasuk Korps Marinir hanya 43, 500 dan Angkatan Udara 24.000 (pada tahun 2005)[168]. Di samping itu matra Darat lah yang paling potensial memiliki pandangan yang sensitif mengenai sekitar profesionalisme militer terutama apabila profesionalisme tersebut dikaitkan dengan masalah pemaknaan peran militer yang tidak hanya di bidang pertahanan semata.

Kedua, sebagai konsekuensi dari pilihan *snowballing* sebagai strategi pengempulan data, di mana dengan strategi ini pekerjaan pengumpalan data akan menggelinding sedemikian rupa mengikuti alur informasi atau data yang diperlukan

[168] _____, *The Military Balance 2005-2006*, (London: The International Institute for Strategic Studies, 2005) hal. 276-277.

untuk dikais setuntas-tuntasnya tanpa menentukan terlebih dahulu --kecuali hanya pada saat awal dimulai penggalian informasi atau data— tentang siapa-siapa saja dan seberapa banyak subyek yang harus berpartisipasi serta tidak mementingkan perimbangan informasi yang diperoleh dari masing-masing Subyek Penelitian.

Penelitian ini mengambil waktu sejak bulan Januari 2006 hingga Agustus 2007. Mengambil lokasi di daerah Kabupaten, Kota Malang dan Kota Batu, selanjutnya akan lebih banyak disebut daerah Malang, atau Malang Raya. Malang dipandang cukup representatif sebagai lokasi penelitian, karena daerah ini dikenal sebagai daerah Garnizun, atau *"Garrison"* (Inggris), yaitu *"a group of soldiers whose task is to guard the town or building where they live"*; atau *"the buildings which the soldier llive in"*[169]. Di samping itu Malang pernah menjadi markas Kodam Jawa Timur hingga awal tahun 70-an.

Di Malang terdapat instalasi dan markas militer yang cukup banyak, lebih dari dua puluh buah (untuk lebih jelas lihat peta terlampir). Meskipun sebagian besar adalah merupakan instalasi di bawah Angkatan Darat, baik Kodam V/Brawijaya maupun langsung di bawa Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), namun juga terdapat instalasi militer yang berada di bawah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Adapun mengenai Malang sebagai daerah garnizun secara lebih detail akan dipaparkan di dalam Bab III.

6. *Pengumpulan Data, Informan dan Partisipan*

Untuk keperluan penggalian data digunakan teknik *snowballing.* Dimulai dengan penentuan dua informan sebagai pembuka jalan *(entry point)* yaitu dipilih dua perwira menengah (Pamen). Satu orang berasal dari satuan teritorial dan satu

[169] Collin Cobuild, *English Electronic Dictionary.*

orang dari satuan tempur. Dari ke dua informan yang sekaligus sebagai partisipan penelitian tersebut peneliti dapat menjalin hubungan dengan perwira-perwira menengah yang lain baik melalui pertemuan pribadi maupun pertemuan bersama.

Seiring dengan langkah untuk memperdalam dan memperluas informasi sehingga dapat diperoleh informasi yang tuntas, akhirnya penelitian ini meliput sebanyak tujuh subyek atau partisipan. Ketujuh partisipan tersebut terdiri dari empat orang berpangkat kolonel dan tiga orang berpangkat Letnan Kolonel. Mereka dipilih dengan sengaja, seiring dengan perkembangan alur informasi yang digali yang secara tidak langsung telah menjadi semacam pemandu atau radar yang mengarah kepada yang bersangkutan.

Di samping hal tersebut di atas, merujuk pada pendapat John W. Creswell[170], ada kriteria teknis atas pemilihan ketujuh orang tersebut yaitu mereka bersedia membuat jawaban tertulis atas angket terbuka, bersedia direkam baik melalui wawancara maupun diskusi terarah.

Dilihat dari asal kecabangan, lima orang dari infantri dan dua orang dari artileri. Dilihat dari lingkup penugasan, dua orang memimpin lembaga pendidikan dan lembaga pengkajian, tiga orang memimpin wilayah (teritorial), satu orang memimpin satuan bantuan tempur dan satu orang memimpin unit usaha atau bisnis TNI.

Ketujuh subyek penelitian tersebut dipilih dengan kriteria: (1) dikenal sebagai tokoh intelektual atau pemikir di dalam lingkungan Garnizun, setidak-tidaknya di kalangan sejawatnya TNI AD, (2) menduduki posisi strategis, di mana oleh karena posisinya itu yang bersangkutan baik secara langsung atau tidak langsung berperan

[170] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. California: Thousand Oaks, Sage Publications, Inc. 1998.

sebagai *'think tank'* bagi TNI AD sekaligus sebagai *'significant others'* bagi koleganya di wilayah Garnizun Malang.

Tabel 2

SUBYEK/PARTISIPAN PENELITIAN

01.	Letkol (Inf.) Tri Suwandono	Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang
02.	Letkol (Art) Suko Purwantoro	Komandan Batalyon Artileri Medan (Armed) 512 / Brawijaya
03.	Kolonel (Art) Dadang Danuardi	Kepala Lembaga Pengkajian Teknologi (Lemjiantek), TNI AD
04.	Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan	Komandan Kodim 0818 Malang dan Batu
05.	Kolonel (Inf) Aries Suhardiono	Kepala Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) Kodam V/Brawijaya
06.	Kolonel (Inf) Budiharjo	Komandan Komando Resort Militer (Korem) 083 /Baladhika Jaya
07	Kolonel (Inf) Tatang Adi Cahyono	Komandan Resimen Induk Kodam (Rindam) V/Brawijaya

Selanjutnya dari tujuh orang perwira menengah Subyek Penelitian ini bisa dianggap sebagai partisipan utama, sebab sebenarnya ada sejumlah perwira menengah yang juga terliput sebagai Subjek Penelitian, namun konstribusi informasi yang diperoleh dari yang bersangkutan kurang memadai dan atau informasi yang diberikan lebih berupa pengulangan (repetisi) terhadap informasi sebelumnya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini ternyata penetapan lokasi penelitian yaitu garnizun wilayah Malang Raya, tidak bisa diterapkan secara kaku sebab ada beberapa Subjek Penelitian yang pindah tugas ke tempat lain tatkala proses penggalian informasi dari yang bersangkutan sedang berjalan.

Guna pengumpulan data, terdapat tiga teknik utama yaitu: (1) angket terbuka di mana partisipan memberi jawaban tertulis dalam bentuk esai, (2) wawancara mendalam, (3) serta diskusi terfokus; di mana untuk dua cara yang terakhir tersebut

informasi dikumpulkan dalam rekaman suara kemudian ditranskripsikan. Di samping itu disertai juga teknik pengumpulan data pendukung yaitu observasi langsung, dan dokumentasi.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN: TNI DAERAH GARNIZUN MALANG

Sebagaimana sudah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa lokus penelitian ini adalah daerah garnizun Malang. Wilayah yang letaknya termasuk di sebelah selatan Jawa Timur terdiri dari kota dan kabupaten Malang, dan kota Batu.Wilayah ini di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, di sebelah timur kabupaten Lumajang, di sebelah barat kabupaten Blitar dan Kediri, di sebelah selatan samudra Indonesia. Adapun yang dijadikan fokus penelitian adalah para perwira menengah TNI AD[171] yang berada dalam jabatan penting baik yang berada di pasukan, pendidikan militer maupun kewilayahan (teritorial).

Karena keberadaan wilayah Malang yang pernah menjadi markas Kodam Brawijaya ini merupakan sebagian daerah dari Jawa Timur, maka di dalam penyajian ini akan terlebih dahulu diketengahkan mengenai Jawa Timur secara sekilas sebagai daerah militer atau yang lebih dikenal sebagai Komando Daerah Militer V/Brawijaya, baru kemudian memfokuskan daerah garnizun Malang yang secara kewilayahan sebagai bagian dari Kodam V/Brawijaya, meskipun dalam kenyataannya tidak semua satuan dan markas militer di Malang merupakan subordinasi Kodam V/ Brawijaya.

[171] Perwira *(officer)* TNI terbagi dalam tiga kelompok hirarkhis, (dari yang tertinggi ke terendah) adalah: Perwira Pertama, Perwira Menengah dan Perwira Tinggi. Nama pangkat pada masing-masing matra terdapat perbedaan. Adapun di dalam jajaran TNI AD, yang termasuk kelompok Perwira Menengah (dari yang terendah ke yang tertinggi) adalah mereka yang memiliki pangkat Mayor, Letnan Kolonel dan Kolonel.

Juga sudah diutarakan pada bab terdahulu bahwa pendekatan metode penelitian ini –di samping fenomenologi—adalah sosiologi sejarah *(historical sosiology),* atau lebih spesifik adalah 'sosiologi sejarah mentalitas', maka pemaparan di dalam bab ini, yaitu mengenai wilayah penelitian, adalah lebih memiliki perspektif historiografi militer, daripada berupa monografi. Dari perspektif waktu, pemaparan dimulai dari apa yang dalam sejarah Indonesia disebut "Masa Perang Kemerdekaan", (1945-1949) dengan tanpa bermaksud menganggap remeh terhadap peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya. Bagaimanapun sangat disadari bahwa sejarah adalah rentetan peristiwa yang berkesinambungan, sehingga sekalipun secara teknis pemenggalan waktu itu tidak bisa dihindari, seorang peneliti tidak bisa melakukan begitu saja tanpa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau yang dimaksudkan adalah mengkaji sejarah mentalitas maka secara arkeologi pengetahuan (meminjam istilah Michael Foucault)[172], penggalian terhadap situs-situs 'sejarah bawah sadar' yang terjadi pada waktu jauh di masa lalu secara metodologis memiliki arti yang sangat penting. Maka dengan demikian, pemenggalan waktu mulai masa perang kemerdekaan adalah merupakan salah satu keterbatasan penelitian ini.

A. Riwayat Kodam V/Brawijaya

Apa yang terjadi di Jawa Timur pada era 'perang kemerdekaan' adalah merupakan imbas dan bagian dari rentetan peristiwa di pusat pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru merdeka waktu itu. Segera setelah kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945 memerintahkan agar segera dibentuk BKR-BKR (Badan Keamanan Rakyat) mulai dari tingkat propinsi hingga level yang lebih rendah. Untuk merespon seruan tersebut

[172] "Arkeologi saya bermaksud menyejarahkan pengetahuan" begitu kata Foucault (Agus Kurniawan et.al [penerjemah], *Mengenal Foucault for Beginners,* Penerbit: Mizan, th. 1997, hal. 90.

maka terbentuklah BKR-BKR di Jawa Timur, meliputi lima wilayah: (1) BKR Karesidenan Madura; (2) BKR Karesidenan Malang; (3) BKR Karesidenan Madiun; (4) BKR Karesidenan Kediri; (5) BKR Karesidenan Bojonegoro; dan (6) BKR Karesidenan Besuki.

Anggota-anggota BKR tersebut berasal dari berbagai kelompok dan kalangan, terutama pemuda-pemuda militan bekas PETA dan *Heiho*. Sedangkan bagi yang tidak tertampung dalam BKR, mereka bergabung dalam Badan-Badan Perjungan yang memiliki sayap kelompok bersenjata yang disebut lasykar[173]. Sebagian pemuda yang berkabung di dalam lasykar adalah mereka yang memang menolak bergabung dengan BKR karena badan tersebut dianggap sekedar sebagai petugas pertahanan sipil (Hansip) belaka, dengan demikian tidak cukup memenuhi aspirasinya yaitu terbentuknya sebuah Tentara Kebangsaan.

Memang kemudian untuk memenuhi aspirasi yang berkembang dan untuk melakukan perlawanan bersenjata, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang anggota intinya terdiri atas BKR-BKR. Pembentukan TKR ini berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 5 Oktober 1945. Empat hari setelah itu, yaitu 9 Oktober 1945 di Jawa Timur dibentuk divisi-divisi TKR yang beranggotakan bekas prajurit-prajurit PETA, *Heiho*, *Keigun*, KNIL, Lasykar Hisbullah, Barisan Pelopor dan lain-lain. Divisi-divisi TKR tersebut adalah:

1) Divisi VI: meliputi daerah karesidenan Madiun dan Kediri di bawah pimpinan Jendral Mayor Sudiro. Berkedudukan di Kediri.
2) Divisi VII: meliputi daerah Karesidenan Bojonegoro, Surabaya, dan Madura di bawah pimpinan Jendral Mayor Jono Sewojo. Berkedudukan di Mojokerto.
3) Divisi VIII: meliputi Karesidenan Malang dan Besuki, di bawah pimpinan Jendral Mayor Imam Sudja'i. Berkedudukan di Malang.

---

[173] _____, *Sejarah Singkat KESDAM V/Brawijaya*, Penerbit: Komando Daerah Militer V/Brawijaya Kesehatan, hal. 3.

Selanjutnya usaha penyempurnaan TKR terus dilakukan dan istilah pun berubah-rubah sesuai dengan keadaan revolusioner waktu itu. Pada tanggal 7 Januari 1946 dengan penetapan pemerintah No.2/SD, Perpanjangan singkatan TKR diganti dengan Tentara Keselamatan Rakyat. Susunan Tentara Keselamatan Rakyat Jawa Timur tetap tediri dari 3 divisi yaitu : Divisi I, Divisi II dan Divisi III[174].

Sejak bulan Juni 1946 Panitia Besar Penyusunan Organisasi Tentara (PBPOT) berhasil menata kembali divisi-divisi TKR yang sudah berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Semula untuk Jawa dan Madura berjumlah 10 divisi kemudian diperkecil menjadi 7 divisi. Divisi yang ada di Jawa Timur mengalami perubahan nomer kode divisi, yaitu :

1) Divisi VII menjadi Divisi V/Ronggolawe. Meliputi daerah Karesidenan Pati, Madiun dan Bojonegoro. Di bawah pimpinan Mayor GPH Djatikusumo, berkedudukan di Mantingan dan kemudian pindah ke Cepu.
2) Divisi VI menjadi Divisi VI/Narotama. Meliputi daerah Karisidenan Kediri, Surabaya dan Madura. Di bawah pimpinan Jendral Mayor Sungkono, berkedudukan di Kediri.
3) Divisi VIII menjadi Divisi VII/Suropati. Meliputi daerah Karesidenan Malang dan Besuki di bawah pimpinan Jendral Mayor Imam Sudja'i, berkedudukan di Malang.

Selain ketiga Divisi di atas masih terdapat lagi tiga Brigade dan delapan Kesatuan lainnya yang berasal dari badan-badan perjuangan, serta unit-unit yaitu : Brigade 13, Brigade 17, Brigade 29, TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) Jawa Timur, Divisi Hisbullah, Divisi Jago, Divisi TRIP, Corps Mahasiswa, Mobilisasi Pelajar, Corps Armada Angkatan Laut, Pangkalan AURI, Pembentukan STM/KDM dan KODIM.

---

[174] Pada waktu itu kementerian keamanan diganti dengan kementerian pertahanan. Pada tanggal 25 Januari 1946 dengan penetapan pemerintah No. 4/SD Tentara Keselamatan Rakyat berubah menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi Tentara Republik Indonesia, dan kemudian tanggal 3 Juni 1947 diganti TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Pada tanggal 3 Juli 1947, nama Tentara Repulik Indonesia diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pembagian 3 Divisi tidak mengalami perubahan, hanya saja dengan keputusan dari pemerintah ini semua kesatuan yang tergabung dalam Badan Perjuangan khususnya yang memiliki sayap lasykar bersenjata secara selektif diwadahi dalam wadah baru TNI.

Berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dana dan demi menjaga kelangsungan hidup organisasi pada waktu itu, satuan-satuan tentara di Jawa Timur menempuh berbagai ragam cara. Divisi V di Bojonegoro misalnya, dengan cara mengambil alih dan menguasai pabrik garam, pabrik gula, pabrik sarung dan mengendalikan sebagian besar distribusi candu. Batalyon 365 di Surabaya mengambili (untuk tidak menyebut merampas) barang-barang dari emas dan perak yang tersimpan di kantor gadai dan bank setempat, menarik retribusi pasar, menarik pajak panen tembakau, menjual hasil-hasil hutan. Divisi VI di Kediri mengontrol sejumlah besar perdagangan candu[175].

Dari paparan di atas dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama,* bahwa mandiri di bidang dana, yaitu dengan menggali dana sendiri untuk memenuhi biaya operasi, meskipun dengan cara-cara yang tidak lazim, adalah sudah merupakan bagian dari kebiasan yang dilakukan oleh TNI sejak dulu. *Kedua,* meskipun bukan merupakan satuan tempur namun personel dan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang keuangan dengan sendirinya memiliki kedudukan yang sangat penting. Demikian pula kemahiran "berbisnis" pun menjadi sama pentingnya dengan kemahiran bertempur.

[175] Sejarah Singkat KUDAM V/Brawijaya, KODAM V Brawijaya Keuangan, hal. 2

Mengingat begitu pentingnya unit "satuan tempur" bidang keuangan dan bisnis ini maka tak pelak bagian yang khusus mengurusi keuangan keberadaannya menjadi sangat menonjol, yaitu yang dikenal dengan sebutan *kwartier meester.* Lantas bagian ini beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu IKUDAM (Inspeksi Keuangan Daerah Militer VIII/Brawijaya), DITKUAD (Direktorat Keuangan Angkatan Darat), lantas dirubah menjadi Keuangan Daerah Militer VIII/Brawijaya. Sejak tanggal 31 Desember 1964 menjadi Kudam V/Brawijaya[176].

Perubahan Kabinet Amir Syarifuddin (11-11-1947—29-1-1948) diganti oleh Kabinet Hatta (29-1-1948 – 4-8-1949) membuat keadaan di dalam tubuh TNI juga berubah. Ketika kabinet Hatta membuat kebijakan RERA-APRI (Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia), serta merta hal tersebut juga diterapkan di Jawa Timur dengan target terbentuknya sebuah komando divisi. Untuk itu disusunlah Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT) pada bulan Juli 1948.

Sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain, dengan adanya pembentukan struktur baru TNI ini mengakibatkan banyak personel yang harus dikeluarkan, sementara itu yang masih bertahan pun tidak sedikit yang mengalami penggeseran jabatan bahkan penurunan pangkat. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab ketidak puasan dari beberapa kalangan yang merasa dirugikan. Mereka pun beroposisi bahkan melakukan pembangkangan. Konflik di tubuh TNI ini semakin meruncing manakala Muso datang dari luar negeri dan mengobarkan pemberontakan PKI di Madiun dan sekitarnya pada tahun 1948.

Muso, lewat personel-personel TNI bekas lasykar Pesindo, berhasil mempengaruhi dan memanfatkan 6 Batalyon untuk melancarkan pemberontakan,

[176] Berdasarkan Surat Keputusan Kasad No. Kep/52/IX/1985, tanggal 1 September 1985, dalam rangka reorganisasi TNI AD Kudam VIII/Brawijaya.

yaitu: Batalyon Mustofa berbasis di Madiun; Batalyon Mursit di Saradan, kabupaten Madiun; Batalyon Darminto Adji di Ngawi; Batalyon Panjang Djokoprijono di Ponorogo; Batalyon Abdoelrachman di Kediri; dan Batalyon Yusuf yang berbasis di Sumoroto, Ponorogo.

Berkaitan dengan pemberontakan PKI Madiun di atas, satu kompi Batalyon I Brigade IV yang berasal dari resimen infanteri 38 Divisi VII/ Surapati di bawah pimpinan Mayor Hamid Rusdi ditugaskan untuk menumpas pemberontak yang beroperasi di daerah Bojonegoro dan Cepu[177].

Terkait dengan pemberontakan Muso tersebut tanggal 25 Oktober 1948 SPDT dibubarkan dan berdiri Komando Divisi-I/Gubernur Militer Jawa Timur. Divisi ini selain tetap mengamankan wilayah Jawa Timur, juga tetap melaksanakan RERA sehingga terbentuk Komando Divisi I Jawa Timur yang diresmikan pada tanggal 17 Desember 1948. Susunan organisasi Divisi I Jawa Timur adalah meliputi: Komando Divisi I, Brigade-brigade taktis di bawah KODIV-I Jawa Timur dan Kesatuan-Kesatuan taktis lain dalam yang terdiri dari 10 Dinas Jawatan, Kesatuan Joko Tole dan Kesatuan Teritorial).

Setelah terjadi pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 Divisi I Jawa Timur melakukan penyempurnaan organisasi melalui konsolidasi menyeluruh baik pembenahan brigade-brigade maupun dinas jawatan dan kesenjataan serta peralatan bantuan lain. Bulan Maret 1950 berangsur-angsur diterima penyerahan 3 Batalyon dan 4 Kompi dari KNIL. Pada tahun itu juga telah berhasil membentuk 14 dinas yaitu: Dinas Lalu Lintas Tentara; Dinas Usaha Tentara; Dinas Peralatan Tentara; Dinas Teknik Tentara; Dinas Perbekalan dan Angkutan

---

[177] _____,*Sejarah Singkat dan Data Satgas Yonif 512/QY*, diterbitkan oleh: Korem 083/Baladhika Jaya, Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha

Tentara; Dinas Pos Tentara; Dinas Agama; Dinas Bangunan Tentara; Dinas Sosial dan Kesejahteraan Tentara; Dinas Penyempurnaan Pengetahuan dan Keahlian; Dinas Pemeliharaan Makam Tentara; Dinas Kesehatan Tentara; dan Detasemen Perhubungan. Disamping membentuk tiga Batalyon yaitu: Yon Geni Pioner; Yon Artileri ;Yon Corps Polisi Militer.

Sementara itu hasil reformasi menuruti perintah harian KSAD-Nomor 40/KSAD/PH/50 tanggal 7 Februari 1950, diadakan reorganisasi sehingga terbentuklah 21 Batalyon Penggempur, dan tiga batalyon pengawal[178]. Di samping ada sembilan Kompi pengawal, yakni KI-201 sampai dengan KI-209.

Pada bulan April 1950 Brigade XVIII yang berada di bawah pimpinan letkol Soeprapto Soekowati dipindahkan ke Indonesia Timur (TT-VII) dengan membawa: Yon-20, Yon-17, Yon-26 dan Yon-31. Kemudian terjadi pula pemindahan pasukan-pasukan dari Brigade-XIX di bawah pimpinan Letkol Kretarto ke Sumatera Selatan dan Timur dengan membawa Yon-28 dan Yon-42.

Nama Divisi Jawa Timur mengalami perubahan pada ulang tahunnya tanggal 17 Desember 1951 dengan nama Divisi-I/Brawijaya serta menggunakan panji Brawijaya yang bersesanti *"Bhirawa Anoraga"* yang berarti "sebuah kekuatan dan ketangkasan yang tidak diperlihatkan". Brawijaya adalah nama raja sekaligus dinasti dari kerajaan Majapahit yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang disebut Jawa Timur pada tahun 1293-1500 M. Pada saat puncak kejayaan Kerajaan Majapahit ini

[178] Ke 21 Batalyon penggempur tsb. adalah: Yon-15 menjadi Yon-501; Yon-16 menjadi Yon-502; Yon-17 menjadi Yon-Abdullah; Yon-18 menjadi Yon-503; Yon-20 menjadi Yon-Branjangan; Yon-21 menjadi Yon-505; Yon-22 menjadi Yon-506; Yon-23 menjadi Yon-507; Yon-25 menjadi Yon-509; Yon-27 menjadi Yon-510; Yon-29 menjadi Yon-511; Yon-30 menjadi Yon-512; Yon-32 menjadi Yon-513; Yon-33 menjadi Yon-514; Yon-34 menjadi Yon-515; Yon-35 menjadi Yon-516; Yon-36 menjadi Yon-517; Yon-37 menjadi Yon-518; Yon-39 menjadi Yon-519; Yon- 40 menjadi Yon-520; Yon–43 menjadi Yon-521. Sedang tiga Batalyon Pengawal adalah: Yon-19 menjadi Yon-504; Yon-24 menjadi Yon-508; Yon-41 menjadi Yon-521.

dipercaya oleh kalangan sejarawan penyatuan wilayah Nusantara --yang kini menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia-- berhasil dilakukan.

Secara harfiah Brawijaya berasal dari kata *Bra* atau *Bhre* adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Wijaya, seorang raja sekaligus panglima dari dinasti Majapahit. Bagi TNI Kodam Jawa Timur keputusan untuk menokohkan Brawijaya ini dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai tipe ideal *(ideal type)* yang diharapkan mampu memberi spirit dan ilham dalam upaya mengasah ketajaman naluri dan sifat-sifat keprajuritan dan kesatriyaan. Dan di atas semua itu paling penting adalah semangat, dan wawasan kedepan yang dimiliki Brawijaya untuk menyatukan Bangsa Indonesia di seluruh Nusantara[179].

Pada Januari tahun 1952, Divisi Brawijaya diresmikan menjadi Tentara dan Teritorium (T&T) V/Brawijaya[180]. Penggunaan istilah teritorium tidak lepas dari situasi pergantian pemerintahan yang pada waktu itu, di mana pemerintahan di bagi ke dalam wilayah-wilayah dengan sebutan teritorium. Untuk keperluan teknis administratif dirubahlah pula kode-kode ke 26 Yon dan bersamaan itu pula ditambah dua batalyon, yakni Yon 529 dan Yon 530.

Pada Oktober 1959, T&T V/Brawijaya Jawa Timur dirubah menjadi Kodam VIII/Brawijaya[181]. Perubahan tersebut sesuai dengan sistem pembinaan wilayah yang bersumber pada doktrin PERATA (Pertahanan Rakyat Semesta). Doktrin ini menekankan pentingnya pembinaan wilayah secara intensif sebagai kesatuan dan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI - AD.

---

[179] *Sejarah Stngkat Kesdam V/Brawijaya*, Kodam V/Brawijaya, Kesehatan, hal. 5

[180] Berdasarkan instruksi KSAD Nomer-2/KSAD/INSTR/52 tanggal 25 Januari 1952, sebagai pelaksanaan organisasi angkatan darat, Berdasarkan instruksi KSAD Nomer-2/KSAD/INSTR/52 tanggal 25 Januari 1952.

[181] Sesuai keputusan Kasad Nomor : Skep/952/X/ 1959 tanggal 9 Oktober 1959.

Dalam rangka pembangunan kekuatan TNI-AD periode 1974-1978 telah diadakan *regrouping* dan *non-aktivering* satuan tempur. Brigif-2 yang semula di Probolinggo dipindahkan ke Singosari Malang dan Brigif-2 tersebut juga dipersiapkan sebagai *pilot project* untuk melaksanakan latihan-latihan posko, pra manuver dan "manuver wiratama"[182]. Sebelum itu regrouping telah diberlakukan untuk Korem serta Kodim termasuk pembentukan Korem 084 Surabaya pada tanggal 5 Mei 1969, disertai penyerahan kodim-kodim 0826, 0827, 0828, 0829 dari Korem 082 kepada Korem 084[183].

Pada Januari 1985, Kodam VIII/Brawijaya diubah menjadi Kodam V/Brawijaya[184] sebagai konsekuensi dari pelaksanaan reorganisasi TNI AD yang dirancang menjadi lebih ramping tetapi efektif. Dari jumlah 17 Kodam disusutkan menjadi 10 Kodam di seluruh Indonesia.

B. TNI Daerah Garnizun Malang

1. *Suasana Perjuangan Bersenjata di Malang*

Perang kemerdekaan RI, sebagaimana gerakan perjuangan pada umunnya, sangat diwarnai suana romantik dan heroik. Hal itu juga dialami oleh pemuda-pemuda pejuang yang berada di wilayah pertempuran Malang dan sekitarnya. Susana itu dapat diresapi dari kisah yang dituturkan para pelakunya yang tertuang dalam buku "Sejarah Singkat Kodam VIII/Brawijaya (tahun 1945-1977)". Memang unsur subyektif para pelaku yang menjadi sumber data utama dalam penyusunan buku ini sangat terasa, namun justru dengan demikian dapat dipahami bagaimana mereka memaknai perananya. Pemaparan dalam

[182] Berdasar Surat Perintah Pangdam VIII Brawijaya, nomer: SPRIN/945-2/IX/1974 tanggal 26, 1974
[183] Berdasar Surat Perintah Pangdam VIII/Brawijaya Nomer: SPRIN-406/II/5/1966 tanggal 24 Mei 1966, kemudian disahkan oleh Pangad dengan surat keputusan Nomer : SKEP-4961/7/1969 tanggal 8 Juli 1969. lebih jauh lihat *Sejarah Singkat Kodam VIII/Brawijaya (tahun 1945-1977)*, disusun oleh Jarah Dam VIII/Brawijaya.
[184] Sesuai keputusan Kasad Nomor : Kep/4/I/1985 tanggal 12 Januari 1985.

bagian-bagian ini sengaja diusahakan tetap "mempertahankan" otentikitas suasana mental para pelaku tersebut di dalam diskripsinya.

Di dalam buku tersebut antara lain dituturkan bahwa pada waktu pecah perang melawan tentara Belanda dalam agresi militer Belanda I (1947), desa-desa dijakan basis pasukan gerilya, sehingga terbentuk kantong-kantong perlawanan[185]. Termasuk di daerah Malang.

> "Pada waktu itu sifat perlawanan TKR menghadapi musuh tidak lagi frontal, tetapi menggunakan taktik pukul dan lari (*hit and run*). Desa sebagai basis pasukan gerilya, sangat berisiko tinggi dalam menghadapi tindakan balasan yang dilakukan Tentara Belanda. Sebagai contoh, resiko dihadapi desa kantong gerilya tersebut dialami beberapa desa, seperti sekitar Pakisaji, Malang Selatan dan di Precet, sebuah desa di Gunung Kawi, Malang Barat"[186].

Tentara Belanda dalam rangka menumpas desa yang menjadi kantong gerilya melakukan tindakan pembakaran. Walaupun banyak rakyat desa yang menjadi korban keganasan musuh, tetapi hal itu tetap tidak mengurangi bantuan rakyat desa kepada pasukan gerilya. Banyaknya korban yang jatuh justru membangkitkan kebencian rakyat terhadap tentara Belanda dan melecut semangat perlawanan mereka.

Bantuan rakyat desa bukan hanya dengan cara memberikan tempat tinggal, namun meliputi juga dukungan operasional. Bantuan tersebut di antaranya pemberian informasi mengenai gerakan tentara Belanda ketika memasuki daerah pedesaan. Dapat dikatakan langka sekali terjadi situasi pendadakan kedatangan Tentara Belanda. Penduduk desa, tua, muda dan anak gembala pun merupakan mata dan telinga bagi pasukan gerilya. Pemuda desa sangat efisien melaksanakan tugas kurir, demikian juga aktif ikut memanggul senjata dan bertempur melawan musuh.

"Keikutsertaan mereka dalam bidang operasional tersebut sangat membantu, karena baik

---

[185] Keberhasilan membentuk kantong-kantong perlawanan tersebut, berkat bantuan dan dukungan nyata rakyat desa. Kantong-lantong perlawanan tersebut sesuai dengan strategi Divisi VII dengan dibentuknya CoG (Comando gerilya).

[186] Soedianto Sastroatmodjo, *"TKR Divisi VII Untung Suropati Malang-Besuki 1945-1948"*. Malang: UM Press, 2000, hal.10.

sebagai kurir dan pembantu pergerakan pasukan gerilya, mereka sangat menguasai medan. Dengan demikian, benar-benar terwujud prinsip kemanunggalan TKR-pasukan gerilya dan rakyat, ibarat ikan dan air. Keikhlasan penduduk desa membantu pasukan pejuang bersenjata, disamping kesadaran perjuangan melawan musuh juga dilandasi kemurnian jiwa gotong royong"[187].

Pada bulan Juli 1947, bertepatan dengan bulan puasa, situasi di garis depan semakin panas. Tanda-tanda yang ada menunjukkan bahwa Belanda akan melakukan penyerbuan ke daerah RI.

"...Pada hari pertama Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, Brigade Infrantri Belanda KNIL yang berpangkalan di Surabaya berhasil menerobos pertahanan lini Divisi VII Untung Suropati di daerah Porong, sedangkan Brigade Marine berhasil melakukan pendaratan amphibi di Pantai Pasir Putih (Situbondo) menuju ke arah timur, yaitu ke Bondowoso, Jember, Tanggul, Kencong, dan Yosowilangun. Selain itu, juga menuju ke barat kota Besuki, Paiton, Probolinggo, Lumajang, dan sebagian ke Pasuruan. Pada saat yang sama, Belanda juga melakukan pendaratan di Meneng (Banyuwangi). Gerakan ofensif Belanda dilakukan dari Porong menunju ke Selatan, yaitu ke Gempol, Pandaan, Lawang, dan Malang"[188].

Mengetahui bahwa persenjataan Divisi VII Untung Suropati cukup kuat dan lengkap maka Tentara Belanda bergerak dengan hati-hati, sehingga baru Tanggal 23 Juli 1947 mereka sampai di daerah Lawang. Perlawanan terhadap gerakan Belanda dilakukan, antara lain oleh P3 (Pasukan Polisi Perjuangan), pasukan pelajar, serta beberapa pasukan lainnya. Jalan raya antara Lawang sampai dengan Malang penuh dengan rintangan yang berupa pohon-pohon yang ditebang, jebakan tank, serta beberapa ranjau darat[189].

Pasukan Belanda kira-kira seminggu lebih masih berada di Lawang Karena menyangka bahwa Kota Malang akan dipertahankan mati-matian oleh Divisi Untung Suropati. Untuk itu mereka mendatangkan bala bantuan pasukan dan Brigade Marinir. Pasukan bala bantuan tersebut berhasil masuk Kota Malang pada tanggal 31 Juli 1947.

Dalam masa perjuangan bersenjata untuk memepertahankan kemerdekaan, di

---

[187] Ibid., hal. 11.
[188] Nur Hadi dan Sutopo, *"Perjuangan Total Brigade IV Pada Masa Perang Kemerdekaan Di Karesidenan Malang"*, Malang: IKIP Malang Press, 1997, hal. 88.
[189] Ibid.

wilayah Malang-Besuki, juga dibentuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal ini andil para pelajar di Malang sangat besar.

> "Di daerah Malang dan Besuki khususnya, dibentuk juga Markas Besar Angkatan Laut di Lawang, yang pasukannya berada di Pasuruan, Probolinggo dan Banyuwangi. Sedangkan di Bugis, Malang terdapat Pangkalan dan Pendidikan penerbangan Angkatan Udara"[190].

Sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, pemuda-pelajar tidak hanya terjun dalam bidang kemiliteran, namun juga dalam bidang sosial kemasyarakatan. Untuk keperluan tersebut, mereka membentuk suatu wadah pelajar guna menyalurkan aspirasi perjuangan mereka. Atas inisiatif para pelajar sendiri membentuk wadah dengan sebutan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), berkedudukan di Malang.

> "Dalam wadah inilah pelajar membuktikan bentuk perjuangan yang lain, seperti menjadi penyuluh sukarela, keluar masuk desa, menyadarkan masyarakat desa mengenai kemerdekaan. Di samping itu, para pelajar membawakan obat-obatan seperlunya, membantu meringankan penderitaan rakyat desa mengenai kebutuhan obat, walaupun sederhana. Tanpa disadari mereka menyatu dengan rakyat desa. Hal itu terbukti pada waktu pecah perang, penduduk kota banyak yang dibantu ketika mengungsi ke desa"[191].

Pada waktu itu pelajar sekolah menengah rata-rata berumur 14-17 tahun tetapi cukup matang, karena perkembangan perjuangan kemerdekaan. Latihan dasar kemiliteran dan *kinrohosi* diadakan secara terus menerus, sehingga memperkuat ketahanan fisik dan mental, serta menimbulkan rasa solidaritas yang pada akhirnya berkembang menjadi kekalnya ikatan batin sesama sekolah menengah. Sebagai bukti kekekalan ikatan batin ini, walaupun mereka usia lanjut, rasa setia kawan tersebut tetap terjalin[192].

---

[190] Sastroatmodjo, Soedianto, *"TKR Divisi VII Untung Suropati Malang-Besuki 1945-1948*. Malang: UM Press, 2000, hal. 11.
[191] Op cit.
[192] "Timbulnya kesadaran kebangsaan, setia kawan dan saling tidak melupakan ini, sebenarnya berkat hasil didikan para guru pula. Tidak sedikit jasa guru sebagai pendidik, bahkan ada yang telah

Pada tanggal 22 Juli 1947, ketika tentara Belanda masih berada jauh dari Malang, kepala staf divisi memberikan *briefing* kepada para pemimpin TRIP.

> "Dalam brifing tersebut dijelaskan rencana pertahanan Kota Malang. Sebelum serangan Belanda tiba di Malang, kota Malang akan dikosongkan dan obyek-obyek yang vital akan dibumi hanguskan. Malam itu juga, kota Malang dibumihanguskan, termasuk kantor telegraf sudah kami ledakkan pada waktu musuh masih berada di Lawang"[193].

Pada waktu itu semua anggota pasukan TRIP Batalyon 5000 Malang disebar di beberapa tempat, pasukan tempur pun dikirim ke garis depan di daerah Porong, Pandaan dan Tretes-Trawas. Sebagian pasukan masih berada dan tersebar di daerah Malang Selatan untuk memberikan penerangan kepada rakyat tentang perlunya pertahanan rakyat *(Volk Defence)* sebagai upaya untuk mempersiapkan rakyat menghadapi segala kemungkinan dan musuh. Sedangkan, pasukan lainnya berada di Kota Malang dengan pimpinan Komandan Batalyon Soesanto.

> "Pada tanggal 31 Juli 1947, pasukan Belanda menyerbu dengan mempergunakan senjata-senjata dan beberapa kendaraan berat. Sesekali terdengar ledakan-ledakan mortier di beberapa sudut kota. Pasukan Belanda dengan mudah memasuki Malang sebab kota ini telah dikosongkan oleh Komando Divisi Untung Suropati dan Kota Malang dinyatakan sebagai kota terbuka. Kami mempersiapkan pertahanan yang kuat di Malang Selatan"[194].

Sewaktu pasukan Belanda sampai di daerah Jalan Salak (sekarang Jalan Pahlawan TRIP), terjadi pertempuran antara Tentara Belanda tersebut dengan pasukan TRIP. Kejadian yang berlangsung sangat cepat itu, membuat beberapa anggota pasukan TRIP berlindung di parit-parit tepi lapangan pacuan kuda. Beberapa anggota pasukan TRIP gugur termasuk Komandan Batalyon 5000 Malang.

Pada sore harinya, mereka yang tewas dalam pertempuran di jalan Salak

---

menanamkan jiwa nasionalisme kepada pelajar. Hal ini disebabkan ada juga guru yang berlatar belakang sebagai anggota partai, seperti bapak Husin dan bapak Sardjono. Yang disebut terakhir kemudian menjadi Walikota Malang", demikian menurut kisah salah seorang pelaku.

[193] Nur Hadi dan Sutopo, *"Perjuangan Total Brigade IV Pada Masa Perang Kemerdekaan Di Karesidenan Malang"*, Malang: IKIP Malang Press, 1997, hal.89.

[194] Nurhadi & Sutopo, loc.cit

tersebut dikubur oleh sekelompok orang yang ditawan Belanda. Jenazah dikubur dalam satu lubang besar yang terletak tidak jauh dari markas TRIP di jalan Salak di tandai dengan empat buah tanaman pisang yang ditanam pada masing-masing pojok kubur.

Dari diskripsi historiografis tersebut di atas ada beberapa makna yang dapat diambil: yaitu bahwa perang kemerdekaan (1945-1949) adalah momentum sejarah yang memberi andil besar bagi tumbuhnya tradisi militer di Malang. Tradisi ini sebetulnya memiliki mata rantai dengan suasana 'bawah kesadaran kolektif' yang berasal dari kisah kejayaan kekuatan militer kerajaan-kerajaan masa lalu.yang pernah berdiri di Malang, seperti kerajaan Kanjuruhan dan –terutama-- kerajaan Singosari (1222-1293). Puncak kekuatan militer dan kejayaan kerajaan Singosari terjadi tatkala Kertanegara berkuasa (1260-1292). Di bawah raja Kertanegara militer Singosari melakukan ekspedisi dengan sandi "Panalayu" (1275) berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Sriwijaya[195].

Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi landasan berkembangnya tradisi militer di Malang sehingga menjadi salah satu daerah garnizun yang sangat menonjol adalah:(1) terjadinya kolaborasi yang sangat kuat antara para tentara (pejuang bersenjata) dengan masyarakat umum di dalam pertempuran. Pengalaman semacam inilah yang kemudian menjadi landasan historis dirumuskannya konsep "tentara rakyat" sebagai bagian dari jati diri TNI saat ini. (2) Terbentuknya satuan-satuan pasukan, terutama tentara pelajar dan terbangunnya unit-unit fasilitas militer yaitu: pangkalan udara, markas Angkatan Laut, lembaga pendidikan tentara dll,

[195] Tatkala militer Kerajaan Sriwijaya gagal membendung serangan militer Singosari, sejak saat itu secara simbolik wilayah kekuasaan Sriwijaya yang terbentang mulai pulau Sumatera, Sunda, Bakulapura (Kalimantan Barat) hingga kepulauan Guru (Maluku) jatuh ketangan Singosari.
Kertanegara juga menolak untuk tunduk kepada kerajaan Mongol, Ku Bilai Khan meskipun dua kekuatan militer ini tidak sempat berperang karena Kertanegara lebih dahulu dibunuh oleh Jayakatwang. Baca lebih lanjut: Abdul Syukur, *Ensiklopedia Umum untuk Pelajar*, jilid 9, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005, 110.

yang adalah merupakan *cikal-bakal* bagi pembentukan tentara Indonesia modern. (3) Pertempuran-pertempuran yang terjadi, khususnya pertempuran "Jalan Salak" adalah merupakan pengalaman nyata dalam pertempuran *(real combat experience)* bagi para pelakunya dan spirit yang terkandung dalam peristiwa itu dapat mejadi sumber inspirasi bagi terbentuknya jiwa keprajuritan bagi para prajurit TNI khususnya para perwira yang bertugas di Malang.

2. *Hamid Rusdi dan Batalyon 512/Quratara Yudha*

Rencana gerilya Kota di Malang dalam menghadapi Agresi Militer I mengalami kekacauan akibat tertangkapnya Kapten Soebowo yang seharusnya memimpin operasi gerilya, oleh pasukan Belanda. Kota Malang pun cepat jatuh ketangan Tentara Belanda karena tidak adanya pemimpin pasukan yang mengomando perlawan.

> "Menurut rencana yang bertugas melakukan gerilya kota adalah pasukan PTRI, khususnya Kompi 338 dengan komandan Kapten Soebowo. Akan tetapi Kapten Soebowo tertangkap di Lumajang. Sebagai akibatnya, sewaktu jatuhnya Kota Malang, tidak ada yang secara formal memimpin pasukan untuk menghadapi musuh"[196].

Dalam mengatasi kondisi tersebut, kemudian secara taktis, kekuatan dipindahkan ke daerah Wagir (Kabupaten Malang bagian selatan). Kompi PTRI tersebut dipecah menjadi dua pasukan, pasukan yang pertama di bawah pimpinan Letda Matra'i dan yang satu lagi di bawah pimpinan Letda Soedianto.

Pasukan Belanda baru dapat menguasai Kota Malang tanggal 31 Juli 1947, yaitu sepuluh hari setelah mereka melakukan Agresi Militer I. Sebelum Belanda mamasukkan pasukannya ke Kota Malang, terlebih dahulu melakukan pengintaian yang dilakukan oleh sejumlah pesawat tempur yang melayang-layang di atas kota dari jurusan utara[197].

---

[196] Ibid., hal. 90.

[197] Mereka menjatuhkan bom-bom ke stasiun kereta api serta kendaraan-kendaraan yang ada di

Jalur komunikasi pasukan TNI sebenarnya telah terbangun untuk menghubungkan segenap wilayah Karesidenan Malang, khususnya komunikasi yang menghubungkan Pasuruan-Probolinggo-Lumajang-Malang, pusat pengendaliannya berada di markas utama masing-masing. Untuk Malang, markas utama berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Soeropati dan markas Do-Dik (Depot Pendidikan) di Turen, kab. Malang. Hubungan komunikasi tersebut putus sebab dihancurkan oleh pasukan Belanda begitu mereka memasuki Malang. Dengan pasukan infanterinya, pihak musuh memasuki kota dengan didahului kekuatan tank.

> "Masuknya pasukan musuh ke Kota Malang, sebagaimana yang mereka lakukan di daerah-daerah lainnya, dilakukan dengan menghancurkan setiap bangunan yang ada, seperti gedung-gedung utama, stasiun, jalan raya, dan lain-lain. Di kota Malang ini, mereka juga melakukan hal yang serupa. Tidak ketinggalan, lapangan terbang Bugis juga menjadi sasaran utama mereka. Pesawat-pesawat udara terlebih dahulu melakukan perusakan"[198].

Dalam kondisi demikian rakyat pun panik. Akibatnya, mereka mencari tempat perlindungan. Pencarian tempat perlindungan itu terutama dilakukan dengan menjauhi jalan-jalan besar yang memungkinkan mereka terhindar dari sasaran peluru musuh. Salah satu tempat pengungsian penduduk ketika itu adalah di sebuah sekolah yayasan Katholik di Jalan Panderman, sebelah barat Jalan Raya Ijen.

Menurut Nur Hadi, kala itu pembumi-hangusan kota Malang pun terjadi. Tapi sebetulnya hal itu tidak hanya dilakukan oleh Tentara Belanda namun juga oleh TNI sendiri, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila Belanda masuk ke Kota Malang dan TNI tidak bisa mempertahankannya. Dengan dihancurkannya fasilitas-fasilitas transportasi maupun bangunan-bangunan yang ada, maka pasukan Belanda

---

sepanjang jalan raya Malang - Surabaya. Banyak di antara kendaraan tersebut milik TNI. Kendaraan milik TNI berupa truk-truk bertuliskan *"India Rice "*.

[198] Nur Hadi dan Sutopo, *"Perjuangan Total Brigade IV Pada Masa Perang Kemerdekaan Di Karesidenan Malang"*, Malang: IKIP Malang Press, 1997, hal. 92

tidak bisa memanfaatkan untuk perlindungan tatkala melakukan penyerangan atau menjadikannya sebagai markas pertahanan.

> "Sebelum pasukan Belanda memasuki Kota Malang, TNI sudah sempat membumihanguskan beberapa obyek yang vital, seperti kantor telekomunikasi. Di samping itu, TNI juga membumihanguskan wilayah Blimbing. Upaya pembumihangusan tersebut sangat bernilai strategis, sehingga perlu dilakukan sebelum dipergunakan oleh musuh. Hal demikian hampir selalu akan terjadi dalam berbagai medan pertempuran, jika kita perkirakan bahwa musuh tidak akan sanggup kita hadang dengan perang secara frontal"[199].

Tentara Hamid Rusdi (Komandan Resimen 38) telah ditugasi bersama seluruh kesatuan yang ada untuk bergerak ke selatan. Sebelum itu, pohon-pohon yang ada di berbagai jalan besar sengaja ditumbangkan untuk menghambat laju gerak musuh, terutama jalan antara Singosari-Malang yang akhirnya tertutup oleh rintangan-rintangan tersebut. Pasukan dari Malang, khususnya dari komando Hamid Rusdi, ditugaskan untuk mencari posisi yang baik. Beberapa markas cabang dibangun ketika itu antara lain di pemandian (sekarang menjadi SMA Kristen, Jalan Semeru), sedangkan untuk TRIP berada di Jalan Simpang Kasin (sekarang menjadi pos polisi). Namun, pasukan Belanda berhasil masuk Malang dan menguasai Blimbing[200]. Kota Malang yang pun jatuh ke tangan musuh. Kota yang selama masa revolusi penuh dengan berbagai tulisan di gedung-gedung besar dengan berbagai semboyan, seperti *"Freedom to the Glory of any nation"*, juga *"Indonesia for the*

---

[199] Ibid, hal 93.

[200] Dengan pimpinan Jenderal Mayor Baay, pasukan Belanda memasuki wilayah Malang dan menduduki Blimbing yang waktu itu dalam keadaan kosong. Dari sini, pasukan musuh menembakkan mortir-mortirnya ke pusat kota. Gedung-gedung sepanjang jalan besar menjadi sasaran, terutama jalan raya Ijen, sehingga banyak di antaranya menjadi hancur. Pasukan Hamid Rusdi kemudian menyebar ke beberapa wilayah, sedangkan, komando pasukan kemudian tersusun di daerah Bululawang. Pos-pos TNI yang ditinggalkan kemudian diambil alih oleh pasukan musuh. Markas besar divisi Untung Suropati direbut, markas bagian timur lapangan Rampal yang sekarang menjadi Batalyon 512 juga berhasil dikuasai pasukan Belanda. Lebih jelasnya lihat Nur Hadi dan Sutopo.

Indonesians"[201] antara lain terpampang di gedung Kantor Kabupaten yang ketika itu menempati wilayah bagian alun-alun kulon.

Komandan Resimen 38, Letnan Kolonel Hamid Rusdi, seperti yang sudah dikatakan, menyusun pertahanan di wilayah Bululawang, Malang Selatan, dari sini kemudian diupayakan untuk merebut kembali Kota Malang. Akan tetapi sebelum maksud tersebut dapat dilaksanakan, sudah dicapai persetujuan gencatan senjata antara RI dengan Belanda, yang kemudian menghasilkan perjanjian Renville. Akibatnya, semua pasukan Hamid Rusdi yang memiliki tanggung jawab terhadap keutuhan wilayah Malang kota dan sekitarnya harus tunduk kepada kemauan politik pemerintah serta mereka mengadakan konsolidasi di daerah Turen.

Selanjutnya Resimen Infanteri 38, Divisi VII/Soeropati dirubah menjadi Batalyon I Brigade IV Devisi VII. Pada tahun 1948/1949 satuan ini malaksanakan perang gerilya di Daerah Malang Selatan dan Malang Barat, sementara itu satu kompi ditugaskan menumpas pemberotakan PKI Muso di Bojonegoro dan Cepu.

Pada saat Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948, Batalyon I beroperasi di Malang Timur dan Malang Barat. Pada saat itu nama kesatuan berganti menjadi Batalyon 30. Dalam masa perang gerilya itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1949, Letkol Hamid Rusdi gugur di medan pertempuran, di desa Wonokoyo, kecamatan Kedung Kandang. Kemudian pimpinan batalyon diganti oleh Kapten Wachman sampai dengan tercapainya gencatan senjata. Mengikuti penyempurnaan organisasi T&T V/Brawijaya, Batalyon 30 berubah nama menjadi Batalyon 512/Quratara

[201] Dari semboyan-semboyan tersebut tampak masyarakat Malang memiliki pegangan yang kuat dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menegakkan kedaulatan negara.

Yudha sampai dengan saat sekarang[202].

Fenomena Kolonel Hamid Rusdi yang gugur menjadi pahlawan, serta Batalyon 512/QurataraYudha sebagai satuan yang dilestarikan hingga sekarang, telah melengkapi rangkaian 'situs' peristiwa-peristiwa militer di Malang selama perang kemerdekaan. Khususnya pertempuran "Jalan Salak" sebagaimana telah dikupas pada bagian terdahulu.

Adapun pemaknaan yang dapat diberikan terhadap temuan fakta tersebut di atas adalah; bahwa dari perspektif sejarah mentalitas *(history of mentality)*, semua fakta itu hanya semakin memperkuat thesis bahwa TNI itu secara ideografis memiliki akar sejarah dan tradisinya sendiri. TNI itu tidak sama dan bagaimanapun tidak mungkin dijadikan sama dengan kekuatan militer manapun.

3. *Garnizun Malang Dewasa Ini*

Saat ini Garnizun Malang bisa di sebut sebagai daerah garnizun yang sangat lengkap. Mengapa disebut demikian? Karena hampir semua elemen-elemen di dalam sistem organisasi militer Indonesia terwakili di sini. Pada tingkat Matra (angkatan) terdapat markas dan instalasi untuk semua angkatan, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, terlebih-lebih Angkatan Darat. Di wilayah dataran tinggi yang berhawa sejuk ini Angkatan Udara memiliki Pangkalan Udara "Abdul Rahman Saleh", sedang Angkatan Laut memiliki Detasemen Angkatan Laut (Denal) dan medan latihan tempur Korps Marinir.

Untuk Angkatan Darat hampir semua elemen satuan terwakili, yaitu unit-unit tempur, bantuan tempur (Banpur), bantuan administrasi (Banmin), komando

[202] Sejarah Singkat dan Data Satgas Yonif 512/QY, Komando Resor Militer 083/Baladhika Jaya, Batayon Infanteri 512/Quratara Yudha, hal .1 dan hal. 2.

kewilayahan, lembaga pengkajian, serta penyelenggara pendidikan dan latihan militer.

Sebagai gambaran makro sebelum difokuskan ke garnizun Malang perlu dikemukakan di sini bahwa secara devisional pasukan TNI AD terbagi dalam dua yaitu: *pertama,* Bala Pasukan Pusat. Bala Pasukan Pusat terdiri dari dua jenis pasukan yaitu Kostrad[203] dan Kopassus.[204] *Kedua,* Bala PasukanWilayah, yaitu pasukan-pasukan yang berada di bawah masing-masing Kodam. Termasuk Kodam V/Brawijaya yang memiliki pasukan bertaraf divisi.

Dalam kaitanya dengan Bala Pasukan Pusat tersebut di Malang terdapat: (1) Markas Komando Divisi Infanteri (Divif) 2 Kostrad di Singosari. (2) Markas komando Brigade Infanteri (brigif) 18 Kostrad, bertempat di Jabung kab. Malang. (3) Markas komando dan pasukan Batalyon Lintas Udara 502 Kostrad di Jabung. (4) Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad berpangkalan di kota

---

[203] Komando cadangan Strategis Angkatan darat (Kostrad) dibentuk tahun 1961. Semula bernama Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat (Korra I/ Caduad). Sejak tahun 1963 menjadi Kostrad. Sejak semula, Kostrad dirancang sebagai kekuatan strategis, siap tempur dan mampu melaksanakan operasi gabungan. Kostrad juga dirancang sebagai kekuatan penggempur yang mobil yang bisa digerakkan setiap saat dan menjangkau seluruh pelosok negara Republik Indonesia. Soeharto (mantan presiden RI) adalah Panglima pertama satuan militer elite ini.

Kostrad kini terdiri dari dua divisi infanteri (Divif). Divisi 1 bermarkas pusat di Cilodong Jawa Barat, Divisi 2 di Singosari Malang Jawa Timur. Divisi 2 ini membawahi pasukan yang tersebar di Jawa tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan hingga Papua. Di malang sendiri, di samping menjadi markas Divif 1, juga menjadi markas Brigade 18 Kostrad, dan Markas pasukan Batalyon Linud 502 Kostrad dan 2 Batalyon bantuan tempur. (Sumber: pusat sejarah TNI, Wikipedia 2007)

[204] Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dibentuk tahun 1952 oleh Kol. Alex Kawilarang. Tatkala sebagai Panglima Tentara Teritorium III/Siliwangi. Semula bernama Kesko TT(Kesatuan Komando Tentara Teritorium). Setelah itu berubah nama sebanyak empat kali: KKAD, RPKAD, Kopasandha, dan Kopassus. Tugas Kopassus adalah melakukan oporasi khusus antara lain penyergapan, penculikan, infiltrasi, sabotase, penaggulangan teror, dan perang inteljen. Kopassus merupakan pasukan khusus terbaik di Asia Pasifik dan Asia Tenggara.Baret Merah sebagai ciri khasnya adalah diadopsi dari pasukan Baret Merah Belanda.

Semula hanya terdiri dari ratusan personel, kemudian berkembang menjadi 3,000. Terakhir jumlah itu meningkat menjadi 6000. Dengan penambahan jumlah tersebut Kopassus dapat merubah pola operasi dari *"three-part rotation cycle"* (latihan-tugas-konsolidasi) menjadi *'four-part rotation cycle'* (tugas-latihan-konsolidasi-cadangan).

Kopassus terbagi dalam: (1) Grup 1/Parakomando, bertempat di Serang, Jabar, terdiri dari 3 abatalyon; (2) Grup 2/Parakomando, di Kartasura, Jateng, 3 batalyon; (3) Grup 3/ Sandhi Yudha *(Combat Inteligent)*, di Cijantung Jabar; (4) Pusat Pendidikan & Latihan, di Batujajar Jabar, dan (5) Detasemen 81/Penaggulangan Teror, di Cijantung Jabar. (Sumber: Wikipedia, 2007; Ken Conboy, *KOPASSUS Inside Indonesia Special Forces*, Singapore: Equinox, th. 2003).

Malang, (5) Batalyon Pertahanan Udara Ringan (Arhanudri) Kostrad juga berbasis di kota Malang.

Dalam kaitannya dengan Bala Pasukan Wilayah (Kodam V/Brawijaya), di Malang terdapat beberapa kekuatan pasukan yang secara organik di bawah komando Kodam V/ Brawijaya yaitu: (1) Batalyon Infanteri 512/ Quratara Yudha, bermarkas di kota Malang, (2) Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) I berpangkalan di Singosari, kab. Malang (3) Batalyon Kavaleri (Yonkav) Serbu, bermarkas di Lawang, kab. Malang dan (4) Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) di Kepanjen, kab. Malang.

Di samping kekuatan tempur, di Malang juga terdapat Markas Komando kewilayahan. Terdiri dari satu Korem, dua Kodim, yaitu Komando Resort Militer (Korem) 083/Bhaladika Jaya, Komando Distrik Militer 0833 kota Malang, Kodim 0828 Malang-Batu.

Korem 083/Bhaladika Jaya ini membawahi 9 Komando kewilayahan tingkat distrik, sekaligus juga komando tempur. Komando Distrik Militer (Kodim) tersebut meliputi: Kodim-Kodim kota Malang, Kabupaten Malang-Batu, kota dan kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Di samping ke 9 Kodim tersebut, Korem 083/Bhaladika Jaya juga membawahi dua batalyon tempur yaitu Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha yang bermarkas di kota Malang dan Batalyon Infanteri 527 bermarkas di Lumajang. "Jadi wilayah Korem kita ini cukup luas, pasukan yang langsung di bawah komando Korem yaitu 2 Batalyon tadi, yang paling cepat digerakkan"[205].

[205] Wawancara dengan Danrem 083/BJ, Kol. (Inf) Budihardjo.

Di samping fungsi tempur dan bantuan tempur (Banpur) di dalam struktur organisasi Angkatan Darat juga terdapat fungsi Bantuan Adminsitrasi (Banmin) dan Pendidikan dan Latihan. Di Garnizun Malang satuan yang menjalankan fungsi tersebut dapat dibilang lengkap. Hampir semua satuan pelaksana administratif Kodam V/Brawijaya ditempatkan di Malang. Sebab tatkala markas Kodam V/Brawijaya berpindah dari Malang ke Surabaya tidak diikuti oleh perpindahan unit-unit komando pelaksana di bawahnya. yaitu: (1) Ajudan Jenderal, (2) Pembinaan Jasmani, (3) Hukum, (4) Keuangan, (5) Kesehatan, (6) Polisi Militer dll.

Sedang dalam kaitannya dengan fungsi pendidikan dan latihan (Diklat) terdapat: (1) Markas Resimen Induk Kodam (Rindam) Brawijaya yang bertugas melaksanakan pendidikan, latihan, pengkajian dan pengembangan bagi satuan-satuan militer di bawah Kodam V/Brawijaya. Unit-unit Diklat yang berada di bawah Rindam ini tersebar di beberapa tempat di Jawa Timur yaitu: (a) Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Magetan, (b) Sekolah Calon Bintara (Secaba) di Jember, (c) Depot Pendidikan Kejuruan (Dodikjur) di Malang, (d) Dodik Bela Negara di Malang, dan (e) Depot Pendidikan dan Latihan Pertempuran (Dodiklatpur) di Situbondo.

Di samping itu terdapat unit pendidikan dan latihan dan pengkajian yang langsung berada di bawah Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) markas besar Angkatan Darat yaitu: (1) Lembaga Pengkajian Teknologi (Lemjiantek), (2) Pusdik Arhanud.

Di samping TNI AD, TNI AL juga memiliki pusat pendidikan di daerah Malang yaitu Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Korps Marinir. Dengan banyaknya

pusat-pusat pendidikan TNI di Malang, ikut menambah bobot kredibilitas Malang yang selama ini dikenal sebagai kota Pendidikan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan Garnizun Malang dapat dilihat pada tabel berikut. Sedang untuk mengetahui posisi dan letak masing-masing dapat dilihat di dalam peta.

Tabel 3

SATUAN DAN INSTALASI MILITER
DAERAH GARNIZUN MALANG

No	Nama Kesatuan / Instalasi	Lokasi / Jumlah Personel	Keterangan
A. Matra Darat			
1	Korem (Komando Resort Militer) 083/Bhaladikan Jaya	Jl. Bromo, kota Malang 414 personel	Membawahi 9 Kodim kab./kota antara lain kab. Malang, Batu dan kota Malang
2	Kodim (Komando Distrik Militer) 0833/Kota Malang	Jl. Kahuripan, kota Malang 289 personel	Sekaligus koordinator Garnizun Malang Raya
3	Kodim (Komando Distrik Militer) 0818/Malang–Batu	Jl. Letjen Sutoyo, kota Malang, 670 personel	
4	Rindam (Resimen Induk Kodam) V/Brawijaya	Jl Suropati, kota Malang 334 personel	Membawahi pusat-pusat pendidikan dan latihan calon Tamtama dan Bintara, serta pendidikan Bela Negara
5	Ajendam (Ajudan Jenderal Kodam) V/Brawijaya	Jl. Belakang RSAA, kota Malang, 369 personel	
6	Dodikjur (Depot Pendidikan dan Kejuruan) Rindam V/Brawijaya	Jl. Mayjen M. Wiyono, kota Malang, 144 personel	
7	Denpom (Detasemen Polisi Militer) V/3 Brawijaya	Jl. Kesatrian Terusan, kota Malang, 186 personel	
8	Jasdam (Pendidikan Jasmani Kodam) V/Brawijaya	Jl. Ronggolawe, kota Malang 66 personel	
9	Dodik Belanegara Kodam V/Brawijaya	Jl. Panglima Sudirman, kota Malang, 104 personel	
10	Kumdam (Detasemen Hukum Kodam) V/Braw.	Jl. Panglima Sudirman, kota Malang, 60 personel	
11	Hubdam (Perhubungan Kodam) V/Brawijaya	Jl. Mayjen M. Wiyono, kota Malang, 138 personel	
12	Keuangan Kodam (Kudam) V/Brawijaya	Jl. Ronggolawe, kota Malang 104 personel	
13	Rumah Sakit Tentara "Soepraoen"	Jl. Arif Margono, kota Malang	
14	Yonif (Batalyon Infanteri) 512/QY	Jl. Ronggolawe, kota Malang 747 personel	

15	Yon Kavaleri 3/Serbu	Randu Agung, Lawang, Malang kabupaten, 435 orang	
16	Yon Armed 1 (Artileri Medan)	Jl. Raya Singosari, Malang kabupaten, 548 personel	
17	Yon Zipur 5 (Batalyon Zeni Tempur)	Jl. Sapta Marga Kepanjen, Kab. Malang 625 orang	
18	Markas Divif (Divisi Infanteri) 2 Kostrad	Jl. Raya Singosari, Malang kabupaten, 362 personel	Membawahi pasukan yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Papua.
19	Brigade Infanteri Kostrad 18	Jabung, Malang kabupaten, 266 personel	Bagian dari Divisi 2, membawahi 3 batalyon. Ditempatkan di Malang, Mojokerto dan Jember
20	Yonif Linud 502 Kostrad	Kemantren Jabung, Malang kabupaten, 747 personel	Bagian dari Brigif 18 Kostrad dengan kualifikasi Lintas Udara
21	Bekang Divif 2 Kostrad	Jl. Panglima Sudirman, kota Malang , 344 personel	
22	Yon Arhanud-ri 2 Kostrad	Jl. Untung Suropati, kota Malang, 615 personel	
23	Kompleks Militer Karang Ploso: Lemjiantek, Searhanud, Dohar Rapier	Jl. Karang Ploso Malang kabupaten, 315 personel	Satuan ini berada di dibawah Kodiklat, Mabesad
24	Medan Latih Pulau Sempu	Pulau Sempu, Malang kabupaten	
B. Matra Laut			
25	Puslatpur Marinir Purboyo	Sumber Bening, Bantur, kab. Malang kabupaten, 130 pers.	
26	Detasemen Angkatan Laut	Jl. Yos Sudarso, kota Malang 250 personel	
C. Matra Udara			
27	Pangkalan TNI AU (Koops TNI AU 2)	Pakis Jajar, Malang kabupaten, 2500 personel	Menjadi pangkalan pesawat angkut Hercules dan pesawat latih Bronco, berada di bawah Komando Daerah Pertahanan Udara II
28	Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU Wing 2	Jl. Komodor Abd. Rahman Saleh, Pakis Jajar, Malang kabupaten, 125 personel	
29	Pasukan Khas (Paskhas) Skadron 464	Jl. Komodor Abd. Rahman Saleh, Pakis Jajar, Malang kabupaten, 362 personel	

Tabel 4

DAFTAR PERWIRA PEJABAT TNI AD GARNIZUN MALANG TAHUN 2005 s/d 2007*)

NO	JABATAN DALAM SATUAN	NAMA PEJABAT LAMA/BARU	MUTASI KE	KET
1	Pangdivif-2 / KOSTRAD	Mayjen TNI Erwin Sudjono, SH.	Mabes AD	
		Mayjen TNI Djoko Susilo	Tetap	
2	Danrem 083/BDJ	Kol. Art Hadi Lukmono	Pabandya Binpers Suad	
		Kol. Inf. Budihardjo	Tetap	Subyek penelitian
3.	Danrindam V/Brw	Kol. Inf. Wahid	Danrem 081/BJ	
		Kol. Inf. Tatang Adi Cahyono	Tetap	Subyek penelitian
4	Kakesdam V/Brw	Kol. CKM. Chairil Karnanda	Pensiun	
		Kol. CKM. Dr. M. Sani., SPJP.	Tetap	
5	Kaajendam V/Brw	Kol. CAJ. Didik Hartanto	Ditajenad Kasubdit Mindik Bandung	
		Kol. CAJ. Yustrustiana	Tetap	
6	Kakudam V/Brw	Kol. CKU. I Nengah Kastika	Dandikkus Bandung	
		Kol. CKU. Bambang Setiabudi.	Tetap	
7	Kahubdam V/Brw	Kol. CHB. Hariyono	Kabengpushub Bandung	
		Kol. CHB. M. Siddiq	Tetap	
8	Kapuskopad "A" Dam V/Brw	Kol. Inf. Karyo	Staf Ahli Bidang Ekonomi Pangdam V/Brawijaya	
		Kol. Inf. Aries Soehardiono	Tetap	Subyek penelitian
9	Kakumdam V/Brw	Kol. CHK. Subagijo, SH., M.Hum.		
		Kol. CHK. Isak Alfarus, SH., M.Hum.	Tetap	
10	Danmen Armed 1	Kol. Art. Yulafiandi	Aster Kodam VI/Tanjung Pura	
		Letkol. Art. Bebi Indra Puji H.	Tetap	
11	Karumkit "Soepraoen"	Kol. CKM. Dr. M. Sani, SPJP.	Kakesdam V / Brawijaya	
		Letkol. CKM. Drg. Pangestu	Tetap	
12	Dandim 0833 kota Malang	**Letkol. Inf. Tri Soewandono.**	Wadanrindam V / Brawijaya	Subyek penelitian
		Letkol. Inf. Bahman	Tetap	Subyek penelitian
13	Dandim 0818/ Malang-Batu	**Letkol. Inf. Besar Harto Karyawan**	Waasop Kasdam V / Brawijaya	Subyek penelitian
		Letkol. Inf. Ivan S. Siagian	Tetap	
14	Danyon Arahanudri 2/KST	Letkol. Art. Sisriadi	Mabesad Jakarta	
		Letkol. Art. Wahyujiantono.	Tetap	
15	Danyon Armed 1	**Letkol. Art. Suko Purwanto**	Tetap	Subyek penelitian
16	Danyon Bekang 2 /KST	Letkol. CBA. Gane Mulyo	Ditbekang AD Pabandya Slog Jakarta	
		Letkol. CBA. Drs. Abdurrohim	Tetap	

17	Dandodikjur	Mayor Inf. Joko Purnomo	Kasiops Rindam V / Brawijaya	
		Mayor Inf. Gumono	Tetap	
18	Dan Bela Negara	Letkol. Inf. Ponidi	Dandenma Kodam V / Brawijaya	
		Letkol. Inf. Wahyu		
19	Kabintal Dam V/Brw	Letkol. Taslim	Pusjarah Musium Jogjakarta	
		Letkol. Inf. M. Taslim	Tetap	
20	Katopdam V/Brw	Letkol. Tukino	Dansecapa Bandung	
		Letkol. CTP. Tukino	Tetap	
21	Dandenbekang V-44-03	Letkol. CBA. Bambang	Wakabekangdam IX / Udayana	
		Letkol. CBA. Yulizer Arief R.	Tetap	
22	Dandenpom V / 3	Letkol. CPM. Suhardi	Wadan Pomdam I / Bukit Barisan	
		Letkol. CPM. Kamil	Tetap	Subyek penelitian
23	Dandempal 05-12-03	Mayor Tjatur		
		Letkol. CPL. Susanto	Tetap	
24	Danyonzibang	Letkol. CZI. Hanafiah Ahmad	Tetap	
25	Danden Dohar	Letkol. CBA. ARH. Zainuddin		
		Letkol. CBA. ARH. Gede Widiana	Tetap	
26	Kalemjiantek AD	**Kol. Art. Dadang Danuardi**	Tetap	Subyek penelitian

***) Sumber: Dokumen Komando Garnizun Malang.**
Nama-nama yang ditulis dengan huruf tebal adalah yang terpilih menjadi informan/Subyek Penelitian

BAB IV

GAMBARAN REALITAS SOSIAL OBYEKTIF: DIBALIK BAJU SERAGAM ADA KEANEKA-RAGAMAN

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab II mengenai ploting 'cerita' hasil penelitian, di dalam Bab IV ini bisa dikatakan merupakan bagian utama dari penyajian dan analisis hasil penelitian. Sedang dua bab berikutnya – Bab V dan Bab VI—adalah merupakan kelanjutannya.

Di dalam bab ini akan dipaparkan hasil temuan lapangan dengan lebih menitik beratkan pada konstruksi tentang realitas-realitas sosial obyektif yang menghampiri ruang kasadaran Subyek Penelitian sehingga kesadarannya itu terarahkan *(directedness)* kepada suatu pemahaman mengenai jati dirinya sebagai TNI, termasuk dirinya sebagai TNI profesional. Oleh sebab itu bab ini juga mencoba mengkonstruksikan bagaimana momentum internalisasi atas realitas sosial obyektif tersebut terjadi di dalam ruang kesadaran mereka.

Realitas-realitas sosial obyektif yang dimaksud tersebut di atas tentu ada dalam deretan kumparan ruang dan waktu yang telah dilalui oleh para perwira penelitian dan dengannya telah terjadi internalisasi –dan sudah barang tentu juga eksternalisasi-- secara terus-menerus hingga mengarahkan mereka sampai pada tingkatan atau keadaan jati dirinya saat ini. Di dalam bab ini juga akan tergambar bagaimana varian atau corak ragam profesionalitas masing-masing Subyek Penelitian sebagai "manusia TNI" *(military man)* dari golongan perwira *(officer)* seiring dengan adanya kemiripan namun juga perbedaan pengalaman yang diperoleh oleh masing-masing penelitian.

A. Jadi Tentara itu Gagah: Sebuah Pemahaman Awal ke Arah Jati Diri

Mengenai hasil pemahaman awal dari proses internalisasi atas realitas obyektif dunia kemiliteran, semua subyek penelitian memiliki pemahaman yang kurang lebih memiliki kemiripan yaitu "tentara itu gagah dan berwibawa". Hal tersebut bisa dikatakan sebagai pemahaman awal, atau embrio yang mendasari terbentuknya jati diri *(self identity)* atau konsep diri *(self consept)*[206] sebagai prajurit TNI yang salah satu aspeknya adalah sebagai tentara profesional kelak.

Pemahaman awal itu umumnya tumbuh sejak mereka masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang ketika masih duduk di Sekolah Dasar (SD). Pemahaman awal seperti itulah yang kemudian diinternalisasi oleh Subyek Penelitian sebagai nilai yang instrinsik yang bermakna bagi dirinya, sehingga mendorong dirinya untuk menjadi seorang tentara. Namun juga ada yang disertai oleh adanya nilai-nilai ekstrinsik misalnya kesadaran akan kondisi ekonomi orang tua, atau posisinya sebagai anak tertua, sehingga memilih lembaga pendidikan akademi militer yang Subyek Penelitian mengetahui bahwa di lembaga ini tidak perlu mengeluarkan biaya studi dan memiliki masa depan pekerjaan yang pasti sehingga bisa meringankan beban biaya rumah tangga keluarga serta segera ikut membantu orang tua 'mengentas' adik-adiknya.

Unsur utama dalam realitas dunia kemiliteran yang diinternalisasi oleh Subyek Penelitian adalah lebih cenderung karena adanya *significant other*[207] atau sosok yang sangat berarti yang berasal dari lingkungan keluarga, bukan karena bahan pelajaran di sekolah. Misalnya, antara lain karena ada anggota keluarganya yang

---

[206] Mengenai *self identity* dan *self concept* ini sudah dipaparkan di dalam Bab II khususnya bagian (d). Dalam tulisan ini antara ke dua istilah tersebut digunakan secara bergantian, tergantung pada konotasi (rasa bahasa) yang diperlukan sesuai dengan konteks pembahasan, namun arti dari keduanya pada dasarnya sama.

[207] Konsep *siginificant other* ini sudah dipaparkan di dalam Bab II khususnya bagian (d).

menjadi tentara atau polisi entah itu ayah, kakak, *pak de,* atau saudara sepupu. Walaupun demikian ada juga yang menginternalisasi realitas obyektif dunia kemiliteran yang berasal bukan dari *significant other,* melainkan berupa kejadian atau peristiwa yang membuat kesan yang mendalam atau *significant accident,* misalnya sering menyaksikan tentara latihan gerak jalan, latihan perang-perangan, dengan demikian bukan berasal dari orang yang dikenali secara pribadi (personal) melainkan lebih bersifat impersonal.

Kol. Inf. Budihardjo (BO), Kol. Inf. Tatang Adi Cahyono (TAC), Letkol. Inf. Tri Soewandono (TSO) antara lain adalah Subyek Penelitian yang melakukan internalisasi dunia kemiliteran dengan tipe yang pertama, yaitu melalui adanya *siginificant other.* Dari lingkungan keluarga. Sedang Letkol. Art. Suko Purwantoro (SPO) melakukan internalisasi tipe kedua, yaitu dari *siginificant accident.*

Bagi BO yang menjadi *significant other* adalah orang tuanya, dalam hal ini ayahnya, adalah bintara polisi dan kakak sulungnya yang tatkala dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah sudah lebih dahulu masuk di Akabri Laut. Dalam penuturannya lebih lanjut sebagai berikut:

> "Saya dulu ingin jadi angkatan laut. Dulu kakak kalau pulang liburan saya lihat kok gagah. Saya senang pakai baju kaos pemberiannya yang ada tulisannya 'TNI AL', rasanya saya berwibawa sekali. Kebetulan waktu masuk pendidikan Akabri sempat keliru. Saya dimasukkan di bagian laut. Setelah sebulan ketahuan yang benar saya di bagian darat. Tertukar dengan nama orang lain"[208].

> "Sejak semula *penginnya* jadi tentara pak. Ketika *temen-temen* pada pergi ke Bandung, Yogya, Bogor, mencari perguruan tinggi saya tenang-tenang saja di rumah *mancing.* Menunggu pengumuman Akabri. *Dilalah* ikut sekali sudah lulus Pak".

> "Tidak ada yang mengarah-arahkan. Termasuk bapak saya. Hanya bapak saya memang sangat bangga dengan kakak saya. Dari situlah saya *pengin* agar

[208] Wawancara dengan BO, tgl 26 Maret 2006, di Markas Korem 083/Bhaladika Jaya.

> menjadi kebanggan bapak juga. Surat-surat perlengkapan pendaftaran [untuk mendaftar di akabri] beliau juga yang *ngurus*"[209].

Menurut pengalaman BO pelajaran-pelajaran di sekolah adalah tidak menjadi inspirasi atas pilihannya untuk menjadi tentara. Begitu juga teman-teman sebayanya. Karena justru semua teman-teman dalam *peer group*-nya pada melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Dirinya sendiri yang memilih masuk akademi militer.

Antara pengalaman BO dengan TAC ada kemiripan dan ada pula perbedaan. Kemiripannya, ayah kedua-duanya menjadi *significant other* bagi masing-masing. Namun agak berbeda, kalau BO ayahnya adalah merupakan *role model* yang nyata karena ayahnya seorang polisi, sedangkan TAC hanya mendapatkan *role model* imajinatif berupa kisah-kisah pengalaman perjuangan heroik yang dituturkan oleh orang tuanya yang sekarang menjadi guru, tatkala masih bergabung dengan TP (Tentara Pelajar) pada zaman perang kemerdekaan. *Siginificant other* yang lain bagi BO adalah kakaknya sendiri sedangkan TAC adalah kakak ayahnya *(Pak De)* dan anak-anaknya yang juga tamatan Akademi Kepolisian yang membuat dirinya terinspirasi untuk masuk ke dunia militer. Namun sebelum masuk ke Akademi Militer Magelang TAC terlebih dahulu berkuliah di perguruan tinggi umum selama dua semester kemudian ditinggalkan. Yang menjadi pertimbangan meninggalkan kuliah dan masuk ke Akademi Militer adalah posisinya sebagai anak pertama dari delapan bersaudara menyebabkan ia ingin segera mandiri dan bisa jadi contoh adik-adiknya, serta pertimbangan beaya pendidikan. Penuturan selengkapnya sbb.:

> "Ya tentunya *witing tresno jalaran soko kulino,* itu yang ada pak. Keluarga dari kakaknya bapak itu di Polri. Kakaknya bapak memiliki anak-anak dari akademi kepolisian yang sudah senior. Sekarang sudah pensiun. Kalau ayah, guru. Ibu juga guru. Bapak dulu sebetulnya tentara pelajar. Waktu itu tidak terus ke tentara tetapi langsung ke guru".

[209] Wawancara lanjutan dengan BO tanggal 15 Mei 2007 di Makorem 0833/Bhaladika Jaya.

> " ... setelah SMA saya justru tidak mendaftar ke akademi militer. Saya kuliah di Gajah Mada sampai tahun ke dua. Tapi saya anak pertama dari delapan bersaudara. Tentunya saya sudah berpikir panjang. Orang tua saya sebagai guru. Jaman waktu itu sangat sulit pak. Ya... masuk [Akabri] coba-coba"[210].

Letkol Tri Soewandono (TSO) lahir memang dari keluarga tentara. Mekipun kelahiran Surabaya, namun memiliki asal-usul dari Solo, mengaku memiliki darah keturunan prajurit dinasti Mangkunegaran Surakarta. Ada kemiripanan dengan BO yang sejak semula hanya ingin menjadi seorang perwira TNI. Juga mirip dengan BO dan TAC, yaitu ayahnya lah yang pertama-tama menjadi *significant other* yang telah meniti karir sebagai prajurit TNI hingga perwira menengah, sekarang sudah pensiun dengan pangkat terakhir Kolonel. Kemudian yang bertindak sebagai *significant other* kedua bagi TSO sebagaimana BO, yaitu kakaknya yang sewaktu penelitian dilaksanakan sudah berpangkat kolonel pada salah satu satuan Korps Infanteri kemudian menjabat sebagai Asisten Teritorial di salah satu Komando Daerah Militer di Pulau Jawa. Ketika mengenang saat masih menjadi siswa salah di salah satu SMA SPO mengatakan: "Sejak di SMA cita-cita saya hanya jadi tentara. Saya tidak termasuk yang rajin belajar. Saya dulu nakal suka kelahi pak. Karena saya pikir itu penting untuk calon tentara", katanya sambil tertawa[211].

Adapun BHK, perwira kelahiran Lubuk Sikeping Sumbar 1963 ini memiliki kemiripan dengan BO, TAC dan TSO dalam soal *sifnificant other* yaitu ayahnya sendiri yang adalah TNI angkatan '45. Sebelum menjadi TNI ayahnya itu adalah anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di daerah tempat tinggalnya. Pangkat terakhir Pembantu Letnan I. Namun perbedaannya adalah BHK tidak memiliki saudara kandung ataupun saudara dekat yang menjadi tentara. Jadi ayahnyalah satu-satunya *signifgicant other* baginya. "Saya satu-satunya anak dari enam bersuadara

[210] Wawancara dengan TAC 4 Mei 2007.
[211] Wawancara tgl 24 Maret 2006 di Makodim 0833/kota Malang (Tidak terekam).

yang mewarisi darah prajurit ayah. Kebetulan isteri saya juga anak tentara", katanya. Kini mertuanya itu sedang menjabat sebagai bupati di salah satu kabupaten di Jawa Timur.

Barangkali di antara subyek penelitian Suko Purwantoro (SPO) memiliki pengalaman yang paling tidak mirip dibanding ke tiga perwira Subyek Penelitian yang sudah dipaparkan di atas. SPO tidak menemukan *siginificant other* dari keluarganya melainkan orang lain yang dia sendiri tidak kenal secara pribadi atau impersonal. Ia sendiri berasal dari keluarga petani yang tidak ada satupun keluarganya yang menjadi tentara. Sewaktu duduk di salah satu SMA di Temanggung, Jawa Tengah di daerah ini sering digunakan latihan oleh tentara dan teruna Akademi Militer Magelang. Karena sering mengalami kejadian itu SPO menjadi terinspirasi untuk memasuki ketentaraan. Jadi yang dialami SPO bukan oleh adanya *siginificant other* akan tetapi *significant accident.* Tampaknya *siginificant accident* tersebut telah menjadi pemicu termanifestasikannya kecenderungn laten yang sudah ada di dalam dirinya, karena SPO anak pertama dari tiga bersaudara ini mengaku merasa memang di dalam dirinya mengalir darah prajurit. "mungkin *mbah-mbah* saya dulu ada yang jadi prajurit mataram", akunya.

SPO sebagaimana TAC, mengakui ketika memilih masuk tentara juga karena menyadari dirinya sebagai anak pertama yang ingin segera lepas dari beban orang tua dalam pembiayaan sehingga adik-adiknya bisa menikmati pendidikan sebagaimana dirinya. Beda dengan BO maupun TSO yang sejak semula hanya ingin masuk akademi militer juga agak berbeda dengan TAC yang sempat mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi umum, SPO hanya sampai ikut tes seleksi mahasiswa yang waktu itu disebut Sipenmaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru). SPO mengaku

lulus diterima di fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta akan tetapi tidak dijalani. Alasanya sebagaimana dituturkan sbb:

> **"Kalau saya kuliah adik-adik saya tidak bisa sekolah. Waktu ikut tes Sipenmaru formulir saja dibelikan teman, harganya 11 ribu. Sampai sekarang pengumuman hasil tes-nya saya *laminating*. Saya taruh dalam album. Buat kenangan"[212].**

SPO mengaku masuk tentara murni inisiatifnya sendiri. "Bapak saya saja tidak tahu kalau saya diterima di Akmil Magelang. Waktu pulang liburan pertama baru dia bertanya. '*Lho kowe ki dadi tentara opo to le?*' [kamu itu jadi tentara macam apa? - pen]. Dia kaget saya beritahu kalau diterima di Akmil. *Dikirain* tentara biasa!"

Dengan paparan tersebut di atas antara lain dapat ditarik makna bahwa momentum internalisasi terhadap realitas obyektif yang menghasilkan pemahaman tentang TNI adalah bermula cenderung berasal dari "dunia sosial-keluarga". Pemahaman awal akan kemiliteran bisa dikatakan sangat sederhana, yaitu apa yang mereka lukiskan dalam istilah "gagah atau berwibawa". Pemahaman awal inilah yang memiliki kekuatan refleksif yang memantul kearah diri Subyek Penelitian sehingga memicu lahirnya gambaran diri *(self image)* dan penghargaan diri *(self esteem)* yang positif yang pada berikutnya menjadi embrio terbentuknya konsep diri yang mengarah kepada harapan dan keinginan menjadi seorang prajurit TNI.

B. Pembentukan Profesionalisme TNI

Pemaparan pada bagian ini adalah bertolak dari profil dan perjalanan karir masing-masing para perwira Subyek Penelitian berdasar "RH" yang ditulisnya sendiri serta dilengkapi dengan interview dalam rangka klarifikasi oleh peneliti. Pemaparan disajikan orang-perorang, adalah sbb.:

---

[212] Wawancara dengan SPO, 1 Mei 2007 di ruang rektorat UMM. Sekitar Jam 21.30, SPO mengenakan Jean baju kaos hitam, sambil berpamitan akan mengikuti Susdandim di Bandung.

1. Kolonel Inf. Budihardjo (BO). Lahir di Purwokerto, 28 Nopember 1955. Lulus Akabri 1980. Berperawakan sedang, tinggi sekitar 170 cm. Berpenampilan *kalem*. Begitu juga cara berbicaranya terkontrol, datar, sedikit sekali intonasi. Perwira yang saat penelitian dilakukan sedang menjabat Komandan Korem ini menonjol dalam tiga hal yaitu: pengalaman pendidikan dan penugasan di luar negeri, pengalaman sebagai staf inteljen dan penugasan di wilayah-wilayah konflik.

   Pengalaman pendidikan luar negeri diperoleh di Australia, *Junior Combat Instructor Course* atau Kursus Perwira Pelatih (Suspatih), sebagai dosen dalam program pertukaran dosen Seskoad di Singapura. Pernah menjadi Perwira Pembantu (Paban) atase pertahanan di Irak.

   Sedang di bidang inteljen pernah menjabat Pasubsi Opsdik Sat Induk BIA (Badan Inteljen ABRI), Pasi Sarfasdik Sat Induk BIA, dan Pabandya E-22 BIA. Pengalaman teritorial ditempatkan di daerah konflik, yaitu Poso Sulawesi Tengah sebagai Komandan Kodim dan Perwira Operasi keamanan di Irian Jaya.

2. Kolonel Aries Suhardiono, S.Sos. (AS). Lahir di Surabaya, 20 September 1959. Lulusan Akabri 1983. Berperawakan paling tinggi dan besar di antara Subyek Penelitian. Juga berpenampilan atletis. Tingi badan 175 cm. Kalau berbicara penuh tenaga, berintonasi tinggi dan cepat. Perwira yang pada bulan Pebruari 2007 baru menikah lagi karena isteri pertama meninggal dunia ini menonjol dalam tiga hal yaitu: penugasan di luar negeri, memiliki kualifikasi lintas udara dan tugas teritorial termasuk di bidang ekonomi atau bisnis yang dikelola oleh kesatuannya.

Tugas di luar negeri yaitu OJT Singapura (1995) dan *United Mission* di Bosnia Herzegovina. Tugas di pasukan mulai dari jadi komandan peleton hingga komandan batalyon dihabiskan di satuan Infanteri Lintas Udara (Linud) Kodam Wirabhuana (Sulawesi) dan Kodam Tanjung Pura (kalimantan).

Ada lima jabatan teritorial yang pernah disandang yaitu Kasi Ops Korem, Dandim, Kasrem, Kababin Minvetcad dan terakhir (tatkala penelitian ini dilakukan) sebagai Kepala Pusat Koperasi Angkatan Darat (Kapuskopad) "A". Semua jabatan itu berada di lingkungan Kodam V/Brawijaya.

3. Kolonel (Arm.) Dadang Danuardi (DD), lahir di Jakarta 14 Mei 1955. Berpostur tubuh cukup tegap meski tidak atletis dengan tinggi sekitar 167 cm. Kalau berbicara lugas, dengan dialek Betawi agak kental. Pamen ini adalah satu-satunya dari Subyek Penelitian yang bukan berasal dari Akabri atau Akmil Magelang.

   Pamen yang saat penelitian berlangsung menjabat kepala Lemjiantek Kodiklat TNI AD ini masuk TNI melalui Sepamilwa (Sekolah Perwira Militer Wajib) angkatan 1980/1981. Lulus S-1 Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut (STTAL) Surabaya 1990. Tatkala penelitian berlangsung ia sedang mengambil studi S-2 jurusan Teknik Manajemen Industri di sebuah perguruan tinggi negeri di Malang.

4. Kolonel Tatang Adi Cahyono (TAC), lahir di Magelang 15 September 1956. Lulus Akabri tahun 1981. Satu-satunya perwira Subyek Penelitian yang beragama Katolik sementara yang lainnya beragama Islam. Berperawakan ramping dengan tinggi badan 168 cm. Nada bicaranya lantang, "mengguru",

dengan dialeg Jawa Tengah sangat kental. Pamen ini sangat menonjol dalam penugasannya di bidang pendidikan di samping tugas operasi.

Dalam tugas di bidang pendidikan militer sudah ada delapan jabatan yang pernah diduduki yaitu: Pama Akmil, Dankotakta Madya Akmil, Perwira Staf, Kasubag Dep. Ser. Akmil, Wadan Pusdik If Pussenif, Wadan Pusdik If. Kodiklat, dosen gol IV Seskoad, Kadep Ter Seskoad, dan tatkala penelitian berlangsung ia sedang menjabat Danrindam V/Brawijaya. Mengenai kompetensinya di bidang pengelolaan pendidikan lebih menonjol dibandingkan dengan bidang penugasan yang lain ini diakui oleh TAC, namun ia juga merasa kompeten di satuan tempur dan teritorial.

> "Kalau pengalaman di pendidikan memang... empat tahun di Akmil, dua tahun di Pusdikif, tiga tahun di Seskoad, terus di sini [Dan Rindam] satu tahun sembilan bulan. Berdasarkan pengalaman tugas saya juga baik di satuan tempur, satuan teritorial...".

Memang di dalam tugas operasi pertempuran ada tiga yaitu: Operasi Timor Timur (1981), Operasi Rajawali Irian Jaya (1986), Operasi Kasuari Irian Jaya (1989). Namun demikian TAC juga memiliki pengalaman tugas teritorial yang cukup karena di samping pernah menjabat Komandan Kodim di lingkungan Kodam IX/Udayana, kini ia sudah selesai mengikuti Kursus Komandan Korem (Susdanrem) dan tinggal menunggu penempatannya.

5. Letkol Inf. Besar Harto Karyawan, SH. (BHK) lulus Akmil 1986, kelahiran Lubuk Sikeping Sumatera Barat 31 Mei 1963. Perwira berperawakan paling kecil di antara Subyek Penelitian, dengan tinggi 167 cm ini menonjol dalam tiga bidang tugas yaitu: tugas di pasukan, tugas operasi, dan tugas teritorial.

Awal karirnya banyak dihabiskan di pasukan elit Kostrad mulai menjabat Komandan Peleton hingga Komandan Batalyon dan memiliki kualifikasi Lintas

Udara (Linud), tugas operasi di Timor Timur sebanyak empat kali yaitu 1986-1987, 1988-1989, 1994-1995, Pamtas (Pengamanan Perbatasan) NTT-Timor Timur tahun 2000-2001.

Tugas luar negeri dialaminya tatkala bergabung dalam Garuda XII-A Kamboja (1991-1992), KKN XII Malaysia dan Pampres (Pengamanan Presiden) Timor Leste tahun 2002.

Tugas teritorial dimulai sebagai Kasi Ops Korem, Dandim, Kasrem, Waas (Wakil Asisten) Ops Kodam. Semuanya di lingkungan Kodam V/ Brawijaya. Selama kurang dari dua tahun ia sudah pindah tugas teritorial sebanyak empat kali. Dari keempat jabatan teritorial tersebut, tiga yang terakhir dipegangnya secara berturut-turut selama penelitian berlangsung.

6. Letkol Inf. Tri Soewandono (TSO), lulusan Akmil 1986 seangkatan dengan BHK. Kelahiran Surabaya, 21 desember 1963. Perwira berperawakan ramping, tinggi 169 ini kalau berbicara santun tapi juga suka mengeluarkan *joke*. Perjalanan karirnya hingga saat ini menonjol di empat bidang: pengalaman tugas di pasukan, tugas operasi, latihan gabungan dan tugas di bidang pendidikan.

Sebagian besar masa awal karirnya dihabiskan di Satuan Elit Kostrad dan mempunyai kualifikasi Lintas Udara (Linud). Ada sembilan jenis jabatan pernah ia pegang di lingkungan Kostrad. Mulai dari Komandan Peleton, hingga komandan Batalyon dan yang paling terakhir sebagai Pabandyalat Staf Ops Kostrad.

Tugas operasi di wilayah pertempuran dan daerah konflik pernah dialami sebanyak tujuh kali yaitu operasi Timor-Timur sebanyak empat kali, Irian Jaya, Aceh dan Ambon masing-masing satu kali.

Latihan gabungan dialami sebanyak empat kali yaitu: Latgab PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) TNI, Latgab Indonesia-Malaysia, Latgab Indonesia-Singapura, dan Latma Kartika Indoensia-Amerika Serikat.

Tugas di bidang pendidikan yang pernah dipegang yaitu Kasitik Linud Deptik Pusdikif, Dansatdik Sussarcabif Akmil 97 Pusdikif; kedua jabatan tersebut masih terkait dengan kualifikasi yang dimiliki yaitu lintas udara. Terakhir, tatkala penelitian ini sedang dilaksanakan --setelah menjabat komandan kodim kota Malang — adalah sebagai wakil komandan Rindam V /Brawijaya.

7. Letkol Art. Suko Purwantoro (SPO), lahir di Magelang 15 September 1968. Lulusan Akmil tahun 1989. Berperawakan tegap atletis, tinggi 169 cm, kalau berbicara tangkas dan penuh intonasi. Cukup fasih berbahasa Inggris. Ia adalah perwira termuda baik dari segi usia maupun waktu lulus dari Akmil di antara Subyek Penelitian. Ia sangat menonjol dalam tugas di tiga bidang yaitu: bidang pendidikan, pasukan bantuan tempur di kecabangan artileri, dan juga pengalaman tugas luar negeri.

Sebagian besar masa awal karirnya dihabiskan di pasukan bantuan tempur Artileri Medan (Armed). Ada delapan jabatan yang pernah dipegangnya selama di pasukan yaitu mulai dari: Pajau Raipur (Perwira Peninjau Baterai Tempur), Pamu (Perwira Pemantau) Raipur, Parai (Perwira Baterai), Danrai (Komandan Baterai), Kasi 2/Ops dan Pabung (Perwira Penghubung); semua jabatan itu pernah ia pegang secara berturut-turut tatkala bergabung di Batalyon Armed 2/105 Kodam I/Bukit Barisan. Tatkala penelitian berlangsung ia menjabat komandan Batalyon Artileri Medan 1/105 Kodam V/Brawijaya kemudian pindah di bidang teritorial yaitu sebagai Kasi Ops Korem 083/Baladhika Jaya, Malang.

Di bidang pendidikan ada tujuh jabatan yang pernah di pegang semuanya berkaitan dengan cabang artileri yaitu: Gumil (Guru Militer) golongan VI, Depnikpal (Departemen Teknik dan Peralatan), Gumil golongan VI Deptikstaf (Departemen Teknik dan Staf) keduanya pada Pusdikart (Pusat Pendidikan Artileri), Kasi Bangdik, Dansatdikbang keduanya pada Pusdikarmed, Perwira Staf Kabag Binsat Sdirbinsen (Staf Direktur Pembinaan Kesenjataan), Kabag Binsat pada Sdirbinsen Pussenart.

Adapun pengalaman luar negeri ia peroleh ketika mengikuti *Forward Observer Course* di Australia (1993), bergabung dalam Milobs *(Military Observers)* di Bosnia Herzegovina dan Timor Leste. Namun demikian SPO kemungkinan juga akan memiliki pengalaman penugasan teritorial yang signifikan karena di samping saat ini sedang menjabat Kasi Ops Korem 083/ Baladhika Jaya SPO juga sedang mengikuti Kursus Komandan Kodim (Susdandim).

Dari pemaparan bagian kedua (B) ini secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua katagori realitas obyektif dunia kemiliteran yang dilalui oleh Subyek Penelitian, yaitu Realitas Sosial Pendidikan Kemiliteran, dan Realitas Sosial Penugasan; di samping realitas sebelum mereka memasuki dunia militer yaitu Realitas Sosial Keluarga.

a. Realitas Sosial Pendidikan Kemiliteran

Realitas Sosial Pendidikan Kemiliteran adalah berupa lembaga pendidikan; terutama akademi militer (Akmil, Akabri) --kecuali bagi Dadang Danuardi (DD) adalah berupa Sepamilwa[213]. Di Akademi Militer di mana para Subyek Penelitian ini

[213] Sepamilwa (Sekolah Perwira Militer Wajib), sekarang disebut Secapa PK (Sekolah Calon Perwira Prajurit Karir) adalah pendidikan calon perwira yang *in put*-nya sarjana. Lama pendidikan militer

menamatkan studinya --pada tahun 1980-an (BO '80, TAC '81, AS '83, BHK dan TSO '86, dan SPO '89)-- inilah pembentukan dasar-dasar keperwiraan militer *(military officership)* termasuk dasar profesionalisme TNI dimulai. Memang setamat dari Akedemi Militer mereka terus mengikuti berbagai jenis Pendidikan Pengembangan (Dikbang) yang terdiri dari pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) dan pengembangan umum (Dikbangum) yang dilakukan di sela-sela di antara penugasan-penugasan yang diterima. Yang termasuk Dikbangspes misalnya, Kursus Perwira Lanjutan (Suslapa) I, dan II, Pendidikan Kursus Kecabangan, Sus Danyon, Sus Dandim; sedangkan yang termasuk Dikbangum adalah Seskoad, Sesko TNI dan Sus Lemhanas.

Sebagaimana dialami BO, sekalipun tidak menjelaskan tentang bagaimana pengalaman selama di Akademi Militer namun BO merasakan betapa pendidikan dan latihan yang diterima di Akademi Militer telah membentuk kepribadiannya yang nyaris baru sama sekali di banding sebelum masuk Akademi Militer, hingga pada awal selepas dari Akademi Militer mengalami kesulitan beradaptasi, misalnya dalam memilih pakaian. Namun juga mampu menumbuhkan sebuah idealisme di dalam dirinya.

> "Itu sejak...ya begitu lulus dari akademi, sudah mulai berubah. Setelah lama di akademi 'kan pakaian seragam terus.....begitu lulus waktu sudah boleh pakai pakaian sipil, malah pinginnya pakai seragam terus. Rasanya lucu ketika pakai sipil. Pertama setelah dilantik saya beli pakaian sipil, bawah pakai celana jeans atas pakai batik ha..ha..ha..lucu *wong* nggak pernah pakaian sipil".

> "Nah setelah dari Akmil itu saya mulai berubah, yang tadinya dengan kebanggaan semata, terus sadar ternyata *kok* permasalahannya banyak. Bukan hanya berbeda pakaian sehari-hari.Tapi rasa *'banggane yo tetep* ada...' Kemudian yang namanmya Perwira Muda itu 'kan masih idealis, selalu berusaha bagaimana dekat dengan anggota untuk ngobrol. Rumah dinasnya bukan yang bagus Pak, rumah yang dari '*gedhek*' tapi kita tetap bangga".

---

sekitar delapan bulan. Lulusan dari pendidikan ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga non tempur atau bantuan administrasi, non tempur misalnya medis, akutan, hukum dll.

Penuturan mengenai pengalaman menempuh pendidikan di Akademi Militer yang agak lengkap datang dari TAC, terutama mengenai metode pembentukan untuk merubah dari *civilian man* (orang sipil) menjadi *military man* (orang militer)", serta kesannya terhadap senior dan pelatihnya, sebagai berikut (teks sudah diedit oleh penulis):

> "Konsep itu saya justru tidak mengetahui persis. Bagaimana cara merubah itu semua tetapi saya ingat bagaimana pada diri saya dulu. Pada waktu itu *kok* bisa betul-betul '*nyantel gitu lho*'. Mungkin karena *brain washing*. Bagaimana caranya saya juga tidak tahu. Tetapi bahwa dari waktu ke waktu, detik ke detik itu selalu yang ada hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya keras semua. Lari, tidur, langsung dibangunkan. Itu yang membuat kita 'nol'. Sehingga masuklah doktrin militer itu. Diberi contoh-contoh, *'kasih ini'*, mungkin sampai ke nonton film yang heroisme.Tetapi menge-nol-kan itu mungkin caranya adalah kita tidak diberi waktu sedetikpun untuk diri kita. Semua waktu untuk lembaga, makan pun dihitung, kalau sudah waktunya selesai juga harus selesai.... Lonceng berbunyi, keluar!. Semua 'nol' kayak orang 'bodo', padahal tidak dipukuli, tidak..."
>
> "Tapi ya itu, kegiatan fisik lari, merayap, iya. Bentakan itu ada, itu saya alami. Tapi dari situ kita juga melihat senior-senior kita yang bisa jadi panutan. 'Wah nanti ingin seperti figur senior ini. Wah ini figur saya gagah'. Begitu dengar bahwa senior itu habis ikut operasi Timor-Timur, 'wah gagah ini…'"..
>
> " .... Pelatih saya dulu tidak dengan kekerasan. Tetapi diberikan contoh-contoh heroisme. Para pelatih adalah prajurit pilihan. Orang-orang yang betul-betul berprestasi. Contohnya Kapten Suroto. Ia mendapat penghargaan 'Bintang Sakti' waktu operasi di Irian. Pak Gubernur pun hormat, padahal waktu itu dia masih Sersan Mayor karena dia ditugaskan diterjunkan di Irian. Dianggap sudah mati...Ya, ternyata masih hidup. Di Akmil jadi pelatih. Juga ada pelatih namanya Woko. Selalu memberi contoh, itu idola saya. Ia Sersan Mayor. Dari cara berpakaian, cara berbicara, jalannya, *ini-itu*-nya, saya idolakan betul. Mungkin yang membuat seseorang bisa berubah mengidolakan seseorang karena kita sudah di nol-kan".

Mengenai kesan dan persepsinya terhadap sosok Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai *ideal type* sekaligus *legendary significant other* sebagai berikut:

> "Pangsar Soedirman disampaikan sebagai bahan pelajaran sejarah perjuangan. Tetapi kita juga melaksanakan secara fisik. Taruna itu wajib melaksanakan yaitu menempuh rute gerilya Pangsar Soedirman. Tinggal memilih rute mana. Dari Pacitan ke Ambarawa saja ada tiga rute. Nah kalau kita hanya menempuh satu rute saja sudah cukup berat dengan membawa replika tandu, Pak Dirman yang dengan kondisi sakit masih bisa berjuang dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah dengan perang. Betapa beratnya!"
>
> "Kita cuma satu rute saja, tidak ada serangan musuh. Di tempat yang kita singgahi diceritai oleh yang dulu rumahnya dipakai persinggahan Pak Dirman hingga

sekarang masih dilestarikan. Kita mendapat ceramah dari tetua-tetua desa. Dari orang-orang tersebut kita mendapat cerita. Jadi kita diberi informasi disamping secara fisik dalam penghayatan rute Sudirman. Saya kemarin baru cerita [kepada siswa Secaba] jaman tahun '45 waktu TRI atau awal TNI itu kalau Jenderal Soedirman ceramah atau ada pertemuan di suatu gedung yang di dinding belakang itu gambarnya Pengeran Diponegoro. Jadi pada waktu Pak Dirman jadi Panglima, Pak Sukarno Presiden idolanya adalah Diponegoro. Waktu Orde Baru idola tentara adalah Pak Dirman".

"Nah sekarang ini *'sopo?'* Apa iya masih Pak Dirman? Ya bolehlah Pak Dirman, tapi siapa lagi? Sudah tidak ada tokoh lagi rasanya. Apa iya tidak ada tokoh lagi? Ya ini yang kita sekarang belum ketemu. Dan yang ada dibenak saya yang sangat heroik adalah kata-kata Pak Dirman: 'Silahkan pemerintah menyerah, saya mau bergerilya, saya tidak mau menyerah, Soekarno ditangkap silakan, tapi saya tidak mau'. Sehingga eksistensi Indonesia masih tetap ada karena TNI-nya masih mengadakan perlawanan. Jadi tatkala gerilya itu Pak Dirman betul-betul berada di bawah tekanan. Dibombardir. Beliau menghindar dengan cara pindah-pindah. Kalau pada waktu itu Pak Dirman betul-betul bisa terbunuh. Habis..! Karena apa, pemerintah sudah tinggal militernya. Ya, sudah...selesai".

Mengenai pembentukan jiwa ksatriya di samping secara eksplisit menjadi *sesanti* dalam pataka Akademi Militer Magelang[214], menurut TAC secara implisit termasuk di dalam struktur kurikulum pendidikan yaitu meliputi materi semangat juang, pembinaan mental dan tauladan keberanian. Berikut ini penuturan TAC (setelah diedit oleh penulis):

"Materi-materi pelajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa ksatria itu ada, mulai dari sejarah TNI. Lalu pelajaran-pelajaran Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Wajib TNI, itu ada Pak. Termasuk jaman itu masih ada pelajaran Wawasan Nusantra. Disitulah [pembentukan jiwa ksatria jadi satu] dengan pelajaran-pelajaran yang menimbulkan jiwa patriotisme.... Itu terjadwal".

"....selalu ada jadwal kegiatan Bintal [Pembinaan Mental]. Misalnya waktunya sholat, harus! Sampai di absen..! Masuk Masjid, ke Gereja. Ini sudah ada pengasuhnya, para pelatih menugaskan *kayak* senatnya taruna untuk mengawasi. Sejak awal jamnya sholat ya sholat. Pas latihan, jamnya sholat ya istirahat, dikasih tempat khusus. Jadi sholat tidak tentu harus tempatnya di Masjid. Kita justru pada saat di lapangan ditentukan bagian yang pohon kelapa sana itu yang muslim; pohon kelapa sana untuk yang katolik dan kristen. Selalu ada pemberian waktu itu".

Menurut pengalaman TAC dalam upaya menumbuhkan mental pemberani di dalam diri para Taruna, para pelatih yang mempunyai pengalaman terutama di

[214] Pataka Akmil mempunyai Seloka: *"Adhitakarya Mahatvavirya Nagara Bhakti"*, artinya: Sebagai Ksatriya yang rajin dan giat menuntut ilmu untuk diamalkan secara gagah berani dan bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa.

daerah operasi itu didatangkan. Mereka adalah prajurit-prajurit TNI yang berhasil di lapangan. Mereka memaparkan pengalaman-pengalaman pada saat tugas operasi. Menurut TAC kadang-kadang ada cerita yang dilebih-lebihkan. TAC baru tahu setelah menjadi perwira yang kemudian ditugaskan di medan operasi yang sama.

> "Oh...ternyata tidak seperti yang mereka katakan. Ceritanya sudah dibumbui, tapi memang cerita itu betul-betul membuat kita ingin [ditugaskan] kesana. Mereka orang-orang bintara komando. Dulu jaman saya mereka itu didatangkan untuk jadi komandan kelas. Semacam bintara kelas. Mengikuti kemanapun kita pergi. Terutama di lapangan mereka sebagai pengawas. Jadi mereka orang-orang mantan Kopassus yang berpengalaman di lapangan. Terutama yang pernah operasi tempur di Timor Timur dan Aceh. Para pelatih itu sampai sekarang masih terbayang. Seorang pelatih itu sangat penting ya Pak? Waduh...mulai dari pakaian yang selalu disetrika, sepatu mengkilat, topi rapih. Jadi *performance* pelatih betul-betul tidak boleh *'nglomprot'*, betul-betul sampai sekarang membekas diingatan saya, sehingga itupun berlaku bagi saya".

Di samping itu TAC mengaku materi pembentukan keahlian adalah materi yang paling menarik bagi TAC, sebagaimana dituturkan sbb.:

> "Kalau di Akademi Militer Darat saya paling suka pelajaran di lapangan. Terutama yang kaitannya dengan pelaksanaan taktik dan strategi militer. Yang tertulis [teori tentang itu pun] saya senang. Sehingga dari hasil-hasil yang saya capai akhirnya baik. Hingga kini dalam materi itu saya mendapatkan nilai yang cukup baik. Baik hasil pada waktu pendidikan, maupun pada waktu akan masuk pendidikan. Saya senang karena itu aplikatif".

Dari penuturan pengalaman BO dan terutama TAC tersebut di atas tampak jelas bahwa realitas sosial berupa pendidikan Akademi Militer di Magelang adalah realitas obyektif di mana proses internalisasi lah yang lebih terjadi ketimbang eksternalisasi, atau –dengan kata lain-- struktur sosial lah yang lebih kuat membentuk individu Subyek Penelitian bukan sebaliknya Subyek Penelitian selaku aktor sosial yang menciptakan struktur sosial.

b. Realitas Sosial Penugasan

Realitas sosial obyektif dunia kemiliteran yang lain adalah bermacam-macam jenis medan penugasan, yang secara katagoris dapat digolongkan ke dalam empat jenis yaitu: (1) tugas di pasukan, (2) tugas di bidang pendidikan-latihan, baik sebagai

tenaga pengelola maupun sebagai tenaga guru militer, (3) tugas kewilayahan atau teritorial, (4) tugas operasi baik tempur maupun selain tempur. Pada setiap masing-masing medan penugasan itu Subyek Penelitian memainkan salah satu dari dua jenis peran yaitu: (1) menjadi perwira staf, yang berperan melayani atau membantu komandan, pimpinan atau atasannya, atau (2) menjadi komandan, yaitu pimpinan itu sendiri yang memimpin anak buah. Dengan demikian Subyek Penelitian memiliki dua jenis pengalaman kepemimpinan selama berada dalam medan tugas yaitu sebagai orang yang memimpin pada suatu saat, dan sebagai orang yang dipimpin pada saat yang lain.

1. Tugas di Pasukan

   Yang menjadi perhatian utama selama SPO menjadi Komandan sebuah Batalyon Bantuan Tempur (Artileri Medan) adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anak buah dan keluarganya. Alasannya, problem utama profesionalisme TNI saat ini adalah terletak pada kesejahteraan prajurit. Jika dibandingkan dengan kehidupan di luar untuk standar kebutuhan minimum kebutuhan hidup prajurit masih jauh. Karena di samping harus memenuhi kehidupan dirinya dan keluarga, pada kenyataannya hidup di markas juga banyak biaya dikeluarkan untuk sosialisasi, misalnya mengikuti perkumpulan, acara keluarga, undangan anak khitanan, anak ulang tahun, pernikahan dan lain-lain. Menurut SPO, kalau seorang komandan pasukan memperhatikan kesejahteraan anak buah itu menjadi bagian dari indikator keberhasilannya tugas dikesatuan. Meskipun yang bisa dilakukan seorang komandan tidak bisa lebih jauh dari kebijakan atasan. Misalnya masalah gaji, yang bisa diperbuat paling dengan mengembangkan

koperasi yang salah satu fungsinya adalah untuk memperpendek mata rantai distribusi barang:

> "Barang itu akan mahal kalau jalur distribusinya panjang, jadi kita berusaha untuk memotong jalur distribusi sehingga akan mendapatkan harga lebih murah. Katakanlah dengan gaji 1.700.000 kalau dia dapat harga lebih murah kan itu merupakan kesejahteraan, sehingga dalam satu bulan misalnya saja untuk kebutuhan sabun yang biasanya harga 5 ribu kemudian dapat harga murah 4 ribu".

Selain itu juga memberdayakan potensi yang ada seperti tanah yang ada di asrama dari pada jadi "lahan tidur" maka digalakkanlah gerakan menanam sayur dan tanaman lain yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan bahan pokok sehari-hari keluarga prajurit.

Menurut SPO peningkatan kesejahteraan anak buah juga bisa berupa memelihara dan meningkatkan kemampuan mereka dengan mengikut sertakan mereka dalam berbagai pendidikan tambahan, memenuhi hak cuti, juga memperlancar karir atau kepangkatan anak buah. SPO juga memanfaatkan hubungan baiknya sebagi komandan dengan pihak luar untuk kepentingan anak buah.

> "Contohnya; selama ini anggota hutang ke bank [tertentu] untuk menabung, *invest* di kampungnya dengan bunga 1,2% per bulan, saya hubungkan dengan Bank Jatim ada SUP dengan bunga 0,78%. Dengan pemerintah daerah setempat ada bantuan untuk pendidikan anak dini usia (Padu). Dengan pengusaha, contohnya saya punya lahan 10 hektar bisa ditanami tebu, setelah itu kita hitung berapa biaya yang diperlukan misalnya sekian puluh juta, kalau tidak mampu berarti kita harus kerjasama dengan investor untuk bibit maupun pupuknya dan yang mengerjakan anggota, adapun hasilnya nanti kita bagi hasil".

Mengenai seberapa jauh keputusan diskressional yang dilakukan, terutama dalam memanfaatkan fasilitas yang ada itu tidak menyalahi ketentuan, SPO menyatakan:

> "Kalau memiliki kandang ayam saja dimarahi itu sudah keterlaluan. Saya punya kandang ayam, akan tetapi bibit, pakan maupun obatnya dari investor. Misalnya kandang diisi ayam sekitar 1000 ekor nanti setelah 30 hari dipanen, Kompi akan menerima dari investor Rp. 2 juta, itu kan bisa meringankan, sehingga Kompi bisa menggunakannya seperti untuk membeli alat tulis kantor dari yang 2 juta itu".

> "....Sekarang saya tanya Batalyon ini gedungnya didirikan tahun 1980. Sampai sekarang selama 26 tahun belum pernah negara memberi anggaran untuk mengecat, makanya biaya ngecat itu didapat dari mana? Ya dari hasil tebu tadi".

2. Tugas di Bidang Pendidikan

Barangkali dapat dikatakan sebagai salah satu ciri proses pembentukan profesionalisme di TNI adalah bahwa setiap prajurit Perwira di samping harus menempuh jenjang-jenjang pendidikan setahap demi setahap, mereka juga harus mampu menjadi pengelola lembaga pendidikan baik sebagai guru militer (Gumil) maupun tenaga kependidikan (Gadik). Sehingga lembaga pendidikan militer bagi mereka di samping menjadi realitas sosial di mana Subyek Penelitian melakukan proses internalisasi dan dibentuk (sebagaimana telah disajikan pada bagian terdahulu dalam bab IV ini juga), pada saat yang lain adalah menjadi realitas di mana para perwira melakukan eksternalisasi, sebagai aktor sosial yang membentuk. Apa yang dituturkan oleh TAC, yang sedang menjadi komandan sebuah lembaga pendidikan ini mencerminkan hal tersebut (sudah di edit oleh penulis):

> "....saya melakukan pembenahan di Rindam ini. Ketika kami masuk itu kondisinya memang masih jauh. Anak buah berkomentar sekarang banyak perubahan. Yang dilihat anak buah itu kan fisik. Padahal yang saya harapkan bukan fisik tapi non fisik. Saya masih jauh dari apa yang sebetulnya ingin saya benahi, non fisik itu. Salah satunya adalah pemberdayaan. Sudah kami tata kesepuluh komponen pendidikan, termasuk kurikulum, Hanjar [bahan belajar], segala macam itu. Tadinya di sini masak mengajar tidak ada dasarnya? Hanya buku. Enak saja. Sekarang kami buat ketentuan-ketentuan, mulai Hanjar kita buat. Lalu harus jelas apa yang diberikan, tolok ukurnya jelas, sekian jam pelajaran ini, yang harus tingkatan dia apa? Mempunyai tingkat pemahaman apa? Mampu, dapat-terbatas, mahir, menguasai? Jadi sudah jelas kalau sekian jam dia harus dapat. Harus tau dia. Harus terukur. Kami siapkan juga perangkatnya mulai dari Hanjarnya sampai pada gurunya. Kalau dari luar pun ya....mohon maaf diminta bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan, pokok-pokok bahasan yang harus dibahas adalah ini...ini...ini...referensinya ini".

> "Juga yang kami hidupkan lagi adalah Jianbang [Kajian & Pengembangan] itu sangat penting. Sekarang kami hidupkan namun tidak ada dananya, kami mengambil dana dari yang lainnya. Kalau di *check* BPK [Badan Pemeriksa

> Keuangan] memang itu ya keliru. Dengan Jianbang, hasil didik mulai dari test awal hingga setiap perkembangannya dapat 'dilihat'. Juga sepuluh komponen pendidikan, bagaimana Hanjarnya, bagaimana gurunya, alin-longin [alat instruksi & penolong instruksi] –nya".

Menurut pemahaman TAC semua itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit didikannya. Untuk ke sana ada tingkatan-tingkatannya. Juga harus ada keterpaduan antara tingkat pengetahuan dengan kemampuan di lapangan. Katanya lebih lanjut:

> "Misalnya saja kemampuan taktik di lapangan tentang cara gerakan mendekati sasaran. Tentunya begitu keluar dari pendidikan di sini, ya harus sesuai standart yang diinginkan oleh lembaga pendidikan. Kalau tingkat tahu ya...mereka harus tahu, tingkat pemahamannya tahu harus terukur. Memang di sini cukup tingkat tahu saja. Tingkat mahirnya di pendidikan lanjutan".
>
> "....Tentunya tingkat pemahaman, pengetahuan dan tingkat ketrampilan itu juga tergantung dari waktu pendidikan. Pelajaran yang diberikan, dengan waktu yang terbatas hanya misalnya empat jam, tentunya seseorang tidak akan sampai pada tingkat penguasaan ilmu atau apapun. Ibarat kita memasukkan air ke dalam botol. Jadi harus sesuai, kaitannya dengan waktu, disini hanya lima bulan, dengan sekian puluh materi pelajaran".
>
> "Misalnya pelajaran menembak hanya sekian jam, tidak bisa kita menambah lagi. Karena kalau kita menambah lagi pendidikan ini akan berubah, akan banyak yang akan terpengaruh. Sistem semua akan berubah".
>
> "Dalam pelajaran menembak tingkat pencapaianya saya tidak bisa memastikan butuh berapa butir. Karena kemampuan setiap orang kan berbeda-beda. Termasuk – katanya-- bakat tetapi pada dasarnya semua orang bisa dilatih. Idealnya sepuluh butir untuk menjadikan seseorang dapat menembak. Tapi saya jadikan sepuluh butir harus mahir[215]. Untuk itu saya membuat terobosan-terobosan. Saya membeli senapan angin bikinan Pare [Kediri]. Berjumlah 60 pucuk. Senjata angin itu saya *design* persis. Maksudnya persis itu ya...jarak sisir, titik mata hingga panjangnya, sama persis dengan senjata api SS[216] yang akan digunakan prajurit. Sehingga bentuk fisik, segala macamnya sama. Nah tentunya itu sangat murah, saya suruh nembak sepuluh kali dengan jarak sepuluh meter saja. Kalau itu sudah kena, otomatis gambar bidiknya sama dengan yang SS. Dengan begitu dalam

[215] 'Mahir' adalah tingkat capaian tertinggi dalam pelajaran menembak. Secara bertingkat capaian adalah: 'Dapat Terbatas', 'Dapat', dan 'Mahir'.

[216] 'SS' adalah nama jenis senjata senapan yang kini menjadi senjata personel standar TNI. 'SS' diproduksi oleh Pusat Industri Angkatan Darat (Pindad), yang kini sudah dikembangkan dalam beberapa varian antara lain senapan tembak runduk SPR-1; dan SS-2 yang diklaim memiliki keunggulan dibanding M-16 (produksi AS) dan AK-47 (produksi Rusia) ketiga-tiganya memiliki kaliber sama yaitu 5,56 mm (Majalah TNI Patriot, Maret 2007). Namun berdasar pengakuan seorang perwira pelatih, SS lebih berat dan kualitas logamnya tidak sebagus M-16 yang menjadi senjata standar TNI sebelum diembargo AS.

> pelaksanaan menembak saya tidak perlu membuang peluru banyak. Nah di sinipun memerlukan inovasi-inovasi seperti itu. Itulah Alin-longin saya yang inovatif. Termasuk misalnya *chart* dari kertas, kalau kehujanan bagimana? Saya bikin sablon yang sekarang model modern, *'sreet'*...biar hujan pelajaran di lapangan *tetep* jalan".

3. Tugas Teritorial

Tugas kewilayahan atau teritorial adalah realitas sosial ke tiga di mana Subyek Penelitian bertindak selaku aktor yang melakukan eksternalisasi yang ikut menciptakan realitas sosial. Di banding realitas sosial kemiliteran lain, dalam tugas teritorial ini Subyek Penelitian berada dalam spektrum yang sangat luas yang didalamnya terdapat aktor-aktor sosial di luar aktor militer. Oleh sebab itu peran yang dimainkan pun bisa lebih beragam bukan hanya sebagai stabilisator saja; misalnya sebagai *gate keeper, solution giver, vasilitator, resources linker* dlsb. Namun apapun ragam perannya sebagaimana pengalaman yang dituturkan oleh BO dan TAC ini menunjukkan bahwa di medan tugas teritorial proses eksternalisasi lah yang lebih banyak terjadi, di mana Subyek Penelitian bertindak selaku aktor sosial yang memproduk struktur sosial dalam relasi "struktur-agensi".

Berikut ini penuturan BO, tatkala menjabat Danrem 0833/Baladhika Jaya dalam mengambil peran meredam konflik kasus pemilihan bupati di Banyuwangi:

> "Waktu itu saya ke sana. Sebelum di Banyuwangi terjadi, di daerah Tuban[217] sudah terjadi. Nah pas di Jember, saya *denger* Banyuwangi mau turun [jalan], seperti di Tuban dengan jumlah massa yang sangat besar. Dari Jember saya langsung ke sana

[217] Kasus Banyuwangi yang dimaksud adalah konflik antara bupati terpilih, Ratna Ani Lestari dan pendukungnya di satu pihak melawan DPRD dan masyarakat dipihak lain. Puncak konflik diwarnai beberapa kali unjuk rasa pada pertengahan hingga akhir tahun 2006 yang menuntut agar bupati mengundurkan diri atau dipecat. Sedang pemilihan bupati sendiri telah berlangsung tgl. 20 Juni 2005. Adapun peristiwa Tuban terjadi 29 Juni 2006, massa pendukung calon bupati yang kalah, yaitu pasangan Noor Nahar Husain-Go Tjoh Ping, meluapkan kekecewaannya dengan membakar kantor KPUD dan pendopo Kabupaten Tuban. Adapun pemilihan itu sendiri dimenangkan oleh Haeny Relawati, calon *incumbent.*

> [saya undang tokoh penggerak utamanya] ke hotel ngobrol sampai jam tiga pagi. Dia berkelit 'Saya *nggak* ini..*nggak* ini...'. Tapi saya dapat informasi banyak [tentang dia]".
>
> "Saya katakan: '[kalau betul terjadi] Saya nggak akan kemana-mana. Saya jauh-jauh datang ke sini untuk agar bagaimana masyarakat Banyuwangi aman. Anda orang Banyuwangi, jangan menggunakan massa, itu rawan. Lalui saja koridor politik. Kalau menghukum, hukum saja. Jangan menggunakan sektor keamanan. Ini urusan Polwil sama saya, kalau masuk ini agar tidak riskan mau demo batasi, jangan kebanyakan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah ada yang melempar, itu sudah anarkhis masuk sektor keamanan. Itu akan berhadapan dengan Polisi sama TNI. Saya tahunya hanya Pak Ketua'. Habis masing yang saling rivalitas, semua *nggak* mau rukun, masih pada gengsi akhirnya *gitu*...rodanya nggak maju-maju. Padahal masyarakat mengharapkan pelayanan yang bagus ....".

TAC menuturkan pengalamannya tatkala menjabat Komandan Kodim di Sumba, Nusa Tenggara Timur (1997-1999):

> "Persoalan teritorial khas sekali di sana. Di sana konflik horizontal sering terjadi. Sering terjadi perkelahian antar suku. Karena saya sudah dianggap anak daerah, karena saya diangkat jadi putra salah satu raja di sana, maka dalam kaitan perang antar suku bagi saya sangat mudah untuk menangani. Lalu di satu pulau ini ada dua Kodim. Banyak persoalan di luar Kodim saya yang saya tangani. Mereka minta tolong saya bukan sebagai Dandim tetapi –gampangnya-- sebagai warga Sumba yang sudah di angkat, dinobatkan sebagai putra sana. Sehingga anggapan orang, dua Kodim itu Dandimnya saya yang ada di Sumba Timur. Bila di Sumba Barat terjadi konflik ya minta tolong saya untuk mendamaikan".

4. Tugas Operasi

Dalam pelaksanaan tugas operasi, contohnya adalah pengalaman BO. Meskipun BO tidak menjelaskan pengalamannya secara spesifik, namun dia mendiskripsikan mengenai proses pengambilan keputusan 'demokratis' a la militer yang lazim dalam penentuan Cara Bertindak (CB) dari sebuah operasi baik operasi tempur maupun selain tempur pada tingkat satuan batalyon. Menurut BO, keputusan diskressional pada tingkat batalyon diperlukan karena organisasi satuan operasi pada tigkat ini sudah cukup kompleks, di sini kemampuan manajerial profesional seorang komandan dipertaruhkan. Komandan batalyon harus mampu memadukan berbagai unsur sumber daya kekuatan yang ada, tidak hanya satuan tempur (Satpur), akan tetapi juga satuan bantuan tempur (Banpur)

dan bantuan administrasi (Banmin) yang berada dalam Bawah Kendali Operasi (BKO)-nya. Beda dengan ketika bertugas dalam batalyon pasukan yang sifatnya menetap dalam sebuah kompleks asrama, tugas dalam batalyon operasi harus menggunakan apa yang oleh BO sebut "manajemen bergerak". Tuturnya lebih lanjut (sudah diedit penulis) sbb.:

> "Dan Yon itu sudah punya staf, punya anggota. Organisasinya cukup kompleks. Nah di situlah manajemen harus bisa berjalan. Termasuk manajemen bagaimana proses pengambilan keputusan. Ada proses 'demokrasi'-nya. Begitu ada perintah dari komando yang lebih atas, sebelum memutuskan, komandan biasanya memberikan petunjuk, diminta untuk dipelajari. Panggil semua staf. 'Ada tugas untuk kita, *gini..gini..gini..*'. Berikutnya ada pembahasan untuk menyelesaikan tugas".
>
> "Biasanya komandan melemparkan salah satu cara bertindak (CB-1). Nah para staf harus membuat CB pembanding, atau CB alternatif. Di situ masing-masing CB dibahas dari aspek inteljen bagaimana, dari aspek personil, taktik operasi, logistik, aspek teritorial dan sebagainya. Kita membuat perkiraan-perkiraan, setelah itu didiskusikan, masing-masing menyarankan kepada komandan".
>
> "....Komandan mempertimbangkan saran-saran tadi dari semua aspek, komandan memilih CB tertentu untuk dipakai. Kalau komandan sudah memutuskan, staf yang semula berbeda pendapat harus mengikuti. Tentu CB yang dipilih ada kekurangan, nah pada saat dipakai kekurangan harus dipenuhi. Kalau sudah keputusan harus loyal. Harus didukung. Tapi sebelumnya bisa otot-ototan".
>
> "Nah di situ proses demokrasinya. Di militer pun ada demokrasi. Silahkan ada argumen dan sebaginya. Nanti komandan akan mengamati, meskipun komandan juga punya perkiraan sendiri [CB-1]. Saya pilih yang menggunakan CB-2 misalnya. Nah semua harus mendukung ke situ, apa kekurangannya dipenuhi. Adapun CB yang tidak dipilih tetap disiapkan mana kala CB-2 gagal. Terus diproses...keputusan dikeluarkan melalui Perintah Operasi".
>
> "Begitu perintah sudah keluar, semua bergerak mengawasi pelaksanaan perintah itu. Ada yang mengawasi bidang logistik, masalah personil, pasukannya, pengamanannya, inteljen. Komandan juga ikut mengawasi untuk menjamin bahwa perintah itu dilaksanakan dengan baik".

Penuturan yang lebih lengkap mengenai pengalaman tugas operasi, termasuk tempur, dituturkan oleh TSO yang selama karir militernya sudah empat kali menjalani tugas operasi tempur di Timor-Timur tahun 1987, '89, '91 sebagai Danton, dan tahun 1993 sebagai Danki. Tugas operasi yang lain adalah di Aceh

1997, di Irian Jaya 1995 dan di Ambon 2002. Selama menjalankan tugas operasi di Tim-tim sering kontak senjata dengan musush. Tidak terlalu sering tatkala di Aceh. Di Ambon yang dihadapi konflik horisontal, jadi pasukan TSO hanya bertugas mendamaikan masyarakat yang berkelahi. Begitu juga waktu bertugas di Irian Jaya.

TSO menuturkan bahwa setiap komandan pada saat berangkat di medan operasi selalu dibekali dengan Surat Perintah Operasi. Di dalam perintah operasi itu menyebutkan tugas dan tanggung jawab tiap-tiap Kompi. Kemudian setiap Danki menjabarkan sesuai dan tergantung tugas pokoknya.

> "Pada waktu saya Pasi tempur di Timtim, ciri-ciri [musuh] GPK sudah di dalam perintah operasi itu. Juga sudah ada lampiran tentang hukum dan HAM, apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Kita *dikasih* peta operasi. Contohnya kompi saya bergerak di kecamatan A, tidak boleh keluar dari areal itu. Untuk pasukan saya sudah ada batas-batas yang jelas. Batas kiri sungai, batas kanan sungai atau jalan. Tidak boleh keluar dari itu. Itu [namanya] Sektor wilayah. Karena ini 'kan lawan gerilya. Jadi kalau lawan gerilya itu sektornya tidak lurus, tergantung kontur bentuk medan, supaya kita lebih mudah membaca".

> "....misalkan sudah ada batas jalan berarti sudah bukan sektor saya. Berarti kita tidak boleh lewat di situ. Kecuali ada perintah pengejaran, itu kalau memang mencari GPK, berarti kita harus ini harus siap.Jadi dalam hal itu sudah ada perintah apa yang boleh diperbuat, apa yang tidak boleh diperbuat. Contohnya misalkan .dalam perintah operasi itu di situ ada salah satu pasal menyebutkan lawan. Ciri-cirinya bagaimana, dia bagaimana bersenjata. Itu ada juga dalam lampiran [ketentuan] hukum itu. Kalau dia bersenjata boleh ditembak, karena membahayakan. Tapi kalau tidak bersenjata tidak boleh ditembak.... Putusan yang diambil Danki ya sesuai dengan perintah itu. Andaikata kita menembak orang tidak bersenjata, ternyata orang itu rakyat ya bermasalah pasti Dankinya ataupun tim itu. Dengan perintah operasi itu Danki akan menurunkan kepada Danton"

Namun di samping itu, menurut TSO, sebagai Danki pada dasarnya juga mengeluarkan surat perintah operasi untuk masing-masing Danton yang ada di bawah komandonya, dengan berpedoman pada perintah operasi dari yang lebih tinggi. Tapi pada akhirnya menurut SPO, kemampuan dan inisiatif individuallah yang sangat menentukan. Berdasar pengalaman SPO faktor sikap dan keseriusan

selama latihan sangat menetukan keadaan prajurit tatkala bertugas operasi tempur.

> " Jadi misalkan kita dalam menembak .... sewaktu latihan sasaran yang dibuat ada kesan gambar wanita, ada kesan gambar masyarakat tanpa senjata, ada kesan gambar orang bersenjata. Disitulah anggota kita di latih. Begitu muncul kesan gambar orang wanita tidak boleh ditembak. Begitu muncul kesan gambar orang bersenjata ya kita tembak. Dalam mengambil keputusan, kita latih di situ. Melihat orang kita harus bagaimana mengamankan diri dahulu. Ambil perlindungan untuk tembakan. Jadi kita sembunyi dulu, sambil kita membidik, tapi belum menembak mengarahkan senjata kepada lawan. Memang kita harus latihan refleks".

Begitu juga dalam masalah inteljen. Memang ada data inteljen dari pusat hanya bersifat umum. Tapi yang sangat diperlukan adalah bagaimana realitas di lapangan. Bagi perwira, mulai lulus dari Taruna masing-masing sudah dilatih intelejen tempur. Namun yang terpenting adalah malatih naluri tempur.

> "Pada inteljen pusat hanya disebutkan ciri-ciri lawan. Kemudian mengenai kebiasaan lawan, persenjataan mereka, adalah analisa keputusan kita di lapangan. Ini bisa dibilang bagian dari naluri tempur itu. Jadi memang naluri tempur itu harus diasah. Makin sering kita bertugas di daerah operasi makin terbiasa menilai suatu medan.... Dengan kebiasaan seperti ini, persenjataan seperti ini, perlengkapannya seperti ini semua kita pelajari".

> "Kebiasaan-kebiasaan antara GPK yang di Ambon, di Aceh, di Timtim, di Irian masing-masing beda. Kalau misalkan di Timtim mereka tidurnya di hutan, mereka jarang ke kampung karena memang di sana pasukan TNI pada waktu itu padat dan kemudian di kampungnya juga mudah dijangkau dengan kendaraan, sehingga pasukan gampang manuvernya sehingga mereka bersembunyi di hutan. Kalau di Aceh, itu kebanyakan mereka justru tidurnya di masyarakat, karena hutannya di sana lebat sama dengan di Irian. *Ndak* mungkin yang namanya GPK Irian itu tidur di hutan, mungkin sehari dua hari masuk hutan untuk meloloskan diri dari pengejaran tentara, tatapi kalau misalkan di hutan terus juga kena malaria. Pasti dia masuk ke rumah penduduk. Saking besarnya luasnya Irian itu kan".

> "Langkah yang saya ambil biasanya, pada saat saya masuk ke daerah operasi itu anggota saya, saya suruh memperhatikan bentuk medan saja. Jadi kalau ketemu GPK ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ketemu dia saya suruh pelajari medan.
> 'Di tebing kamu temukan apa?'
> 'Ada bekas ini pak, daun-daun aren, enau sepertinya orang tidur. Terus di sini kalau kira-kira kita turun dari tebing sekitar 10 meter untuk turunnya harus pakai tali bawahnya ada jalan yang ini'.
> 'Ya *udah* kamu catat. Ingat dalam kepalamu. Nanti kalau menemui medan seperti itu lagi, kamu harus waspada, kemungkinan ada GPK'.
> Kalau di Aceh: 'Coba diantara orang-orang itu siapa yang sama tentara apriori. Terus kemudian kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang tentara-tentara dulu yang

dihadang di daerah mana saja. Saya suruh waspada. Orang-orang apriori ini kita waspadai saja, tapi tidak usah menunjukkan kita benci sama mereka. Nah kemungkinan, terus berapa jumlah laki-laki yang ada di sana. Berapa jumlah laki-laki yang muda, yang tua, yang ini. Perhatikan kakinya mereka. Kalau orang biasa jalan di hutan kan kelihatan. Kalau dia diam ya kita biarkan saja, tapi kalau dia bawa senjata ya persoalannya lain'".

TSO menuturkan lebih lanjut pengalaman tempur di daerah operasi Tim-Tim sebagai berikut:

".... pada saat ada bayang-bayang hitam begerak, ada salah satu tim saya malam-malam waktu dia ngendap diatasnya ada [cahaya lampu] senter-senter mungkin sekitar 50 atau 100 m. Saya panggil Dankinya:
'Danki ini ada orang senter-senter', *Ndak* mungkin orang kampung. Langsung saya bilang:
'Kamu posisinya dimana?'
'Saya di lereng ketinggian'.
'Oke di lereng ketinggian, anak-anak anggotamu sudah masak belum?'.
'Belum Komandan'.
'Kamu jangan masak, kamu *nggak* usah makan, bila perlu makan supermi mentah, pakai air yang ada. Jangan coba-coba buka senter, jangan coba-coba kamu buat api. Kamu kalah medan. Sudah habis itu diam dulu *ndak* ada yang bergerak. Mau kencing kencing *aja* di tempat'.
Pagi-pagi subuh *trantanan* kami berpatroli. Kita kontak di situ. Kan sudah saya plot di peta, oh.. kontaknya di sini, saya pelajari bentuk medannya konturnya, paling-paling kalau dia lari ke arah sini. *Hunting* dia saya rapatkan jalan setapak, di lereng sungai. Kan malamnya sudah saya perkirakan kalau akan ke sini. Pagi-pagi dia saya suruh patroli ke sini. Kemungkinan kan dia lari ke sana, pagi-pagi juga saya suruh patroli ke sana. Di sini kontak, *ndak* dapat lari. Di sananya kontak juga, *mbales* juga dia di sana. Senjatanya juga banyak waktu itu, ada bunyi AR dan P3. P3 itu kan 7,2 [mm] bunyinya berat 'Dag!' Ditunggu di sana. Sana kontak lagi sampai 3 hari berturut-turut saya kontak terus. Kemudian jalankan aja, kontak lagi di sini. Terakhirnya baru dapat 2 pucuk. Sebetulnya dia banyak, waktu itu satu regu, tapi ya kenanya 2."

Dengan penuturan tersebut TSO menegaskan bahwa seorang komandan berhak sepenuhnya untuk mengambil keputusan di lapangan.

"Tidak. Tidak pak. [maksudnya tidak tergantung pada atasan] Semuanya diserahkan ke kita. Termasuk Danton pun manakala berhadapan dengan musuh di situ, mereka bersenjata, tidak perlu lapor saya. Dia laporannya enak. 'Danki saya ketemu GPK'. Sudah. Habis itu saya suruh menyelesaikan sendiri. *Nah* Taktik dan teknik cara dia menyelesaikan itulah yang kita latihkan. Mereka, Danki, Danton, Danru biasa kita latih cara bertindak. Ya naluri tempur tadi".

"Jadi kuncinya di naluri tempur. Jadi kalau saya punya naluri, misalkan saya lewat di suatu tempat ada dahan yang patah satu, pasti ada orang yang habis lewat di ini. Saya pernah menyergap hanya dengan informasi itu. Cuman saya 'masuknya' terlambat. Waktu saya datang mereka sudah tahu terlebih dahulu. Orangnya lari semua. Di tempat itu ada bekas masakannya. Terus ada bekas –kotoran. Maaf *tahi.*

Masih hangat lagi. Anak-anak bilang 'Masih *ijo'*. Waduh.... Larinya nggak lama ini'".

"Cenderung GPK di situ [Tim-Tim] lebih pintar dibanding Irian sama Aceh. Kalau di Papua sebetulnya tidak begitu pintar dan senjatanya relatif terbelakang. Kalau senjatanya modern GPK Aceh. Tapi yang militan sampai tidur di hutan segala GPK Timtim".

"Di Aceh saya sebagai pengamat *aja*. Tidak bawa pasukan. Kalau di Irian, waktu itu konflik horizontal jadi pekerjannya memisah. Kejadian Abepura di bakar. BBM [Bugis Buton Makasar] diserang sama orang asli sana [Papua]".

"Selama saya menjadi Danki korban tempur dari anak buah saya *ndak* ada. Karena saya tekankan agar mereka menguasai teknis dan taktis. Saya perintahnya ya satu saja: 'Silahkan kalau nggak mau belajar taktik dan teknik, jangan salahkan saya kalau kamu pulang hanya tinggal nama'. [di samping itu] Ya terus berdo'a juga".

Pada kondisi di lapangan, komandan pasukan bisa mengambil inisiatif sendiri. Tidak selalu menunggu komando dari atas, karena mereka telah dibagi ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil. Bahkan sekalipun seorang Bintara--yang senior, menurut TSO, diperbolehkan mengambil keputusan.

"Dalam operasi di Timtim kita operasikan satu Danki, tiga Danton, 100 orang anggota. Dari tiga peleton sesuai kepentingan, saya pecah-pecah lagi ke dalam tim. Tiap tim hanya 10 orang. Karena musuhnya kecil antara 5 sampai 6 orang dan persenjataan mereka hanya separuh. Jadi saya punya 10 tim. Sisanya lagi dipimpin oleh Bintara."

"Ketika operasi lapangan seorang Bintara Senior boleh mengambil keputusan. Ya tinggal *aja* PO [perintah operasi] saya yang saya sampaikan ke komandan sebagai dasar pertanggungjawaban. Saya sampaikan: 'Pak saya bagi lagi, boleh ?' Jadi kalau di medan operasi keputusan ada di garis depan, karena kalau garis depannya semuanya tergantung atau tidak punya inisiatif ya seperti tentara Amerika itu, banyak yang kebungkus [kantong mayat] waktu di Vietnam. Dan saya, di dalam mengambil keputusan cenderung ekstrim. Tapi setelah itu saya laporan ke komandam Batalyon: 'Saya bertanggung jawab pak. Saya sampaikan dasarnya ini, ...ini..ini'."

"Pernah saya membuat suatu keputusan, anggota yang nakal-nakal yang mulutnya tidak bisa di rem, tipikal orang seperti itu saya kumpulkan jadi satu tim. Saya kelompokkan sendiri. Saya *kasih* seorang Bintara [sebagai komandan] yang bisa ngemong. Saya bilang sama bintara itu: 'Kamu pimpin itu. Tugasmu hanya bakar-bakar di atas ketinggian'. Saya suruh bakar-bakar, selama di puncak [bukit]. Wah.... Danyon marah sama saya: 'Tri, kamu gimana anggotamu bakar-bakar. Bikin ribut semuanya'. Saya jawab: 'Biar pak, itu anggota yang saya korbankan'. Tapi dari sisi taktik, kalau mereka kelihatan di ketinggian dan bakar-bakar, GPK tidak akan mau lewat. Mereka 'kan lihat di sana ada tentara. Mereka pasti akan menghindar. Justru yang orangnya diam-diam saya susupkan di jalur di bawahnya yang saya duga akan mereka lewati. .... Di situlah kontak senjata terjadi. Justru

yang dapat banyak [menangkap atau membunuh musuh] ya yang di bawah-bawah itu".

"Jadi memang keputusan itu ada di garis depan. Sama sebetulnya [perang gerilya] dengan kita melaksanakan perang konvensional. Semua keputusan ada di garis depan, hanya dikonvensional itu lebih termonitor. Serangan yang sifatnya berhubungan dengan batalyon atau brigade. Seorang penembak senapan pada saat dia melaksanakan serbuan, disitulah dia harus melangsungkan pertempuran jarak dekat. Jadi setiap orang, setiap prajurit harus dilatih mengambil keputusan. Nah... si Danru [Komadan regunya]-nya sama Dantonnya juga harus bisa menilai medan, mengambil keputusan, misalnya perlu minta bantuan tembakan atau tidak. 'Wah dia kuat sekali, senjatanya berat di pihak sana', misalnya. Dihitung dari tembakannya, tembakan kelompok ini dari senapan SMS atau SMR. 'Sudah minta ke belakang saja. Saya minta bantuan tembakan mortir dengan koordinat sekian... sekian... sekian. Sudah [front] belakang ngirim mortir *'der...der....der'* atau Armed".

Menurut TSO, unsur-unsur dalam pertempuran yang harus disiapkan adalah unsur manuver, bantuan tembakan dan bantuan tempur. Unsur-unsur itu dimasukkan dalam perencanaan operasi. TSO memahami doktrin kelengkapan unsur itu sebagai keharusan, ketiadaan salah satu unsur mengancam ketidaksuksesan suatu pertempuran. Adapun Struktur penugasannya dalam unsur-unsur itu dijelaskan TSO sebagai berikut:

''Mortir itu ada mortir 5. Istilah 5 itu diameter munisinya 5 mm. Itu dibawa oleh anggota peleton. Kemudian di tingkat kompi ada mortir yang dikelola oleh Danki. Di batalyon ada mortir juga dibawah Dankiban [komandan kompi bantuan]. Kemudian juga ada di tingkat brigade. Kalau kita 'kan doktrinya, setiap kita melaksanakan serangan itu harus ada unsur manuver, unsur bantuan, unsur bantuan tembakan dan bantuan tempur. Kalau kita hanya unsur manuver *thok*, unsur infantri *thok* tidak mungkin bisa tercapai. Istilah perencanaan tiga hal ini yang harus kita perhitungkan".

"Bantuan tempurnya Zeni. Bagaimana membersihkan ranjau, bagaimana membuka lorong, membangun jembatan penyeberangan. Dari artileri berupa bantuan tembakan. Jadi harus ada Bantem, manuver, dan Banpur. Selalu harus terkait dan melekat di perencanaan operasi."

"Banmin [bantuan administrasi] juga harus ada. Misalnya, bagaimana melakukan *resupply* munisi, evakuasi ke belakang dll. Kalau operasi besar tidak mungkin seorang komandan hanya memimpin bertempur *thok*, padahal munisi kurang. Kemampuan orang untuk membawa munisi itu hanya 250. Berat sudah itu. Itu kalau termasuk senjata perlengkapan beratnya bisa 13 sampai 18 kilo gram".

"Penggunaan munisi itu tergantung pada kepadatan tembakan untuk membalas musuh dan berapa lama?. Untuk mengefektifkan munisi yang dibawa oleh

> prajurit, musuh harus ditembaki dengan bantuan tembakan. Istilahnya musuh harus ditekan. Jadi momentum serangan tidak boleh terhenti. Jangan sampai musuh itu bisa *ndelik* [bersembunyi dalam kepungan]. Begitu kepalanya nongol harus *diantem* lagi. Sampai dia betul-betul *ndelik* terus lantas kita serbu. Kalau sampai kita berhenti sebentar saja musuh akan berkonsolidasi...."
>
> ''Komposisi pasukan pada tingkat kompi harus ada unsur bantuan dan senapan. Jadi di batalyon ada Kompiban, ada tiga kompi senapan, satu kompi bantuan, satu kompi markas. Dulu komposisinya begitu. Itu mengacu pada ROI 45. Kepanjangannya Rangka Organisasi Infantri. Kita tiru dari Amerika pak. Dari waktu ke waktu terus disempurnakan. Pada tahun '73 penyempurnaannya. Kemudian tahun '81, '85. Terakhir tahun 2000. Pada prinsipnya semua itu memang 3 unsur tadi harus ada. Jadi 3 kompi senapan 'kan satuan manuver, satu kompi bantuan itu unsur bantem, kompi markas itu kan unsur administrasi, sama banpur itu digabung dalam kompi markas.''

Mengenai masalah dari mana sistem organisasi pertempuran di adopsi, menurut TSO sebagian besar diadopsi dari organisasi militer Amerika Serikat. Namun ada perbedaan yang cukup prinsip. Di Amerika Serikat seluruh batalyon berada dalam satu lingkungan brigade. Sehingga apabila batalyon-batalyon tersebut melaksanakan tugas operasi, semuanya berangkat. Tidak perlu meninggalkan perwakilan ataupun orang untuk menjaga pangkalan. Karena semua berada dalam satu kompleks. Penjelasan TSO lebih lanjut:

> "Kalau di Indonesia beda. Kita itu mengadopsi Amerika, tapi batalyon tempatnya sendiri-sendiri. Seperti [batalyon] 512 di Rampal, 502 di Jabung, ada yang di Madiun 501. *Lha* pada saat kita tugas operasi itu tidak bisa utuh 747 personel. Tidak bisa, karena siapa yang menjaga pangkalan, siapa yang menjaga Persit [Persatuan Isteri Tentara}, siapa yang petugas air. 'Kan tidak mungkin pangkalan ditinggal dijaga oleh Persit? Akhirnya dari 747 itu disusunlah tugas baru. Mungkin mengadopsi separoh-separoh. Saya pernah sarankan dibentuk saja dari satuan manuver itu, setiap kompi atau setiap batalyon yang kalau batalyon bertugas operasi ada orang yang jaga pangkalan. Ada *provost* atau kompi provost ataupun apalah namanya yang penting dia tugasnya bisa jaga pangkalan".

Selama era Orde Baru, tatkala Panglima ABRI/TNI dijabat oleh Jenderal L. B. Moerdani, telah terjadi perombakan yang cukup drastis terhadap organisasi satuan tempur TNI AD. Yaitu dibubarkannya unsur-unsur Bantem hingga pada tingkat satuan Brigade. Hal tersebut terkait dengan pergeseran tugas dan peran TNI AD yang tidak lagi terfakus pada persiapan pertempuran, namun lebih pada aspek keamanan dalam negeri

dan sosial politik. Di samping itu menurut TSO berdasar perkiraan inteljen strategis tidak mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang ada serangan militer dari negara lain. Atas dasar pertimbangan itu kompi-kompi Bantem dihapus dirubah menjadi kompi senapan semua.

> ".... waktu itu timbul ide kenapa *kok* tidak dijadikan kompi senapan semua saja dengan adanya Indonesia tidak ada ancaman. Kemudian pada akhirnya semua dijadikan kompi senapan. Jadi [dalam satu batalyon] ada empat kompi senapan. Bantemnya dihilangkan, senjata-senjatanya ditarik semuanya. Memang senjatanya juga sudah kuno kan. Begitu kita sadar bahwa kondisi sekarang ancaman musuh bisa datang setiap saat, kita bingung sekarang. Kita tidak punya unsur Bantem. *Gimana* kalau operasi gitu?"
>
> "Sekarang mulai diadakan lagi. Buatan Cina, Lorencui itu. Semuanya baru, tapi kualitasnya ya itu lah, karena murah. Yang penting bisa untuk memenuhui semua dulu kan, ha..ha.. Jadi begitu pola berfikirnya".

Berdasarkan pengalamannya dalam operasi gabungan dengan tentara negara lain, TSO memberikan kesan sbb.:

> "Memang kita ketinggalan. Dengan Malaysia, Singapura kalah kita, dengan India kalah. Peralatan ya...relatif maju mereka. Yang jelas kalah lah kita. Mereka profesional sekali. Memang ada yang mereka tidak miliki yaitu moral tempur dan jiwa juang. Pada saat latihan dengan [militer] Malaysia di Kalimantan, di Singkawang, kita dihambat oleh rawa-rawa kita lewati rawa itu sambil lari. Kalau mereka *nggak*, berhenti dulu di-*kumpulin*, baru cari jalan...Jalan yang tidak rawa, sehingga pakai *ular-ularan panjang gitu*. Kalau kita *ndak*. Semua masuk ke rawa dan tetap pakai ransel. Dia tidak. Minta kendaraan dulu. Katanya: 'Di doktrin saya seperti ini. Jadi kalau lewat ini...ya semua harus di-*kumpulin* dulu!' Ya sudah, akhirnya, pada hal pada waktu itu kita 'kan punya Protaplatgab [Prosedur Tetap Latihan Operasi Gabungan] bersama tentara Malaysia di perbatasan. Dalam Protapgab kalau ada musuh bersama, [untuk menghadapinya] bisa satu kompi dari Malaysia, dua kompi dari kita atau sebaliknya. Juga dalam melaksanakan operasi gabungan bisa dipimpin oleh salah satu. Kan tentunya tiap-tiap kompi dapat peta serangan. Kalau petanya dapat rawa-rawa ya harus ditembus itu. Nah tapi karena kita sama tentara Malaysia akhirnya sasaran yang lainnya sudah bisa direbut sasaran mereka belum, karena mereka menunggu jemputan kendaraan...."

Selanjutnya, mengenai masalah perpindahan tugas *(tour of duty)* dan perpindahan penempatan *(tour of area)*. Perpindahan tugas dan penempatan bagi setiap masing-masing perwira dari medan penugasan yang satu ke medan penugasan yang lain biasanya berlangsung relatif cepat. Perpindahan tersebut

menurut Letkol Suko Purwantoro (SPO) terdiri dari dua jenis: "perpindahan promosi" yaitu pindah tugas yang disertai dengan kenaikan pangkat dan "perpindahan pemantaban" yaitu perpindahan yang tidak disertai kenaikan pangkat. Jenis kedua ini bisa terjadi beberapa kali yang disebut Mantab I, Mantab II dst. Sekalipun tidak disertai kenaikan pangkat namun punya makna penting bagi citra diri seorang perwira TNI yang bersangkutan, sebab semakin sering seorang perwira mengalami perpindahan tugas dan penempatan, membuat perwira tersebut mendapat peluang untuk menganeka-ragamkan kemampuan dan pengalaman, hal itu membuat dirinya semakin matang dan tinggi tingkat profesionalismenya di mata koleganya.

Jenis dan bidang tugas di mana seorang perwira menghabiskan sebagian besar masa dinasnya, serta jenis dan bidang jabatan tugas yang paling sering diduduki dalam *proses tour of duty* dan *tour of area* akan memberi arah yang bersangkutan kepada keahlian yang lebih terspesialisasi dan akan menjadi faktor penentu karier yang bersangkutan selanjutnya. Misalnya karena sebagian besar masa dinas dan seringnya seorang perwira ditempatkan di bidang inteljen dia akan menjadi sangat *expert* di bidang inteljen seperti yang dialami oleh kolonel BO, dan hal tersebut terpantul dalam tingkah laku dan tutur kata BO --selama berwawancara dengannya-- yang kalem, dingin, dengan intonasi yang datar, kata-katanya penuh selidik.

Banyaknya jabatan di bidang pendidikan-latihan (militer) dibanding bidang yang lain ini akan membuat yang bersangkutan sangat *expert* di bidang pendidikan militer sebagaimana terdapat dalam diri kolonel TAC dan terpantul dalam dirinya yang dalam berpenampilan selalu rapih, santun, lugas, dalam

bertutur kata tampak berusaha tahu apakah yang diajak bicara benar-benar mengerti apa yang dimaksudkannya sebagaimana layaknya seorang guru, dst.

Subyek Penelitian menjadi peserta didik dalam lembaga pendidikan militer, terutama tatkala berada di Akademi Militer Magelang, apabila menggunakan analisis konstruksi sosial Berger dipadu dengan analisis strukturasi Giddens, dapat dikatakan bahwa Subyek Penelitian lebih cenderung sebagai pihak yang dibentuk, atau melakukan pembentukan diri dengan melalui proses internalisasi, yaitu momentum yang mempertautkan realitas obyektif tersebut di atas dengan "ruang kesadaran" dirinya. Pertautan tersebut mengahasilkan gugusan-gugusan pemahaman yang terakumulasi secara setahab demi setahab menjadi pemahaman yang bermakna bagi proses pembentukan konsep diri Subyek Penelitian sebagai perwira TNI yang dalam salah satu aspeknya adalah sebagai tentara profesional.

Dengan analisis tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses yang terjadi --dengan menggunakan istilah baik Berger maupun Bruner—adalah lebih pada proses internalisasi *(internalization)*. Sedang apabila merujuk pada Teori Strukturasi Giddens maka struktur sosial tersebut lebih memiliki peranan membentuk diri Subyek Penelitian daripada yang sebaliknya --yaitu Subyek Penelitian sebagai aktor sosial yang melakukan eksternalisasi atau menciptakan struktur sosialnya.

Adapun dalam perspektif Interaksionisme Simbolik Mead, Subyek Penelitian dapat dikatakan sedang berada dalam tahap main-main *(play)* di mana terdapat *siginificant other* ataupun *siginificant accident* yang menjadi *role model*-nya. Struktur sosial-militer berupa lembaga pendidikan dan latihan militer, serta penugasan-penugasan militer yang mereka terima dan laksanakan inilah yang

membuat mereka berproses setahap demi setahap menuju ke arah kematangan sebagai seorang pribadi perwira TNI termasuk kematangan profesional yang ditandai dengan kemenonjolan dalam spesialisasi tertentu.

Pada realitas sosial-kemiliteran kedua yaitu "dunia penugasan", subyek penelitian lebih cenderung melakukan proses eksternalisasi *(externalization)* di tempat dan saat mana mereka melakukan pencurahan diri dengan seluruh keadaan mental yang ada, mengekpresikan kembali semua pengalamannya yang sudah tersusun dalam bentuk pemahaman dan pemaknaan yang bersemayam dalam ruang kesadaranya.

Dalam konteks analisis struktur-agensi, mereka bisa dikatakan lebih sebagai aktor yang memiliki andil atas penciptaan struktur sosial kemiliteran. Oleh sebab itu realitas sosial kemiliteran yang berupa medan penugasan (pasukan, operasi, teritorial, pendidikan [sebagai tenaga didik]) adalah realitas obyektif yang berfungsi --meminjam istilah Giddens-- sebagai medium bagi Subyek Penelitian untuk melakukan eksternalisasi. Dalam perspektif interaksionisme simbolik Mead, pada domain ini Subyek Penelitian melakukan salah satu peran bersama-sama dengan pemeran-pemeran yang lain dalam sebuah permainan *(game).* Di sini bukan *significant other* lagi yang lebih dibutuhkan melainkan *generalized other* dan momentum tersebut dalam perspektif konstruksi sosial Berger bisa disebut sebagai terjadinya proses obyektivasi.

Namun yang perlu selalu diingat, bahwa antara proses internalisasi dan proses eksternalisasi itu adalah dua aktivitas mental yang terjadi secara serempak dalam diri setiap individu. Begitu pula realitas sosial, ia akan selalu menjadi medium

(realitas media) bagi terjadinya proses eksternalisasi namun juga sekaligus sebagai realitas obyektif bagi proses terjadinya internalisasi.

Manakala, dan itu niscaya terjadi, Subyek Penelitian dalam melakukan eksternalisasi tersebut berpapasan dengan aktor-aktor sosial yang lain, baik aktor elit TNI lain maupun aktor sosial selain TNI yang semua secara serempak juga melakukan eksternalisasi maka pada momentum ruang dan waktu itulah proses -- apa yang oleh Berger sebut-- obyektivasi tengah terjadi. Pada saat itulah realitas obyektif sebagai produk kolektif telah dan sedang diciptakan. Di sini –menurut pendapat penulis-- ada tiga level realitas sosial obyektif yang secara terus-menerus mengalami proses penciptaan di mana aktor elit TNI AD ikut andil, di samping juga sekaligus secara tidak ada henti-hentinya dijadikan obyek internalisasi dan sekaligus dijadikan medium untuk eksternalisasi. Ketiga level tersebut adalah:

Pertama, penulis sebut sebagai "Realitas Obyektif Mikro" yaitu berupa dunia sosial TNI yang diciptakan bersama-sama dalam momentum obyektivasi yang hampir sepenuhnya dilakukan oleh para aktor elit TNI. Realitas ini sudah dengan sendirinya juga merefleksi ke dalam ruang kesadaran aktor elit TNI AD dalam bentuk ruang kesadaran mikro.

Kedua, penulis sebut sebagai "Realitas Obyektif Mikro-Makro" di mana realitas ini posisinya berada dalam persilangan, sebagian berada dalam dunia sosial TNI dan sebagian yang lain sudah berada di luarnya. Realitas obyektif ini dicirikan antara lain oleh andilnya aktor-aktor sosial diluar TNI yang ikut berekspresi ke dalam wilayah yang pada dasarnya lebih merupakan *domain* dari

dunia sosial TNI. Konsekuensinya realitas ini juga merefleksi pula ke dalam ruang kesadaran elit TNI AD dalam bentuk ruang kesadaran mikro-makro.

Ketiga, penulis sebut "Realitas Obyektif Makro", yaitu dunia sosial di mana andil para aktor elit TNI hanyalah menjadi bagian sangat kecil diantara keterlibatan aktor-aktor sosial yang lain, yang secara kolektif melakukan eksternalisasi atau ekspresi dalam dunia sosial keseluruhan *(the whole of social world)*. Dan bagaimanapun realitas ini juga memantul ke dalam ruang kesadaran aktor elit TNI AD dalam bentuk ruang kesadaran makro.

Di dalam penyajian hasil penelitian ini pada dua bab berikutnya adalah akan mengacu pada katagori di atas. Pada Bab V adalah mengkosntruksikan mengenai pemahaman dan makna yang dialami oleh Subyek Penelitian pada level realitas sosial obyektif mikro, atau bagaimanakah konstruksi ruang kesadaran mikro mereka, sedangkan pada Bab VI berupa konstruksi pemahaman dan makna yang dialami oleh subyek penelitian pada level realitas sosial Mikro-Makro. Adapun pemahaman dan makna yang dialami oleh Subyek Penelitian pada level makro sengaja tidak dibahas secara eksplisit lantaran dalam tujuan penelitian ini hal tersebut sudah berada di luar cakupan pembahasan. Secara susbtansi sudah di luar masalah profesionalisme militer, sedang dari sudut kompetensi sudah menjadi domain perwira tinggi (jenderal) bukan perwira menengah. Hal terakhir ini didasarkan pada pernyataan dari subyek penelitian sbb:

> " ...profesionalisme TNI itu urusannya berlaku untuk kolonel ke bawah. Sedang yang jenderal sudah di luar urusan profesionalisme. Makanya sekolah militer itu hanya berlaku sampai kolonel. Tidak ada sekolah untuk jenderal. Jenderal itu

artinya ya *general*. Sudah mengurus yang umum-umum lah....termasuk jadi menteri..., presiden!"[218]

Sub tema yang telah dibahas tersebut di atas perlu dijelaskan dengan perspektif interaksionisme simbolik Herbert Mead dengan bertitik tolak dari konsep istilah *"self"*, karena momentum-momentum tersebut memiliki implikasi sekaligus --bisa disebut-- sebagai fase-fase perkembangan "diri" *(self)* subyek penelitian. Mulai saat mereka manjing ke dalam "jebakan awal" struktur sosial kemiliteran hingga pada keadaan yang sekarang yang sedang berjalan *(existing)* yaitu sebagai prajurit TNI yang profesional, sebagai aktor elit TNI AD, sekaligus sebagai bagian dari penciptaan struktur sosial kemiliteran TNI.

Teori interaksionisme simbolik Mead tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa selama dalam lingkungan keluarga dan masa pendidikan khususnya di Akademi Militer Magelang, dapat dikatakan sebagai fase di mana Subyek Penelitian lebih cenderung berada dalam tahap main-main *(play stage)* men-seolah-kan diri menjadi sosok tentara sebagaimana yang dipahaminya. BO misalnya menceritakan betapa dirinya merasa gagah ketika mengenakan kaus seragam TNI AL pemberian kakaknya. Begitu juga TSO dengan tindakannya terlibat dalam perkelahian-perkelahian merupakan refleksi imajinasi akan dirinya sebagai tentara yang dimaknainya sebagai orang yang harus berwatak pemberani.

Adapun yang bertindak sebagai *significant other* pada fase main-main *(play stage)* ini adalah para orang tua mereka, saudara, kerabat dekat yang terlebih dahulu berdinas di militer. Atau figur impersonal dalam suatu kejadian yang memiliki kesan sangat mendalam *(siginifant accident)*. Itu tatkala Subyek Penelitian masih di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan tatkala selama berada

[218] Pernyataan tersebut disampaikan oleh Letkol Art. Suko Purwantoro, namun pemahaman yang sama disampaikan juga oleh Letkol Inf. Tri Soewandono dan Kol Inf. Budihardjo.

di dalam akademi militer *Significant other*(s) tersebut bergeser kepada tokoh-tokoh utama TNI terdahulu, terutama Panglima Besar Jenderal Soedirman. Pendiri TNI ini diposisikan sebagai "model ideal" sedangkan para pelatih dan guru militer diposisikan sebagai "model nyata"[219] mereka.

Berdasar penuturan BO dan subyek penelitian yang lain, sangat tampak bahwa: pandangan, tindakan dan kepribadian Pangsar Jenderal Soedirman, yang telah direduksi menjadi citra ideal dan ditauladankan oleh para pelatih dan guru militer (gumil) adalah menjadi materi utama selama pendidikan di Akademi Militer Magelang terutama dalam pendidikan kejuangan dan pembentukan kepribadian, di mana menurut pengakuan Subyek Penelitian adalah merupakan dua materi yang memiliki porsi terbesar dan terpenting selama menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang. Kegiatan kuliah berupa *"field trip"* yaitu menelusuri route-route gerilya yang pernah dilalui oleh Pangsar Soedirman tatkala memimpin perang gerilya, adalah sebagai mata kuliah akhir yang harus ditempuh oleh para taruna (mahasiswa) akademi militer. Ia adalah merupakan puncak dari fase "main-main" sebagai seorang Soedirman tersebut. Atau dengan kata lain, sebagai tahap awal pembentukan *"Me"* (memakai istilah dari Mead). Yaitu awal terbentuknya konsep diri *(self-concept)* atau jati diri *(self-identity)* Subyek Penelitian sebagai aktor elit TNI AD. Kalau ditelisik dari penuturan TAC dan BO tampak bahwa faktor utama pembentuk konsep diri selama mereka di Akademi Militer ini adalah adalah berbentuk contoh-contoh keteladanan, pembiasaan, dan latihan-latihan.

[219] Dalam hal "model nyata" ini Tatang Adi Cahyono misalnya menceritakan adanya Guru-guru Militer, yang dengan siapa dirinya sangat terkesan akan tindak-tanduk, cara berpakaian, bicaranya yang ia contoh hingga sekarang.

Tahap berikutnya dapat disebut sebagai tahap pengembangan jati diri, yaitu tatkala Subyek Penelitian tamat dari pendidikan akademi militer dan mulai menjalankan tugas-tugas kedinasan baik tugas sebagai pucuk pimpinan maupun staf. Baik tugas di pasukan, dalam operasi, di lembaga pendidikan militer maupun tugas di teritorial. Memang di sela-sela tugas tersebut Subyek Penelitian juga harus mengikuti berbagai pendidikan sebagai pendidikan lanjutan dari Akademi Militer Magelang sebab memang tujuan dari pendidikan di akademi ini adalah termasuk menyiapkan lulusan agar siap menempuh pendidikan-pendidikan selanjutnya[220]. Pendidikan lanjutan tersebut ada dua jenis yaitu pendidikan pembetukan (Diktuk)[221] dan pendidikan pengembangan (Dikbang). Dikbang terdiri dari pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) dan pendidikan pengembangan umum (Dikbangum), sedang pendidikan Akademi Militer Magelang adalah termasuk pendidikan pertama (Dikma). Pendidikan-pendidikan itu boleh dikatakan sebagai bagian dari tahap pengembangan konsep diri atau jati diri, di mana sifat-sifat jati diri itu ada tiga yaitu: dipelajari *(learned)* artinya bukan *ujug-ujug* ada atau bawaaan lahir, teroganisir *(organized)* artinya memiliki konsistensi yang relatif stabil, serta dinamis artinya berkembang dari waktu ke waktu.

Pada tahap akhir pengembangan jati diri, yaitu di medan penugasan, Subyek Penelitian tidak lagi berada dalam tahap "main-main" *(play stage)* melainkan lebih berada dalam tahap permainan *(game stage)*. Di medan

[220] Tujuan pendidikan Akademi Militer Magelang: "Membentuk Taruna Akmil untuk menjadi Perwira TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Saptamarga, pengetahuan dan ketrampilan dasar golongan Periwira, berkemampuan intelektual setingkat akademi serta jasmani yang samapta dan siap mengikuti pendidikan selanjutnya." (SK KASAD NO:SKEP/375/X/2002).

[221] **Diktuk** adalah pendidikan militer yang *in put*-nya dari anggota TNI, bukan dari masyarakat, untuk naik ke golongan yang lebih tinggi misalnya dari Tamtama ke Bintara, atau dari Bintara ke Perwira.

penugasan tersebut yang hadir bukan lagi *siginificant other(s)* melainkan apa yang oleh Mead sebut sebagai *generalized other*[222], yang dalam hal ini bisa diartikan bahwa Subyek Penelitian lebih dilihat sedang memainkan peranan bersama-sama dengan orang lain baik orang lain itu adalah sebatas sesama perwira (aktor elit TNI), atau sesama prajurit TNI, atau juga mereka yang sama sekali bukan anggota TNI. Itu semua tergantung pada jenis medan penugasan yang diemban. Orang-orang di luar Subyek Penelitian tersebut juga memainkan peranan tertentu, yang berbeda-beda namun satu sama lain --termasuk dengan Subyek Penelitian-- membangun relasi sosial yang koheren dalam proses menciptakan simbol, memaknai simbol dan berkomunikasi melalui simbol[223]. Apa yang perlu diberi penekanan makna dari *generalized other* di sini adalah bahwa subyek penelitian tidak lagi hanya harus memahami peranan dirinya sendiri sebagaimana dalam tahap main-main akan tetapi jauh lebih kompleks yaitu harus memahami peranan-peranan yang dimainkan orang lain sedalam dan seluas mungkin. Bahwa di medan penugasan ini ada perwira sejawat yang memiliki peran kurang lebih sama dengan dirinya, juga ada perwira yang berperan sebagai atasannya, ada bintara-bintara dan tamtama-tamtama yang berperan sebagai anak buah, dan ada orang-orang bukan prajurit TNI yang juga memiliki peran-peran tertentu.

Akhir diskusi pada bab ini, perlu ditegaskan bahwa sebetulnya pembahasan di atas adalah dimaksudkan untuk mengaitkan pandangan Berger (sebagaimana telah dibahas dalam bab II) akan pentingnya makna peran *(role)* dan identitas *(identity)* dalam fase internalisasi. Dengan peranan dan identitas tertentulah anggota-anggota

[222] Robert Hagedorn, ibid, hal. 75.
[223] Robert Hagerdon, Ibid. , hal. 17.

dari suatu struktur dalam hal ini setiap prajurit TNI melakukan internalisasi. Perwira Menengah (Pamen) TNI AD sebagaimana halnya manusia pada umumnya adalah ter-struktur oleh realitas obyektif tertentu yang didiaminya. Masing-masing memiliki peranan dalam struktur. Memainkan sebuah peran berarti menjadi sebuah pribadi *(be that person)*. Kesadaran individual akan diri dan dunianya akan terbentuk sesuai dengan peran tadi. Struktur obyektif yang didiami oleh Pamen TNI AD akan membuat dirinya tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan *(play a role)* melainkan juga "menjadi" (beridentitas). Misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keprajuritan *(military values),* "menjadi" seorang komandan adalah menjadi[224], sepanjang menjadi komandan itu didefinisikan oleh struktur. Sang komandan akan menginterpretasikan seluruh kehidupan, diri, dan dunia sosialnya menurut identitas yang diberikan oleh struktur tadi atas dirinya.

Semua yang dipaparkan di atas menggambarkan bagaimana jati diri subyek penelitian –yang antara lain memiliki sisi-- sebagai perwira TNI professional terbentuk di dalam sebuah *"black box"* kehidupan, yang didalamnya terjadi proses dialektika yang sangat ruwet lagi kompleks. Dialektika terjadi dalam "dualitas struktur" *(structure of duality)*[225] antara "realitas struktur sosial di 'luar sana' yang obyektif" dengan "realitas struktur kesadaran di dalam diri yang subyektif". Di mana kejadian tersebut sesungguhnya jauh lebih ruwet dan kompleks dari sekedar yang bisa digambarkan dan dijelaskan lewat penelitian ini.

---

[224] Kata "menjadi" (dalam tanda petik) dengan **menjadi** di sini untuk membedakan antara peran imitatif dengan peran sejati. Bandingkan antara Taufik Savalas "Menjadi" presiden dalam serial TV "Presiden BBM" dengan Susilo Bambang Yudhoyono **menjadi** presiden RI.

[225] "Dualitas" *(duality)* adalah istilah yang digunakan Giddens untuk membedakan dengan kata dualisme. Dualitas di sini dimaknai sebagai adanya kesejajaran dan tidak adanya pemisahan antara kedua realitas, yaitu realitas struktur sosial dengan realitas struktur kesadaran.

BAB V

GAMBARAN RUANG KESADARAN MIKRO: MEMBANGGAKAN PENDIDIKAN MEMPRIHATINKAN KESEJAHTERAAN

Kalau di dalam bab IV penyajian hasil penelitian lebih ditekankan pada pemaparan jenis-jenis realitas obyektif dunia sosial *(social world)* yang menghampiri kesadaran Subyek Penelitian, maka dalam bab ini akan ditekankan pada pengungkapan realitas subyektif yang ada dalam dunia pengalaman *(empirical world)* Subyek Penelitian saat ini. Sebagaimana telah disingung pada akhir bab IV, di dalam bab V ini pemaparan akan lebih difokuskan pada domain yang per-katagori lebih cocok disebut level mikro.

Atau dengan kata lain, pada bagian ini akan menyingkap struktur pemahaman Subyek Penelitian sebagai produk dari proses internalisasi-eksternalisasi yang dilakukan terhadap realitas obyektif mikro yang membentuk jati diri Subyek Penelitian sebagai seorang perwira TNI profesional yang pada gilirannya merefleksi pada gambaran diri *(self image)* serta perasaan harga diri (*sense of self esteem*)-nya.

Konsep Diri *(Self Concept)* atau Jati Diri (*Self Identity*) adalah sebagaimana didiskripsikan dalam *Wikipedia Free Encyclopedia* sebagai berikut:

> *"**Self-concept** or **self-identity** is the mental[226] and conceptual understanding and persistent regard that sentient[227] beings hold for their own existence. In other words, it is the sum total of a being's knowledge and understanding of his or her self. The self-concept is different from self-consciousness, which is an awareness or preoccupation with one's self. Components of the self-concept include physical, psychological, and social attributes, which can be*

[226] Mental: (biasanya sebelum kata benda) dihubungkan dengan, atau kejadian di dalam pikiran (sally Wehmeier, *Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, p. 1164-1165).

[227] Kemampuan melihat atau merasakan sesuatu melalui penginderan. Penginderaan adalah melihat, mendengar, membau, merasa, dan meraba dengan menggunakan bagian dari tubuh tertentu untuk memperoleh informasi mengenai dunia sekitar. (Sally Wehmeier, ibid. p. 800).

influenced by the individual's attitudes, habits, beliefs and ideas. These components and attributes can not be condensed to the general concepts of self-image and the self-esteem".

Jadi "konsep diri" atau "jati diri" adalah pemahaman mental dan konseptual, yang terjadi secara terus-menerus (*persistent*) sehubungan dengan diri manusia sebagai makhluk pengindra (*sentient being*). Pemahaman tersebut dijadikan pegangan bagi keberadaannya. Konsep diri berbeda dengan kesadaran diri (*self conciouesness*), yang adalah suatu kesadaran atau suatu keasyikan yang tertuju hanya pada diri sendiri. Komponen dari konsep diri itu adalah termasuk di dalamnya pertanda pisik, psikis, dan sosial, yang keadaanya dapat dipengaruhi oleh sikap, kebiasaan, keyakinan maupun ide individual. Komponen-komponen dan pertanda-pertanda tersebut tidak hanya cukup diringkaskan ke dalam konsep umum tentang gambaran diri (*self-image*) dan penghargaan diri (*self esteem*) sungguhpun kedua hal tersebut merupakan bias atau terpaan dari konsep diri.

Secara sederhana, apabila pengertian tersebut diturunkan ke dalam pengertian yang terkait dengan penelitian ini maka konsep diri adalah keseluruhan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Subyek Penelitian, baik bersifat mental maupun konseptual, yang dijadikan oleh Subyek Penelitian sebagai pegangan, pedoman akan keberadaannya sebagai Perwira Menengah atau sebagai aktor elit TNI AD. Dari pemahaman yang dimilikinya tersebut antara lain merefleksikan gambaran diri (*self image*) sera rasa harga diri (*sense of self esteem*).

Setelah mencermati berbagai pernyataan, pandangan serta pendapat Subyek Penelitian selama FGD (*focused group discussion*) berlangsung serta wawancara yang menyangkut tema ini, serta pertimbangan teknis untuk mempermudah dalam pemaparan data dan analisis data, maka pembahasan ini akan dibagi ke dalam empat

sub-tema yaitu: *pertama,* pemahaman tentang jati diri TNI dalam kaitannya dengan profesionalisme militer. *Kedua,* pemahamannya mengenai profesionalisme secara umum dan profesionalisme militer. *Ketiga* Pemahamannya tentang pendidikan dan latihan sebagai prasyarat membentuk TNI profesional. *Keempat,* perlengkapan dan persenjataan sebagai sebagai penunjang. *Kelima* Kesejahteraan yang layak bagi prajurit dan biaya operasional sebagai syarat pokok.

A. Jati Diri dan Profesionalisme

Sebagaimana diketahui bahwa TNI memiliki rumusan yang khas berkenaan dengan jati diri (*self identity*)-nya. Jati diri tersebut merupakan rumusan yang diramu dari: *Pertama,* adanya faham atau nilai-nilai "ksatriya" sebagai dasar jati diri TNI dengan menjadikan Jenderal Soedirman sebagai *ideal type*-nya. Nilai-nilai ksatriya tersebut telah dibahas secara cukup mendalam di dalam Bab II; *Kedua* konstruksi pengalaman heroik-romantis prajurit TNI di medan tugas yang dialami, terutama selama perang kemerdekaan, hal tersebut juga telah dikupas cukup panjang baik di dalam Bab II maupun Bab III.

Formula Jati Diri TNI pertama-tama dilontarkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman yang menyebut bahwa TNI adalah Tentara Rakyat, Tentara Revolusi dan Tentara Nasional. Pada perkembangan selanjutnya, sebutan Tentara Revolusi tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada menjadi Tentara Pejuang.

Di dalam UU No 34 tahun 2004, Bab II Pasal 2, tiga Jati Diri yaitu Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Nasional --di samping Tentara Profesional-- didiskripsikan sebagai berikut: Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; Tentara Nasional, yaitu

tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan, serta agama.

Berbeda dengan apa yang tertuang dalam UU No 34 tahun 2004 yang menempatkan TNI sebagai "Tentara profesional" sebagai bagian dari Jati Diri TNI, para informan memahami "Tentara profesional" adalah suatu nilai artifisial yang menjadi bagian dari jati diri melalui "inplantasi". Sedang ciri-ciri Jati Diri TNI yang otentik adalah "Tentara Rakyat", "Tentara Pejuang", dan "Tentara Nasional". Adapun istilah "Tentara Profesional" lebih dipahami sebagai ciri umum dan bersifat inheren bagi semua militer di setiap negara. Oleh karena itu tidak tepat kalau disebut sebagai Jati Diri TNI. Meskipun secara substantif, hal tersebut difahami mereka sebagai sesuatu yang sudah inheren dengan keberadaan TNI sebagai tentara modern, dalam hal ini sama halnya dengan tentara-tentara di semua negara, khususnya negara yang militernya sudah terorganisir dengan baik dan relatif modern. Sedangkan "Profesionalisme TNI" artinya ciri tentara profesional yang sudah mengalami spesifikasi karena sudah dirasuki oleh tiga Jati Diri TNI yang otentik tersebut.

Jadi sebagian besar Subyek Penelitian cenderung lebih memahami profesionalisme dalam militer secara umum itu hanya berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian di bidang kemiliteran (*expertise*) semata --bukan sebagaimana pendapat Huntington yang memasukkan faktor tanggung jawab dan ikatan korps. Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan (BHK), lulusan Akmil '86 yang saat penelitian dilakukan sedang menjabat Dandim 0813/Malang-Batu, misalnya menyatakan:

> "Secara umum, profesionalisme prajurit RI dimulai dari tingkat pelaksana paling bawah hingga pada tingkat *top* manajerial berlaku sama dengan tuntunan profesionalisme prajurit di negara-negara lain dengan menguasai teknis kemiliteran, penguasaan alat persenjataan, memiliki kesigapan yang prima dan memiliki tingkat pengetahuan sesuai dengan bidangnya".

Lebih lanjut menurut pria yang berasal dari kecabangan Infanteri Lintas Udara (*air borne*) ini bahwa dibanding prajurit negara lain pada umumnya, prajurit TNI memiliki suatu kekhususan yaitu dengan jati dirinya: sebagai prajurit pejuang, prajurit rakyat dan prajurit nasional. Hal senada dikemukakan oleh Letkol (Inf) Tri Suwandono (TSO), menurutnya dengan adanya Jati Diri TNI membuat profesionalisme TNI menjadi berbeda dengan profesionalisme militer pada umumnya. Pamen kelahiran Surabaya, lulusan Akmil '86, yang saat penelitian dilakukan sedang menjabat Dandim 083/Kota Malang lebih lanjut menuturkannya sebagai berikut:

> "Konsep profesionalisme keprajuritan TNI Angkatan Darat tidak sama dengan konsep profesionalisme keprajuritan yang umum dianut angkatan bersenjata negara-negara lain. Profesionalisme keprajuritan Angkatan Darat tidak diukur semata-mata dengan ketrampilan dalam penguasaan taktik dan teknis kemiliteran, tetapi berdasarkan kepada ketrampilan penguasaan taktik dan teknik militer yang berlandaskan kepada jati diri Prajurit TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional".

Kalau antara jati diri dengan profesionalisme difahami sebagai dua hal yang berbeda, lantas bagaimana kedudukan jati diri tersebut terhadap profesionalisme? Bagaimana pula hubungan antara keduanya? Mengenai kedudukan jati diri terhadap profesionalisme, di dalam pemahaman Subyek Penelitian, kedudukan jati diri atas profesionalisme sangat berarti dan menentukan. Karena jati diri itu bagi mereka adalah menjadi faktor pengganda (*multiplayer effect*) terhadap kinerja profesionalisme. Letkol (Art) Suko Purwantoro (SPO) antara lain mengemukakan bahwa dengan rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit, dengan peralatan yang sudah *uzur* dan ketertinggalan teknologi, serta tekanan-tekanan yang dialami sebagai dampak saat terjadi gerakan reformasi; mestinya TNI sudah mengalami demoralisasi yang parah. Tetapi hal itu tidak terjadi karena adanya faktor spirit yang terkandung di dalam jati diri tadi. Dengan demikian kedudukan jati diri terhadap tugas pokok dan

fungsi TNI jauh lebih penting, dibandingkan dengan profesionalisme dalam arti *expertise*.

> "[jati diri] Itu merupakan efek pengganda. Efek pengganda ini berpengaruh terhadap profesional secara umum. Misalnya nilai kerja [TNI] diperbandingkan dengan angkatan bersenjata negara lain dengan teknologi yang sama, maka TNI akan lebih baik. Contoh yang paling gampang, salah satunya adalah [unsur profesionalisme] *well paid* [gaji yang baik]. Kita tidak *well paid* saja sekarang, semangatnya sudah tidak ketulungan....."

Lantas bagaimana pemahaman mereka terhadap jati diri tersebut? Untuk memberi gambaran tentang pemahaman mereka terhadap Jati Diri TNI dapat dicermati melalui paparan sebagai berikut ini.

1. *Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan Siapapun*

"Jati Diri TNI sebagai tentara rakyat, artinya ialah bahwa TNI itu berasal dari rakyat serta berjuang untuk kepentingan rakyat", demikian Letkol (Art.) SPO memberi definisi yang agak beda dengan rumusan dalam UU No 34 tahun 2004. Lebih lanjut, Pamen lulusan Akmil '89, sebagaimana pandangan umum Pamen yang menjadi subyek penelitian ini, lebih menekankan hubungan jati diri sebagai Tentara Rakyat dengan masalah kekuasaan. Yaitu bahwa TNI tidak boleh menjadi alat kekuasaan siapa pun. Sekali menjadi alat kekuasaan, TNI pasti akan dijauhi oleh rakyat. Ia secara tidak langsung mengakui bahwa pernah terjadi, ada masa saat mana TNI telah menjadi alat kekuasaan.

> "Jika terjadi distorsi tentang jati diri TNI yang selama kurun waktu telah menjadi alat kekuasaan, kini harus diluruskan kembali. Hanya dengan keberpihakan dan kedekatan serta mencintai dengan tulus terhadap rakyat, maka TNI akan dihormati, disegani dan dicintai oleh rakyat dan bangsa Indonesia".

Menurut gagasan SPO mengenai pengabdian TNI, pengabdian tersebut hanya diberikan kepada pemegang kedaulatan tertinggi negara yaitu rakyat. Itulah loyalitas TNI yang paling hakiki. Secara struktural TNI adalah bagian dari pemerintah dan bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa secara universal pun militer

senantiasa menjadi alat pemerintah. Oleh karena itu sudah seyogyanya loyalitas TNI diberikan kepada pemerintah, namun loyalitas tersebut hanya diberikan kepada pemerintahan yang *legitimate* dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian seorang prajurit TNI dengan memahami jati dirinya selaku tentara rakyat, maka akan senantiasa mendedikasikan profesionalitas yang dimilikinya untuk kepentingan rakyat.

2. *Mengutamakan Tugas, Kehormatan, dan Negara*

SPO menegaskan gagasan idealnya bahwa *Duty, honor and country* (tugas, kehormatan, dan negara) harus menjadi landasan utama TNI. Orientasi TNI harus hanya pada tugas, kehormatan dan negara, sehingga tidak ada pamrih untuk mendapatkan jabatan politik ataupun hal-hal yang lainnya. Dalam kondisi perekonomian yang masih serba sulit dimana dukungan anggaran dan perlengkapan jauh dari memadai namun TNI tetap akan bertindak yang terbaik, inilah merupakan perwujudan TNI sebagai tentara pejuang.

Lebih lanjut SPO menyatakan bahwa tingkat kepejuangan yang akan melandasi keseluruhan totalitas tampilan prajurit akan sangat ditentukan oleh tingkat moralitas prajurit. Dengan demikian moral merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan barometer untuk memulai tampilan jati diri TNI sebagai tentara pejuang dan menjadi alat penting karena berhubungan dengan ajaran tentang baik dan buruk, serta menjadi dasar penilaian terhadap satu sikap maupun perbuatan yang pantas atau tidak dilakukan prajurit TNI dalam mempertahankan jati diri sebagai tentara pejuang. Selaras dengan konsep jati diri selaku tentara pejuang, maka seorang prajurit TNI akan mampu melipat gandakan tingkat profesionalitasnya di medan tugas karena dilandasi oleh semangat pantang menyerah atau militansi yang tinggi sebagai refleksi dari kepejuangannya itu.

Sementara itu Subyek Penelitian yang lain, yaitu AS menyatakakan Jati Diri TNI sebagai tentara pejuang ini sangat vital terutama dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi negara yang tidak memungkinkan bagi ketersediaan anggaran dan perlengkapan yang memadai bagi TNI. Sementara itu negara-negara tetangga yang bersahabat maupun yang potensial menjadi musuh mampu dan berlomba-lomba memperbesar anggaran militer dalam upaya meningkatkan postur kekuatan pertahanannya. Dalam hubungannya dengan hal tersebut maka jati diri TNI sebagai tentara pejuang ini sangat vital keberadaanya.

Para Pamen subyek penelitian memandang bahwa manakala semua negara berusaha meningkatkan profesionalitas militernya, sementara bagi TNI untuk mengimbangi dari segi perangkat yang diperlukan bagi peningkatan profesionalitas tidak mungkin, maka kekuatan utama TNI untuk mengimbangi sebenarnya adalah mempertajam wawasan kebangsaan dan spirit kejuangan. Hal itu antara lain seperti dikemukakan oleh Kol. (Inf) Budihardjo (BO). Danrem kelahiran Purwokerto alumni Akabri '80 ini menyatakan:

> "Bagaimanapun canggihnya senjata kalau mentalnya, kejuangannya, jelek tidak ada gunanya. Malah bisa berbahaya. Kalau senjata itu bisa cepat rusak dan berkarat. Menembak itu juga bisa di belok-belokkan....!"

3. *Sebagai Tentara Nasional: Apapun "Its my Indonesia"*

Menurut SPO, prajurit TNI adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara Indonesia. Maka hanya Warga Negara Indonsia (WNI) saja yang bisa diterima menjadi anggota TNI. Di TNI tidak dikenal adanya tentara legiun asing sebagaimana berlaku di militer beberapa negara lain. Sebaliknya, TNI juga tidak akan pernah berperang selain untuk membela kepentingan nasional Indonesia. Kalau ada tugas keluar (*off shore duty*) harus

dalam rangka terciptanya perdamaian dunia sesuai amanah Pembukaan UUD 1945, yang sebetulnya hal itu dipahami oleh SPO --baik langsung maupun tidak langsung-- harus tetap terkait dengan kepentingan nasional dan bangsa Indoensia.

Secara internal TNI sebagai Tentara Nasional artinya harus memposisikan diri di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama. Dengan demikian maka meskipun komposisi demografis prajurit TNI sangat tinggi tingkat heterogenitasnya, akan tetapi dalam menjalankan tugas pengabdiannya tidak akan pernah merefleksikan hal-hal yang bersifat primordial.

Salah seorang subyek penelitian, yaitu Letkol (inf) Tri Swandono (TSO) menekankan pentingnya jati diri TNI sebagai Tentara Nasional ini untuk saat ini. Sebab, walaupun secara *de facto* dan *de jure* telah menyatakan bahwa NKRI merupakan bentuk yang paling sesuai dengan kondisi Bangsa dan Negara Indonesia, namun berbagai permasalahan disintegrasi bangsa muncul dari segala aspek. TSO memahami banyak terjadi pemaksaan kehendak dari satu kelompok kepada kelompok lainnya adalah termasuk faktor pemicu disintegrasi. Gejala-gejala yang ada pada saat ini oleh TSO dianggap bahwa kondisi persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara cukup rentan.

> " Dalam hal ini jati diri TNI sebagai Tentara Nasional harus bisa menjadi perekat dan pemersatu.Guna menyikapi hal tersebut perlu ditanamkan wawasan kebangsaan yang barang kali tergolong cukup ekstrem yaitu artinya bahwa setiap komponen masyarakat ketika berhubungan dengan pihak luar harus berani mengatakan bahwa *'It's My Indonesia'*".

Masih dalam kaitannya dengan jati diri TNI sebagai Tentara Nasional memiliki implikasi yang cukup berat bagi tugas seorang perwira TNI. Kol. (Inf) BO menganggap bahwa menjalankan tugas pokok saja adalah tidak cukup bagi seorang perwira TNI. Terkait dengan posisinya sebagai komandan kewilayahan menurutnya

kemampuan seorang perwira dituntut lebih jauh dari itu, yaitu sebagai perekat dan pengayom dan mampu mengatasi krisis baik dalam keadaan perang maupun tidak.

Akhirnya, di dalam penyajian dan analisis data penelitian ini mencoba dipetakan mengenai dunia pemahaman elit TNI AD, subyek penelitian, terhadap profesionalisme TNI. Pemetaan alam pemahaman tersebut disajikan dalam bentuk matrik yang menggambarkan kait-mengait (koherensi) antara faham ksatriya, jati diri TNI, tugas pokok TNI, serta doktrin-doktrin normatif TNI hingga akhirnya bermuara pada kesimpulan bahwa TNI sebagai tentara profesional disamping memiliki ciri-ciri umum baik sebagaimana profesi pada umumnya (yaitu ahli dibidangnya) maupun profesi militer pada khususnya (yaitu ahli mengelola kekerasan/kekuatan), namun TNI profesional memiliki ciri yang lebih khusus. Di mana ciri yang lebih khusus itu pada dasarnya berakar pada nilai-nilai yang bersumber dari faham ksatriya. Nilai itu tertanam di dalam dunia kesadaran para Perwira TNI melalui pendidikan dan latihan maupun tauladan dari para perintis, pendiri TNI dan juga para seniornya secara "turun-temurun".

B. Profesional itu Ahli di Bidangnya

Pemahaman Subyek Penelitian tentang makna profesionalime pertama-tama adalah sebagaimana yang berlaku secara umum. Mereka berkeyakinan bahwa apapun macam profesi itu semuanya mensyaratkan satu hal yaitu keahlian. Namun adanya syarat tersebut harus disertai juga oleh adanya prasyarat *(Prerequisite)* tertentu. Pandangan para Subyek Penelitian semacam itu dapat diambil ilustrasinya dari pernyataan Letkol (Inf) Tri Soewandono (TSO). Pamen yang saat berlangsung penelitian menjabat sebagai komandan Kodim ini memaknai tenaga profesional apapun adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Karenanya, TNI profesional

menurut penuturan TSO --dengan bahasa "terstandar"-- juga dipandang harus memiliki karakteristik yang demikian itu.

> "..... harus memiliki keahlian di bidang tugasnya selaku alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Walaupun pada dasarnya menjaga keutuhan NKRI bukan hanya kewajiban TNI saja, tetapi kewajiban dari semua unsur atau komponen masyarakat Indonesia".

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh TSO Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan (BHK) memaknakan keahlian TNI sebagai keahlian yang lebih spesifik yaitu keahlian militer di mana dalam keahlian ini TNI dituntut sama dengan halnya militer negara lain, kata BHK:

> "Secara umum, profesionalisme prajurit RI dimulai dari tingkat pelaksana paling bawah hingga pada tingkat *top* manajerial berlaku sama dengan tuntunan profesionalisme prajurit di negara-negara lain dengan menguasai teknis kemiliteran, penguasaan alat persenjataan, memiliki kesigapan yang prima dan memiliki tingkat pengetahuan sesuai dengan bidangnya".

Untuk mencapai hal tersebut di atas menurut Letkol (Art) Suko Purwantoro (SPO) perlu adanya empat prasyarat yaitu ia sebut "4-*well*". Pertama-tama harus *well trained* yaitu setiap personel TNI harus melalui proses rekrutmen, pendidikan dan latihan yang baik. Namun hal itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan "3-*well*" yang berikutnya yaitu *well equiped, well paid* dan *well managed.* Artinya, TNI yang terdidik dan terlatih tersebut harus dipenuhi perlengkapan serta persenjataannya, diberi gaji dan tunjangan yang cukup bagi kesejahteraan dirinya dan keluarganya; dan melalui sistem pengelolaan yang baik. "Tanpa adanya prasyarat itu semua mustahil akan tercapai postur TNI yang profesional itu" katanya.

C. Pendidikan dan Latihan sebagai Syarat Mutlak

Berdasarkan hasil *focused group discussion* dan wawancara dengan para perwira Subyek Penelitian memaknai pendidikan militer yang berkualitas, terfokus

dan ekstensif serta latihan-latihan yang intensif adalah merupakan syarat mutlak atau sesuatu yang tidak boleh tidak harus jadi landasan terbentuknya profesionalisme TNI.

Pendidikan militer di TNI terbagi ke dalam empat jenis yaitu: *pertama*, pendidikan pertama (dikma). Pendidikan ini merupakan pendidikan yang dikenakan terhadap tentara yang datang dari masyarakat langsung, artinya tentara yang baru diterima sebagai anggota bukan tentara yang sudah berdinas. *Kedua*, Pendidikan Pembentukan (diktuk) yang merupakan kelanjutan dari pendidikan pertama, yaitu pendidikan untuk naik ke golongan di atasnya. *Ketiga*, Pendidikan Pengembangan Umum (dikbangum). Pendidikan ini berupa pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko). *Keempat*, Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes). Dalam pendidikan jenis yang terakhir ini, para prajurit dididik untuk dapat menjadi tentara yang mempunyai keahlian khusus hingga yang sangat khusus[228].

Menurut mereka dari keempat pendidikan tersebut jika dilihat dari waktu pendidikan ditempuh ia kategorikan kedalam dua jenis.Yaitu *pre-service training* dan *in-service training.* Yang dimaksud *pre-service training adalah* pendidikan pertama (Dikma) yang ditempuh tatkala baru masuk sebagai anggota TNI dan belum melaksanakan tugas kedinasan, baik itu lewat Akmil, Secapa PK (Sekolah Calon Perwira Prajurit Karir) Secaba PK (Sekolah calon Bintara Prajurit Karir) dan Secatam (Sekolah Calon Tamtama). Singkatnya *pre-service* ini adalah pendidikan bagi prajurit TNI yang baru masuk menjadi tentara oleh sebab itu selalu dimulai dengan Diklatsar (pendidikan dan latihan dasar-dasar kemiliteran).

[228] Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan para Perwira Menengah pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006 yang telah diolah.

Kedua, In-service, yaitu terdiri dari Diktuk, Dikbangun, Dikbangspes. Pendidikan dalam kategori *in-service* ini dilakukan setelah mereka masuk dan dididik sesuai dengan jenjang kepangkatan masing-masing di dalam kesatuannya dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira. Sebagai contoh Diktup (Pendidikan Pembentukan) adalah pendidikan secaba reguler dari tamtama untuk jadi Sersan II (pangkat terendah dari golongan bintara). Kalau untuk mengisi profesionalitas setelah *in-service* namanya Pendidikan Pengembangan Spesialisasi. Seperti untuk ahli radio (alat-alat komunikasi militer), di sini belajar berlangsung beberapa bulan khusus masalah radio saja. Demikian pula untuk menjadi ahli dalam senjata ringan (senjata infanteri) sebagian besar kegiatanya akan mempelajari masalah itu[229].

> "Jadi kalau kita *in-service* ya kita dilatih. Kita sudah jadi *teacher*, saya pernah jadi instruktur, jadi guru dan saya juga mendapat pelatihan-pelatihan keguruan. Mana yang khusus guru militer. Jadi *teacher of training*, itu ada pak! *Pre-service* itu namanya Dikma. Akmil, Secapa PK, Secaba Pk. Yaitu Prajurit yang baru masuk".
> "Nah kalau yang *in-service* itu untuk pindah golongan. Disebut Diktuk. Secaba reguler dari tamtama untuk jadi sersan itu kan pendidikan pembentukan. Nah kalau untuk mengisi profesionalitas setelah kita *in-service* ada namanya yakni Pendidikan Pengembangan dan Spesialisasi dan umum. Ahli radio, ya sudah belajar sekian bulan khusus masalah radio saja. Ahli senjata ringan, senjata ringan itu infantri. Sebagian besar kurikulumnya akan mempelajari masalah itu".
> "Kemudian ada Pendidikan Pengembangan Umum. Yang Seskoad itu pengembangan umum. Sifatnya general. Boleh dikatakan itu *army staff college* kita sekolah staf dan komando angkatan darat, itu sifatnya umum"[230].

Menurut pemahaman para Subyek Penelitian banyaknya pendidikan dan latihan yang diberikan di tingkat perwira, baik pendidikan teknis yang terkait dengan profesionalisme TNI AD maupun pendidikan bersifat umum seperti bahasa Inggris, dan kepemimpinan, yang semua itu diberikan dengan pertimbangan, karena tentara di jenjang perwira menurut mereka adalah merupakan sosok prajurit pemimpin[231]. Terkait dengan bagaimana ragam pendidikan dan latihan yang diberikan kepada

[229] Hasil wawancara dengan Danyon Armed 1, Letkol Suko, pada tanggal 20 Maret 2006.
[230] ibid.
[231] Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan para Perwira Menengah pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006.

perwira ini, SPO menceritakan keadaan yang pernah dialami dan keadaan pendidikan kecabangan artileri sebagai berikut:

> "..... kalau di militer banyak pak, ...Yang paling banyak di AKMIL. Di pusat pendidikan artileri itu hanya kursus lanjutan perwira yang pertama dan ke dua, *udah* itu *aja*!. .... Disamping yang saya sampaikan tadi ada kursus perwira yang mengatur tembakan, ada kursus perwira purna lanjutan dalam tembakan, dan banyak sekali macamnya itu. Hanya saja bagaimana ya?, pada saat itu karena batalyon "di ujung dunia sana", di ujung Sumatera Utara waktu itu mungkin belum begitu menyadari pentingnya kurikulum itu sehingga sangat jarang latihan. Sedang intensitas penugasan cukup tinggi pak pada waktu itu. Jadi Pam [pasukan pengamanan] sepak bola lah, Pam ini Pam itu banyak sekali. Sehingga untuk pembinaan, yang saya rasakan untuk pengembangan pembinaan kemampuan pribadi itu, kurang. Sekarang saya lihat sistemnya cukup bagus"[232].

Berkenaan dengan pelatihan Bahasa Inggris apa yang dinyatakan oleh SPO sangat menarik:

> "Pertama kali, ya pas saya April 1990 ada penjaringan untuk sekolah bahasa Inggris, semua perwira di tes saya *ndak* tau. *Lho kok* langsung di panggil ke pusat bahasa Hankam di Pondok Labu. *Network*-nya pun *advance*, saya kan kebingungan. Begitu saya masuk kesitu, yang masuk disitu minimal sudah pernah kursus disitu, *level* yang sebelumnya *intermediate* lalu baru naik. Atau paling tidak orang yang pernah keluar negeri. Jadi saya yang sama sekali awam tidak pernah kursus, saya tadinya sudah mau mengundurkan diri, saya minta *grade*-nya di turunkan saja. Terus diajak, dipanggil sama salah satu kepala bidang disana diajak *conversation gitu*. Wa awakmu sudah bisa *gitu*, kamu jangan takut, masuk *aja*. Ya Alhamdulillah *ndak* masalah *gitu*. Dulu obsesinya satu, saya *pengen* keluar negeri, *wong* saya orang kampung ... *pengen* keluar negeri itu *aja!*"[233].

Tatkala SPO mengikuti pendidikan di Akmil mengaku memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda dibanding kakak angkatan sebelumnya dan adik angkatan sesudahnya yaitu memperoleh materi kecabangan sampai empat tingkat, dengan lama empat tahun. Ini agak beda dengan angkatan pendahulunya dan angkatan terkemudian. Menurut pemahaman SPO, dengan materi kecabangan selama empat tahun ini ia merasa lebih bisa mendalami di cabang artileri, karena berarti sudah pada taraf "mahir". Apabila sudah pada taraf "mahir" berarti bisa mengajarkan kemampuannya itu kepada prajurit lain.

---

[232] Hasil wawancara dengan Danyon Armed 1, Letkol Suko, pada tanggal 20 Maret 2006.
[233] Ibid.

Periode setelah angkatannya terjadi perubahan, dimana pendidikan yang dulu ditempuh dalam empat tahun dikurangi menjadi hanya tujuh bulan. Dan hal ini menurut SPO secara prinsip memang tidak mengalami perubahan dalam hal materi pendidikan, akan tetapi prajurit yang didik dengan rentang waktu tujuh bulan kategorinya bukanlah mahir melainkan hanya "bisa".

> "Nah *gitu!* Apabila dikembalikan kesana dengan materi teknis itu sebenarnya tidak begitu banyak. Artinya perhitungan itu ditempuh 7 bulan bisa, tetapi *kan* hanya kuantitas saja bisa terpenuhi dengan sekian jam pelajaran hanya untuk taraf 'bisa'. Tapi kalau untuk taraf 'mahir'? Di kita *kan* ada klasifikasi untuk tingkat keterampilan. Misalnya keterampilan untuk mengoperasikan meriam atau untuk mengoperasikan Rudal. Hal itu *kan* ada kata 'terbatas', dapat tapi terbatas, 'mampu', dan 'mahir'. Nah, kalau mahir ini dia *level*-nya, yakni menguasai segala macam, misalnya prosedur kerjanya kemudian mengetahui mengapanya dan dia bisa mentransfer kepada orang lain"[234].

Selanjutnya, kesan atas pengalaman SPO pada masa pendidikannya dilukiskan sebagai suatu proses yang sangat kompleks. Dari mulai pendidikan dasar bagi golongan perwira, terus materi militer umum, sampai materi militer kecabangan. Semua materi itu juga ada sejak mulai tingkat I sampai tingkat IV ada materi kecabangan atau jurusan. Sementara untuk yang angkatan sebelum 1989 dan setelahnya ini tidak ada. Untuk angkatan sebelum dan sesudah tahun 1989 dari tingkat I sampai tingkat III hanya diberikan materi dasar golongan perwira dan materi militer umum, sesudah lulus mereka baru di tes untuk masuk jurusan, di Cimahi Bandung[235].

Berkenaan dengan pendidikan setelah dalam penugasan (*in-service*), Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan (BHK) menuturkan kesan pengalamannya, dimulai dari ketika menjabat Komandan Peleton (Danton) yang kemudian harus mengikuti Susdanki (Kursus Komandan Kompi). Kedudukan kursus ini sama dengan Suslapa (Kursus Lanjutan Perwira) I yang sekarang, yaitu khusus perwira Letnan Satu dan

[234] Ibid.
[235] Ibid.

diikuti dengan pemberian jabatan sebagai Komandan Kompi, kemudian Susperastaf (Kursus Perwira Staf) itu untuk memiliki jabatan perwira staf di Batalyon.

> "Kalau Susdanki lebih mengarah ke 'ke-danki-annya', sedangkan Susperastaf lebih mengarah ke 'ke-staf-annya'. Untuk menjabat wakil komandan batalion harus memiliki pendidikan Suslapa II karena untuk mendapatkan jabatan promosi Mayor dalam artian bisa mendapatkan Mayor apabila sudah mengikuti Suslapa II. Mayor itu jabatan yang promosinya wakil komandan batalyon atau Kasdim. Setelah Suslapa II berikutnya Sesko. Jadi urutannya adalah Suslapa I, Suslapa II, Sesko, Sesko TNI dan Lemhanas. Sesko itu untuk jabatan komando tertinggi di AD. Kalau Susdandim, Susdanyon, itu *kan* untuk tambahan-tambahan saja[236].

Kesan Subyek Penelitian terhadap pendidikan di militer di TNI relatif tidak sering mengalami perubahan karena sistemnya sudah sangat bagus. Kalau terjadi perubahan menurut SPO hanya diperlukan untuk alasan-alasan teknis organisasi, misalnya untuk memberdayakan pusat pendidikan spesialisasi atau kecabangan.

> "Saya tingkat I sudah Armed, kalau yang lain sebelum saya dan sesudah saya itu ya masih umum, masih taruna tempur, teknik, administrasi, *gitu aja*. Sehingga masuk batalyon begitu dihadapkan dengan peralatan dengan segala macamnya untuk kita sudah tidak awam, tidak asing. Mereka *kan* hanya 7 bulan. Jelek-jelek *gini* kita sudah terampil sekali. Nah, cuma masalahnnya waktu itu karena organisasi, kalau kita dibuat seperti itu akhirnya pusat-pusat pendidikan kecabangan seperti Pusat Pendidikan Armed, Pusat Pendidikan Arhanud di Karang Ploso *kan* terus fungsinya untuk apa?[237]

Ketika ditanya mengenai masalah perkembangan senjata dalam kaitannya dengan pendidikan, menurut SPO apabila terjadi perkembangan persenjataan, hal ini disiasati dengan cara TNI mengirim perwiranya keluar negeri. Dan setelah mereka kembali, prajurit yang dikirim harus membuat laporan hasil pendidikan diluar negeri tersebut dan selanjutnya di jadikan referensi baru di pusat kecabangan. Sebagaimana yang ia kemukakan:

> "Kita meng-*Upgrade*-nya itu ya, barangkali. Salah satu cara yang baru bisa dilakukan ya dengan cara mengirimkan perwira keluar negeri. Disana *kan* seperti saya waktu itu. Meriam kita baru 105M2A101, meriam Armed itu teknologi tahun '48, masuk Indonesia tahun '82, dan waktu itu saya Satcab pendidikan kecabangan

[236] Angket Terbuka, Letkol Infanteri Besar Harto Karyawan, Kasrem 084 Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.
[237] Hasil wawancara dengan Danyon Armed 1, Letkol Suko, pada tanggal 20 Maret 2006.

> di Australia di sana sudah pakai meriam 105L109 itu jenis meriam generasi ke-4. M1A1, M2A1, L108, L109. Nah setiap kita selesai pendidikan, *kan* kita diundang ke pusat kecabangan. Memaparkan apa yang sudah dipelajari, membuat laporan, kemudian referensi-referensi itulah yang akan dipakai sebagai referensi di pusat kecabangan. Misalkan beli senjata baru atau segala macam, ya itulah"[238].

Kesan Subyek Penelitian, secara keseluruhan proses pendidikan dan latihan dalam unsur Angkatan Darat sudah sangat sempurna. Lembaga puncak pendidikannya yaitu Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) juga mencerminkan kesempurnaan itu. Bagaimana bisa disebut begitu? Salah satu alasannya, sebagimana dituturkan oleh SPO direkturnya saja "bintang 3" (maksudnya Letnan Jendaral), punya tiga direktur yaitu Direktur pembinaan Doktrin, Direktur Pembinaan Pendidikan, dan Direktur Pengembangan Latihan[239].

Berkenaan dengan syarat-syarat dan proses yang harus dipenuhi untuk mengikuti pendidikan, SPO mengambil misal proses pendidikan untuk pindah golongan dari bintara ke perwira:

> "Diantaranya begini pak, dari bintara ke perwira, masuk Secapa itu minimal pangkatnya Serka[240], kuning 3. Kemudian ijazah pendidikan murni harus SMA, masa dinasnya 12 tahun minimal. Jadi orang-orang yang tidak *referece* itu otomatis akan tersingkir. *Lha* setelah dia secara administrasi memenuhi syarat dia akan dites. Tes kesehatan yang dibutuhkan untuk menjadi perwira. Kemudian dites kemampuan jasmaninya, ya lari, ya renang, ya segala macam itu pak. Terus akan dites akademik, terus tes psikologi, setelah ini lulus diumumkan, setelah diumumkan dia akan dikirim ke Bandung. Di Bandung ada seleksi tahap 2, seleksi tahap 2 itu diantaranya adalah seperti wawancara, ada *matching* dilihat memang pintar *feeling*-nya tetapi *kok* bengkok baretnya ternyata tidak bisa. Atau ternyata mungkin hasil tes tulisnya tidak sama dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh dia. Nah..harus pulang jadinya!"[241]

Dalam tradisi TNI setiap prajurit yang telah mengikuti pendidikan atau latihan, maka prajurit tersebut akan mendapat promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun demikian berdasar pengalaman Letkol BHK bahwa tidak

---

[238] Ibid.
[239] Hasil wawancara dengan Danyon Armed 1, Letkol Suko, pada tanggal 20 Maret 2006.
[240] Serka: Sersan Kepala.
[241] Ibid.

selamanya prajurit yang telah mengikuti pendidikan latihan akan mendapatkan promosi[242]. Dalam kaitannya dengan promosi ini ia menuturkan sebagai berikut:

> "Jadi, kalau sekolahnya banyak macamnya berarti bekal pendidikannya yang banyak itu nilainya tinggi. Terus penugasan *ini-itu* ada, ada sistemnya. Nanti *pas* akan ada kegiatan apa. Istilahnya ada panitia karir untuk rapat sidang jabatan, misalnya jabatan yang memenuhi syarat. Ketika ditolak *tallent Scotting*-nya terjadilah orang yang diinginkan, setidaknya orang yang *rangking*-nya tinggi yang akan masuk, lalu tidak jarang yang bukan tinggi dalam koridor yang baik saja, yang ditoleransi, *ndak* masuk".

> "Sekarang dikembangkan, tapi masih *level* Kolonel pak, belum sampai ke Letkol, namanya pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Itu yang punya Pusat Psikologi Angkatan Darat, yang artinya kompetensi jabatan itu urusan psikologi, psikologi itu bukan ururan potensi. Saya misalnya kualifikasi psikologinya sebagai komandan, staf operasi, guru militer dan staf perencana. Berarti potensi yang ada sama saya itu 4, tetapi belum tentu potensi itu bisa 'dikeluarkan', makanya ada kompetensi jabatan. Hal itu harus melalui serangkaian tes, nanti akan dapat menyimpulkan, oh..dari rangkaian potensi ini yang ini bisa keluar. Kalau dia mau dikatakan, misalnya saja potensinya komandan, staf operasi, guru militer, staf perencanaan. Dites yang keluar cuma 3, hanya Komandan Staf operasi sama Guru militer. Padahal ada lowongan jabatan dan atasan menghendaki saya menjadi staf perencanaan maka saya akan ditraining supaya bisa 'keluar' staf perencanaannya itu"[243].

Terkait dengan masalah hubungan karier dengan pendidikan, oleh SPO menjelaskan:

> "Secara singkat kalau paradigma itu *kan* dari *pre-service* menjadi *in-service*. Kalau Diktuk itu pindah golongan, kalau dia tidak menjalani sekolah itu dia tidak akan bisa pindah. Contohnya Bintara dari Tamtama atau Bintara ke Perwira. Sebab di Dikbangspes kita itu hanya untuk yang bersifat pada ketrampilan-keterampilan khusus atau keahlian-keahlian khusus. Kalau Dikbangum itu untuk pengembangan umum, pengembangan umum itu artinya apa? Artinya untuk jenjang yang lebih tinggi yang kedepannya lebih jauh. Seandainya tidak mengalami [pendidikan tersebut], diapun bisa menjadi Mayor tapi waktunya sangat lama dan dia tidak akan pernah menjabat jabatan-jabatan yang dianggap stategis. Seorang mayor tanpa Seskoad pun akan bisa menjadi Letkol, tapi dia waktunya lebih lama.

> "Contohnya kalau Seskoad, saya Seskoad masa dinas 15 tahun sudah bisa Letkol, tapi tanpa melalui itu dia harus masa dinas 18 tahun baru bisa jadi Letkol. Jadi sama-sama satu angkatan dia akan tertinggal 3 tahun. Dan dia tidak akan pernah dikasih jabatan-jabatan yang strategis. Artinya jabatan kepala TU, kepala tata usaha di kantor, itu 'kan Letkol juga. Kepala Sekrrtariatan umum di Kodam,Komandan Kodim, tapi dia agak-agak jauh mungkin tantangannya kurang"[244].

---

[242] Angket Terbuka, Letkol Infanteri Besar Harto Karyawan, Kasrem 084 Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.
[243] Hasil Terbuka Armed 1, Letkol Suko, pada tanggal 20 Maret 2006.
[244] Ibid.

Menurut kesan Subyek Penelitian pendidikankan dalam TNI, khususnya TNI AD, dilakukan dengan sangat sistematik dan terencana dengan baik. Seperti yang diungkapkan SPO:

> "Kita di dunia pendidikan itu ada 10 komponen pendidikan. Komponen pendidikan yang pertama adalah Gadik atau tenaga pendidik, terus Gapendik, tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidik itu dosen, kalau Gapendik adalah bagian tata usaha, administrasi. Komponen lainnya adalah kurikulum-kurikulum, fasilitas pendidikan, alat penolong instruksi atau instruksi dan kemudian ada dana juga"[245].

> "Kalau kita jadi instruktur di lembaga pengembangan itu, kita harus punya apa yang namanya Siapjar[246] dengan pakai instruksi. Instruksi itu apa misalnya dan referensinya apa? Misalnya mengajar salah satu materi A, disitu ada referensinya, soalnya untuk latihannya kalau kita menggunakan *in-focus* itu pakai LCD. Kemudian kita pembagian waktu, misalnya kita dapat 30 jam pelajaran untuk materi A, 5 jam pelajaran itu apa yang akan disampaikan. 5 jam pertama misalnya 1 jam pendahuluan disitu disampaikan. Terus jam kedua tentang masalah apa yang dikehendaki. *Output*-nya itu ada, jadi sebenarnya kalau kita menghayati itu sudah sangat...."[247].

Sebelum proses pengajaran dimulai, para guru yang akan mengajar telah dipersiapkan dengan baik, bahkan materi pengajarannya pun sebelumnya harus dipresentasikan dahulu.

> "Setiap mengajar, sebelumnya dia akan dipanggil oleh yang namanya Katimgumil[248]. Misalnya *you* besok akan mengajar apa saja, ini harus dipaparkan didepan saya. *Kinetik* apa yang mau diajarkan, akan diceritakan walaupun tidak mengerti bahasa *ngajar*. Kalau di Seskoad lebih ketat lagi, jadi sebelum mengajar harus dipaparkan di depan forum dosen. Disitu ada namanya komandan Korps Dosen. Di depan para dosen ia paparkan. Memaparkan masalah yang akan disampaikan nanti yang jadi bahan pengajaran. Karena Seskoad itu ada beberapa dosen maka tim harus memiliki tanggung jawab perkuliahan dalam satu materi yang akan diajarkan"[249].

Malahan menurut SPO: " ....untuk Seskoad dan Akademi Militer itu *patern*-nya sudah modern. Sekarang di Seskoad itu sudah pakai *Local Area Networking*. Kalau soal-soal ujian, namanya lembar penugasan itu tinggal dibuka di komputer masing-masing. Dikerjakan disitu, dikirim nanti sudah keluar.Kalau zaman saya

---

[245] Ibid.
[246] Siapjar: Persiapan Mengajar.
[247] Ibid.
[248] Katimgumil: Kepala Tim Guru Militer.
[249] Hasil wawancara dengan Danyon Armed 1, Letkol Suko, pada tanggal 20 Maret 2006.

belum, masih tulis tangan pak. Sekarang setiap kamar sudah ada komputernya, tinggal buka... ", tuturnya[250].

Bagi prajurit TNI AD, puncak karier tertinggi dalam hal pendidikan itu Seskoad karena sudah dibekali pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum dan apabila lulus bisa menduduki jabatan komando, termasuk jabatan se-*level* Kepala Staf Angkatan Darat. Beda Seskoad dengan Sesko TNI hanya yang terakhir ini lebih difokuskan pada pembekalan latihan bersama antar angkatan. Dibahas hal-hal umum dari masing-masing kesatuan. Sedangkan Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) cakupannya lebih luas lagi, yaitu mencakup masalah politik, ekonomi, sosial dll. Menurut pandangan BHK tentang Sesko TNI, yaitu bahwa jenjang pendidikan ini adalah untuk prasayarat menduduki jabatan staf di lingkungan TNI AD. Paling tidak, bisa menjadi dasar promosi yang bersangkutan. "Namun itu tidak menjamin kalau sudah Sesko TNI akan mendapat skala prioritas" tukasnya[251].

Sementara ketika ditanya mengenai pendidikan Lemhanas, menurut pemahaman BHK, pendidikan lemhanas itu bukan syarat wajib, tapi merupakan salah satu tambahan pendidikan, buktinya banyak yang tidak melalui Lemhanas bisa jadi "bintang", tukasnya[252].

Sedangkan Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter) paling tinggi adalah pendidikan bagi yang akan menduduki jabatan Dandim. Sebagaimana diketengahkan Kolonel Budihardjo (BO), bahwa Pusdikter itu paling tinggi untuk tingkat Dandim sedangkan untuk komandan Korem ada Susdanrem. Berkenaan dengan itu ia mengemukakan pengalamannya sebelum dipromosikan sebagai komandan Korem: "...Untuk masuk Susdanrem itu ada seleksi terlebih dahulu tentunya berkompeten apa

---

[250] Ibid.
[251] Hasil wawancara dengan Letkol Infanteri Besar Harto Karyawan, Dandim 0818 Malang dan Batu.
[252] Ibid.

enggak untuk menjadi Danrem baik dari segi psikologi dan sebagainya. Kalau memenuhi akan dipanggil untuk tes sekolah"[253]. Walaupun demikian untuk menduduki jabatan teritorial tidak harus lewat Pusdikter. Namun hal itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah mendapat pendidikan di Lemhanas: "Tidak, tidak harus 'lewat' situ. Bisa jadi sudah Lemhanas tetapi belum Susdanrem. Memang waktu itu sebelum masuk Susdanrem masih dianggap ada kekurangan. Tapi bagi yang sudah lemhanas tapi belum dapat job, ya... dimanfaatkan saja"[254].

Disamping itu menurut Kolonel BO, pendidikan Kursus Komandan Kodim (Susdandim), dan Kursus Komandan Batalyon (Susdanyon) tersebut untuk saat sekarang harus benar-benar dimaksudkan untuk membentuk profesionalisme TNI AD. Dimana lama pada masing-masing pendidikan tersebut ditempuh selama satu setengah bulan. Materinya sekarang lebih spesifik. Tidak seperti sebelum reformasi yang materinya menurut Subyek Penelitian tidak menjurus kepada peningkatan profesi, misalnya materi ke-Golkar-an, Kekaryaan ABRI dlsb.

Kesan pengalamannya selama mengikuti pendidikan Susdandim, Susdanyon ini adalah tentang betapa ketatnya jadwal pendidikan, perubahan pola pendidikan dan perubahan proyeksi penempatan setelah menempuh pendidikan dituturkan oleh BO sebagai berikut:

> "Ya, kadang-kadang sampai larut malam bahkan sampai pagi. Jadi dihadapkan pada kasus-kasus agar membiasakan pikirannya terpola.... Sebelum tahun 2000-an setelah 'menjadi' baru ditatar. Kalau sekarang sebelum 'menjadi' ditatar dulu dan itu belum menjamin jadi walaupun sudah sekolah Dandim. Masih akan dilihat perkembangannya, disamping peta jabatan, dan pribadi yang bersangkutan juga dalam penilaian terus. Waktunya antara 'menjadi' lebih kurang 2 sampai 3 bulan setelah kursus. Putaran program pergeseran personil dengan pencetakan calon pengganti itu sudah diperkirakan"[255].

[253] Wawancara dengan Danrem 083 Baladhikajaya, Kolonel Budiharjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[254] Ibid.
[255] Ibid.

D. Kesejahteraan dan Biaya Operasional sebagai Syarat Utama

Aspek kesejahteraan khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar menurut pandangan semua perwira Subyek Penelitian adalah menjadi problem umum yang dialami oleh semua prajurit. Menurut Subyek Penelitian Kondisi ini merupakan realita yang pertama harus segera diatasi kalau memang TNI mau profesional. "Bagaimana bisa profesional kalau kebutuhan primer bagi prajurit hanya terpenuhi dengan standar yang sangat minimum" kata seorang Pasupel dengan nada bertanya. Sebagai ungkapan dari rasa keprihatinan terhadap kondisi para prajurit TNI Letkol (Inf.) TSO menceritakan pengalaman pribadinya dan anjuran untuk anak buahnya, bahwa sebagai seorang prajurit dirinya mulai sejak awal harus menabung dan mencari tambahan pemasukan untuk sedikit demi sedikit memikirkan hari tuanya. Demikian pula dengan sarana untuk mobilitas kerja seperti kendaraan, mereka harus mengambil pinjaman bank atau koperasi untuk membeli kendaraan yang notabene untuk kemudahan melaksanakan tugas-tugas[256].

> "Nah itu.... Sebenarnya tidak masuk akal. Saya Letnan Kolonel pak? Gaji saya hanya 3 juta, saya menjadi pemimpin diberikan tanggung jawab anak buah sebanyak 600 orang dengan keluarganya 375 dan anaknya 275"[257].

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua Subyek Penelitian menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit lah yang menjadi penyebab beberapa prajurit TNI melakukan aktivitas diluar tugas dan fungsinya sebagai penjaga pertahan dan keamanan. Seperti yang SPO: "Kebutuhan primer bagi prajurit untuk mencapa tingkat cukup dipenuhi dengan dukungan yang sangat sederhana, jauh dari standar jika dihadapkan dengan

[256] Wawancara dengan TSO waktu masih menjabat Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.
[257] Wawancara dengan SPO sewaktu masih menjabat Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

tuntutan tugas dan pengabdian yang diberikan"[258]. Akibat dari rendahnya kesejahteraan ini mendorong untuk oknum prajurit TNU mencari pemenuhan kebutuhannya dengan cara melakukan kegiatan "usaha".

Melihat kondisi kesejahteraan prajurit dewasa ini, maka salah satu cara menurut kolonel AS untuk mencapai profesionalisme prajurit harus diawali dengan pemenuhan kebutuhan dasar prajurit yaitu gaji atau *salary*[259]. Hal ini didasarkan pada pemahamannya mengenai keadaan kesejahteraan prajurit saat ini. Menurut kesan perwira yang menjabat Kepala Pusat Koperasi Angkatan darat ini kondisi kesejahteraan prajurit sekarang ini adalah sebagai berikut:

a) Masih sangat kurang dari yang seharusnya. Dibandingkan dengan negara lain. Terhadap se-Asean saja, tidak perlu dengan Negara Barat, Eropa dalam soal gaji prajurit ini.
b) Perlu ada Peraturan Pemerintah mengenai prosedur tentang kesejajaran gaji prajurit dengan instansi sipil.
c) Oleh sebab itu jangan dilarang kalau TNI masih menjalankan yayasannya untuk menambah kesejahteraan prajurit. Hal ini tidak dapat dihindari semasih pemerintah belum dapat memberi kesejahteraan prajurit.
d) Untuk mencapai profesionalisme prajurit harus diawali dengan pemenuhan kebutuhan dasar prajurit yaitu gaji atau *salary*. Terpenuhinya kebutuhan prajurit dalam bidang pangan, papan dan sandang[260].

Hal senada juga dikemukakan oleh SPO bahwa kesejahteraan prajurit memang menjadi problem.

> "TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan negara yang terbentuk dari hasil perjuangan-perjuangan dan perlawanan-perlawanan dalam masa kemerdekaan, sehingga pada saat itu tidak terfokus terhadap imbalan-imbalan apa yang akan didapat dari perjuangan dan tugasnya. Hal tersebut masih melekat dalam diri TNI karena doktrin-doktrin yang ada mewajibkan setiap prajurit untuk mengabdi kepada bangsa dan negara tanpa berpikir tentang, imbalan. Namun kebutuhan mendasar sebagai seorang prajurit tetap menjadi problem setiap prajurit"[261].

[258] Wawancara dengan SPO pada tanggal 9 Desember 2005.
[259] Wawancara dengan Kol Inf AS pada tanggal 10 Agustus 2005.
[260] Jawaban dari angket terbuka Kol Inf AS.
[261] Jawaban dari angket terbuka Letkol Art SPO.

Dalam rangka menanggulangi problem kesejahteraan prajurit ini menurut Kolonel BO TNI mencari solusi, yang salah satunya dengan memanfaatkan koperasi. Menurutnya, dengan berbagai usaha yang dijalankan koperasi ini sedikit membantu kesejateraan prajurit yang notabene sebagai para anggota koperasi itu sendiri. Berkenaan dengan koperasi ini ia mengemukakan, "... koperasi itu *kan* merupakan badan usaha bisa berupa toko, usaha angkutan seperti Mandala, itu dibawah koperasi yang berbadan usaha resmi. Selain itu juga punya unit-unit seperti wartel. Hasilnya itu nanti dirasakan anggota *kan* iurannya dari anggota, jadi nanti bisa dirasakan misalnya pada saat lebaran tentunya ada sisa hasil usaha (SHU)"[262].

Berdasarkan kesan pengalaman dan pemahaman Subyek Penelitian di atas dapat dipastikan bahwa pada saat ini kondisi kesejahteraan prajutit dirasakan oleh mereka sebagai masih jauh dari harapan. Dengan kondisi seperti ini menut pandangan mereka tidak mungkin bisa mengharapkan para prajurit sanggup bertidak profesional. Karena kebutuhan dasarnya masih belum terpenuhi. Oleh karena itu tidak bisa dielakkan kalau para prajurit mencari pemenuhan sendiri dan ini diakui oleh mereka, membawa implikasi pada rendahnya profesionalisme tentara.

Subyek Penelitian memiliki kesan bahwa di negara manapun, alokasi anggaran untuk kebutuhan biaya pertahanan bagi suatu negara adalah yang termasuk paling besar dibanding dengan kebutuhan di bidang lain. Walaupun demikian mereka menyadari, dalam prakteknya anggaran belanja untuk persenjataan di setiap negara berbeda satu sama lain, salah satunya didasarkan pada kemampuan keuangan masing-masing negara dengan skala prioritasnya.

"Dengan kondisi perekonomian bangsa dan negara kita yang belum tertata dengan baik dan karena ketergantungan terhadap negara lain serta berbagai

[262] Wawancara dengan BO, pada tanggal 24 Maret 2006.

permasalahannya, membuat pengalokasian untuk operasioal TNI belum cukup[263]. Dalam satu tahun anggaran dana kegiatan pokok dan operasional satuan hanya terdukung pada kegiatan-kegiatan yang bersifat program semata atau kurang lebih 30% dari seluruh beban kegiatan satuan, dengan demikian tugas-tugas sesuai fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Mengenai kebutuhan biaya operasional, Bon melukiskan sebaga berikut:

> "Sekarang kita hitung saja, katakan satu batalion 800 personel kali senapannya a' 5 juta sudah berapa? Ini baru infanteri belum kavaleri. Sepanjang perbatasan, misalnya Kalimantan perlu berapa kali. Nah, kalau sudah maju ke DPR orang mau ngomong itu barangkali berat kondisinya".
>
> "Mungkin masih ada permasalahan pada bagaimana pemaknaan pentingnya persenjataan,..... TNI *kan* sudah banyak *ngomong* bahwa itu penting, tapi dewan bagimana? Kita tidak punya kapal, terus pulau dimiliki orang lain. Jadi komunikasi politiknya perlu ditingkatkan[264].

Berkenaan dengan kebutuhan operasional TNI ini, AS menyarankan bahwa seharusnya kebutuhan operasional TNI itu didasarkan pada *program oriented* bukan *budget oriented.* Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa kenyataan dana di pemerintahan sipil itu berlebih-lebih, mestinya sebagian bisa dipakai untuk kepentingan biaya operasional TNI. Komentarnya lebih lanjut:

> "Seharusnya kebutuhan operasional kegiatan TNI berdasar *program oriented* bukan *budgeting oriented.* Tetapi sampai saat ini sudah 60 tahun merdeka, pemerintah tidak mampu memberi anggaran militer karena banyak kebocoran anggaran dan tidak ada keseimbangan penerimaan antar instansi. Seharusnya gaji anggota DPR misalnya, sesuaikan saja dengan gaji PNS sehingga kelebihannya dapat dibelikan Alutsista atau ops TNI".
>
> "Setiap melaksanakan kegiatan ops TNI selalu ada kendala tidak ada dana. Uang. Disatu sisi pemerintahan sipil cukup, bahkan kelebihan dana dan bingung cari kegiatannya untuk habiskan anggaran!"[265]

---

[263] Wawancara dengan SPO tanggal 9 Desember 2005.
[264] Wawancara dengan BO pada tanggal 24 Maret 2006.
[265] Wawancara dengan Letkol (Inf) AS sewaktu masih menjabat Kasrem 083/ Baladika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.

Makna yang bisa disimpulkan dari pengungkapan mengenai pemahaman Subyek Penelitian yang dikatagorikan ke dalam empat sub-tema tersebut diatas dalam perspektif konsep diri *(self concept)* terdapat dua katagori makna yang paradoks. Ada makna-makna positif seperti bangga, puas, percaya diri, optimistis dlsb. Akan tetapi sebaliknya juga terdapat makna-makna negatif antara lain: kecewa, tidak puas, pesimistis dlsb. Makna pertama cenderung terdapat dalam pemahaman mereka terhadap pendidikan dan latihan yang diperoleh. Baik selama dalam masa pendidikan pertama (Dikma) tatkala di akademi militer maupun pendidikan pengembangan dan pendidikan spesialis. Sedang makna yang kedua cenderung terdapat dalam pemahamannya tentang perlengkapan yang dimiliki, persenjataan yang digunakan, jaminan kesejahteraan dan fasilitas yang diperoleh serta dalam hal biaya operasional. Keadaan pemaknaan yang paradoks tersebut pada gilirannya terefleksi pada bagaimana gambaran perasaan harga diri *(sense of self-esteem)* Subyek Penelitian dewasa ini.

E. Perlengkapan dan Persenjataan sebagai Syarat Penunjang

1. *Senjata Bukan Segala-galanya*

Menurut Subyek Penelitian secara geografis negara Indonesia merupakan negara yang rentan pecah. Rawan karena luas wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana ucapan pesan pendek (SMS) bernada puitis yang disebarkan BHK kepada kolega-koleganya dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. (Letkol BHK ini mempunyai kebiasaan menyebar pesan lewat SMS untuk memperingati kejadian-kejadian penting juga untuk mengumpulkan dana kegiatan sosial).

"INDONESIA BANGKIT 20 MEI 1908-2007".

"Di Hari Kebangkitan Bangsa ini mari anak bangsa !!
sadarkan diri. Bahwa Indonesia ku bangsa yang besar
Itu Bhineka ku yang rentan pecah bila tak satu
Sadar ... sadar... sadar...!!
Wahai anak bangsa !!
Kita dari dulu hingga kini memang sudah ditakdirkan berbeda
Tapi ingat !!
Ikatan persatuan & kesatuan
Dari Sabang sampai Merauke tak boleh putus"[266].

Kondisi sebagaimana yang dilukiskan oleh BHK tersebut menurutnya membutuhkan kekuatan pengaman yang kuat. Untuk itu dibutuhkan TNI yang tangguh dengan perlengkapan dan persenjataan yang memadai. Kalau tidak, kedaulatan NKRI akan mudah diintervensi bahkan diinvasi dari luar atau dipecah belah dari dalam oleh kekuatan negara lain. Namun kenyataannya, menurut kesan Subyek Penelitian kondisi perlengkapan dan persenjataan TNI selama ini tidak diperhatikan. Alutsista yang ada sebagian besar sudah udzur. Sementara penambahan dan peremajaan dilakukan dengan cara membeli senjata dengan harga murah, berkualitas rendah atau senjata bekas sehingga masa pakainya tidak bisa lama:[267]

> "Sebagian besar Alutsista TNI merupakan aset-aset lama dan tidak dibeli dengan kandisi baru atau 100 persen baru, sehingga dalam penggunaannya serta perawatannya memerlukan keahlian dan perhatian yang lebih tinggi agar dapat digunakan lebih lama. Yang paling terlihat memperparah kandisi tersebut adalah *spare part* dari tiap-tiap materiil yang sangat terbatas bahkan sudah tidak ada di pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga Alutsista yang barupun dapat berdaya pakai pendek apabila kerusakan yang ada tidak segera didukung dengan suku cadangnya"[268].

Menurut perwira subyek penelitian, Kolonel BO, langkah-langkah untuk menyadarkan kepada masyarakat awam dan kelompok politisi sipil penentu kebijakan akan betapa pentingnya alat persenjataan ini memang tidak mudah. Hal

[266] Pesan lewat SMS oleh BHK tanggal 16 Mei 2007.
[267] Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan para Perwira Menengah pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006.
[268] Wawancara dengan Letkol Infanteri Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

tersebut, menurutnya, terkait dengan situasi dan kondisi politik terutama citra dan posisi TNI yang masih belum pulih seratus persen, menguatnya kekuasan legislatif dan kondisi ekonomi yang masih berat. Akan tetapi menurutnya, paling tidak mereka mestinya punya kesadaran dan perhatian akan kondisi peralatan dan persenjataan itu sehingga kasus-kasus pelanggaran wilayah kedaulatan RI bisa diminimalisir, bahkan BO dengan nada bertanya menyampaikan kegundahan mengenai kondisi persenjataan ini, dan dengan nada bercanda ia memandang perlu ada kasus atau kejadian yang bisa menyadarkan masyarakat dan pembuat keputusan akan pentingnya senjata yang memadai ini.

> "Mungkin perlu ada sesuatu kasus yang membuat kita semuanya sadar perlunya kekuatan senjata. Seperti kasus Ambalat. Atau perlu ada pulau yang 'dicaplok' begitu. Agar sadar senjata yang ada itu perlu diperkuat, agar pulaunya tidak seperti itu, kemudian baru terpikir kesitu. Tapi untuk ngetok palu [DPR] saja susah. Perlu uang. Contohnya kasus di NTT yang sering dimasuki pesawat-pesawat asing. Kita ketinggalan kalau dari segi teknologi. Sekarang tinggal spirit kebangsaan yang bisa kita andalkan"[269].

Bahkan kesan Subyek Penelitian, yang paling menyedihkan disamping kondisi persenjataan yang sudah kedaluwarsa, untuk membeli *spare part* dari persenjataan juga susah di pasaran. Hal ini telah menyebabkan banyak dari Alutsista seperti kapal perang, pesawat tempur, radar, perbaikannya dilakukan dengan cara kanibalisme. Kenyataan ini telah mengakitbatkan banyak persenjataan yang dibeli, karena susahnya suku cadang, masa pakainya menjadi pendek.

> "Yang paling terlihat memperparah kondisi tersebut adalah *spare-part* dari tiap-tiap materiil yang sangat terbatas. Bahkan sudah tidak ada di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga alut sista yang barupun dapat berdaya pakai pendek apabila kerusakan yang ada tidak segera didukung dengan suku cadangnya"[270].

Hal kesan yang demikian juga dengan dikemukakan Kolonel (Inf) Aris Suhardiono (AS) bahwa kondisi persenjataan TNI sangat memprihatinkan

---

[269] Wawancara dengan Danrem 083 Baladhikajaya, Kolonel Budiharjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[270] Ibid.

dibandingkan dengan negara-negara lain tingkat Asean. Dia juga mencontohkan Malaysia yang merupakan negara kecil namun punya persenjataan yang relatif lengkap. Menurut Aris Suhardiono, selama Orde Baru RI sangat disegani oleh saudara-saudara muda kita, sekarang malah dilecehkan seperti dalam kasus pulau Sipadan, Ligitan dan Ambalat. Dan hal ini menurutnya sangat ironis dan menyakitkan, khususnya bagi TNI sebagai kekuatan militer dari sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu ia mengusulkan untuk memprioritaskan pada peremajaan senjata TNI yang kebanyakan bekas untuk operasi Dwi Kora (Irian Barat) tahun 60-an.Walau di satu sisi ia menyadari akan keterbatasan dana. Oleh karena sangat bisa dipahami kalau kita beli Alutsista *second* dari negara lain baik kapal, pesawat, dan lain-lain[271].

Tapi menurut SPO dengan nada pesimistis menganggp terlalu jauh untuk memikirkan adanya pembaharuan Alutsista TNI yang canggih dan modern. "Untuk memelihara Alutsista yang sudah ada saja kita sudah banyak mengalami kendala dan kekurangan biaya. Padahal kalau melihat persenjataan dari negara tetangga kita sudah pada sangat maju, seperti misalnya Singapura dan Malaysia"[272], tukasnya.

Melihat kondisi persenjataan sekarang ini, menurut Subyek Penelitian akan sangat berat kalau suatu saat terjadi perang, sekalipun perang terbatas. Namun kalau melakukan perang total akan lebih menguntungkan seperti yang dilakukan oleh kekuatan perlawanan di Irak sekarang ini, dan Vietnam waktu dulu[273]. Di mana kunci

---

[271] Wawancara dengan Letkol (Inf) Aris Suhardiono, Kababinminvetcadam V/Brw, Kasrem 083/ Baladika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.

[272] Wawancara dengan Letkol Infanteri Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

[273] Kalau di dalam batalyon infanteri kita melaksanakan serangan itu ada 3 unsur, yaitu: unsur manuver, unsur bantuan dan unsur gabungan. Nah, kalau di dalam batalyon itu ada 5 kompi, yaitu: kompi manuver, kompi senapan, kompi bantuan (bantuan mortir), kompi dukungan, kompi markas.

keberhasilan kekuatan perlawanan di Irak sekarang dan Vietnam waktu dulu? Menurut pemahaman Subyek Penelitian, bahwa walaupun persenjataan ini penting, namun senjata bukan segala-galanya. Hal yang terpenting adalah manusianya.

> "Tapi sebenarnya kekuatan itu adalah wawasan kebangsaan dan spirit, bagaimanapun canggihnya senjata kalau mentalnya jelek, senjata itu cepat rusak dan berkarat atau menembak bisa di belok-belokkan. Tekanan dari Kasad adalah perwira tidak hanya mampu menjalankan tugas pokok saja dengan baik, tapi nilai perwira yang tinggi, mampu mengatasi krisis baik dalam keadaan perang atau tidak"[274].

Oleh karena itu menurut BO, karena Indonesia tidak mempunyai persenjataan yang memadai untuk berperang dalam mempertahankan kedaulatan RI, salah satu jalan terbaik adalah dengan cara melakukan strategi perang total. Dengan cara ini mungkin kekuatan luar akan berpikir untuk menyerang Indonesia, dengan demikian, kata BO, Indonesia harus mempersiapkan untuk perang seperti itu.

> "Saya sependapat dengan..., untuk perang total kekuatan luar akan berfikir, karena dia takut seperti di Vietnam, Irak sekarang ini. Karena itu akan merupakan perang terbatas. Kalau sudah begitu kita perlu peralatan untuk itu. [padahal] Misalnya kasus Ambalat. Kita belum siap menghadapi perang terbatas. *Hercules* saja mungkin sekarang *nggak* tahu berapa yang bisa terbang. Paling untuk mengangkut satu batalyon cuma berapa yang bisa terbang. Padahal mereka dengan kapal induk, sudah ada beberapa opsi. Mereka *nggak* perlu pasukan. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta kemudian ke Bandung. *Kan* tinggal pindah? Selesai. Itu menurut mereka. Tapi perang belum dimenangkan mereka. Tapi pertempuran *oke* lah. Seperti di Irak sekarang justru lebih banyak korban"[275].

2. *Pentingnya Adopsi Teknologi*

Ketersediaan perlengkapan atau piranti, baik lunak maupun keras serta persenjataan yang memadai dan modern dipandang mutlak oleh semua subyek

---

Jadi meskipun maju ke depan kita dibantu unsur-unsur logistik. Pada waktu itu unsur bantuan itu menjadi unsur senapan, unsur manuver menjadi unsur mortir sudah berkurang, padahal itu untuk menekan kekuatan musuh. Pertempuran jarak dekat, senapan. Urgensisi pada waktu itu banyak yang dibubarkan, kompi bala bantuan diganti kompi senapan, mortir-mortir itu ditarik semua. Begitu kita kemarin benturan, peralatan itu tidak bisa dipakai, rusak, sudah tua. Kita punya yang buatan China memang agak murah, ibarat orang itu pas-pasan, duitnya sedikit dapat banyak, karena ada yang berfikiran yang penting dapat murah dan tidak berfikir untuk nanti-nanti. Misalnya: bagaimana amunisinya, peralatannya. Begitu ditembakkan tidak bisa. Jadi mungkin ada masalah internal yang perlu di evaluasi." (Wawancara dengan Danrem 083 Baladhikajaya, Kolonel Budiharjo, pada tanggal 24 Maret 2006).

[274] ibid.

[275] Wawancara dengan BO pada tanggal 24 Maret 2006.

penelitian demi terwujudnya TNI Profesional. Karena tentara yang sudah terdidik dan terlatih dengan baik akan mustahil bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional tanpa ketersediaan peralatan memadai, dengan mengadopsi teknologi modern. Dalam konteks ini, peralatan dipandang merupakan bagian dari kekuatan yang melekat sebagai kebutuhan TNI profesional. Selanjutnya, adopsi dan inovasi teknologi militer mau tidak mau juga harus terkait langsung dengan sistem pendidikan dan latihan yang ada, sebab untuk penguasaan aplikasi teknologi serta pemeliharaannya membutuhkan sumberdaya personil yang terdidik dan terlatih secara khusus untuk itu.

Mengenai pentingnya penguasaan teknologi ini Kol. (Art) Dadang Danuardi, kepala Lemjiantek AD, menyatakan:

> ".....militer yang profesional tanpa penguasaan teknologi militer adalah omong kosong. Oleh karena itu tidak bisa instan mencetak orang dengan patriotisme yang tinggi dan kemampuan menguasai teknologi yang memadai. Jaman dulu sudah dirintis dengan kemampuan membuat persenjataan sendiri sebagai skala prioritas".

Mencermati pernyataan di atas jelas bahwa penguasaan teknologi militer bukan saja penting, tetapi mutlak dalam upaya membangun TNI yang profesional. Penguasaan teknologi di sini dimaknai bukan hanya sebatas terampil sebagai pengguna teknologi. Dalam kenyataannya kalau hanya terampil saja akan menjadikan tergantung kepada negara produsen baik untuk perawatan, *up grade,* pelatihan personel, maupun pasokan suku cadang. Berikutnya negara tersebut bisa mendiktekan kemauannya melalui praktek embargo. Contoh yang paling nyata adalah keadaan yang mengenaskan dialami oleh Alat Utama Sistem Kesenjataan (Alutsista) TNI, karena sebagian besar bikinan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya, ketika negara-negara tersebut melakukan embargo maka sebagian besar Alutsista TNI tidak siap untuk digunakan. "Detasemen-detasemen yang kita miliki di

Kerawang tidak bisa berbuat apa-apa karena perlengkapan kita terbatas akibat embargo itu", kata Kol. (Art) Dadang Danuardi. Di pangkalan Karang Ploso Kab. Malang terdapat Peluru Kendali Rapier. Peluru kendali anti pesawat udara buatan Inggris ini dari disain roketnya tidak terlalu baru karena tidak ada fasilitas untuk melakukan *up grade.* Bahkan saat ini sudah mengalami *loss qualitative,* yaitu masa penggunaannya sudah nol tahun, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Kalau digunakan menembak sudah melenceng atau *missfire.*

Oleh sebab itu penguasaan teknologi harus sampai pada kemampuan menciptakan dan memproduksi sendiri. Dalam kaitan hal tersebut, Kol. (Arm) Dadang Danuardi, lebih lanjut menyatakan penilaiannya terhadap kebijakan yang menurut dia sangat startegis sayang kebijakan tersebut saat ini tidak dilanjutkan:

> "Di era Pak Harto ada yang namanya BPIS [Badan Pengembangan Industri Strategis], tujuannya dalam kondisi tertentu industri-industri strategis mampu mengadakan senjata yang dibutuhkan. Dalam kondisi damai industri strategis bisa memproduksi 30% untuk militer dan 70% untuk produk sipil, tetapi dalam keadaan negara sedang membutuhkan, produksi industri strategis bisa dirubah sebaliknya 70% militer, 30% sipil".

Adapun mengenai kondisi Alat Utama Sistem Kesenjataan (Alutsista) TNI dikesankan oleh para subyek penelitian dalam keadaan tidak memprihatinkan. Kata salah seorang subyek penelitian misalnya menyatakan:.

> "Kondisi persenjataan TNI sangat memprihatinkan dibandingkan dengan negara-negara lain tingkat Asean pun. Misalnya dengan Malaysia yang merupakan negara kecil. Bahkan kita selama Orde Baru sangat disegani oleh saudara-saudara muda kita, sekarang bahkan dilecehkan dengan kasus pulau Sipadan, Ligitan dan Ambalat. Sangat ironis dan menyakitkan kita sebagai bangsa yang besar".

Lebih lanjut para subyek penelitian menekankan perlunya peremajaan senjata TNI yang kebanyakan bekas untuk operasi Dwikora (saat merebut Irian Barat) tahun 60-an. Karena keterbatasan dana kita beli Alutsista bekas dari negara lain baik kapal, pesawat, dll.

Sebetulnya, menurut Kol. Dadang, Alutsista dengan muatan teknologi yang ada didalamnya sangat berguna bagi semua angkatan bersenjata untuk memberi efek tangkal. Sedang penetapan sistem persenjataan itu harus didasarkan pada: (1) Aspek taktis, (2) Kebutuhan organisasi atau sistem atau doktrin pertempuran yang telah ditetapkan, (3) Aspek ekonomi, yaitu ketersediaan anggaran.

BAB VI

GAMBARAN RUANG KESADARAN MIKRO-MAKRO: "POKOKNYA" MENJALANKAN TUGAS POKOK

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa di dalam Bab VI ini pemaparan hasil penelitian akan dititik-beratkan pada upaya merekonstruksikan pemahaman Subyek Penelitian dalam proses internalisasi yang dialaminya ketika dirinya merasuk (*manjing* - jawa) ke dalam realitas obyektif Mikro-Makro yang menghampirinya. Yaitu realitas obyektif yang posisinya berada pada persilangan, di mana sebagian berada dalam domain sosial kemiliteran dan sebagian yang lain sudah berada di wilayah luarnya yang lebih luas.

Realitas atau struktur sosial obyektif ini, dilihat dari sudut pandang Subyek Peneletian, dapat dicirikan oleh ikut andilnya aktor-aktor sosial *(social actors)* di luar elit TNI dalam memproduksi struktur. Sungguhpun struktur yang diproduksi itu pada gilirannya diberlakukan hanya untuk TNI. Tahap momentum semacam itulah yang oleh Berger disebut obyektivasi yaitu pada saat mana sebuah totalitas makna sedang diproduksi yang pada gilirannya melahirkan realitas atau struktur sosial obyektif.

Di antara aktor-aktor selain TNI yang dimaksud di atas adalah: (1) para politisi, khususnya para anggota DPR yang ikut menentukan peraturan perundang-undangan mengenai TNI. Termasuk didalamnya ikut menentukan masalah tugas pokok dan fungsi TNI, anggaran, serta permasalahan peran teritorial dan politik TNI dll.

(2) Para pelaku bisnis yang mereka ikut menjadi aktor sosial karena sebagian kepentingannya memiliki kesamaan dengan bisnis TNI maka mereka mempersoalkan

dan ikut menentukan keberadaan aktivitas bisnis TNI termasuk di dalamnya perusahaan, koperasi, serta yayasan-yayasan sosial TNI.

(3) Para aktivis LSM atau kelompok-kelompok strategis lain yang oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu baik langsung maupun tidak langsung sehingga mereka bertindak sebagai aktor sosial yang turut menentukan keberadaan lembaga dan fungsi teritorial TNI.

Mereka itu semua ikut masuk ke dalam wilayah yang secara substantif lebih merupakan domain dari dunia sosial TNI dengan motif dan kepentingan yang berbeda-beda yang berimplikasi kepada pemaknaan yang berbeda-beda pula, yang terefleksi ke dalam sikap, pandangan dan tingkah-laku mereka. Begitu juga halnya bagi aktor-aktor dari kalangan elit TNI dalam meresapi fenomen-fenomen yang sama akan memberikan pemaknaan yang berbeda. Sebab, kalau merujuk pada pendapat Bruner, realitas (sosial kemiliteran) yang sama akan dialami oleh aktor-aktor sosial -- dari kalangan politisi, pelaku bisnis, aktivis LSM dan elit TNI sendiri-- dengan disposisi mental serta ketubuhan pisikalnya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, pengalaman itu selalu menjadi sangat individual dan subyektif. Disposisi mental (pikiran dan emosi yang ada dalam diri mereka) dan ketubuhan (kondisi pisik dan posisinya dalam lingkungan pisik) telah mengarahkan momentum sesaat tadi kepada sebuah pengalaman yang unik dan membekas. Realitas yang sama ketika dialami seseorang akan 'disaring' lewat disposisi mental dan pisiknya menjadi pengalaman diri.

Berikut ini adalah diskripsi yang menggambarkan pemahaman dan pemaknaan yang terjadi di ruang kesadaran Mikro-Makro aktor elit TNI yang

menjadi Subyek Penelitian di bagi ke dalam sub-sub tema seperti yang telah disinggung di atas.

A. Tugas Pokok: Suatu yang Tidak Bisa Ditawar

1. *Menegakkan, Mempertahankan, Melindungi*

Berkenaan dengan masalah tugas, pandangan Subyek Penelitian di dalam penjelasan tertulisnya mengetengahkan bahwa tidak ada pilihan lain dalam memahami tugas yang harus diembannya kecuali harus berlandaskan Undang-undang. Yaitu UU No. 34 tahun 2004. Di dalam bab IV tercantum mengenai Peran, Fungsi dan Tugas TNI.

Tugas pokok TNI yang dipahami Subyek Penelitian sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang, ada tiga yaitu: "menegakkan, mempertahankan dan melindungi". Yang harus ditegakkan adalah **kedaulatan negara**, yang harus dipertahankan adalah **keutuhan wilayah NKRI** (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, sedang yang harus dilindungi adalah **keselamatan bangsa** Indonesia. Di dalam menjalankan tugas tersebut TNI mendasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. (Beberapa kata ditulis dengan huruf tebal adalah sebagai penanda untuk menjelaskan bahwa kata-kata itu merupakan kata kunci, yang selalu disampaikan secara berulang-ulang oleh Subyek Penelitian baik dalam tulisan, dalam FGD, maupun dalam wawancara yang berkaitan dengan tugas utama yang harus diemban).

Tugas pokok tersebut di atas terkait erat dengan peran dan fungsi TNI, yang juga sudah tercantum dalam Undang-Undang. Dinyatakan oleh Subyek Penelitian bahwa TNI itu berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Sedang fungsi TNI ada tiga yaitu sebagai "penangkal, penindak dan pemulih". Sebagai penangkal dan

penindak, artinya menangkal dan menindak setiap bentuk ancaman baik militer maupun ancaman bersenjata yang lain. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada tiga sasaran ancaman yang harus ditangkal atau ditindak oleh TNI yaitu: yang mengarah kepada kedaulatan negara, memecah keutuhan wilayah, dan membahayakan keselamatan bangsa. Sedangkan sebagai Pemulih yang dimaksudkan adalah memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut TNI memiliki kedudukan yang oleh Subyek Penelitian sebagai "komponen utama sistem pertahanan negara".

Kembali ke masalah tugas pokok sebagaimana terjabar tersebut di atas, dilaksanakan melalui dua bentuk 'operasi' yaitu: Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) atau *Military Operation Other Than War (MOOTW)*. Operasi Selain Perang terdiri dari dua jenis yaitu operasi tempur dan non-tempur.

Lantas bagaimanakah subyek penelitian memahami kaitan profesionalisme dengan tugas pokok tersebut di atas? Kaitan kedua hal tersebut antara lain seperti yang dinyatakan oleh Letkol (Art) Suko Purwantoro (SPO), yang mengibaratkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laksana sebuah lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman tersebut perlu dikelilingi pagar pengaman dan pelindung. Pagarnya terserah, bisa terbuat dari bambu, kayu, kawat, besi, atau tembok. Pagar yang berfungsi sebagai pengaman dan pelindung itulah TNI.

Bagaimanapun seharusnya pagar itu benar-benar kokoh sehingga bisa diandalkan kekuatannya sebagai pengaman dan pelindung. Pagar yang kokoh dan kuat semacam itulah ibarat TNI yang profesional itu. Pagar yang kokoh akan bisa berlipatganda kekuatannya bila fondasi dan kerangka struktur bangunannya juga

kokoh. Pondasi dan rangka struktur bangunan itu ibarat dari "Jati Diri TNI"[276]. Sehingga pagar yang kokoh bagi NKRI itu adalah postur TNI profesional yang berpondasikan jati diri. Apabila diselami lebih dalam maka nilai intrinsik atau makna hakiki, baik tugas pokok maupun jati diri itu sebenarnya adalah berasal dari satu sumber yaitu nilai ksatriya-an.

Jadi makna dibalik metafora tersebut di atas menunjukkan akan adanya suatu sikap atau pendirian tertentu yang dimiliki oleh para perwira menengah TNI AD. Tentu saja sesuai dengan kesadaran dan pemahaman yang dimiliki, bahwa TNI profesional itu (1) tidak bisa dilepaskan dengan tugas pokok TNI itu sendiri dan (2) tidak bisa dilepaskan dengan Jati Diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Nasional.

2. *Perluasan Mandat (Broader Mandate)*

Pertanyaan berikutnya adalah: Apakah tanggung jawab TNI selaku alat pertahanan negara hanya sebatas menjalankan bertugas untuk mempertahankan keselamatan bangsa dan negara dari invasi atau agresi militer negara lain? Apakah TNI profesional hanya bertugas melakukan Operasi Militer untuk Perang (OMP)? Apakah keamanan nasional sepenuhnya menjadi wewenang dan tugas Polri, sementara TNI profesional sepenuhnya untuk tugas perang?

Jalan fikiran para elit AD tergolong sangat jelas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pandangan Kol. (Inf) Besar Harto Karyawan (BHK), misalnya, secara tegas membedakan antara tugas TNI dan tugas Polri dalam mewujudkan keamanan nasional. Menurutnya, wewenang dan tugas Polri lebih terfokus pada isu-

[276] Jati Diri TNI menurut Undang-Undang No. 34 Th. 2004 semestinya ada empat yaitu: sebagai "tentara rakyat", "tentara pejuang", "tentara nasional" serta "tentara profesional", dan disebut demikian juga oleh Subyek Penelitian dalam pandangan tertulis. Namun dalam wawancara dan FGD mensiratkan pandangan yang berbeda, bahwa "TNI profesional" adalah organ baru yang dicangkokkan dalam Jati Diri TNI.

isu Kamtibmas (keamanan-ketertiban masyarakat); kaitannya dengan penegakan hukum guna mewujudkan tertib sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan TNI, tekanannya adalah pada keamanan nasional (*national security*), terkait dengan ancaman bagi keselamatan bangsa dan negara; sebagai alat pertahanan negara, kepedulian TNI adalah untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa dan negara. Karenanya, ancaman apa pun dan dari mana pun datangnya (apakah dari luar maupun dalam negeri) yang membahayakan keselamatan bangsa dan NKRI adalah tugas dan fungsi TNI untuk menangkal, menindak dan memulihkannya.

Jalan pemikiran tersebut merupakan tafsiran dan pemaknaan terhadap fungsi dan tugas pokok TNI sebagaimana yang disebutkan dalam UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Ketentuan dalam UU tersebut memang senantiasa menjadi acuan elit TNI AD yang menjadi subyek penelitian ini, termasuk juga dalam memaknakan bidang tugas yang menuntut profesionalisme TNI.

Sejalan dengan itu, kalangan elit TNI AD di garnizun Malang memaknai tugas TNI profesional bukan hanya berkeahlian mengelola kekuatan pertahanan dalam menangani operasi militer untuk perang (OMP) guna menghadapi invasi atau agresi kekuatan militer negara lain. Atau dengan kata lain, tidak hanya berkeahlian menggunakan kekuatan bersenjata untuk menanggulangi ancaman keamanan tradisional yang berupa invasi atau agresi militer negara lain. Akan tetapi, juga berkewenangan dan berkeahlian mengelola kekuatan pertahanan yang disebut Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sedang OMSP bisa dalam bentuk penggunaan kekuatan tempur maupun non-tempur. Penggunaan kekuatan tempur selain untuk perang misalnya untuk menanggulangi gerakan separatis,

pemberontakan bersenjata, kerusuhan sosial, konflik komunal. Sedang yang non-tempur adalah untuk pemberdayaan fungsi pertahanan wilayah dan kekuatan pendukung, penanggulangan bencana, tugas penyelamatan dlsb. Secara lebih rinci cakupan dari OMSP tersebut --dalam pandang mereka—adalah telah tertuang secara lengkap dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sebagaimana disebutkan dalam UU tentang TNI dimaksud, yang termasuk kedalam lingkup OMSP itulah adalah (1) mengatasi gerakan separatis bersenjata, (2) mengatasi pemberontakan bersenjata, (3) mengatasi aksi terorisme, (4) mengamankan wilayah perbatasan, (5) mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, (7) mengamankan Presdiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, (8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, (9) membantu tugas pemerintahan di daerah, (10) membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, (12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, (13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*searh and resccue*), serta (14) membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Mengacu pada deskripsi tugas pokok non-perang tersebut, terlihat jelas, dan disadari benar oleh elit TNI AD bahwa fungsi komando teritorial (memberdayakan wilayah pertahanan berserta kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan

sistem pertahanan semesta) juga termasuk bagian integral dari tugas pokok TNI. Karenanya, karakteristik keahlian (*expertice*) TNI profesional juga termasuk untuk memberdayakan wilayah pertahanan yang selama ini dikenal sebagai fungsi komando teritorial. Maka dengan demikian di dalam pemahaman subyek penelitian perwira TNI bukanlah *'the manager of violence'* atau pengelola kekerasan akan tetapi lebih cocok disebut *'manager of forces'* atau pengelola kekuatan. Dan kekuatan yang dikelola itu bukan hanya bisa digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kekerasan seperti untuk perang dan pertempuran-pertempuran selain perang, akan tetapi kekuatan yang dikelolanya juga bisa digunakan dalam melaksanakan tuigas-tugas non-kekerasan, yaitu *civic mission* atau *non-violence mission* seperti penanggulangan bencana, membantu tugas pemerintah daerah.

Tugas *non-violence* TNI seperti dituturkan oleh BHK yang antara lain berupa pembinaan dan pemberdayaan wilayah sebagai kekuatan pertahanan berserta komponen sebagai pendukungnya itu membuat, "Departemen Pertahanan bisa punya mata dan telinga di mana-mana untuk kepentingan deteksi dini dan cegah dini" terhadap setiap gangguan dan ancaman yang diperkirakan bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Selain itu, kata BHK: "potensi wilayah juga menjadi mungkin dan mampu diubah menjadi kekuatan bagi kepentingan pertahanan negara". Sementara, SPO menganggap bahwa fungsi komando kewilayahan itu adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pertahanan di daerah. Komando kewilayahan dipandang merupakan gelar kekuatan TNI terdepan di daerah-daerah untuk melaksanakan fungsi pertahanan nasional. Ia adalah sebagai induk dan penyangga awal serta melakukan pelatihan-pelatihan yang diperlukan bagi rakyat di bidang pertahanan itu.

Apakah tugas pemberdayaan wilayah pertahanan (pengelolaan kekuatan pertahanan wilayah) tersebut juga ditunjang oleh pendidikan/latihan tersendiri? menurut mereka "ya". Para Komandan Kodim maupun Komandan Korem mengakui adanya pendidikan/latihan khusus yang demikian itu, dan mereka mengalaminya.

Berdasarkan komponen-komponen intrinsik dari pemahaman yang telah dipaparkan di atas, tampak nyata (dalam pemahaman di tingkat elit TNI AD) bahwa karakteristik keahlian (*expertise*) TNI profesional tidaklah terbatas dalam arti klise (perspektif lama) sebagaimana konsep militer profesional yang diajukan Huntington. Pemaknaannya lebih luas, atau tepatnya "ganda", yaitu mencakup kemampuan OMP/MOW (Operasi Militer Perang – *Military Operation of War*) maupun OMSP/MOOTW[277] (Operasi Militer Selain Perang – *Military Operation Other than War*). Karakteristik keahlian TNI profesional dianggap tidak hanya harus mampu atau berkeahlian mengelola kekuatan pertahanan untuk "perang", tetapi juga yang bersifat "non-perang". Termasuk katagori yang ke dua ini adalah pemberdayaan wilayah pertahanan dengan segenap kekuatan pendukungnya guna menghadapi segala bentuk ancaman yang membayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia. Semua itu berpangkal dari adanya pemahaman yang ada di alam kesadaran prajurit TNI akan tugas pokoknya seperti apa yang oleh SPO sebut "Sebagai bhayangkari, atau tameng negara". Kesadaran itu dianggapnya sudah mengakar dan menyejarah, sedangkan adanya Undang Undang

[277] *Military Operation Other than War* (MOOTW) adalah konsep doktrin militer yang mengacu pada penggunaan kemampuan militer untuk operasi di luar perang. Mencakup dua jenis operasi yaitu tempur (*combat operation*) dan non-tempur (*non-combat operation*). Dalam kontek hubungan internasional, MOOTW meliputi: pencegahan terjadinya perang, mengatasi konflik, memelihara perdamaian. Sedang untuk dalam negeri antara lain untuk menangkal, mencegah dan menumpas pemberontakan atau pembangkangan bersenjata, melindungi kepentingan nasional, menyediakan bantuan-bantuan kemanusiaan, membantu otoritas sipil dalam mengatasi krisis tertentu.

No 34 tahun 2004 serta undang undang lain yang berhubungan dengan itu adalah merupakan mengukuhan saja.

Matrik 1

Pemahaman Elite TNI AD Tentang Profesionalisme Kaitannya dengan Tugas Pokok TNI

TUGAS POKOK TNI
1. Menegakkan kedaulatan negara
2. Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI
3. Melindungi keselamatan Bangsa dan Negara

	Melaksanakan OMP	**Melaksanakan OMSP**
Karakteristik Keahlian *(Expertise)*	Ahli mengelola / menggunakan kekuatan pertahanan dalam kerangka OMP	Ahli mengelola / menggunakan kekuatan pertahanan dalam kerangka OMSP
Karakteristik Tanggung jawab sosial *(Social Responsibility)*	Bertanggung jawab kepada negara dan bangsa untuk mempertahankan NKRI dengan menggunakan kemampuan / kekuatan satuan-satuan tempur baik yang ada dipusat maupun yang ada di bawah komando kewilayahan.	Bertanggung jawab kepada negara dan bangsa untuk melindungi keselamatan bangsa dan negara dengan mengoptimalkan pembinaan dan penyiapan potensi kekuatan pertahanan rakyat melalui komando kewilayahan
Karakteristik Organisasi pengikat *(Corporateness)*	Memiliki kekhasan organisasi, sistem nilai, tradisi, kode etik dan doktrin tersendiri	Tetap berakar dan dekat dengan rakyat, berdiri di atas semua golongan, suku, agama dan unsur-unsur primordial yang lain.

B. Masalah Peran Politik TNI

Subyek Penelitian meyakini bahwa keterlibatan TNI dalam politik praktis di era pemerintahan Orde Baru adalah suatu kekeliruan. Dan ongkos yang harus ditanggung oleh TNI sangat besar sementara keuntungan bagi institusi tidak ada.

Keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir Perwira. Hal tersebut tercermin antara lain ungkapan pengalaman SPO pada masa pemerintahan Orde baru:

> ".... waktu itu saya masih Letnan II sampai Kapten. Generasi perwira menengah sekarang ini seperti agak terputus dengan perwira menengah era Orde Baru, yang menikmati jadi Bupati, walikota dlsb. Kita jauh banget dengan itu. Antara bumi dengan langit. Dan feodelismenya kental sekali.... Kita dulu kalau pengamanan pemilu bupatinya tentara malah susah. Kalau bupatinya dari sipil 'kan dia takut, jadi apa yang kita butuhkan didukung....kalau yang tentara: 'Kamu di sini tugasnya. Kamu sudah membawa uang lauk pauk jadi kamu jangan macam-macam'.
>
> "Jadi, sebagaimana kata Kasad dan saya merasakan, untuk institusi Angkatan Darat sendiri selama 32 tahun masa Orde Baru ini jujur saya sampaikan tidak ada keuntungan institusi. Perorangan ya. Segelintir lah. Buktinya apa, selama 32 tahun kita begitu.... gigih membela kepentingan penguasa. Apa senjata kita diganti? Tidak! Kendaraan baru? Kelengkapan ya masih itu itu juga"[278].

Lantas, bagaimana kepolitikan TNI? Menurut BHK, TNI sudah mengambil komitmen bahwa politik TNI hanya politik negara.

> "Kita tidak akan terlibat dalam politik praktis. Apa yang menjadi komitmen politik TNI adalah NKRI tidak boleh pecah harus tetap bersatu. Bagaimana pun caranya. Wujud kongkrit dari komiten TNI dalam menjaga NKRI yaitu dengan memberdayaan Komando Wilayah, peran satuan wilayah dalam situasi aman adalah membina, mencegah, melerai agar tidak terjadi perpecahan"[279].

Upaya TNI untuk mengamankan NKRI menurut para perwira banyak tantangan, salah satunya ditunjukan dengan tuntutan untuk dibubarkannya komando teritorial (Koter). Subyek Penelitian curiga terhadap yang menghendaki tersebut karena keberadaan Koter selama ini dianggap sebagai pengnghalang agenda-agenda politiknya yang akan memecah belah NKRI.

> "....TNI tidak boleh mendustai semangat revolusi yaitu dari Sabang sampai Merauke jangan lagi dipisah-pisahkan. Ini tidak terpikir oleh TNI. Masalah keputusan politik, pemerintah diharapkan sedikit cerdas untuk mewaspadai ancaman ini.Untuk tugas menjaga NKRI ada upaya-upaya orang untuk mencekal TNI, karena kepentingan politik. Supaya tujuannya tercapai. Kenapa ada wacana koter dibubarkan? Karena itu hal mendasar. Kita [dengan Koter] bisa membina masyarakat untuk pertahanan. Ini membahayakan kepentingan politik tertentu yang tertahanan oleh kita, teredam oleh kita dan terdektesi oleh kita, akhirnya dia gagal lagi-gagal lagi. Bagaimana supaya

[278] Wawancara dengan Suko Purwantoro, Danyon Armed, 20 Maret 2007.
[279] Wawancara dengan Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu pada tanggal 25 Januari 2005.

> lancar, bubarkan Koter, itu 'kan upaya-upaya politik. Saya sedih masih ada pelaku politik kita yang mendukung. Kok lucu"[280].

Subyek Peneliti memandang TNI sebagai institusi yang diperebutkan banyak pihak untuk mendukung kepentingan kelompok atau golongannya. Namun TNI bertekad untuk tetap berpegang pada komitmen politik negara dan sebagai alat negara. "TNI sebagai alat negara bukan dalam arti alat pemerintah atau kepentingan politik tertentu. Sebagai alat negara bertugas untuk mengamankan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh proses politik sebagai tugas para pelaku politik. TNI sebagai alat negara harus mem-*back-up* keputusan politik"[281].

Dalam keadaan tertentu, apabila komitmen yang dikemukakan TNI berupa NKRI tidak diindahkan, TNI ada kemungkinan mengambil jalan lain untuk menyelamatkan NKRI. Sebagaimana Budiharjo Kemukakan,

> "Dalam keadaan tertentu mungkin TNI tidak lagi memperhatikan keputusan politik. Dalam keadaan darurat. Contohnya pada saat Pak Soedirman gerilya, presiden menyerah atau apa? Tapi TNI jalan terus untuk mempertahankan kemerdekaan. Mungkin presiden sudah diasingkan ke Digul atau dimana, tapi TNI jalan terus untuk gerilya. Dalam keadaan seperti itu masih bisa ditolerir terhadap keputusan politik. Tapi itu kan relatif"[282].

Walaupun sekarang ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, TNI tidak lagi menjadi institusi yang berada terdepan, akan tetapi tetap berjalan walaupun dengan cara mempengaruhi di belakang.

> "Kebijakan sekarang ini 'kan tidak tetap. Tetapi mempengaruhi dari belakang. Berarti tetap aktif supaya keputusannya itu seperti yang diharapkan dari pihak TNI?"
> "Kalau dulu kita bisa langsung bertindak. Tapi kalau sekarang tidak boleh karena bukan bidang kita. Nanti kita mencampuri urusan sipil. Kita lihat kalau misalnya ada masalah air dibiarkan bisa beralih menjadi ke parang yang berbicara. Permasalahan seperti itu kalau kita rembuk saja atau kita hadapi secara teknis saja 'gak adil, tapi bagi kita tidak punya ilmunya tetapi melalui komunikasi sosial lewat orang yang berkompeten"[283].

---

[280] Ibid.
[281] Wawancara dengan Letkol (Inf.) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu pada tanggal 25 Januari 2005.
[282] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[283] Ibid.

Berkenaan dengan tindakan yang diambil oleh TNI dalam rangka mengamankan NKRI, menurut BO Perwira harus berani bertanggung jawab, dengan melihat eskalasinya. Soal hukum bisa dibicarakan nanti, yang penting reda dulu situasi dan masyarakat tenang. Perwira harus berani bertanggung jawab demi keamanan, demi persatuan dan kesatuan. Jadi siapa yang berada di wilayah itu yang senior itulah yang mengambil keputusan"[284].

Walaupun demikian, kalau mau mengirimkan pasukan misalnya dalam keadaan darurat militer itu harus tergantung keputusan politik negara. Dinyatakan butuh militer dulu, baru TNI bisa bergerak. Atau mungkin Polisi minta bantuan kekuatan dari TNI. Itu pun sudah mengacu pada perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Itu sudah keputusan politik negara[285].

Subyek Penelitian mengaku bahwa pada masa Orde Baru banyak muncul tuntutan dari masyarakat yang menginginkan figur-figur pimpinan dari kalangan tentara. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila banyak elit TNI yang mengemban tugas pada bidang eksekutif. Namun kondisi pasca reformasi jauh berbeda. Subyek Penelitian merasa, figur TNI tidak lagi menjadi idola, bahkan banyak yang menghujat keberadaan mereka. Namun demikian bukannya dalam TNI tidak ada lagi figur yang berkualitas, tapi hal ini semata-mata disebabkan karena perubahan paradigma politik.

Menurut pemahaman para perwira, keberadaan TNI di eksekutif masih dibutuhkan, apalagi kalau melihat kondisi kepemimpinan sipil yang masih sering terlibat dalam korupsi dan konflik berkepanjangan sehingga mengabaikan kepentingan rakyat. Namun demikian apabila ada personel TNI yang dikehendaki

[284] Ibid.
[285] Ibid.

oleh masyarakat sebagai pejabat eksekutif harus mengundurkan diri atau pensiun dari institusi TNI sebagai yang diamanatkan dalam undang-undang saat ini. Hal ini menurut Letkol (Inf.) Tri Suwandono (TSO) merupakan solusi agar institusi TNI tidak disalah-gunakan untuk kegiatan politik praktis[286]. Namun mekanisme peluang untuk TNI mestinya harus lebih terbuka, menurut Letkol (Inf) Aris Suhardiono (AS), bahkan idealnya adalah apabila komposisi di eksekutif antara yang dari sipil dengan militer (yang sudah barang tentu harus mengundurkan diri dari dinas aktif) itu seimbang (proporsional) sehingga tidak ada istilah "supremasi sipil atas militer". Mereka berkompetisi secara sehat dan berdasar kemampuan[287].

Berkenaan dengan keterlibatan TNI dalam bidang eksekutif, Letkol (Inf.) BHK menyatakan sebagai berikut:

> "Secara individual kalau itu dibutuhkan *oke*-lah. TNI tidak 'menjual' sembarang putra-putranya. Misalnya ada TNI yang dianggap bisa memimpin wilayah dan dia diminta secara resmi oleh DPR maupun masyarakat bisa dengan mengajukan ke panglima TNI atau ke Pangdam atau ke pimpinannya langsung untuk meminta kesediaannya yang bersangkutan. Jadi bukan bicara institusinya, satu prinsip melepas TNI yaitu memberikan yang terbaik kalau memang diperlukan. Apabila dia terpilih maka harus pensiun dan menanggalkan atributnya"[288].

Sejalan dengan apa yang dikemukakan BHK, AS sependapat bila ada putra terbaik dari TNI mengabdi di eksekutif tetapi bila sudah duduk di sana diberi pensiun dini. Mereka harus diperlakukan sama seperti warga negara atau dari instansi lain, termasuk terlebih dahulu harus melewati *fit and proper test.* Seperti yang lain, ia harus punya kesempatan[289]. Hal ini juga ditegaskan oleh BO:

---

[286] Hasil wawancara dengan Letkol (Inf.) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.
[287] Wawancara dengan Letkol (Inf) Aris Suhardiono, Kababinminvetcadam V/Brw, Kasrem 083/ Baladika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.
[288] Wawancara dengan Letkol (Inf.) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084 Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu pada tanggal 25 Januari 2005.
[289] Wawancara dengan Letkol (Inf) Aris Suhardiono, Kababinminvetcadam V/Brw, Kasrem 083/ Baladika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.

"....manakala ada anggota perwira berkeinginan jadi bupati, maka dia diseleksi terlebih dahulu. Karena walaupun nantinya sudah menjadi sipil tapi masyarakat tetap menyorot. Apabila calon tersebut sudah diseleksi semuanya bagus tentunya harus mengundurkan diri dulu dari TNI. Jadi kalau berminat harus diseleksi. Tidak bisa sembarangan. Diharapkan keberadaan eks-TNI tersebut harus mampu menciptakan kondisi yang baik. Dan kalau sudah jadi bupati diharapkan wilayah itu akan menjadi maju dan berwawasan kebangsaan"[290].

Oleh karena itu tidak akan ada lagi perwira aktif yang menduduki jabatan di eksekutif. Bagi perwira TNI yang mau mencalonkan menjadi kepala daerah harus siap untuk tidak lagi menjabat dari jabatannya di TNI apabila ia tidak terpilih. Karena kalau kalah menurut BO tentunya akan kembali, dan tidak ada jaminan mempunyai jabatan lagi atau nanti-nanti bisa menunggu lagi. Menurutnya ini adalah aturan resmi, jadi kalau mau mencalonkan harus berfikir resiko[291].

Subyek Penelitian memahami bahwa situasi dan kondisi telah berubah. Khsususnya dengan adanya paradigma baru TNI. Ketika masa Orde Baru politisi di Senayan yang berasal dari TNI/Polri walaupun jumlahnya tidak signifikan dibanding dengan jumlah anggota Dewan secara keseluruhan, namun umumnya para politisi dari TNI/Polri cukup mendominasi dan berperan besar dalam menentukan arah kebijakan politis di Dewan. SPO mengemukakan bahwa pada masa sebelum reformasi terlihat suara fraksi TNI/Polri masih sangat dominan. Akan tetapi pada saat ini tidak terjadi lagi, karena TNI betul-betul memfokuskan diri untuk pertahanan negara dan sebagai alat pemersatu bangsa"[292].

Setelah TNI tidak lagi duduk di legislatif, seharusnya para politisi sipil bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan rakyat. Namun sangat disayangkan, sebab menurut AS setelah TNI/Polri tidak lagi di DPRD dan DPR RI

[290] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[291] Ibid.
[292] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

para angota Dewan justru banyak terlibat masalah dalam penggunaan anggaran untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Hal ini menurutnya sangat berbeda dengan legislatif masa Orde Baru,

> "...anggota DPRD maupun DPR RI pada saat ini banyak bermasalah terutama dalam penggunaan anggaran. Hal ini tidak terjadi pada masa sebelumnya (Orde Baru), karena tidak ada lagi fraksi TNI sebagai alat kontrol" tukasnya[293].

Walaupun secara institusional TNI tidak lagi masuk di legislatif bukan berarti bahwa semua anggota TNI tidak diperkenankan untuk duduk di legislatif. Menurut TSO, tentara sebagai sebuah profesi sama halnya dengan profesi lain yang punya hak yang sama untuk menduduki jabatan di legislatif. Akan tetapi hal penting dari itu semua adalah perlu adanya aturan yang bisa jadi sandaran ketika seorang anggota TNI mau aktif di politik. Sebagaimana ia kemukakan:

> "…. dalam hal keterlibatan TNI dalam bidang eksekutif dan legislatif sebetulnya itu suatu profesi yang tidak ada bedanya dengan dokter, guru, bintang film, tukang las bahkan tukang becak sekalipun. Dengan demikian personil TNI secara orang per orang juga merupakan warga negara Indonesia biasa yang berhak dan turut serta dalam membangun bangsa. Oleh karena itu tidak ada salahnya apabila ingin berkiprah pada bidang eksekutif dan legislatif. Akan tetapi agar tidak melibatkan TNI selaku institusi pada kepentingan orang per orang atau golongan tertentu, kiranya harus dibuat Undang-undang, Peraturan-peraturan serta prosedur tertentu untuk keperluan tersebut"[294].

Oleh karena itu lah untuk menghilangkan keraguan dari kalangan sipil masalah keterlibatan TNI dalam politik, maka TNI secara institusional tidak lagi punya hubungan kecuali secara personal. Bahkan pengarahan yang berkaitan dengan urusan keamanan tidak lagi dilakukan karena sudah bukan tugas dari TNI lagi. Dalam hal ini TSO menyampaikan, "Berkaitan dengan partai politik setelah reformasi, TNI hanya memberikan arahan-arahan saja dan disampaikan secara non-

[293] Wawancara dengan Letkol (Inf) Aris Suhardiono, Kababinminvetcadam V/Brw, Kasrem 083/ Baladhika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.
[294] Hasil wawancara dengan Letkol (Inf) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.

formal. Untuk masuk ke wilayah pembinaan secara formal bukan lagi menjadi kewajiban TNI, karena bukan tugas TNI. Pembinaan partai politik dilakukan oleh masing-masing ketua partai"[295].

C. Masalah Peran Teritorial dan Keberadaan Komando Kewilayahan

Di dalam doktrin kewilayahan dinyatakan bahwa ada lima kemampuan teritorial yang harus dimiliki TNI yaitu meliputi: (1) Deteksi dini, cegah dini, tangkal dini, (2) penguasan wilayah, (3) komunikasi sosial, (4) Mepersiapkan perlawanan rakyat, (5) manajemen teritorial. Lantas bagaimanakah hal tersebut dipahami oleh Papasupel?

1. *Masalah peran teritorial*

Para perwira berpandangan bahwa dalam menjaga persatuan dan kesatuan wilayah sudah operasional di lapangan walaupun dalam situasi aman sekalipun. TNI yang sudah siap di lapangan, yaitu Babinsa atau Koramil dan bekerja bersama dengan Polres di lapangan. Koramil dan Babinsa bertugas membina potensi kewilayahan untuk diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan. Dan inilah yang menurut pemahaman para perwira sebagai fungsi dari koter-koter. Salah satu perwira di Daerah Garnizun Malang, Besar Harto Karyawan menyatakan bahwa sekarang ini opini yang berkembang seolah-olah pemisahan TNI dengan Polri adalah pemisahan eskalasi ancaman.

> "Kalau di TNI pemisahannya: aman, rawan dan gawat. Sedangkan di Kepolisian pemisahannya: aman, rusuh terkendali dan rusuh tidak terkendali. Terus menginjak ke darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Adanya pemisahan Undang-Undang TNI dengan Polri ada seolah-olah TNI baru berperan kalau diminta oleh kepolisian dalam situasi eskalasi, kalau situasi aman seolah-olah itu bukan kewenangan TNI tapi kewenangan Polri. Ini merupakan pemahaman yang salah. Untuk kesatuan kewilayahan dalam situasi aman TNI sudah *reserve* di lapangan. Sudah operasional di lapangan yaitu Babinsa atau Koramil sudah *reserve* bersama Polres di lapangan. Tugasnya apa? Yaitu membina potensi kewilayahan untuk

[295] Ibid.

> diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan. Ini fungsi yang dikatakan Koter-koter tadi. Untuk satuan penindak ini sebetulnya yang eskalasi di dalam Undang-undang, TNI bergerak atas permintaan Kepolisian yang diatur oleh Undang-undang nomor 34. Ada lagi bunyi di dalam Undang-undang nomor 34 tentang tugas TNI selain perang yaitu membantu pemerintah daerah"[296].

Sebenarnya menurut BO, pemisahan TNI dan Polri bukan pemisahan dalam arti jenis eskalasi ancaman melainkan pemisahan dalam hal konteksnya. Sebagaimana ia kemukakan, "Dalam konteks keamanan Polri itu ketertiban masyarakat, tapi keamanan yang dimiliki TNI nasional (*national security*) jadi keamanan negara. Misalnya dari dalam negeri ada separatis mau merdeka, atau teroris"[297]. Secara lengkap terkait dengan masalah keamanan BO mengemukakan sebagai berikut:

> "Di Undang-undang ada, pokoknya yang mengganggu keamanan masyarakat misalnya pencurian, perampokan itu wilayah Polisi. TNI hanya bisa membina lewat Siskamling agar keamanan tidak terganggu oleh perampok. Tetapi kalau sudah terjadi ada TKP tentunya Polisi yang 'main' dan TNI membantu mencari data dan saksi. Dalam konteks keamanan TNI – Polri, wewenang yang dilaksanakan Polri yaitu kamtibmas yang oleh TNI adalah tanggung jawab negara yang didalamnya termasuk ada separatis, ancaman dari luar, yang mengancam keamanan negara"[298].

Sementara pemahaman mengenai pembagian peran dalam tugas teritorial (pembagian wilayah) antara TNI dan POLRI menurut Tri Suwandono adalah sebagai berikut:

> "Wilayah dalam pengertian di sini adalah bagian dari pemerintah pusat. TNI tidak mengenal negara bagian. TNI di bawah departemen pertahanan. Polisi di bawah presiden. Di daerah, polisi dipimpin pemerintah daerah. Wilayah Polisi dan TNI sama, hanya tugas dan tanggung jawab berbeda. Pemerintah Daerah menangani kesejahteraan masyarakat. Polri menangani Kamtibmas. TNI menangani Pertahanan artinya manakala pertahanan keamanan suatu daerah terancam atau menjurus pada perpecahan maka saat itulah TNI memerankan tugasnya. Misal: ketika massa akan menyerang gereja Bethani. Sebagai Dandim melihat seperti ini akan menimbulkan kerusakan yang apabila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga terjadi di tempat lain, karena paling tidak massa merasa tindakannya dibiarkan atau

[296] Hasil Angket Terbuka Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084 Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.
[297] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[298] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.

> dilegalkan. Tugas Profesional TNI lainnya yang berkaitan dengan *civic mission* (kemanusiaan) asal tidak melanggar rambu-rambu yang ada bisa dilakukan"[299].

Dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2000 berarti sudah ada pembagian tugas yang jelas antara TNI dan Polri sebagai mana SPO ungkapkan:

> "...melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000 TNI dan POLRI secara resmi terpisah, TNI hanya berkonsentrasi pada masalah Pertahanan Negara untuk menghadapi musuh negara baik yang berasal dari dalam dan luar negeri sedangkan POLRI berkonsentrasi untuk mengurusi masalah Kamtibmas"[300].

Perlu diperhatikan juga bahwa pertahanan dan keamanan dalam negeri adalah merupakan sub-sistem keamanan nasional. Pada dasarnya masalah keamanan dalam negeri yaitu upaya merespon tindakan pelanggaran hukum dalam rangka penegakkan hukum. Sebaliknya fungsi pertahanan pada dasarnya merupakan fungsi menghadapi ancaman dari luar negeri yang mangancam kedaulatan dan integritas negara. Namun menurut TSO, TNI yang sudah disiapkan dalam fungsi pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri saja,

> "TNI juga digunakan untuk mengatasi persoalan pertahanan yang timbul akibat permasalahan dari dalam negeri. Pada era saat ini telah diatur tentang ketentuan-ketentuan permintaan bantuan militer dan pada status apa dilakukannya. Namun dalam pelaksanaanya masih memerlukan piranti lunak yang menjelaskan tentang aturan pelibatan yang lebih rinci dan aplikatif[301].

Berkenaan dengan proses bantuan keamanan TNI, BHK mencontohkan dalam pilkada Tuban. Menurut Besar Harto Karyawan, sebelumnya Bapak Kapolwil memberi paparan dalam rangka mem-*back up* situasi keamanan pilkada Tuban. Lantas disiapkan satuan pengamanan sebanyak 1.750 orang. Unsur-unsur yang terkait diantaranya Linmas, Kepolisian, dan TNI (dalam hal ini diminta oleh Polri). Dalam peristiwa pengamanan ini TNI hanya diminta 92 orang yang setara dengan

---

[299] Hasil wawancara dengan Letkol (Inf) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.
[300] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.
[301] Hasil wawancara dengan Letkol (Inf) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.

satu satuan penindak. Padahal di dalam satu ketentuan yang sudah berjalan (tersosialisasi) setidak-tidaknya kekuatan TNI seperlima dari pasukan Polri yang dikerahkan atau sekitar satu SSK[302].

Jumlah aparat Kodim yang berada di Tuban jumlahnya cukup besar yaitu sekitar 400 orang atau sama dengan anggota Polres, maka kalau dilihat dari sisi jumlah, aparat TNI sangat potensial untuk bisa membantu keamanan di Tuban. Akan tetapi menurut BHK aparat Kodim tidak pernah diperhitungkan karena dianggap TNI belum berfungsi dalam pengamanan tersebut[303]. Oleh karena itu dari segi jumlah tidaklah berlebihan kalau BHK menganggap TNI sangat dominan dalam menjaga keamanan di satu wilayah.

Menurut SPO pada dasarnya masalah keamanan dalam negeri yaitu upaya merespon tindakan pelanggaran hukum dalam rangka penegakan hukum. Sebaliknya fungsi pertahanan pada dasarnya merupakan fungsi yang menghadapi ancaman dari luar negeri yang mangancam kedaulatan dan integritas negara. Namun TNI yang sudah disiapkan dalam fungsi pertahanan tidak hanya mutlak digunakan untuk menghadapi ancaman dan luar negeri saja, tidak ada larangan menggunakan TNI untuk masalah dalam negeri yang berdasarkan keputusan politik dengan syarat :

> "Bila wilayah nasional atau sebagian dinyatakan dalam keadaan Darurat Militer atau Perang. Dalam keadaan damai atas keputusan politik ditingkat nasional atau atas permintaan institusi pemilik kewenangan fungsi tersebut dalam hal ini Polri[304].

---

[302] Keterlibatan TNI dalam bidang Keamanan Nasional secara umum: (1) Sebagai komponen utama di bantu oleh komponen cadangan dan pendukung. (2) Bertanggung jawab kepada pemerintah terhadap kedaulatan negara NKRI. (3) Selalu di depan bila ada kelompok/golongan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang syah. Wawancara dengan Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/ Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.

[303] Wawancara dengan Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.

[304] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

Dalam rangka menjembatani penggunaan institusi TNI yang bertugas dalam pertahanan dan keamanan untuk kepentingan pengamanan dalam negeri, secara hukum telah diatur. Walaupun demikian menurut BHK masih perlu penjabaran secara rinci sebagai mana ia ungkapkan, "Pada era saat ini telah diatur tentang ketentuan-ketentuan permintaan bantuan militer dan pada status apa dilakukannya. Namun dalam pelaksanaanya masih memerlukan piranti lunak yang menjelaskan tentang aturan pelibatan *(Rules Of Engagement)* yang lebih rinci dan aplikatif"[305].

Mengenai aturan pelibatan TNI dalam keamanan yang lebih rinci menurut BO masih belum. Oleh karena itu sering terjadi persoalan di lapangan dalam rangka pengamanan wilayah. Padahal gangguan keamanan sekarang ini sudah menjurus pada mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Sementara kalau Polri dituntut untuk kamtibmas bukan untuk perang, tidak untuk melawan *insurgensi*, tapi kalau sudah *insurgensi* lawannya adalah TNI karena sudah terlatih untuk menggunakan senjata untuk itu. Kalau Polisi, yaitu Brimob yang bersenjata itu untuk mendukung kamtibmas manakala diperlukan"[306].

Akan tetapi menurut BHK walaupun demikian TNI akan bertindak sesuai dengan keputusan politik yang telah diambil,

> "Saya kira itu sudah menjadi statemen TNI di dalam melaksanakan tidak mempengaruhi politik yang sedang berjalan, kita wajib mengetahui permasalahan politik di wilayah yang konteksnya dalam rangka menciptakan, membina masyarakat mengarah kepada situasi yang kondusif"[307].

Selanjutnya menurut BHK, ada satu pola penanganan TNI sebagai kesatuan kewilayahan yang tidak dimiliki oleh kepolisian. Deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini itu tidak dimiliki oleh kepolisian. Doktrin kepolisian dia melangkah setelah

---

[305] Ibid.
[306] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[307] Wawancara dengan Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.

kasus terjadi, karena bicara secara hukum. Jadi kalau sudah kejadian baru bertindak. Kalau tentara bertindak agar supaya bagaimana itu tidak terjadi. Di sini konteksnya mengapa TNI menciptakan situasi kondusif sekaligus membantu pemerintah daerah dan kepolisian[308]. Berkenaan dengan pola penangan keamanan TNI, BHK mengungkapkan sebagai berikut:

> "Misalnya kasus kecelakaan, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah itu proses tugas polisi. Tugas TNI kenapa terjadi kecelakaan, mungkin jalannya tikungan banyak batu. Upaya TNI sebagai aparat wilayah mencegah agar supaya tidak kejadian lagi yaitu berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing sesuai dengan keakrabannya, Danramil dengan Camat maupun Polsek. Dandim dengan Bupati, Walikota, dan sebagainya untuk berkoordinasi melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan batu-batu maupun pasir di jalan tadi agar tidak licin, itu merupakan kewenangan TNI dalam rangka membantu menciptakan situasi kondusif"[309].

BO mengumpamakan fungsi teritorial TNI sebagaimana layaknya mata, hidung dan telinganya Departemen Pertahanan (Dephan). Menurut BO, Dephan sangat perlu ada mata dan telinga di setiap Wilayah. Pemahaman didasari pada kenyatan akan keterbatasan Dephan dalam menjangkau wilayah-wilayah di tanah air yang sangat luas. Sebagaimana ia ungkapkan:

> "Untuk bisa semacam itu yang mengelola pusat. Mestinya Departemen Pertahanan yang adanya di sebuah ibu kota negara. Padahal pertahanan negara tidak hanya di Jakarta. Di setiap jengkal dari ujung sampai ke ujung. Kalau misalnya mata Dephan yang ada di wilayah tidak ada, dibubarkan, maka sekarang yang ada kantor Dephan di Jakarta saja. Apakah dengan pertahanan yang di jalan Merdeka itu bisa mempertahankan tanpa punya mata, sehingga wilayah yang mampu menjangkau seluruh wilayah menjadi tanggung jawab Dephan dalam konteks pertahanan kedaulatan negara. Ini yang mungkin belum dipahami"[310].

Berkenaan dengan peran Komando teritorial dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, menurut BO karena teritorial mempunyai lima kemampuan sebagai mana ia ungkapkan:

"*Satu*, Deteksi dini dan cegah dini. Saya bilang deteksi dini ini terhadap

---

[308] Wawancara dengan Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.
[309] Wawancara dengan Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.
[310] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.

> permasalahan-permasalahan yang bisa mengurangi kesiapan dalam rangka pertahanan. Misalnya, Babinsa jalan-jalan mengetahui busung lapar dan itu cepat diatasi. Selain itu jika ada permasalahan air, dsb. Itu merupakan deteksi Babinsa yang nantinya juga untuk masyarakat. *Kedua*, kemampuan manajemen teritorial. Ada batas tatarannya kalau pada level Babinsa misalnya, paling tidak mereka harus mampu merencanakan, mempersiapkan dan mengelola semua sumber daya yang ada di desa untuk kepentingan pertahanan di desa itu. *Ketiga*, kemampuan penguasaan wilayah. Artinya seorang Babinsa itu harus mengetahui secara mendalam tentang wilayah desa. *Keempat*, kemampuan pembinaan perlawanan rakyat. *Kelima*, kemampuan komunikasi sosial. Kita dalam mempertahankan negara perlu suatu kesertaan masyarakat, satu wawasan nasional tidak wawasan politik. Perlu pendekatan, kalau dulu kita bisa langsung sospol sekarang tidak. Jadi berkomunikasi biar ada kesadaran diantara kelompok itu tidak ribut. Demokrasi pun jalan. Yang penting saling mendukung kepentingan wilayah bersama"[311].

2. *Masalah keberadaan komando kewilayahan*

Sama halnya fungsi teritorial, Subyek Penelitian bersikukuh bahwa TNI harus ada di dalam struktur kewilayahan seperti halnya pemerintahan sipil. Termasuk penolakan terhadap pendapat bahwa tentara harus berada di barak. Sebagaimana yang diungkapkan SPO:

> "... Tuntutan untuk kembali ke barak dan pembubaran Koter harus dicermati konteksnya. Karena Koter merupakan salah satu perwujudan gelar TNI AD dalam rangka menyiapkan kekuatan juang yang tangguh demi terciptanya ketahanan nasional, sesuai Doktrin Sishanta yang kita anut, menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung"[312].

Menurut BHK, tuntutan agar Koter-koter dibubarkan itu hanya alasan orang-orang yang punya kepentingan terhadap TNI dan bangsa ini. Disamping itu menurutnya kenapa bangsa ini sekarang banyak mengalami keretakan-keretakan itu karena diciptakan oleh orang-orang yang punya kepentingan pada bangsa ini, perpecahan itu memang sudah diciptakan. Secara lengkap ia mengungkapkan sebagai berikut:

> "... Belajar dari sejarah bahwa kita pernah menjadi negara besar misalnya pada waktu Majapait. Wawasan kita muncul kembali tahun 1908 Budi Utomo berdiri, kita

[311] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[312] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

> menyatakan tekat pada tahun 1928, kita menyatakan tekad merdeka atau mati mengusir penjajah dari bumi Indonesia 17 Agustus 1945 setelah dijajah tiga setengah abad. Indonesia baru bisa membangun bangsa ini setelah tahun 1965, sebelumnya tahun '65 ke bawah isinya konflik-konflik dalam negeri. Selama dari tahun 1965–1985 dari negara terbelakang menjadi negara berkembang dan masuk ke negara industri. Ini kan suatu percepatan bangsa yang luar biasa".
>
> "Bagi negara yang mempunyai kepentingan terhadap negara ini bahaya kalau Indonesia dilepas dengan segala potensinya, sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya dan menjadi negara super power. Untuk itu ada pemikiran-pemikiran bagaimana menghancurkan dari dalam melalui ideologi, politik, maupun sosial budaya. Sekarang apa yang tidak terjajah, tinggal belum diduduki secara fisik, tapi aspek-aspek penjajah sudah di dalam tubuh kita. Sekarang saya sebagai generasi muda TNI apa yang bisa saya banggakan dengan amunisi yang sangat terbatas dan anggaran yang sangat minim sekali"[313].

Pandangan SPO, AS, menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan masalah Komando Teritorial ini, sebagai berikut:

> "*Pertama,* masih relevan dihadapkan dengan proses operasi keamanan yaitu Sishan rata. *Kedua,* sudah terbukti dalam sejarah sebagai ujung tombak bila ada masalah sara, dll. *Ketiga,* sebagai stabilisator keamanan di wilayah-wilayah rawan konflik dan perbatasan. *Keempat,* sebagai satuan untuk bersandar satuan tempur yang melaksanakan tugas ofensif dan defensif"[314].

Begitupun pemahaman TSO yang menyatakan bahwa eksistensi Kodim masih diperlukan, apalagi untuk daerah-daerah rawan. Apabila Kodim dibubarkan bisa dipastikan daerah tersebut akan bubar[315]. Walaupun demikian, menurut SPO fungsi komando teritorial pada masa sebelum dan sesudah reformasi sudah sangat berbeda. Di masa lalu, pembinaan potensi nasional di daerah untuk mendukung upaya pertahanan nasional dilaksanakan langsung oleh TNI melalui Apter (Aparat Teritorial) di daerah. Oleh karena itu dengan adanya perubahan-perubahan struktur pasca reformasi, maka dilakukan penambahan yang lebih demokratis dengan upaya

---

[313] Wawancara dengan Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu pada tanggal 25 Januari 2005.
[314] Wawancara dengan, Letkol (Inf) Aris Suhardiono, Kababinminvetcadam V/Brw, Kasrem 083/ Baladika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.
[315] Hasil wawancara dengan Letkol (Inf) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.

transformasi fungsi teritorial yang semula sebagai salah satu fungsi TNI menjadi fungsi pemerintahan"[316].

Oleh karena itu maka menurut SPO dengan adanya perubahan fungsi Koter ini tidak perlu berimplikasi pada pembubaran Koter itu sendiri.

> "Pengalihan fungsi pembinaan teritorial tidak harus mengandung konsekuensi pembubaran Koter, karena Koter masih diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pertahanan di daerah. Visualisasi Koter adalah Koter sebagai gelar kekuatan TNI terdepan di daerah-daerah untuk melaksanakan fungsi pertahanan nasional yaitu sebagai induk dan penyangga awal serta pelatih rakyat"[317].

Terkait dengan pemahaman pentingnya koter untuk dipertahankan, Kolonel Budiharjo (BO) menyampaikan bahwa pertahanan riel itu ada di daerah. Sementara Departemen Pertahanan itu kedudukannya ada di pusat. Padahal menurut BO, pertahanan negara tidak hanya di Jakarta, disetiap jengkal dari ujung sampai ke ujung. BO mengibaratkan Koter adalah mata Departemen Pertahanan:

> "Kalau misalnya mata Dephan yang ada di wilayah tidak ada. Dibubarkan. maka yang ada tinggal kantor Dephan di Jakarta saja. Apakah dengan pertahanan yang di jalan Merdeka itu bisa mempertahankan tanpa punya mata, sehingga wilayah yang mampu menjangkau seluruh wilayah menjadi tanggung jawab Dephan dalam konteks pertahanan kedaulatan negara adalah sistem pertahanan. Ini yang mungkin belum dipahami"[318].

Bagi Pertahanan Negara, menurut BHK, Komando Kewilayah sangat penting karena disamping punya satuan wilayah juga punya satuan penindak:

> "Pasukan satuan wilayah punya sampai korem. Korem itu dikatakan sub kompartemen Strategis. Korem mempunyai satuan penindak, jadi ada 2 pergerakan satuan, yaitu: satuan wilayah dan satuan penindak yang terdiri dari sanpur, banpras korem (Badan Prasarana Korem). Sedangkan kodam kompartemen strategis. Di kodam bala korem unsur administrasinya seperti bekang, denpan itu dilengkapi. Kalau tingkat kodim kebawahnya tidak, murni satuan kewilayahan. Tapi kalau korem membawahi kodim dan batalion. Babinsa itu ujung tombak di kewilayahan"[319].

---

[316] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.
[317] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.
[318] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[319] Wawancara dengan Letkol (Inf) Besar Harto Karyawan, Kasrem 084 Bhaskara Jaya, Dandim 0818 Malang dan Batu.

Oleh karena itu menurut BO, sekarang ini perlu merubah potensi yang dimiliki menjadi kekuatan untuk kepentingan negara. Ia juga mengemukakan bahwa kekuatan negara tidak hanya persenjataan saja, tetapi transportasi, obat-obatan, telekomunikasi yang bersifat kewilayahan juga mempunyai daya guna yang tinggi untuk kepentingan pertahanan.

> "Sekarang kita mau mengacu ke negara mana? Amerika? Ada gangguan disini, rudal sudah bisa sampai, pesawat sudah bisa sampai. Sedangkan kita belum, maka harus ada orang di situ. Rudal, pesawat, fungsinya digantikan oleh orang itu. Maka perlulah mata, telinga, untuk berperan sebagai penangkal. Kalau itu ditarik, maka Dephan di Jakarta tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sistem ketahanan negara, artinya ketata-negaraan kita pincang dari sistem pertahanan negara. Subsistem itu yang lemah. Nah, ini yang perlu pemahaman"[320].

Mengenai pentingnya Komando Teritorial untuk tetap dipertahankan, BO menyampaikan:

> "Sekarang ada pergeseran spektrum ancaman, kalau dulu dari luar negeri. Karena itu sekarang kenapa [kekuatan militer terpusat] di Jawa. Karena Jawa lebih padat. Kini ancaman bangsa ini tidak hanya dari luar tetapi dari dalam juga. Sekarang ini persoalan keamanan tidak hanya melulu di Jawa tapi juga di perbatasan".

Maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan ancaman ini, menurut Budiharjo ada pengembangan-pengembangan Divisi, pengembangan Brigade. Disamping jangka panjangnya kalau perang berlarut, maka ancaman-ancaman yang non-militer itu juga bisa diredam. Berkenaan dengan kondisi keamanan di perbatasan ini, selengkapnya BO mengemukakan:

> "....sejak awal melalui cegah dini itu dengan menggunakan pasukan kewilayahan. Pasukan-pasukan ini mem-*back up,* melihat permasalahannya.Tapi ada pasukan yang siaga, begitu polisi minta membantu di samping pasukan yang berbasis di Jawa ini, diproyeksikan penugasan ke perbatasan Irian setiap tahun. Karena di sana belum siap pangkalan penugasannya seperti Posko setahun kembali, atau semacam markas pinjaman"[321].

SPO menyebutkan bahwa pada periode pasca reformasi, tentara benar-benar meninggalkan panggung politik praktis. Hal ini ditengarai dengan

[320] Ibid.
[321] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.

ditiadakannya jatah kursi di badan legislatif dan dihapuskannya *cabang - cabang politik* seperti Bakortranas dan badan kekaryaan ABRI. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa TNI akan tetap konsisten terhadap UUD 1945 dan pancasila untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI siapapun kepala pemerintahannya[322].

Dikemukakan oleh SPO, menurutnya yang dimaksud kembali ke barak, bukan dalam arti bahwa TNI meninggalkan wilayah teritorial. Yang dimaksud kembali ke barak adalah meninggalkan peran dan fungsi dalam kegiatan politik praktis.

Proses adaptasi di lapangan terhadap tugas dan fungsi baru bidang teritorial dilakukan dengan cara tetap melakukan berbagai aktivitas kemasyarakat. Akan tetapi aktivitas kemasyarakatan tersebut tidak lagi punya pretensi politik maupun keamanan. Hal ini semata untuk kepentingan pertahanan dimasa mendatang. Dengan demikian TNI tidak lagi banyak melibatkan diri pada urusan pilitik dan keamanan secara langsung, dalam arti terlibat dalam mengawasi akitivitas masyarakat seperti yang dilakukan inteljen teritorial pada masa sebelum reformasi.

> "Kita arahkan fungsi komando kewilayahan misalnya untuk penghijauan. Untuk apa itu penghijauan puluhan hektar. Jangka panjangnya memang ya kita numpang dengan proses itu, tetapi untuk jangka pendek bisa mencegah terjadinya bencana. Kalau mempertahankan kondisi tanah, memelihara kesuburan, sumber air, pasukan akan mendapatkan tempat yang bagus untuk berlindung. Kita memilih daerah itu untuk berlindung dari intaian udara dan sumber airnya bagus sehingga bisa *survive*"[323].

[322] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.
[323] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.

D. Masalah Supremasi Sipil

Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) terungkap bahwa Subyek Penelitian mempunyai pemahaman yang khas mengenai supremasi sipil. Mereka menganggap dengan adanya supremasi sipil berarti militer berada di bawah sipil. Dalam sanggahannya mengenai supremasi Sipil TSO misalnya menyatakan: "Tidak bisa kalau TNI di bawah sipil atau sebaliknya, tetapi lebih baik pada sama-sama sebagai komponen bangsa. Siapapun yang menjadi pimpinan pemerintahan (pusat dan daerah), TNI mendukung. TNI mendukung program-progam yang ditetapkan sepanjang tidak merugikan orang banyak"[324].

Akan tetapi setelah ditanyakan mengenai supremasi apa yang seharusnya ada di Indonesia, mereka sepakat bahwa supremasi yang pelu dijunjung tinggi adalah supremasi hukum. Kalau melihat apa yang mereka kemukakan mengenai adanya pemahaman yang "khas" ini, pada dasarnya TNI secara individu ada kecenderungan memaknai negatif dengan kata-kata sipil. Bahkan ketika berbicara mengenai kepemimpinan sipil tampak jelas bahwa Subyek Penelitian menunjukkan pemaknaan negatif tersebut[325]. Mereka menganggap kepemimpinan sipil cenderung korup dan tidak disipilin. Oleh karena itu menurut TSO kepemimpinan sipil dalam menjalankan pemerintahan diharapkan dapat dijalankan sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi dan mengikuti prosedur ketatanegaraan sebagaimana yang berlaku di alam demokrasi[326].

---

[324] Hasil wawancara dengan Letkol (Inf) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.

[325] Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan para Perwira Menengah pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006.

[326] Pada awal "Orde Reformasi" yang terjadi justru kepemimpinan sipil sangat kental diwarnai dengan adanya euforia sehingga terdapat kecenderungan memimpin dengan cara aji mumpung sehingga seolah-olah harus diciptakan hegemoni kekuasaan sipil atas militer. Kondisi demikian apabila tidak segera disadari justru akan berkembang menjadi penyalahgunaan militer untuk kepentingan kekuasaan

> "Ironisnya, dengan tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun perlu kita akui secara jujur bahwa kinerja kaum sipil dalam mengelola negara belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak sedikit partai-partai politik yang belum profesional dan bahkan banyak diantara mereka yang terlibat konflik internal dan kurang memperhatikan para konstituennya. Tidak sedikit lembaga-lembaga demokrasi yang justru terlibat kasus-kasus korupsi, termasuk KPU, anggota DPR serta beberapa pimpinan daerah"[327].

Mereka menilai semenjak reformasi, dan kepemimpinan diserahkan kepada sipil banyak terjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Menurut SPO walaupun secara *de facto* dan *de jure* telah menyatakan bahwa NKRI merupakan bentuk yang paling sesuai dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia, namun berbagai permasalahan disintegrasi bangsa yang dipicu dari segala aspek. Banyak terjadi pemaksaan kehendak dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.

Menurut SPO disamping NKRI merupakan bentuk yang paling sesuai dengan kondisi Bangsa dan Negara Indonesia, juga secara konstitusional sudah merupakan sesuatu yang final[328]. Sementara berbagai pertentangan yang ada antar kelompok, menurutnya merupakan tuntutan-tuntutan yang timbul dari adanya perubahan dan globalisasi. Dan hal ini berujung pada banyak terjadinya pemaksaan kehendak dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Untuk itu ia mengingatkan "...hal ini tidak boleh terjadi yaitu suatu cara dalam melakukan perubahan 'yang dipaksakan' dengan tidak melihat kondisi yang ada"[329].

Oleh karena itu menurut SPO bangsa Indonesia perlu meningkatkan perasaan nasionalismenya:

> "... perlu kiranya dibudayakan wawasan kebangsaan yang barangkali tergolong cukup ekstrem yaitu *'right or wrong is my country'* artinya bahwa setiap

---

atau oleh penguasa sipil. Hasil wawancara dengan Letkol (Inf) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.

[327] Hasil wawancara dengan Letkol (Inf) Tri Suwandono, Dandim 0833 Kota Malang, pada tanggal 25 Maret 2005.

[328] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

[329] Ibid.

> komponen masyarakat ketika berhubungan dengan pihak luar harus berani mengatakan bahwa "ini adalah Indonesiaku" walaupun ketika berada di dalam harus juga berani memberikan koreksi dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan bersama"[330].

E. Masalah Bisnis dan Yayasan

Para perwira menyadari bahwa masih kental terasa TNI memiliki bisnis lain yang dapat mengganggu tugas pokoknya. Namun kedepan akan lebih efektif lagi apabila TNI tidak terlibat dalam bisnis-bisnis besar terutama yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan prajurit. Namun apabila masih berkaitan dengan kepentingan TNI dan prajurit, perlu ada pemikiran bagaimana konsep penyelenggaraanya agar tidak mengganggu tugas pokok TNI[331].

Berekenaan dengan keterlibatan TNI dalam bisnis, AS yang menjabat Kapuskopad itu menyatakan: "Sebagai institusi tidak boleh. Tetapi pribadi, perorangan saya pikir tidak masalah karena mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain"[332]. Sementara menurut SPO keterlibatan TNI secara institusional dalam bisnis sebenarnya akibat kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan TNI mendapatkan secara penuh kebutuhan yang diperlukan.

> "Melihat kondisi ekonomi bangsa yang masih belum sempurna maka saat itu TNI mencoba untuk memenuhi kebutuhan internal TNI dengan cara merintis dan mengembangkan modal yang ada kedalam kancah bisnis yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan akan operasional TNI yang masih kurang. Namum hal tersebut lambat laun tidak diikuti oleh upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan standar maupun operasional TNI. Sehingga masih kental terasa TNI memiliki bisnis lain yang dapat mengganggu tugas pokoknya"[333].

Selama masa pemerintahan Orde Baru banyak perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di bidang yang mempunyai keterkaitan dengan peralatan

---

[330] Ibid.
[331] Ibid.
[332] Wawancara dengan Letkol (Inf) Aris Suhardiono, Kababinminvetcadam V/Brw, Kasrem 083/ Baladika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.
[333] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.

dan persenjataan untuk kepentingan TNI, seperti PT. Pindad dan PT. PAL. Menurut SPO kedepan, kalaulah bisnis yang lain tidak memungkinkan maka bisnis yang punyai keterkaitan dengan kepentingan TNI inilah yang harus dikembangkan. Menurutnya, bisnis persenjataan ini sangat menguntungkan seperti halnya Amerika Serikat yang menjual senjata ke mana-mana. Berkenaan dengan bisnis persenjataan ini Suko Purwantoro mengatakan sebagai berikut:

> "... misalnya Pindad yang buat senjata, tapi masih ada ikatan dengan luar dikarenakan ada komponen tertentu yang haru masih dari luar. Yang produk TNI untuk kebutuhan TNI yaitu pindat itu. PAL sebetulnya badan milik TNI tapi bisa dimanfaatkan untuk itu"[334].

> "Kita kembali ke Undang-undang tersebut, seperti contoh orang Amerika [Serikat] jual senjata kemana-mana 'kan itu bisnis juga. Pasti militer lah walaupun namanya bukan militer di sana tapi masih di bawah suatu bisnis militer. Kita tidak boleh berbisnis tapi tidak diimbangi dengan anggaran, padahal bisnis militer sangat menguntungkan"[335].

Sudah dikemukakan di depan bahwa Subyek Penelitian merasakan kondisi kesejahteraan prajurit maupun kondisi biaya operasional TNI masih jauh dari standar. Terkait dengan itu dalam memahami persoalan bisnis TNI haruslah hati-hati. Hal ini bisa dipahami karena belum ada jaminan dari negara apabila TNI baik secara individu maupun secara institusi akan mendapatkan perhatian penuh untuk membangun profesionalisme dilihat dari kesejahteraan prajurit maupun biaya operasional TNI.

Dengan melihat kenyataan tersebut, berkenaan dengan bisnis TNI, SPO secara pribadi apabila bisnis itu untuk mensenjahterakan prajurit atau untuk kepentingan TNI tidak keberatan. "...apabila bisnis itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit kenapa tidak? Paling tidak bisa bantu-bantu pengadaan ATK [alat tulis kantor] lah!"

---

[334] Wawancara dengan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Budihardjo, pada tanggal 24 Maret 2006.
[335] Ibid.

Terkait dengan yayasan-yayasan yang ada di lingkungan TNI, Subyek Penelitian mempunyai pemahaman yang hampir sama. Pada umumnya mereka memahami yayasan-yayasan itu sebagai sesuatu hal yang wajar karena punya manfaat yang besar bagi prajurit TNI. "Ada sebagian yayasan yang benar-benar menyentuh hajat keluarga prajurit TNI. Seperti halnya koperasi prajurit dan pendidikan keluarga prajurit", demikian SPO memberi alasan[336]. Alasan yang sama dikemukakan oleh TSO. Selanjutnya dicontohkan:

> "... satuan-satuan TNI yang tersebar dimana-mana dan jauh dipelosok maka tidak ada satu kelompok masyarakatpun yang mencoba melihat bagaimana kebutuhan hidup dipelosok tersebut, bagaimana pendidikan putra-putri prajurit yang berada digaris depan yang seharusnya seorang prajurit tidak terbebani dengan masalah tersebut selama di medan tugas"[337].

Hal senada juga dikemukakan oleh Letkol (Inf) Suko Purwantoro,

> "Dapat dibayangkan, dengan lokasi satuan-satuan TNI yang tersebar di mana-mana dan jauh di pelosok maka tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang mencoba melihat bagaimana kebutuhan hidup dipelosok tersebut. Bagaimana pendidikan putra-putri prajurit yang berada di garis depan, yang seharusnya seorang prajurit tidak terbebani dengan masalah tersebut selama di medan tugas"[338].

Oleh sebab itu menurut AS, yayasan yang ada di lingkungan TNI masih diperlukan. Terutama selama pemerintah belum dapat memberikan kesejahteraan prajurit dengan memadai. Paling tidak setara dengan negara-negara tetangga seperti negara-negara Asean. Bila prajurit sudah sejahtera dengan sendirinya yayasan akan tidak ada lagi karena TNI menyadari tugas pokoknya hanya untuk menjaga keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Bukan mengurusi yayasan apalagi berbisnis[339].

---

[336] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.
[337] Ibid.
[338] Wawancara dengan Letkol (Inf) Suko Purwantoro, Danyon Armed 512 Brawijaya, pada tanggal 9 Desember 2005.
[339] Wawancara dengan Letkol (Inf) Aris Suhardiono, Kababinminvetcadam V/Brw, Kasrem 083/ Baladika Jaya pada tanggal 10 Agustus 2005.

BAB VII

TEMUAN, KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

Sebelum melangkah ke bagian temuan penelitian penulis memandang perlu terlebih dahulu memberi sedikit kilas balik mengenai langkah-langkah yang dilakukan hingga mencapai hasil temuan penelitian. Penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya terdiri dari dua gugus penelitian. Penelitian pustaka (*letterer research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Dalam penelitian pustaka penulis telah mencoba merekonstruksikan berbagai konsep dan postulat tentang profesionalisme militer secara umum yang bersifat **nomotetis**, yang berasal dari para ilmuwan dan ahli militer; di samping yang bersifat **ideografis** yaitu pandangan, gagasan dan pemikiran tentang profesionalisme TNI yang berasal dari kalangan pendiri dan tokoh intelektual TNI baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih dinas aktif. Temuan dari pengkajian pustaka tersebut telah di sajikan dalam Bab II, dan Bab III. Sesuai prosedur penelitian fenomenologi, temuan-temuan teoritik tersebut ditahan semantara di dalam kurung *(bracketing theory)*.

Sedang penelitian lapangan menghasilkan data atau informasi berupa pemahaman Subyek Penelitian di sekitar tema utama yaitu mengenai profesionalisme militer. Penyajian data atau informasi tersebut berikut analisisnya dituangkan dalam tiga bab, yaitu Bab IV, Bab V, dan bab VI.

Dari hasil penelitian lapangan terdapat empat temuan utama, yang dapat dikemukan sebagai berikut:

1. *Temuan I:* **Terdapat "Realitas Sosial Kemiliteran" yang terpola**

Realitas Sosial Kemiliteran yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berupa realitas kompleks yang berputar dan mengembang searah dengan perjalanan karir para Subyek Penelitian. Putaran tersebut dimulai tatkala mereka akan memasuki pendidikan hingga dinas aktif pada saat ini. Masa sebelum memasuki pendidikan militer tersebut penulis menyebut sebagai: "Realitas Sosial Ke-keluarga-an" (Reskel). Pada masa Subyek Penelitian mengikuti pendidikan militer penulis menyebut sebagai "Realitas Sosial Pendidikan Militer" (Resdikmil) sedangkan ruang dan waktu mereka menjalankan tugas-tugas penulis menyebut sebagai "Realitas Sosial Penugasan" (Restu).

Resdikmil terdiri dari Pendidikan Pertama (Dikma), dan atau Pendidikan Pembentukan (Diktuk) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang). Dikbang terbagi dua yaitu Dikbang spesialisasi (Dikbangspes) dan Umum (Dikbangum). Realitas Sosial Penugasan (Restu) terbagi ke dalam empat medan yaitu tugas di pasukan, tugas operasi, tugas di lembaga pendidikan dan tugas kewilayahan.

Sudah barang tentu bentangan Realitas Sosial Obyektif (RSO) yang sesungguhnya mereka alami tidak selinier dalam skema ini. Artinya di samping realitas sosial yang terskemakan ini sebetulnya keberadaan RSO-RSO tersebut jauh lebih kompleks. Adalah diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengungkap secara lebih terang mengenai kompleksitas Realitas Sosial Obyektif (RSO) tersebut.

Berikut ini adalah skema realitas sosial obyektif sebagaimana dimaksud dalam deskripsi di atas.

Gambar 2

SKEMA REALITAS SOSIAL OBYEKTIF

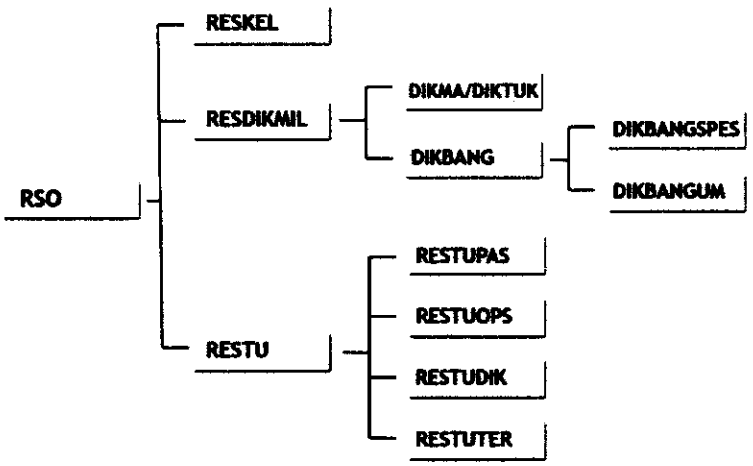

KETERANGAN:

RSO	= Realitas Sosial Obyektif
RESKEL	= Realitas Sosial Keluarga
RESDIKMIL	= Realitas Sosial Pendidikan Militer
DIKMA	= Pendidikan Pertama
DIKTUK	= Pendidikan Pembentukan
DIKBANG	= Pendidikan Pengembangan
DIKBANGSPES	= Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
DIKBANGUM	= Pendidikan Pengembangan Umum
RESTU	= Realitas Sosial Penugasan
RESTUPAS	= Realitas Tugas Pasukan
RESTUOPS	= Realitas Tugas Operasi
RESTUDIK	= Realitas Tugas Pendidikan
RESTUTER	= Realitas Tugas Teritorial

2. *Temuan II:* **Terdapat pola perkembangan profesionalisme militer di kalangan elit TNI AD, dengan ciri-ciri sbb.:**

(1) Embrio atau bibit-bibit profesionalisme TNI terjadi semenjak mereka berada dalam realitas sosial ke-keluarga-an *(social kindship)* melalui *significant other(s)* ataupun melalui *significant accident* tertentu. Pada saat itu kesadaran diri *(self)* Subyek Penelitian mulai terarah kepada dunia kemiliteran.

(2) Pembentukan pertama terjadi dalam realitas sosial pendidikan militer. Yaitu pada saat Subyek Penelitian mengikuti pendidikan akademi militer

(AKMIL/AKABRI). Pada fase ini peranan para pendiri dan perintis TNI sebagai *role model* sangat penting. Terutama Jenderal Soedirman. Panglima TNI pertama ini ditempatkan sebagai *legendary significant other*. Sedang para Gadik dan Gumil berperan sebagai *real significant other*. Adapun tiga komponen kurikulum di akademi militer yang meliputi: pembentukan sikap dan perilaku, transfer pengetahuan dan ketrampilan, serta pembinaan jasmani sebagai instrumen pembentukan profesionalisme TNI tersebut.

(3) Tahap pembentukan lanjutan profesionalisme TNI terjadi dalam berbagai pendidikan pengembangan dan berbagai penugasan, di mana antara pendidikan pengembangan dan penugasan-penugasan tersebut di alami oleh Subyek Penelitian secara silih berganti.

(4) Selama menempuh pendidikan, khususnya pendidikan pertama Subjek Penelitian lebih berposisi sebagai pribadi yang ditentukan *(diterminated)*. Posisi itu berubah, yaitu berperan sebagai aktor (sosial) militer ketika yang bersangkutan memasuki realitas-realitas (sosial) penugasan.

Melalui fase-fase sebagaimana tersebut dia atas lah, setahap demi setahap puncak kematangan jari diri *(self identity)* Subyek Penelitian sebagai TNI profesional pada akhirnya dapat dicapai.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang telah dideskripsikan tersebut di atas berikut ini adalah visualisasi tentang bagaimana tahapan-tahapan pola pembentukan profesionalisme TNI tersebut terjadi sebagaimana dapat dilihat dalam model di bawah ini:

Gambar 3

MODEL POLA PERKEMBANGAN PROFESIONALISME TNI

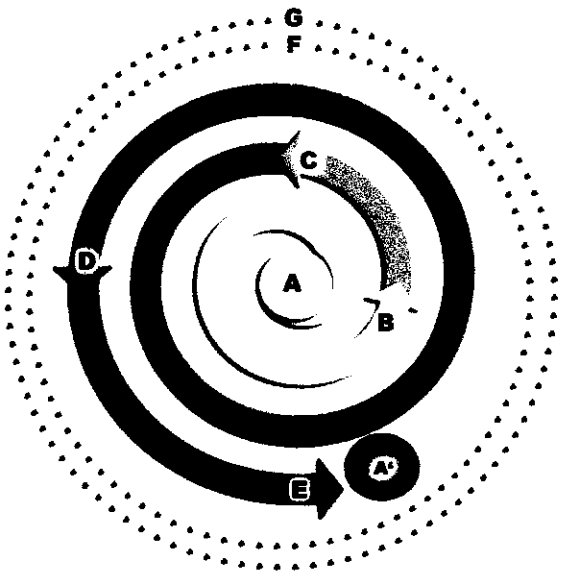

KETERANGAN:

A-B = Keluarga
B-C = Akademi Militer (Akmil)
C-D = Penugasan dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang)
D-E = Penugasan
A-E = Realitas Kesadaran Subyektif (RKS)
F = Realitas Historis
G = Realitas Sosial Obyektif (RSO)

3. *Temuan III:* **Pemahaman mengenai profesionalisme militer terjadi dalam sebuah dialektika yang kompleks, antara Realitas Sosial Obyektif (RSO) kemiliteran di satu sisi dengan Ruang Kesadaran Subyek (RKS) elit TNI AD di sisi lain.**

Di antara dua entitas tersebut ada momen yang simultan berupa internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi terjadi dari arah Realitas Sosial Obyektif ke Ruang Kesadaran alit TNI AD. Sebaliknya eksternalisasi terjadi dari Ruang Kesadaran elit TNI AD ke arah Realitas Sosial Obyektif kemiliteran. Dalam Proses dialektika tersebut telah menciptakan gradasi tiga Realitas Sosial Obyektif kemiliteran yaitu Mikro, Mikro-Makro dan Makro; di mana gradasi

tersebut juga merefleksikan adanya gradasi pemahaman di dalam Ruang Kesadaran Subyektif elit TNI AD.

Pertama, penulis sebut sebagai "Realitas Obyektif Mikro" yaitu berupa dunia sosial TNI yang diciptakan bersama-sama dalam momentum obyektivasi yang hampir sepenuhnya dilakukan oleh para aktor elit TNI. Realitas ini sudah dengan sendirinya juga merefleksi ke dalam ruang kesadaran aktor elit TNI AD dalam bentuk ruang kesadaran mikro.

Kedua, penulis sebut sebagai "Realitas Obyektif Mikro-Makro" dimana realitas ini posisinya berada dalam persilangan, sebagian berada dalam dunia sosial TNI dan sebagian yang lain sudah berada di luarnya. Realitas obyektif ini dicirikan antara lain oleh andilnya aktor-aktor sosial diluar TNI yang ikut berekspresi ke dalam wilayah yang pada dasarnya lebih merupakan *domain* dari dunia sosial TNI. Konsekuensinya realitas ini juga merefleksi pula ke dalam ruang kesadaran elit TNI AD dalam bentuk ruang kesadaran mikro-makro.

Ketiga, penulis sebut "Realitas Obyektif Makro", yaitu dunia sosial dimana andil para aktor elit TNI hanyalah menjadi bagian sangat kecil diantara keterlibatan aktor-aktor sosial yang lain, yang secara kolektif melakukan eksternalisasi atau ekspresi dalam dunia sosial keseluruhan *(the whole of social world)*. Dan bagaimanapun realitas ini juga memantul ke dalam ruang kesadaran aktor elit TNI AD dalam bentuk ruang kesadaran makro.

Diskripsi mengenai proses dialektika yang terjadi antara realitas sosial obyektif dengan ruang kesadaran subyektif sebagaimana tersebut di atas, dapat digambarkan dalam sebuah model sebagaimana sebagai berikut:

Gambar 4

MODEL PEMAHAMAN TENTANG PROFESIONALISME MILITER (DIALEKTIKA "REALITAS SOSIAL OBYEKTIF" DENGAN "RUANG KESADARAN SUBYEKTIF")

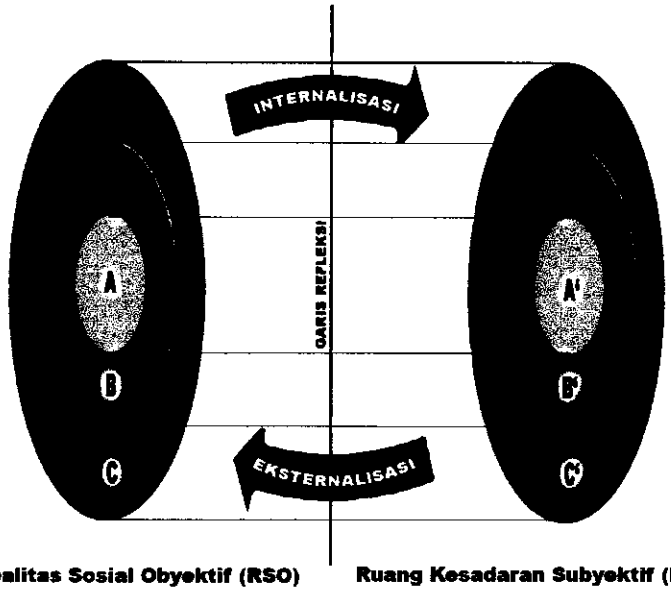

KETERANGAN:

A – Realitas Sosial Mikro	A' – Ruang Kesadaran Mikro
B – Realitas Sosial Mikro-Makro	B' – Ruang Kesadaran Mikro-Makro
C – Realitas Sosial Makro	C' – Ruang Kesadaran Makro

Ke-empat temuan tersebut di atas dapat diulas dengan menggunakan paduann beberapa perspektif teoritis yang ada yaitu: Konstruksi Sosial Berger, Interaksionisme Simbolik Mead, Strukturasi Giddens dan Antropologi Pengalaman Bruner sbb.:

Untuk dapat memahami persoalan dalam perspektif fenomenologi Husserl harus bertitik tolak dari konsep tentang kesadaran; yaitu "Sadar" itu selalu "sadar akan", artinya selalu memiliki intensionalitas atau keter-arah-an *(directedness)* terhadap sesuatu yang tertentu. Kesadaran dalam temuan penelitian ini adalah pemahaman elit TNI AD tentang profesionalisme TNI. Kesadaran tersebut terjadi secara intensif, ekstensif dan terus berlangsung sampai pada bentuk dirinya

menjadi sebuah pribadi *(be that person)* elit TNI AD sekarang ini (pada saat penelitian sedang dilaksanakan). *Be that person* sebagaimana yang disebut oleh Berger ini adalah serupa dengan apa yang disebut dan dikonseptualisasikan secara lebih lengkap oleh Mead dengan istilah Jari Diri *(Self Identity).*

Pada bagian terdahulu sudah disinggung bahwa dalam teori Konstruksi Sosial, Berger menekankan adanya hubungan dialektik antara Realitas Sosial Obyektif (RSO) dengan Ruang Kesadaran Subyektif (RKS). Adapun proses dialektika yang telah terjadi antara Realitas Sosial Obyketif (RSO) dengan Ruang Kesadaran Subyektif (RKS) yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berupa hubungan dialektik antara Realitas Sosial Keluarga (Reskel), Realitas Sosial Pendidikan Kemiliteran (Resdikmil) dan Realitas Sosial Penugasan (Restu) di satu pihak dengan kesadaran elit TNI AD (yang menjadi Subyek Penelitian) di pihak lain. Proses dialektik tersebut terjadi sangat kompleks, namun apabila disederhanakan maka akan tampak adanya pola tertentu. Pola itu adalah, terjadinya internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi lebih cenderung terjadi tatkala RKS masih berada di Reskel dan ketika berada Resdikmil, baik pada saat mengikuti Pendidikan Pertama (Dikma) maupun Pendidikan-pendidikan Pengembangan (Dikbang). Sedang eksternalisasi lebih cenderung terjadi terutama tatkala RKS berada dalam Realitas Sosial Penugasan (Restu) yang meliputi: Realitas Tugas Pasukan (Restupas), Realitas Tugas Operasi (Restusop), Realitas Tugas Pendidikan (Restudik) dan Realitas Tugas Teritorial (Restuter).

Apabila menggunakan perspektif Strukturasi Giddens temuan-temuan penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ada dua jenis entitas yaitu "Struktur" di satu pihak dengan "Agensi" di pihak lain[340]. Struktur di sini adalah berupa "Struktur Sosial Kemiliteran" (Sesosmil) yang dalam hal ini dapat dibuat tiga katagori yaitu: Keluarga Militer (Kemil), Pendidikan Militer (Dikmil) serta Penugasan Militer (Tumil). Sedang entitas agensi adalah terdiri dari para "Aktor Militer"[341] (AM) yaitu para Perwira Menengah TNI-AD (yang menjadi Subyek Penelitian).

Di antara keduanya, yaitu Sesosmil dengan AM ini terdapat faktor lain yang bekerja yaitu apa yang Berger menyebutnya sebagai "dualitas struktur" yang berfungsi membuat titik keseimbangan *(a point of balance)* di antara keduanya yang sama-sama sebagai kekuatan yang saling melengkapi *(complementary forces)*. Dengan bekerjanya faktor dualitas struktur *(structure of duality)* ini membuat Sesosmil (struktur sosial militer) mampu mempengaruhi tingkah laku AM (aktor militer), sebaliknya AM memiliki kemampuan merubah Sesosmil yang mereka diami. Di dalam Kemil (keluarga militer) dan Dikmil (pendidikan militer), Sesosmil lebih berada dalam posisi mempengaruhi bahkan membentuk AM sedangkan di dalam Tumil (tugas militer), AM lah yang menjadikan Sesosmil sebagai medium untuk penciptaan.

Dengan menggunakan perspektif Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Mead dapat diimajinasikan bahwa di dalam *jagad cilik (inner world)* masing-masing elit TNI AD (Subyek Penelitian) itu terdapat apa yang disebut *"self", "I"*

---

[340] Istilah "struktur" mengacu pada faktor-faktor misalnya klas sosial, agama, jender, etnisitas, adat kebiasaan dll. yang nampaknya membatasi, mengekang atau mempengaruhi kesempatan yang dimiliki individu-individu. Istilah "agensi" mengacu pada kapasitas manusia sebagai individu-individu untuk bertindak secara bebas dan membuat pilihan bebas mereka sendiri. (Juga lihat: Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, London: Sage Publications, th. 1994, hal. 11 dan 12.

[341] Giddens menggunakan istilah aktor sosial *(social actor)* dan agensi manusia *(human agency)* secara bergantian untuk pengertian yang sama (Lihat: Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, [edisi bahasa Indonesia], Penerbit Pedati, 2004, hal xxvii).

dan *"Me"*. *"Self"* adalah ruang dan aktivitas yang ada di dalam *inner world* para elit TNI AD, yang secara terus-menerus berusaha mensinergikan dan memelihara harmoni antara *"I" dan "Me"* elit TNI AD yang dari waktu ke waktu dua entitas tersebut terus-menerus mengalami perkerkembangan. Di mana *"I"* adalah sifat-sifat elit TNI AD yang spontan, individual, subyektif, dan bebas. Sedangkan *"Me"* yaitu sikap-sikap elit TNI AD yang terorganisir dan terarahkan kepada orang-orang lain. *"Me"* ini boleh dikatakan sebagai penghubung antara diri elit TNI AD dengan masyarakat luar. *"Me"* ini memiliki sifat-sifat sosial lagi terbatasi *(determinated)*. Dengan menggunakan perspektif Interaksionisme Simbolik, "*Me* Pamen TNI AD" (Subyek Penelitian) ini penulis beri makna sedikit lebih luas sebagai "Jati Diri TNI"[342] yang pada dasarnya –dalam hubungannya dengan penelitian ini—ia adalah pemahaman dan pemaknaan elit TNI AD tentang Profesionalisme TNI. Pemahaman dan pemaknaan tersebut mereka konstruksikan dengan cara "melihat" dirinya sendiri dengan melalui "mata" orang-orang lain yang berada sekitarnya *(to see themselves through the eyes of others)"*. Adapun orang lain tersebut adalah bisa dari kalangan prajurit TNI, terutama para elitnya, tetapi juga orang-orang di luar TNI. *"Me"* inilah yang disebut *self identity* atau jati diri.

Self identity yang sedang menjadi di dalam diri elit TNI AD (Subyek Penelitian) ini bukan anugerah dari lahir, melainkan berkembang melalui komunikasi yang dilakukannya dengan aktor-aktor sosial lain melalui simbol-simbol yang lazim digunakan di kalangan masyarakat militer maupun masyarakat yang lebih luas. Perkembangan Jati Diri TNI itu terjadi dalam dua fase yaitu *play*

[342] Penulis bersandar pada pendapat bahwa *"Me"* itu sama dengan *"Self Concept"* atau juga *"Self Identity"* (Lihat: Gordon Marshal [editor], *A Dictionary of Sociology*, New York: Oxford University Press, 1998).

stage (tahap main-main), dan *game stage* (tahap permainan). Fase main-main cenderung lebih banyak terjadi tatkala Pamen TNI AD masih berada di dunia keluarga, sebelum memasuki pendidikan militer dan kemudian tatkala mereka berada di dalam pendidikan militer khususnya Akademi Militer Magelang. Pada fase *play stage* diperlukan adanya *significant other(s)* yang bertindak sebagai *role-model.* Di dunia sosial keluarga *significant other(s)* tersebut pada umumnya adalah anggota keluarga, terutama ayah atau kakak laki-laki; sedang di dunia pendidikan militer adalah Jenderal Soedirman dan tokoh-tokoh TNI yang lain sebagai *legendary role model*, serta para Guru Militer dan Pelatih sebagai model nyata *(real model)*.

Fase kedua, yaitu tahap permainan (*Game Stage)*. Fase ini cenderung lebih banyak terjadi di dunia penugasan. Dalam fase permainan, dengan merujuk pendapat Herbert Mead, yang sangat diperlukan bukan lagi *significant other(s)*, melainkan *generalized other(s)* –yaitu berbagai individu-individu yang bertindak sebagai Pemain Sosial *(Social Player)*, di samping berbagai status, dan aturan permainan; yang semua itu harus dikenali dan diikuti oleh Pamen TNI AD. Jenis keberagaman itu tergantung pada macam medan tugas yang dijalani. Di medan pasukan misalnya, Pemain Sosialnya relatif homogen yaitu para anggota prajurit dan keluargnya dengan jenis status dan aturan yang relatif sederhana. Beda dengan tugas di teritorial Pamen TNI AD akan berhadapan dengan berbagai *Social Player* yang lebih beragam, begitu juga status dan tata aturan yang ada[343]. Di medan-

[343] Oleh karena itulah dalam tradisi TNI, tugas memimpin teritorial adalah tugas pemantapan, artinya diperuntukkan bagi yang sudah memiliki pengalaman di pasukan. Misalnya jabatan Komandan Batalyon dan Komandan Kodim adalah sama-sama diperuntukkan bagi Pamen TNI AD berpangkat Letnan Kolonel (Letkol). Akan tetapi hampir dipastikan, untuk bisa menjadi Komandan Kodim seorang Letkol harus terlebih dahulu pernah menjabat Komandan Batalyon atau jabatan staf yang setara dengan itu di pasukan.

medan penugasan inilah para Pamen TNI AD membangun dan mengembangkan sikap-sikap dan tingkah lakunya yang terorganisir dan terarah kepada masyarakat keseluruhan. Mereka mencoba menginterpretasikan status yang diberikan dan mengadakan adaptasi diri sesuai dengan status yang diberikan oleh –atau ia *rumangsa (sense)* memperoleh status itu dari– orang-orang lain di sekitarnya. Dengan melalui dua fase –*play stage* dan *game stage*-- ini memungkinkan para elit TNI AD memarasukkan nilai-nilai yang menopang keberadaan masyarakat sekitarnya ke dalam jati dirinya. Baik dalam lingkup kecil yaitu di lingkungan masyarakat militer yang relatif homogin, maupun dalam masyarakat yang lebih luas dan heterogin, bahkan dalam masyarakat bernegara yang kompleks.

4. *Temuan IV:* **Di balik fenomen-fenomen yang dapat diungkap dari ruang kesadaran elit TNI AD, secara refleksif-spekulatif dapat diduga adanya gagasan dan nilai-nilai yang bersifat adikodrati (transendental) yang berada dibaliknya. Gagasan dan nilai-nilai yang dimaksud, penulis sebut sebagai "gagasan dan nilai ksatriya".**

Temuan IV ini diperoleh pada tahap akhir dari penelitian fenomenologi ini. Yaitu tahap mentransendensikan pemahaman-pemahaman tentang profesionalisme TNI yang ada di dalam ruang kesadaran elit TNI AD. Tahap ini dimulai dengan "membuka" gagasan dan pemikiran tentang TNI, yang berasal dari tokoh-tokoh intelektual dan pemikir TNI, yang telah dikonstruksikan sebelumnya, --yang untuk sementara telah "ditahan di dalam kurung" *(Bracketing)*-- untuk dicari hubungan dan sangkut pautnya dengan apa yang ada di dalam ruang kesadaran elit TNI AD (Subyek Penelitian).

Dalam tahap transendental fenomenologi ini, peneliti dengan melakukan aktivitas berpikir reflektif, berusaha menemukan jawaban spekulatif mengenai nilai-nilai yang terdapat di balik fenomen dan pemahaman tentang profesionalisme

militer yang ada dalam ruang kesadaran elit TNI AD (Subyek Penelitian). Yaitu nilai-nilai yang bersifat intrinsik dan transendental.

Tahab ini dapat dikatakan sebagai tahab akhir dari penelitian fenomenologi Husserlian yang tujuan utamanya adalah mengembalikan ilmu-ilmu sosial kepada asal muasalnya yaitu filsafat. Husserl melakukannya untuk mengurangi kuatnya kecenderungan terjadinya "saintifikasi" ilmu-ilmu sosial akibat pemakaian metode-metode kealaman dalam studi ilmu sosial, yang membuat ilmu sosial menjadi positivistik dan supervisial.

Adapun nilai transendental yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berupa gagasan kekuasaan *(power of idea)* yang berasal dari apa yang di dalam konsep sub-budaya bangsa Indonesia masa lalu (untuk tidak menyebut budaya Jawa) disebut sebagai "Ksatriya". Memang, konsep ksatriya atau istilah sejenis – antara lain *worrior* (Barat), *Samurai* (Jepang)-- bukanlah hanya dikenal dalam khasanah budaya Indonesia. Di kalangan bangsa-bangsa lain juga mengenal konsep tersebut. Namun secara substansi masing-masing sangat dipengaruhi oleh budaya dimana konsep itu berkembang. Demikian pula halnya konsep "Kstariya" dapat dikatakan sebagai khas budaya Indonesia.

Di dalam Tabel 5 di bawah ini penulis mencoba menyajikan ikhtisar mengenai bagaimana nilai-nilai kstariya yang semula merupakan landasan etik bagi para prajurit-prajurit bangsa Indonesia masa lalu kemudian tertransformasikan ke dalam etika tentara Indonesia modern (TNI). Sedangkan Matrik 2 berusaha membuat ikhtisar mengenai penjelmaan nilai-nilai ksatriya tersebut sehingga menjadi bagian integral dari nilai profesionalisme tentara Indonesia modern.

Tabel 5

TRANSFORMASI NILAI-NILAI KSATRIYA DALAM DIRI TNI

ASPEK	NILAI KSATRIYA	DOKTRIN TNI
Cara-cara memperoleh dan memelihara kekuatan/kekuasaan	1. **Unifikasi.** Mempersatukan pasangan berlawanan atau *binary opposition (manunggaling kawulo lawan gusti).* 2. **Sentripetal - integralistik** Penyatuan dan pemusatan bermacam-macam energi yang terpencar. 3. Melakukan *pati rogo, mesu budi, tapa brata*[344].	1. **TNI sebagai Tentara Rakyat.** Memanunggalkan diri bersama rakya, membela kepentingan rakyat. 2. **TNI sebagai Tentara Nasional.** Keutuhan Negara Kesatuan RI sebagai harga mati. Berdiri di atas semua golongan, suku, agama. 3. Menjalani kehidupan asketis, budi pekerti luhur, mentaati ajaran agama yang dianut dengan sungguh-sungguh dlsb. sebagaimana tercantum dalam doktrin-doktrin TNI..
Pedoman moral kekuasaan/kekuatan	1. *Olah kanuragan* untuk mencapai bentuk dan kecakapan pisik penting tetapi lebih penting olah batin untuk mencapai keluhuran budi. 2. Kebenaran dan keadilan adalah soal pilihan, soal mana ksatriya harus berpihak. 3. *"Wedi wirang wani mati"*[345]. 4. Martabat ksatriya	1. Profesionalisme penting tapi yang lebih penting adalah mental dan semangat kejuangan, "pejuang dulu baru profesional". 2. Bagi TNI keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia adalah realitas kebenaran yang harus dibela. 3. "Tidak mengenal menyerah". 4. Kehormatan prajurit/perwira.
Justifikasi dan penggunaan kekuatan/kekuasan	1. Sebagai panggilan mulia, kehormatan dan harga diri. 2. *"Sadumuk bathuk sanyari bumi den tohi ataker pati"*[346].	1. Sebagai wujud kecintaan, kesetiaan pada tanah air, pemenuhan atas janji Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia harus dilakukan dengan apapun resiko yang harus ditanggung.
Idealisasi tugas dan peran yang dimainkan	Sebagai *"Lelananging Jagat"*[347] Sebagai *"senopati ing alogo, kalifatullah sayidin panoto gomo"*[348].	**TNI Sebagai Tentara Pejuang** Sebagai kekuatan kekerasan sekaligus sebagai kekuatan nir-kekerasan, adalah komandan dalam perang/pertempuran sekaligus pemimpin di luar/selain perang/pertempuran (dahulu, sebelum reformasi diformulasikan dengan istilah "Dwifungsi", yaitu antara lain sebagai stabilisator dan dinamisator).

[344] Mengendalikan nafsu jasmani dan kebendaan, mempertajam akal pikiran (budi), membersihkan dan memusatkan diri lahir batin agar selalu dekat kepada Yang Maha Kuasa.
[345] Lebih memilih mati dari pada dipermalukan.
[346] Artinya: Ibarat ancaman terhadap rakyat itu hanya berupa sebuah sentuhan di jidat, dan pelanggaran terhadap wilayah negara itu hanya berupa perampasan atas sejengkal tanah, maka harus dibela meski untuk itu harus dibayar dengan kematian.

Matrik 2

PROSES PENJELMAAN NILAI-NILAI KSATRIYA MENJADI TENTARA PROFESIONAL KSATRIYA

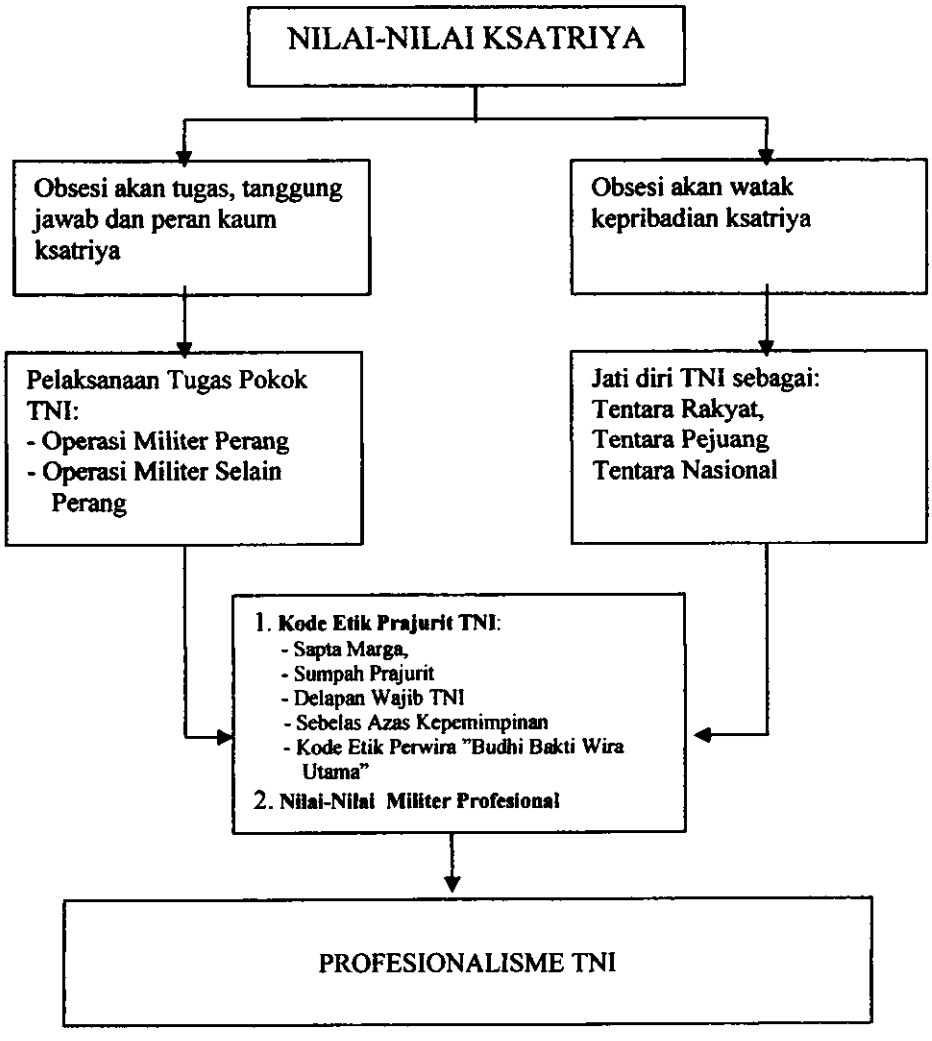

B. Kesimpulan

Untuk menyajikan bagian kesimpulan --secara umum-- ini akan dimulai dengan kilas balik khususnya mengenai tujuan dari penelitian ini. Sebagaimana dimuat di dalam Bab I, tujuan pokok penelitian ini ialah untuk mengkonstruksikan pemahaman tentang profesionalisme militer di kalangan aktor elit Tentara

[347] Arti secara harfiah adalah sebagai paling jantan di dunia, sedang secara maknawi berarti manusia terpilih.
[348] Komandan di medan pertempuran [di saat perang], wakil Tuhan pemimpin bagi hamba serta penegak aturan [disaat damai].

Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Kata "mengkonstruksikan" mengandung makna bahwa di samping penelitian ini memaparkan pemahaman Subyek Penelitian dengan apa adanya, tetapi juga memaparkan upaya penulis memahami pemahaman Subyek Penelitian *(understanding of the understanding)* tentang profesionalisme TNI.

Sebagai "kompas giro" pemberi ancar-ancar ke arah tujuan tersebut telah disusun rumusan masalah yang harus diungkap melalui penelitian ini. Baik yang melalugi kajian literatur, yaitu dengan menyusun kerangka teori, diskripsi wilayah penelitian, maupun melalui penelitian lapangan. Selanjutnya masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian *(research question)* yang hendak ditemukan jawabannya. Dari jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut, baik yang berasal dari sumber tertulis maupun yang didapatkan dari pernyataan Subyek Penelitian yang telah ditranskripsikan selanjutnya diolah untuk dimaknai, sebagaimana dimaksud dengan tujuan penelitian ini.

Di mulai dengan membuka *bracketing* yang dalam penelitian ini, yaitu "membuka" pandangan-pandangan dan asumsi-asumsi teoritik tentang profesionalisme militer yang semula "ditahan", yaitu pandangan dan asumsi teoritis secara umum (nomotetis) serta gagasan dan pemikiran serta konsepsi mengenai profesionalisme TNI (ideografis).

Salah satu konsepsi dan norma tentang profesionalisme TNI adalah sebagaimana di rumuskan di dalam UU No. 34 tahun 2004. Di dalam Undang-Undang tersebut "TNI profesional" ditempatkan sebagai bagian dari Jati Diri TNI. Adapun diskripsi lebih lanjut dari Tentara Profesional adalah sebagai berikut:

> "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara .....".

Apabila hal tersebut dikontraskan dengan data dan analisisnya, yang disajikan pada Bab V, telah ditemukan sedikit ketidaksamaan antara "realita" substansi yang terkandung dalam teks undang-undang tersebut dengan "pengalaman" pemahaman yang terjadi dalam diri Subyek Penelitian. Para Subyek Penelitian memahami "Tentara Profesional" adalah bukan ciri Jati Diri TNI yang otentik. Sebagai konsep, ia mengandung nilai artifisial, yang di-"inplantasi"-kan. Sedang ciri-ciri Jati Diri TNI yang otentik adalah "Tentara Rakyat", "Tentara Pejuang", dan "Tentara Nasional" saja.

Istilah "Tentara Profesional" lebih dipahami sebagai ciri umum dan bersifat inheren bagi semua militer di setiap negara. Meskipun begitu secara substantif, hal tersebut mereka fahami sebagai sesuatu keharusan bagi institusi maupun prajurit TNI sebagai tentara modern, sama halnya dengan tentara-tentara negara lain yang militernya sudah terorganisir dengan baik dan modern.

Apa yang ditemukan tersebut di atas sesusai dengan asumsi yang dijadikan landasan teori Antropologi Pengalaman Bruner, bahwa antara realita, pengalaman dan ekspresi itu selalu memiliki jarak, yang membuat satu sama lain tidak identik. Apa yang terformulasikan dalam teks Undang-Undang no. 34 tentang TNI sebagai tentara profesional adalah realita senyatanya, apapun realitas sosial yang lebih luas yang ada di balik teks itu. Sedangkan Subyek Penelitian telah menginternalisasi realita itu dengan disposisi mental (pikiran dan emosi)-nya sendiri. Dengan demikian pengetahuan, perasaan, pandangan, dan sikap Subyek Penelitian

terhadap ikhwal profesionalisme TNI adalah pengalaman yang sesungguhnya; yang subyektif, individual, dan unik, yang ada dalam ruang kesadaran.

Pengalaman tentang profesionalisme TNI itu sebetulnya lebih merupakan "misteri" sebab hanya individu Subyek Penelitian dengan kesadaran diri *(self conciousness)*-nya lah yang agak betul-betul mengerti dan merasakan. Sedang bagi orang lain –termasuk peneliti— ia memang "jagad kecil" *(inner world)* namun kedalaman dan luasnya nyaris tidak terbatas. Ia seperti halnya horizon, yang apabila dikejar seolah-olah terus menjauh.

Kerja penelitian fenomenologi ini hanya sebatas memahami melalui fenomen-fenomen yang di ekspresikannya dalam bentuk pikiran, sikap dan tindakan mereka. Padahal pikiran, sikap dan tindakan (ekspresi) Subyek Penelitian berkaitan dengan profesionalisme TNI itu adalah merupakan pengalaman yang juga sudah "tersaring" dan terbatasi. "Tersaring" oleh disposisi mental (pikiran dan emosi) dan ketubuhannya (kondisi pisik dan posisinya di lingkungan pisik), dan "terbatasi" oleh realita struktur sosial (baik struktur sosial militer maupun struktur sosial yang luas) selaku media dimana pengalaman itu diekspresikan. Sehingga pengalaman yang terekspresikan itu tidak lagi sebebas dan seliar tatkala masih di dalam ruang kesadaran mereka, ibarat imajinasi pelukis yang terkekang oleh bingkai kanvas, tinta dan kuas.

Konsekuensi dari pemahaman di atas adalah bahwa suatu temuan yang dihasilkan dari penelitian fenomenologi harus diperlakukan sebagai bukan temuan akhir, ia masih bisa berkembang mendalam maupun meluas dan tidak akan pernah final.

Implikasi dari analisis Antropologi Pengalaman Bruner ini adalah bahwa bagaimanapun, berbagai realita sosial senyatanya itu apabila diinternalisasi oleh Pamen TNI AD maka akan membentuk pengalaman sesungguhnya yang tidak sama persis (identik) dengan realita senyatanya tadi. Begitu juga akan tidak sama persis antara pengalaman itu dengan ekspresinya. Bahkan antara pengalaman dengan ekspressi itu bisa melahirkan fenomen-fenomen paradoks, baik berupa Intensi-Paradoksi maupun Ekstensi-Paradoksi[349].

Subyek Penelitian cenderung lebih memahami profesionalisme dalam militer secara umum itu hanya berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian di bidang kemiliteran (*expertise*) semata --bukan sebagaimana pendapat Huntington yang memasukkan aspek tanggung jawab sosial dan ikatan korps.

Selanjutnya Subyek Penelitian memahami profesionalisme militer bagi TNI lebih sebagai upaya agar prajurit TNI menjadi ahli dibidangnya yang diperlukan untuk melaksakan Tugas Pokok TNI. Tuntutan profesionalisme semacam itu berlaku bagi semua prajurit, tidak terbatas pada golongan perwira. Kendatipun begitu memang ada yang lebih spesifik sepanjang menyangkut profesionalisme bagi golongan perwira, yaitu lebih ditekankan pada aspek manajemen termasuk di dalamnya mengenai kepemimpinan. Oleh sebab itu kode etik profesi di dalam TNI juga terdiri dari dua tingkatan. *Pertama,* "Kode Etik Prajurit TNI", yang berlaku bagi prajurit TNI untuk semua tingkatan, yaitu terdiri dari "Sapta Marga", "Sumpah Prajurit" dan "Wajib TNI". Sedang bagi para

[349] Apa yang dimaksud dengan "Intensi Paradoksi" adalah fenomen berkebalikan antara ekspresi dengan pengalaman misalnya bersikap ramah padahal sedang mengalami rasa benci, sedangkan "Ekstensi Paradoksi" adalah keadaan pengalaman dan ekspresi yang berkebalikan dengan realita. Misalnya tatkala masyarakat dengan keras menuntut perbaikan disiplin anggota TNI- Polri, justru banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI-Polri.

perwira di samping dikenakan kode etik tersebut juga diberlakukan Kode Etik Perwira yaitu "Budhi Bakti Wira Utama".

Manajemen kepemimpinan perwira TNI dipahami oleh mereka bukanlah untuk mengelola penggunaan kekerasan *(management of the instruments of violence)* semata, melainkan diberi pemahaman yang lebih luwes dan luas yaitu mengelola penggunaan kekuatan *(management of force).* Kekuatan tersebut bisa termanifes dalam bentuk kekerasan maupun non-kekerasan, tergantung mana yang diperlukan sesuai dengan Tugas Pokok TNI.

Implikasi dari pemahaman tersebut, maka tugas-tugas operasi militer selain perang (*military operation other than war*) adalah memiliki derajat yang sama terhormat dan mulianya dengan tugas operasi militer perang dan tempur. Sudah barang tentu termasuk yang terakhir adalah tugas-tugas pengkondisian dan pembinaan wilayah sebagai upaya menyiapkan basis kekuatan pertahanan semesta sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta *(Total Defence System).*

Di bagian terdahulu dinyatakan para elit TNI AD memahami bahwa militer profesional adalah bukan merupakan bagian yang otentik dari Jati Diri TNI melainkan sesuatu hasil inplantasi kedalam Jati Diri TNI. Namun diakui bahwa militer profesional adalah menjadi ciri umum bagi semua tentara modern, sedangkan bagi TNI dengan Jati Diri yang dimiliki –sebagai tentara rakyat, pejuang, dan nasional—berpadukan dengan nilai profesionalitas tersebut menghasilkan formula profesionalisme militer khas TNI yang disamping tetap memelihara nilai-nilai ke-Indonesiaan juga sekaligus menjadi tentara yang modern. Pemahaman semacam ini agak berbeda dengan apa yang termaktub dalam UU No. 34 Tahun 2004, di mana "TNI Profesional" memiliki posisi yang

setara, menjadi salah satu dari empat ciri Jati Diri TNI, di samping sebagai "Tentara Rakyat", "Tentara Pejuang" dan "Tentara Nasional" itu. Eksistensi profesionalisme di dalam badan maupun personel TNI dalam pemahaman elit TNI AD adalah sebagai hal yang sangat penting dan menentukan terhadap pelaksanaan tugas pokok, karena dengan adanya profesionalisme di dalam TNI akan bisa menghasilkan efek berganda *(multiple effect)* terhadap fungsi Jati Diri --sebagai "Tentara Rakyat", "Tentara Pejuang" dan "Tentara Nasional"-- sehingga capaian TNI dalam melaksanakan Tugas Pokoknya dapat optimal. Karena itu pendidikan keahlian sebagai upaya membentuk TNI yang profesional menjadi mutlak akan tetapi yang lebih penting adalah pendidikan yang membentuk watak kerakyatan, semangat kejuangannya serta patriotisme.

Elit TNI AD secara hakiki *(intrinsic)* memaknai tugas pokok TNI, yaitu "menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta melindungi dan menjamin keselamatan segenap bangsa Indonesia" adalah merupakan Jati Diri TNI itu sendiri. Oleh sebab itu tugas pokok tersebut bagi TNI adalah merupakan "harga mati" karena kegagalan dalam menjalankan tugas pokok berarti juga memudarnya bahkan hilangnya Jati Diri TNI.

Elit TNI AD memahami pentingnya ketentuan-ketentuan yang harus dihormati dan dipatuhi oleh TNI profesional dalam mengikuti kebijakan politik negara; yaitu demokrasi, supremasi sipil, hak-hak asasi manusia, ketentuan hukum, dll. Yang harus menjadi catatan penting adalah bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus ditempatkan di bawah kerangka Tugas Pokok TNI. Dan menurut pemahamannya, apabila prajurit baik secara individu maupun secara korps suatu saat dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis karena telah terjadi

kontradiksi-kontradiksi antara ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan substansi tugas pokok maka secara moral bagi TNI harus tegas dan tidak ada keraguan sedikitpun harus lebih memilih tugas pokoknya itu, apapun resiko yang harus diterima dan dihadapi sebagai prajurit.

Tugas Pokok TNI dan semua doktrin-doktrin normatif TNI adalah bersumber dari Jati Diri TNI. Sedang jati diri tersebut memiliki akar yang sangat kuat di dalam tradisi dan budaya keprajuritan khas Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai "Ksatriya". Dengan adanya perpaduan antara pembentukan watak dan keahlian tersebut oleh karenanya secara ideal TNI sebagai tentara yang profesional khas Indonesia bisa diberi karakteristik sebagai "Tentara Profesional Ksatriya". Kesimpulan tersebut didasari dengan asumsi bahwa dalam perspektif sejarah mentalitas, sejak munculnya negara-negara kerajaan yang dibarengi oleh munculnya prajurit-prajurit kerajaan tersebut di berbagai wilayah yang sekarang disebut NKRI, hingga lahir dan tumbuhnya tentara Indonesia modern dewasa ini, sebenarnya telah terjadi transformasi nilai-nilai ksatriya dalam alam kesadaran para prajurit TNI, khususnya para perwiranya.

Dipandang dari perspektif nilai ksatriya maka pamor, wibawa, martabat dan moral TNI baik sebagai institusi, terutama perwiranya baik dalam arti korps maupun personel, akan mengalami kemerosotan bila mana mereka itu banyak yang meninggalkan *"laku ksatriya"*. Yaitu secara normatif mereka tidak lagi menjalani kehidupan asketis melainkan lebih memilih kehidupan hedonis; tidak menjaga keluhuran budi-pekerti tapi meng-*umbar* nafsu rendah; tidak taat kepada --melainkan lebih cenderung meninggalkan-- ajaran agama yang dianutnya; meninggalkan semangat *"sepi ing pamrih rame ing gawe"* dan mengedepankan

"vested interest"; tidak lagi menyatu dengan dan berpihak kepada kepentingan rakyat melainkan lebih berposisi berseberangan dengan rakyat; lebih mengutamakan kepentingan diri pribadi, sanak keluarga, serta kepentingan primordial sempit yang lain daripada kepentingan nasional, tergoda terjun ke dalam dunia politik rendahan *(law politics)* dan berdagang; di mana ke dua jenis pekerjaan itu –sebagai pekerja politik rendahan dan pedagang—adalah bukan pekerjaan yang lebih mulia (untuk tidak menyebut lebih rendah) dibanding sebagai ksatriya itu sendiri. Atau dari semua itu dapat dinyatakan dengan kata lain kemerosotan akan terjadi yaitu apabila mereka melanggar Kode Etik Prajurit TNI yaitu: Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Wajib TNI, "Budhi Bakti Wira Utama", dan doktrin-doktrin TNI yang lainnya.

Masalah TNI dan politik, sekalipun nilai kstariya itu berpantang melakukan politik rendahan akan tetapi bukan berarti tidak boleh meraih kekuasaan dan kedudukan politik. Akan tetapi secara ideal pencapaian kekuasaan dan kedudukan itu harus di peroleh dengan cara-cara elegan, *high politics* menjunjung tinggi moralitas, etika dan *rightous objective.* Sebab justru keberhasilan meraih puncak kekuasan dan kedudukan politik (bukan sekedar menjadi pemimpin militer) adalah simbol puncak pencapaian derajat ke-ksatriya-an seorang Perwira. Jadi tidak hanya berhenti sampai yang bersangkutan mencapai pangkat jenderal, melainkan adalah bilamana ia bisa menduduki posisi sebagai pemimpin negara atau *"lungguh ing keprabon"*, yaitu terpilih menjadi raja dalam konsep kekuasaan tradisional, atau terpilih menjadi pejabat tinggi dalam konsep kekuasan Indonesia modern. Sedang tahap berikutnya adalah tahap pencapaian kematangan sebagai seorang ksatriya yang ditandai oleh *"lengsering keprabon,*

madeg pandito" artinya adanya sikap "Legawa" yaitu bahwa ada saatnya kedudukan, peran dan tanggung jawab itu harus diserahkan kepada orang lain termasuk kepada yang lebih muda[350]. Berikutnya memposisikan diri sebagai junjungan dan sesepuh sebagai tempat orang lain meminta nasehat. Menurut hemat kita term "Bapak bangsa" dalam konsep politik Indonesia kontemporer adalah memiliki akar keterkaitan dengan nilai ksatriya ini.

C. Implikasi Penelitian

Untuk kepentingan pengkajian atas masalah yang terkandung dalam topik disertasi ini telah dipilih beberapa kerangka teori untuk dijadikan sebagai alat penjelas. Sebagaimana layaknya alat diagnosis penyakit, di mana alat harus sesuai dengan gejala dan karakteristik penyakit sehingga dapat terdeteksi penyakit yang sebenarnya. Demikian pula keberadaan suatu kerangka teori. Setiap kerangka teori yang digunakan harus memiliki kecocokan *(compatibility)* dengan fenomen dan karakteristik masalah penelitian yang akan dijelaskan sehingga terungkap realitas masalah yang sesungguhnya.

Namun demikian harus disadari bahwa ketika alat diagnosis maupun kerangka teori digunakan terkadang bisa menjelaskan secara sempurna, namun sering juga terjadi malah justru sebaliknya, dari penggunaannya tersebut diketahui bahwa alat itu tidak sepenuhnya, atau bahkan sama sekali tidak bisa, menjelaskan realitas penyakit ataupun realitas masalah, dan oleh karenanya diperlukan penyempurnaan terhadap alat itu atau bahkan perlu alat yang baru sama sekali sehingga hasil pengungkapan atas realitas memiliki tingkat keterpercayaan *(reliability)* yang tinggi.

---

[350] **Legawa,** adalah merupakan salah satu dari 11 Azas Kepemimpinan TNI.

Dengan alur pikiran semacam itu, maka dapat dikatakan bahwa setiap penelitian mestinya memiliki implikasi teoritik tertentu, bisa berarti mengukuhkan bangunan teori yang ada, merevisinya atau bahkan merobohkannya untuk diganti bangunan teori yang baru. Demikian pula halnya penelitian ini sebetulnya memiliki beberapa implikasi teoritik, namun demikian hanya akan diketengahkan dua implikasi yang penulis anggap paling penting yaitu mengenai relasi *state-political society-civil society* dalam konsep mengenai tatanan sosial, dan relasi *expertise-social responsibility-corporateness* dalam konsep profesionalisme militer.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai implikasi teoritik tersebut:

1. *Relasi:* ***State – Political Society - Civil Society***

   Kerangka teoritik tersebut di atas digunakan Alfred Stepan[351] untuk mengkonseptualisasikan adanya dua "arena". Stepan mengkaitkan teorinya dengan masalah kehidupan masyarakat bernegara *(state).* Menurut hemat penulis, Stepan relatif dapat menjelaskan siapa, dan bagaimana posisi TNI dalam realitas negara dan bangsa Indonesia.

   Sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu Alfred Stepan menyebut *political society* dan *civil society* yang didefinisikan sebagai dua arena yang relatif terpisah, di arena mana warga masyarakat melakukan peran tertentu di dalam kerangka hidup bernegara. Jadi arena itu hadir bersama di dalam waktu dan ruang tertentu.

   Apabila dilihat dari aspek distribusi dan alokasi kekuasaan antara ketiga entitas yaitu *State-Political Society-Civil Society* harus berada dalam

[351] Alfred Stepan, *Militer dan Demokrasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 1996, hal.1 dst.

keseimbangan. Apabila kekuasaan negara terlalu sangat besar yang tercermin pada perilaku aparatus negara, termasuk aparatus pemaksa *(coersive apparatus)*-nya maka akan mendegradasikan hakekat fungsi dan tugas negara sampai pada tingkat *state abuse,* di mana kekuasaan negara itu "menelan" (pinjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo) kekuasaan masyarakat.

Perspektif teoritik ini secara empirik menemukan contoh kasusnya dapat di Indonesia pada era Orde Baru (akhir tahun 60-an hingga pertengahan 90-an). Di mana negara, dalam hal ini aparatus eksekutifnya menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan dan diimbangi oleh kekuasaan masyarakat, sehingga banyak terjadi penyalahgunan kekuasaan dan TNI sebagai *coersieve apparatus* pun tidak bisa menghindarkan diri dari keadaan itu. Bahkan menjadi pemeran utamanya. Tak pelak peranan TNI sebagai pemonopoli alat dan tindakan kekerasan atas nama negara juga sangat menonjol. TNI selalu di depan dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dipandang oleh pelaksana negara mengarah pada terjadinya *social disorder.*

Ketika terjadi perubahan paradigma sosial di Indonesia pasca reformasi pada saat mana kekuasaan negara melemah, dan kekuasaan masyarakat baik di arena *Political Society* maupun *Civil Society* kian menguat bisa jadi peranan TNI semacam itu dipandang sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam kontek paradigma tatanan sosial, ia adalah menjadi bagian dari kebenaran relatif paradigma tatanan sosial yang berlaku kala itu, kalau lantas pada kurun berikutnya hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan tidak lain adalah sebagai bagian dari perubahan penilaian karena adanya perubahan pandangan paradigmatik semata.

Era reformasi (akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an), Indonesia dengan–merujuk pada apa yang disebut Thomas Kuhn (1922-1996)[352]— dapat disebut sebagai berada dalam krisis paradigma. Setelah kurang lebih 30 tahun berada dalam orde sosial yang stabil yang diberi label "Orde Baru".

Harus diakui bahwa "Orde Baru" telah membuktikan kebenaran relatifnya dalam arti telah menunjukkan kemampuannya merespon, menampung dan menahan berbagai anomali selama tiga puluh tahun hingga akhirnya *ambrol* karena gagal menahan gelombang krisis, yang pada giliran muncul masa transisi menuju paradigma orde sosial baru. Paradigma orde sosial baru yang muncul tersebut secara skeptis diharapkan adalah sejenis *civil society,* ditandai dengan kian menguatnya kekuasaan dan peran masyarakat warga. Namun pada kenyataanya peran masyarakat warga tersebut dalam beberapa aspek tampak *kebablasan.*

Pada dasarnya tidak salah kalau ada anggapan umum yang menyatakan bahwa *civil society* adalah orde sosial sebagai bentuk koreksi atas paradigma-paradigma tatanan sosial sebelumnya, namun kalau oleh karena itu ia dianggap yang paling sempurna dan final maka anggapan tersebut sangat menyesatkan. Dengan adanya anggapan semacam itu menyebabkan munculnya ekspektasi yang sangat tinggi serta tidak adanya upaya untuk mengkritisi kemungkinan terjadinya degradasi akibat terlalu kuatnya kekuasaan masyarakat yang bisa menyeret kearah terjadinya kecenderungan negatif yang sebaliknya, yaitu

[352] Menurut Thomas S. Kuhn siklus perubahan paradigma pengetahuan dari paradigma lama ke paradigma baru melalui tahap-tahap: normal – anomaly – krisis -- revoluasi –paradigma baru. (Lihat: Frank Pajares (reviewer), Thomas Kuhn: *The Structure of Scientific Revolutions,* Outline and Study Guide, Emory University, tt.).

bukan *"state abuse"* melainkan *"people abuse"* sehingga kekuasaan masyarakat "menelan" kekuasaan negara.

Fenomena kekuasaan masyarakat telah "menelan" kekuasan negara agaknya sedikit banyak telah terjadi di Indonesia paling tidak pada sepuluh tahun di awal tahun 2000-an. Kalau *"state abuse"* adalah negara akan diwarnai oleh suasana sentralistis-otoritarianisme oleh aparat negara, maka apabila terjadi *"people abuse"* negara akan berada dalam suasana mobokratis-anarkhisme oleh rakyat bernegara.

Lantas bagaimana agar distribusi dan alokasi kekuasan antara negara di satu pihak dengan masyarakat dipihak lain agar tetap dalam bentuknya yang ideal? *Pertama*, antara kekuasaan negara dengan kekuasaan masyarakat harus diupayakan selalu berada dalam posisi berkeseimbangan *(in-equilibrium)*. Berkeseimbangan berarti tidak statis melainkan dinamis. Dengan demikian harus ada kesadaran bahwa porsi antara kekuasaan negara dengan kekuasaan masyarakat itu tidak mungkin benar-benar berada pada sebuah titik Keseimbangan.

Antara kekuasaan masyarakat dan kekuasan negara pada dasarnya memerlukan satu sama lain dalam sebuah ko-eksistensi, dan kedua belah pihak berusaha berada dalam sebuah keseimbangan, yang penulis sebut sebagai *"In-equilibrium State and Society"*. Memang sangat bisa jadi akan selalu ada tarik-menarik dan timbul ketegangan antara keduanya namun ketegangan itu harus diusahakan bersifat positif *(positive tension)*. Di samping itu harus ada kekuatan yang bertindak sebagai jangkar penyeimbang yang menurut hemat penulis dapat diperankan oleh para perwira baik dalam arti korps maupun

individu karena mereka ini memiliki status ganda, satu sisi sebagai bagian dari birokrasi negara di sisi lain adalah sebagai bagian dari komunitas profesional *(security community)* di masyarakat.

Gagasan yang diajukan penulis mengenai *in-equilibrium state-society* sebagaimana yang dimaksud di atas dapat didilihat melalui visualisasi model yang ditampilkan di bawah ini:

Gambar 5

MODEL IN-EQUILIBRIUM STATE-SOCIETY

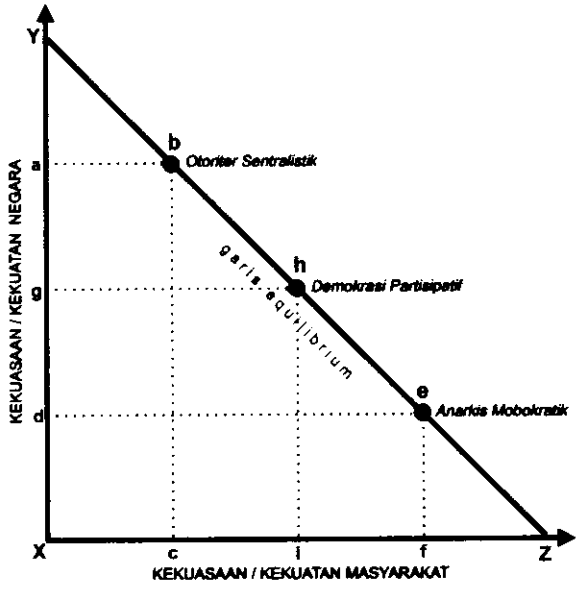

KETERANGAN GAMBAR:

Garis XY = menunjukkan tingkat (besar-kecil) kekuasaan/kekuatan negara.
Garis XZ = menunjukkan tingkat (besar-kecil) kekuasaan/kekuatan masyarakat.
Garis YZ = menunjukkan sistem pemerintahan atau praktek kekuasan yang berlaku. Misalnya, ketika kekuasaan/kekuatan negara terlalu dominan (Xa), kekuasaan/kekuatan masyarakat akan sangat lemah (Xc), maka yang muncul adalah praktek otoriter dan sentralistis (b). Sebaliknya, apabila kekuasaan/kekuatan masyarakat terlalu dominan (Xf), kekuasaan/kekuatan negara akan sangat lemah (Xd), maka yang terjadi adalah praktek mobrokratik dan anarkhis (e). Apabila kekuasaan/kekuatan negara seimbang dengan kekuasaan/kekuatan masyarakat (Xg = Xi), maka yang terjadi adalah kehidupan demokrasi partisipatif, negara dan masyarakat berada dalam keseimbangan.

Berikutnya, *political society* dan *civil society* dalam perspektif "teori arena" Alfred Stepan dinyatakan bahwa kedua-duanya --*political society dan*

civil society— adalah merupakan arena yang ada di dalam kehidupan masyarakat bernegara. Di arena *civil society* berbagai gerakan sosial bersama-sama menunjukkan kiprahnya. Seperti kelompok keagamaan, kelompok wanita, organisasi-organisasi sipil semua kelas, termasuk kelas profesional. Di arena ini mereka dapat mengekspresikan diri dan memajukan kepentingan-kepentingannya. Sedangkan *political society* adalah arena berkiprahnya warga yang secara khusus melibatkan diri dalam kontestasi politik guna memperoleh kontrol atas kekuasaan pemerintahan dan aparatur negara.

Sudah disinggung pada bagian terdahulu bahwa Stepan mengkaitkan *political society* dan *civil society* dengan masalah kehidupan masyarakat bernegara *(state)*. Meski keduanya memberi tekanan definisi negara yang agak berbeda dengan Max Weber. Misalnya, bagi Weber, negara adalah badan superior jelmaan mandat masyarakat untuk memonopoli atas penggunaan kekerasan yang sah, memiliki perangkat administratif (termasuk mengelola apparatus), dan kemampuan menegakkan monopolinya atas keseluruhan wilayah. Sedang negara bagi Stepan peranannya tidak hanya mengelola aparatus negara tetapi juga menyusun pola hubungan 'antara' kekuasaan sipil dan kekuasan pemerintah, serta menyusun tata hubungan 'dalam' *political society* maupun *civil society;* di samping sebagai suatu sistem administratif, legal, birokratis dan memaksa yang berkesinambungan.

Lantas siapakah (Perwira) TNI itu? Dan bagaimanakah posisinya? Dengan mengkombinasikan definisi negara yang dikemukakan oleh Weber dan kerangka teori Arena Stepan, maka TNI adalah sebagai aparatus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memonopoli penggunaan alat

kekerasan atas nama NKRI guna menjamin keamanan dan keutuhan NKRI dan sekaligus juga sebagai komunitas profesional (keamanan) yang berhak mengekspresikan kepentingannya di dalam arena *civil society*.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa: *Pertama,* TNI (baca: korps perwira) adalah merupakan entitas yang unik. Ia adalah aparatus pemerintah namun juga salah satu kelompok profesional. Sebagai aparatus ia sangat istimewa karena sebagai bagian dari aparatus pemaksa yang paling ahli dan menguasai alat kekerasan bersenjata, di pihak lain adalah sebagai bagian dari kelompok profesional yang berhak mengekpresikan diri dan seharusnya juga memajukan kepentingan-kepentingannya di tengah-tengah arena *civil society* bersama golongan-golongan sipil yang lain. Dengan dua identitas yang dimiliki tersebut bagaimanapun membuat posisi TNI sangat strategis di dua sisi sekaligus, baik dalam kekuasaan negara maupun kekuasan masyarakat. Sayang menurut sepanjang pengetahuan penulis, studi-studi militer terutama yang bersifat konseptual normatif, masih belum memalingkan perhatiannya kepada masalah milite sebagai kelompok profesional, terutama korps perwira, di arena *civil society* berdampingan dengan kelompok-kelompok profesional dan kelompok strategis yang lain.

Kedua, dengan identitas dan posisi seperti tersebut di atas maka sangat mungkin TNI berperan sebagai jangkar penyeimbang antara kekuasaan negara/pemerintah dengan kekuasaan masyarakat dalam rangka membangun *civil society* di Indonesia dewasa ini maupun di masa-masa mendatang.

Peran TNI itu bisa dinisbatkan dengan pendulum yang gerakannya menjamin tetap berputarnya jarum jam. Atau gerakan pendayung yang

menjamin perahu tidak oleng dan tetap berada pada haluannya. TNI harus siap untuk bergerak ke salah satu di antara dua sisi: kekuasaan negara (selaku aparatus) dengan kekuasaan masyarakat (selaku komunitas profesional) dengan demikian tanggung jawab sosial TNI tidak hanya melulu kepada negara sebagai agennya, akan tetapi juga langsung kepada masyarakat sebagai pengguna dan pengambil manfaat yang sesungguhnya dari jasa profesional keamanan TNI.

Untuk melaksanakan peran itu paling tidak ada tiga azas yang harus dipatuhi yaitu asas temporalitas (*emergency*), tetap memelihara dan meningkatkan profesionalisme, memberi penguatan pada peran-peran sosial kemasyarakatan *(Civic mission).*

2. *Relasi:* ***Expertise– Social Responsibility – Corporateness***

Skema Expertise-social responsibility-corporateness sebagaimana yang dirumuskan Huntington[353] mengenai profesionalisme militer bagaimanapun harus diakui dapat menjelaskan sebagian besar masalah berkitan dengan profesionalisme militer, dalam hal ini TNI. Sekalipun teori ini banyak memperoleh kritik tetapi justru kritik-kritik yang ada membuat konsep-konsepnya menjadi memiliki bobot klasik yang secara prinsipial tidak terbantahkan. Hampir dipastikan, tidak ada studi militer yang tidak menjadikan teori-teori yang dikembangkan Huntington sebagai rujukan utamanya.

Perdebatan teoritis atas konseptualisasi Huntington mengenai profesionalisme militer ini pada tingkat puncaknya adalah melahirkan dua faham utama antara mereka yang mendukung pandangan Huntington

[353] Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-Military Relation,* Cambridge: Harvard University Press, 1998, hal. x, 47 dst.

(Huntingtonian) dan yang menentangnya. Akhirnya teori yang dikembangkan dengan dasar pandangan Huntington dikatagorikan sebagai pandangan profesionalisme lama *(the old professionalism),* sedang yang mengembangkan teori yang berpijak atas ketidak setujuannya terhadap pandangan Huntington disebut sebagai pandangan profesionalisme militer baru *(the new professionalism).*

Kalau diadakan pengkajian lebih jauh sebetulnya kandungan makna dalam istilah *the new professionalism,* adalah bukan untuk menyatakan bahwa teori yang dirintis oleh Huntington itu sudah usang, sehingga sekalipun kehadirannya memang terkemudian namun bukan berarti menumbangkan pandangan *the old professionalism* Huntingtonian. Bahkan juga bukan untuk menyempurnakannya.

Barangkali yang lebih tepat posisi pandangan profesionalisme baru terhadap pandangan profesi lama adalah saling mengukuhkan. Eksistensi pandangan profesionalisme baru adalah terletak pada adanya kenyataan bahwa memang ada fenomen-fenomen baru dalam realitas dunia kemiliteran yang tidak terakomadasikan dalam konseptualisasi Huntington. Fenomen-fenomen baru tersebut pada umumnya baru muncul setelah kajian-kajian militer secara ekstensif dilakukan di negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang. Oleh sebab itu pandangan profesionaisme baru dapat dianggap sebagai pandangan profesionalisme militer negara berkembang, yang umumnya memiliki sejarah dan tradisi yang berkebalikan dengan sejarah dan tradisi militer di negara-negara maju.

Bertitik tolak dari analisis relasi antara pandangan profesionalisme lama Huntingtonian dengan pandangan profesionalisme baru tersebut di atas, kalau diadakan penelaahan lebih mendalam dapat terungkap bahwa telah terjadi ketersesatan (falsifikasi) asumsi yang mendasari kerangka teori Huntington. Falsifikasi asumsi-asumsi tersebut adalah:

Pertama, falsifikasi terjadi dalam pendefinisian tentang jenis pekerjaan atau keahlian militer. Huntington bersandar pada asumsi bahwa bidang keahlian perwira militer itu adalah manajemen kekerasan *(management of violence)*, sedang sebagai profesional perwira militer adalah sebagai pengelola kekerasan *(manager of violence).* Pandangan ini diadopsi dari pengertian yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell[354] yang menyebut pekerjaan militer sebagai spesialis dibidang kekerasan *(specialist of violence).* Sedang Lasswel memberikan definisi tersebut diilhami oleh hasil kajiannya terhadap tentara fasisme Jepang dalam perang Sino-Jepang II, dalam kapasitasnya sebagai tenaga ahli militer pemerintah Amerika Serikat. Dalam kajian tersebut Lasswel lebih menfokuskan perhatiannya pada kekuatan angkatan udara kekaisaran Jepang, sebagaimana kita tahu bahwa ciri khas angkatan udara adalah lebih dominan peralatan daripada personel dan sangat sensitif terhadap perkembangan teknologi perang. Sedang tentara kekaisaran Jepang pada perang dunia II dikenal memiliki mental pembunuh yang melebihi batas kemanusiaan hingga sampai mengabaikan keselamatan diri.

Aspek partikularitas pemahaman Lasswel mengenai pekerjaan keahlian militer yang menggunakan rujukan pada kinerja tentara kekaisaran Jepang

[354] Harrold D Lasswell, *"The Garrison State"*, ***American Journal of Sociology*** , th. 1941.

lebih khusus lagi hanya terhadap angkatan udaranya inilah yang menyebabkan terjadinya ketersesatan ketika pemahaman itu ditarik menjadi definisi yang lebih umum mengenai pekerjaan profesional militer.

Dalam kerangka pengertian Lasswell ini, bahwa prasyarat pekerjaan militer itu harus dimulai dengan mengubah total kepribadian manusia sipil *(civilian man)* menjadi manusia militer *(military man)* yaitu manusia yang sudah mengalami mati rasa diri sebagai manusia dan berubah menjadi mesin pembunuh. Padahal pada perkembangan realitas yang terjadi, definisi pekerjaan keahlian militer tidak sekaku dan sedemikian paradoks dengan pekerjaan keahlian sipil. Pandangan inilah yang telah berimplikasi pada perdebatan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab militer, dan menjadi isu utama dalam perbedaan pandangan antara profesionalisme militer lama Huntingtonian dengan pandangan profesionalisme militer baru.

Realitas tugas dan tanggung jawab militer yang tidak hanya melulu untuk perang dan memenangi pertempuran melainkan juga ada tugas non-tempur seperti operasi kemanusiaan *(humanitarian operation),* misi sipil *(civic mission),* pemeliharaan perdamaian *(peace keeping),* dll. menuntut adanya definisi pekerjaan keahlian militer yang lebih tepat. Definisi yang lebih tepat bagi pekerjaan militer –menurut hemat penulis berdasar temuan lapangan-- adalah "spesialis dalam bidang penggunaan kekuatan *(specialist of force)"*, sedangkan perwira militer adalah manajer pengelola kekuatan *(manager of force)*. Adapun kekerasan *(violance)* adalah salah satu bentuk kemungkinan penerapan kekuatan itu, di samping non-kekerasan.

Kedua, pandangan mengenai larangan militer terlibat dalam politik oleh Huntington adalah dipengaruhi pandangan kaum teoritisi di dalam ilmu administrasi klasik yang dalam pandangan mereka, pemisahan secara keras dan tegas antara fungsi politik (pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan) dengan fungsi adminstrasi (implementasi kebijakan dan realisasi keputusan) adalah mutlak, misalnya sebagaimana digagas oleh ilmuwan administrasi klasik Dwight Waldo maupun Frank J. Goodnow[355]. Pandangan semacam ini sudah tidak terlalu relevan lagi untuk menjelaskan hubungan fungsi politik dengan administrasi pemerintahan dewasa ini yang semakin cenderung melihat antara dua fungsi politik dan fungsi administratif tersebut bukan terpisah sama sekali melainkan saling berjalin dan berkelindan, dalam arti bahwa didalam fungsi politik sedikit banyak juga terdapat fungsi administratif, demikian pula halnya di dalam fungsi administratif pasti terdapat muatan politis pula. Persoalannya adalah bukan mengenai keharusan pemisahan antara fungsi politik dan administrasi secara kaku karena pada kenyatannya hal itu tidak mungkin dilakukan, melainkan bagaimana porsi yang paling tepat untuk masing-masing fungsi dalam tiap jenjang hirarkhi birokrasi yang ada.

Ketiga, falsifikasi terjadi pada konseptualisasi Huntington mengenai keamanan. Huntington menggolongkan keamanan kedalam tiga jenis yaitu: (1) keamanan militer, (2) keamanan internal dan (3) keamanan situasional. Di dalam keamanan militer, dilihat dari istilah yang dikenakan saja sudah jelas bahwa bahwa ia adalah wilayah tugas dan tanggung jawab militer. Meskipun

[355] Lihat Dwight Waldo, *"What is Pubic Administration?"*, dan Frank J. Goodnow, *"Politics and Administration"*, dalam Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (ed.), *Classics of Public Administration,* Brooks Cole Publishing Company, 1987.

di dalam domain ini Huntington juga memasukkan masalah keamanan yang berkaitan dengan insurgensi dan kejahatan bersenjata namun secara tersirat Huntngton lebih menekankan pada tugas dan tanggung jawab militer sebagai kekuatan bersenjata yang bersifat eksternal. Konseptulisasi ini sebenarnya mengacu pada karakteristik militer negara maju terutama Eropa Barat, dan Amerika Serikat pasca perang dunia II yang kekuatan militernya memiliki sejarah dan tradisinya menjadi bagian dari penjajahan. Karena itu sangat kuat karakter invasionis dan orientasi eksternalnya. Doktrin pertahannya bukan melindungi dan mempertahanan wilayah negara, tetapi lebih diarahkan kepada melindungi dan mempertahankan wilayah jajahan. Pada pasca perang dunia II seiring perubahan bentuk dari imperialisme menjadi kapitalisme, maka doktrin melindungi dan mempertahankan wilayah jajahan berubah menjadi melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingan negara di luar negeri terutama kepentingan ekonomi. Itulah sebabnya mengapa konseptualisasi Huntington mengenai tugas dan tanggung jawab keamanan militer lebih bersifat eksternal. Kendatipun Huntington memasukkan juga jenis ancaman dari dalam seperti insurgensi ke dalam wilayah keamanan militer.

Keempat, masih berkaitan dengan konseptualisasi Huntington mengenai keamanan, tampaknya Huntington telah menempatkan ketiga katagori yaitu Keamanan Militer, Keamanan Internal dan Keamanan Situasional di dalam posisi sejajar dan linier. Ketiga domain tersebut secara bersama tetapi sendiri-sendiri memberi kontribusi jenis keamanan tertentu yang secara akumulatif berwujud keamanan nasional *(national security).*

Kerangka teoritik seperti tersebut di atas menjadi kurang berhasil digunakan untuk menjelaskan fenomen-fenomen militer di negara berkembang dan bukan dalam posisi sebagai bekas militer penjajah atau sedang menjajah, justru malah sebaliknya yaitu militer yang lahir dari kekuatan perlawanan terhadap penjajahan. Oleh sebab itu jugalah mengapa kerangka teori Huntington ini tidak cukup akurat untuk menjelaskan fenomen peran, tugas dan tanggung jawab TNI. Karena sekalipun TNI pernah melakukan tugas-tugas invasionis seperti merebut Irian Barat (1963), konfrontasi dengan Malaysia (1964), dan menguasai Timor-Timur (1977), akan tetapi sejatinya TNI adalah tentara yang postur dan doktrinnya lebih sebagai tentara pertahanan rumahan *(home defence army)*, dan berorientasi internal. Bagi negara-negara yang tidak pernah memiliki pengalaman sebagai penjajah, atau malah sebaliknya sebagai negara terjajah, maka konseptualisasi Huntington itu tidak berlaku. Maka dalam konteks ini, thesis Giddens akan lebih sesuai untuk menjelaskan posisi TNI saat ini, dimana Giddens mengatakan bahwa keberadaan militer di negara-negara yang tidak pernah menjadi penjajah yang oleh Giddens disebut negara pra-modern, umumnya lebih memiliki fungsi internal berkaitan dengan tanggung jawab negera untuk menciptakan tertib sosial. Sedangkan guna mewujudkan keamanan nasional, katagorisasi keamanan militer--keamanan internal--keamanan situasional tidak bisa diposisikan secara sejajar-linier, melainkan bersifat saling mencakup dan saling menentukan. Ketiganya tidak secara sendiri-sendiri dalam mewujudkan keamanan umum atau nasional, melainkan secara saling melengkapi dan saling

menentukan. Perbedaan konsepsi keamanan Huntington dengan yang digagas oleh penulis adalah dapat dilihat dalam gambar sbb:

Gambar 6

MODEL PARADIGMA KEAMANAN HUNTINGTON

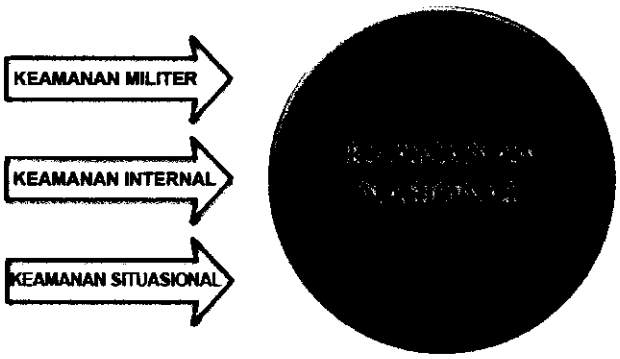

Gambar 7

MODEL PARADIGMA KEAMANAN ALTERNATIF
(Diajukan oleh Penulis)

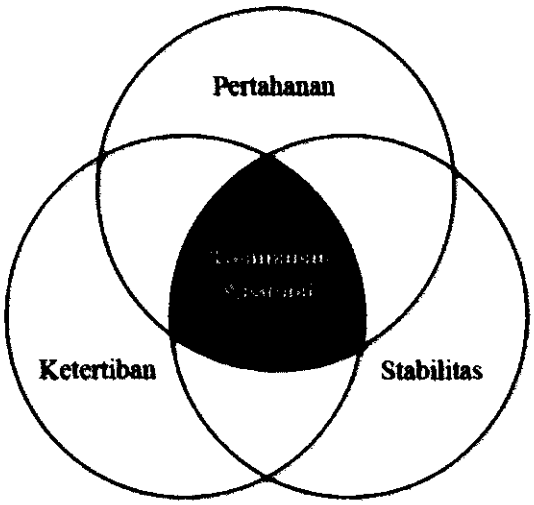

Apa yang terpampang dalam gambar 7 di atas menggambarkan adanya tiga fungsi yang masing-masing menghasilkan keamanan. Fungsi tersebut adalah pertahanan-keamanan, ketertiban-keamanan, dan stabilitas-keamanan. Pada ketiga fungsi tersebut satu sama lain terjadi inter-seksi dan pada berikutnya secara simultan menghasilkan keamanan nasional. Fungsi pertahanan peran utamanya adalah militer, fungsi ketertiban peran utamanya adalah polisi dan aparat penegak

hukum yang lain, sedangkan fungsi stabilitas diperankan oleh aktor-aktor sosial di luar militer dan polisi, antara lain para politisi, pebisnis, pemuka agama dlsb. Sistem sebagaimana yang terlukis dalam Gambar 7 di atas --yang mengandaikan keterlibatan seluruh aktor untuk menciptakan keamanan nasional tersebut-- apabila dimungkinkan menggunakan istilah "pertahan" dalam arti yang luas, bisa disebut sebagai sistem pertahan semesta *(Total Defence System).*

Sekedar sebagai bandingan, negara Singapura juga menggunakan konsep doktrin keamanan nasional yang didasarkan pada sistem pertahanan semesta yang mulai dicanangkan sejak tahun 1984. Di sana konsep pertahanan diberi arti yang luas, dan pertahanan militer *(military defense)* adalah hanya sebagai salah satu dari aspek pertahanan yang ada. Sedangkan –ke empat-- yang lain adalah: pertahanan psikologi *(psychological defense),* pertahanan ekonomi *(economic defense),* pertahanan sosial *(social defense),* dan pertahanan sipil *(civil defense)*[356].

3. Perwira Menengah Antara Dibentuk dan Membentuk

Di samping implikasi atas kedua kerangka teori sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas perlu juga diketengahkan kembali disini bahwa ploting "cerita" penyajian dan analisis fenomenologi atas hasil penelitian ini telah menggunakan: (1) kerangka analisis relasi Realitas-Pengalaman-Ekspresi dalam Antropologi Pengalaman yang dikemukakan oleh Edward Bruner[357], (2) kerangka analisis relasi Obyektivasi-Internalisasi-Eksternalisasi oleh Peter

[356] Derek Da Cuncha, *Sociological Aspect of the Singapore Armed Forces,* dalam: **Armed Forces and Society,** ProQuest Social Science Journals, Spring 1999, 25,3; hal 460.
[357] Victor W. Turner and Edward M. Bruner, *The Anthropology of Experience,* Urbana: University of Illinois Press, th 1986.

Berger[358], (3) kerangka analisis Struktur-Agensi dalam teori strukturasi Anthony Giddens[359] dan (4) Kerangka relasi Self – I – Me dalam analisis Interaksionisme Simbolik oleh George Herbert Mead[360].

Penggunaan keempat kerangka analisis tersebut telah berhasil mengungkap paling tidak ada fenomen di seputar profesionalisme TNI. *Pertama,* bahwa personel militer, khususnya para perwira adalah memiliki karakter lebih sebagai aktor elit TNI yang memproduksi struktur sosial kemiliteran. Mereka bukan hanya melulu sekedar sebagai produk dari struktur sosial kemiliteran. Dengan demikian pengungkapan ini membantah anggapan umum bahkan beberapa kalangan akademis selama ini yang memandang bahwa dengan struktur sosial kemiliteran yang dicirikan oleh adanya organisasi yang kaku, menekankan nilai kepatuhan, interaksi sosial yang hirarkhis dan komando dlsb. membuat setiap prajurit nyaris sama sekali kehilangan sifat "ke-agensi-annya" dan nyaris sepenuhnya terkungkung dan kehilangan kapasitasnya untuk bertindak secara bebas dan melakukan pilihan-pilihannya sendiri. Anggapan akademik seperti tersebut di atas tidak sepenuhnya benar.

Para prajurit, dalam hal ini perwira TNI adalah aktor sosial juga, yang ikut memproduk struktur sosial terutama struktur sosial kemiliteran. Mereka mengkonstruksi dan merekonstruksi dunia sosial kemiliteran dan juga dunia sosial yang luas. Peran tersebut terjadi terutama ketika mereka menjalankan

---

[358] Tim Knepper (reviewer), *Berger The Sacred Canopy: Elements of Sociological Theory of Religion*, Religious Experience Resources Review of Books and Articles, http://people.bu.edu./wwildman

[359] "Structure and Agency", dalam *Wikipedia*, The Free Encyclopedia.

[360] Robert Hagedorn (editor), *Sociology*, Toronto: Holt, Rinehart & Winston of Canada, Limited, 1983, hal. 72 dst.

bermacam-macam tugas di berbagai area. Semakin tinggi jenjang kepangkatan, semakin strategis posisi yang dipegang --baik dalam arti individu maupun korps—maka akan semakin besar pula kapasitasnya sebagai aktor sosial kemiliteran. Kalau dilihat dari perspektif kekuasan[361] hal itu terjadi seiring dengan kian membesarnya kekuasan yang ada pada dirinya, dengan demikian semakin besar kekuasaan yang ada pada dirinya akan semakin besar pula andilnya dalam mengkonstruksi dan merekonstruksi struktur sosial tersebut.

Kedua, dengan mengacu pada pendapat Edward Burner yang menempatkan pengalaman berada dalam posisi sentral dalam relasi Realitas-Pengalaman-Ekspressi, di mana pengalaman itu selalu memiliki karakteristik individual, subyektif, dan unik; maka realitas sosial kemiliteran TNI juga harus dipandang memiliki karakteristik (inter-)subyektif, (multi-)individual dan unik. Realitas sosial tersebut adalah merupakan akumulasi produk dari para aktor/agensi elit TNI (yang dalam batas tertentu juga melibatkan aktor/agensi lain di luar TNI) yang membentuk *continous loop* dalam kumparan ruang-waktu yang sangat lama, oleh karenya ia memiliki urat dan akar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Semua itu harus dilihat sebagai semacam *local genius* dan adalah pekerjaan yang sia-sia dan a-historis kalau harus mencerabutnya dan

[361] Konsep kekuasaan terkaitan dengan agensi oleh Giddens dinyatakan: Kekuasan itu aslinya berada di mana-mana dan jumlahnya tetap. Kekuasaan pada dasarnya adalah kapasitas untuk mencapai hasil. Kekuasaan diekspresikan dan dilaksanakan melalui sumber-sumber *(resources)*, di mana sumber-sumber itu adalah medium untuk bertindak bagi seorang agen.

Ada dua jenis sumber medium itu menurut Giddens terdiri dari sumber alokatif dan sumber autoritatif. Sumber alokatif merujuk pada suatu penguasan manusia atas dunia alam; sedang sumber autoritatif adalah penguasaan atau pengendalian seseorang atas dunia sosial melalui penerapan kekuasaan atas orang lain (Geoff Boucher, *The Nation State and Violence,* Blackwood Project, 2001, hal. 5).

menggantikannya dengan realitas struktur sosial yang dibangun dari dan oleh aktor sosial lain yang asing.

4. TNI sebagai Tentara Profesional Ksatria

Setelah melalui penjelajahan terhadap sejumlah literatur mengenai militer, diikuti dengan penelaahan terhadap kajian-kajian tentang militer Indonesia atau TNI, lantas keduanya dipertemukan dengan data atau informasi dari lapangan di seputar pemahaman perwira menengah TNI AD tentang profesionalisme, akhirnya terkuak segugusan fenomena di seputar profesionalisme TNI yang dapat dimaknakan secara khusus dan unik yang dirangkum dalam suatu sebutan bagi TNI yaitu "Tentara Profesional Ksatriya".

Kesimpulan atas kajian ini tidak berdiri sendiri melainkan diilhami dan terkait dengan kajian-kajian sebelumnya. Pertama adalah bertitik tolak dari konstruksi militer yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, yang dalam salah satu thesisnya mengajukan dua tipologi tentara modern yaitu apa yang ia sebut Tentara Pretorian dan Tentara Profesional. Dari tipologi Huntington tersebut, Eric Nordlinger dalam telaahnya menemukan adanya varian dalam tentara pretorian yaitu apa yang ia sebut sebagai tentara pretorian moderator, tentara pratorian guardian, dan tentara praetorian rulers. Sedang dalam hal tentara profesional, Amos Perlmutter menemukan sebuah varian yang ia sebut 'tentara profesional revolusioner'.

Dalam kaitannya dengan kajian terhadap militer Indonesia (TNI), Syamsul Ma'arif dalam disertasinya "Militer dalam Masyarakat Menuju TNI Profesional di Era Reformasi" baru-baru ini, menyebut fenomena TNI

profesional sebagai "Tentara Profesional Patriot". Dan pemunculan rumusan makna tentang TNI sebagai "Tentara Profesional Ksatriya" ini tidak dimaksudkan untuk menyanggah atau menafikan terhadap apa yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, khususnya terhadap rumusan TNI sebagai "Tentara Profesional Patriot", sebagaimana dikemukakan oleh Syamsul Ma'arif. Barangkali yang lebih tepat temuan mengenai "Tentara Profesional Ksatriya" ini adalah merupakan perspektif yang lain dari TNI, yaitu manakala TNI ditelaah dari sudut makna hakiki *(intrinsic meaning)* yang mendasarinya.

5. Perlunya Level Studi "Mikro-Subyektif"

Perkategori, studi mengenai pemahaman tentang profesionalisme militer yang penulis lakukan adalah tergolong studi "mikro-subyektif". Studi semacam ini menurut hemat penulis tergolong masih langka dalam studi militer, setidak-tidaknya dalam studi mengenai TNI. Oleh sebab itu, pada bagian pendahuluan sudah disebutkan bahwa hal tersebut merupakan keunikan dari karya penelitian ini. Mengingat kebanyakan studi militer yang selama ini dilakukan – khususnya di Indonesia—adalah bersifat "makro-obyektif" atau juga "makro-subyektif". Begitu juga wilayah kajian, sebagian besar pengkajian militer di Indonesia diarahkan pada isu-isu yang ekstrinsik misalnya hubungan sipil-militer, politik militer, dan bisnis militer. Sedang penelitian ini lebih memiliki nilai intrinsik, yang mengarah kepada pengkajian di bidang etika militer *(Military Ethic)*. Ketidak seimbangan porsi –antara ekstrinsik dengan intrinsik— ini memiliki konsekuensi terjadinya ketidak imbangan dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi TNI. Sehingga wacana publik yang

berkembang berkenaan dengan masalah profesionalisme TNI, misalnya, lebih berkutat pada tataran ektrinsik-superfisial misalnya soal keterbatasan anggaran, keterbatasan dan ketertinggalan di bidang perlengkapan dan persenjataan, rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit dlsb. Sementara hal-hal yang intrinsik-substansial seperti masalah sistem pendidikan TNI, reaktualisasi dan revitalisasi doktrin, penguatan ideologi serta penananam nilai dlsb. cenderung diabaikan atau setidak-tidaknya tidak pernah menjadi perhatian publik.

6. Jati Diri TNI Bersumber dari Nilai-nilai Ksatria

Telah disebutkan juga di bagian terdahulu, bahwa salah satu temuan kesimpulan penelelitian ini mengungkap bahwa sumber nilai TNI itu pada hakekatnya adalah terletak dalam apa yang dikonseptualisasikan dengan nilai "ksatriya". Tiga unsur Jati diri TNI –sebelum profesionalisme dicangkokkan didalamnya melalui UU No. 34 tahun 2004—yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional pun pada dasarnya adalah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung di dalam ksatriya tersebut. Begitu juga butir-butir pernyataan yang terdapat di dalam doktrin-doktrin TNI --yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, 11 asas kepemimpinan TNI serta Kode Etik Perwira atau Budi Bakti Wira Utama—adalah merupakan norma-norma yang 'diejawantahkan' dari nilai ksatriyaan itu.

Kajian mengenai ide ksatriya di dalam khasanah studi militer Indonesia memang belum banyak. Barangkali hanya Piter Britton dan Benedict R O'G Anderson yang mengangkat fenomena itu ke wilayah kajiannya meskipun tidak dilanjutkan dengan pengkajian yang lebih mendalam. Namun di dalam

literatur lama dalam sejarah dan kesusasteraan Jawa pembahasan terhadap konsep tentang kesatriya ini cukup intens di lakukan. Lantas apa perbedaan antara tentara profesional klasik Huntingtonian, tentara profesional revolusioner Perlmutter dengan tentara profesional kesatriya khas Indonesia tersebut?

Dari segi keahlian, perwira profesional dalam konsep Huntington dan Perlmutter adalah manajer kekerasan *(manager of violence)*. Sebagai tujuan utama dengan kekerasan itu adalah memenangkan pertempuran dengan mengalahkan musuh. Sedang tentara profesional ksatriya, adalah pengelola kekuatan *(manajement of forces)*. Memang penggunaan atau aktualisasi dari kekuatan tersebut bisa berupa kekerasan, namun bagi tentara profesional ksatriya kekuatan yang dihimpunnya adalah terutama untuk tujuan-tujuan non -kekerasan. Karena tentara ksatriya memberi makna yang berbeda mengenai kemenangan. Bagi tentara ksatriya untuk mencapai kemenangan tidak harus dengan mengalahkan musuh sebagaimana terkandung dalam kalimat "*ngluruk tanpo bolo menang tanpo ngasorake*" yaitu menyerang tanpa harus dengan bala pasukan, memenangkan pertempuran tanpa harus dengan mengalahkan.

Apabila *term* ksatriya dijadikan isu bahasan, maka yang menjadi topik utama adalah masalah kekuatan atau kekuasaan. Kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki ksatriya disebut 'kadigdayan' atau 'kesaktian'. Persoalannya adalah berkisar tentang bagaimanakah ksatriya itu memperoleh kedigdayan? Bagaimana cara memelihara atau mempertahankan kedigdayaan itu? Untuk apa kedigdayan digunakan?

Di dalam konsep tentara profesional Huntington, kekuatan seorang perwira terletak di dalam kemampuan intelektual yang terutama diperoleh melalui pendidikan serta keadaan yang bersifat lahiriah yang diperoleh melalui latihan-latihan pisik yang intensif, sehingga ia menjadi seorang ahli yang menguasai teknis kemiliteran sekaligus sebagai manajer kekerasan. Pola pembentukan semacam ini membuat pencitraan tentara profesional dalam pandangan Huntingtonian menjadi sangat "macho militarism".

Dewasa ini mulai banyak kritik terhadap *"macho militarism"* ini. Misalnya dilontarkan oleh Carol Burke, dalam bukunya: *"Camp All-American, Hanoi Jen and the High-and-Tight: Gender, Folklore and Changing Military Culture"*. Berdasar penelitian dan pengalamannya mengajar di *Naval Academy*, Annapolis, Maryland, Burke berpendapat: *"The macho culture of the military is not only unjust, but will be irrelevant in a future where brute force will not be the primary military need"*[362]. (Budaya macho dalam militer bukan hanya tidak adil, tetapi akan menjadi tidak relevan dalam sebuah masa depan dimana kekuatan kejam dan kasar tidak lagi merupakan kebutuhan utama dalam militer). Memang Burke dalam penelitiannya lebih menyoroti tata cara pendidikan dan latihan militer tentara Amerika Serikat yang sangat bias gender, memarginalkan perempuan, memuja maskulinitas; serta kenyataan berbagai efek negatif yang ditimbulkannya. Namun hal tersebut juga sangat relevan jika dikaitkan dengan perubahan yang sangat besar dalam dunia kemiliteran dewasa ini khususnya dalam hal definisi mengenai postur dan paradigma pertahanan serta mengenai alat utama sistem senjata. Salah satu

[362] Di kutip dari bahan review dalam *Books on Military Sociology*, 15 Mei 2005.

kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa perubahan tersebut menuntut adanya kemahiran-kemahiran untuk melakukan pekerjaan militer yang menggunakan sentuhan halus dan kekuatan otak; bukan lagi dengan kekuatan pisik yang kasar.

Kian kurang relevannya *macho militarism* tersebut kalau bertitik tolak dari pandangan Bruce Berkowitz terutama terkait dengan munculnya apa yang disebut sebagai "Wajah Baru dalam Perang abad 21". Dalam perang abad 21-an, pertarungan tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di dunia komputer dan sistem komunikasi. Menurut Berkowitz, dewasa ini tidak ada efek revolusi informasi sedahsyat yang terjadi di dunia kekuatan kemiliteran[363].

Relevansi perubahan postur dan paradigma militer tersebut di atas dengan konsep tentara kesatriya adalah sangat signifikan. Dalam konsep tentara ksatriya, khususnya bagi seorang perwira, kekuatannya bukan terutama dan hanya diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang bersifat pisik dan kasar, akan tetapi justru yang lebih penting adalah melalui olah batin atau "*mesu budi topo broto*". Sehingga "Macho" adalah bukan suatu keharusan menjadi ciri seorang ksatriya. Penampilan fisik yang sahaja justru menunjukkan kematangan seorang ksatriya, sekaligus menjadi ciri pembeda antara prajurit biasa dengan perwira ksatriya. Postur yang sahaja semacam itu adalah sebagai hasil dari melakukan olah batin melalui tirakat, mesu budi, menahan diri dari dorongan nafsu naluriah dan menghindari kehidupan yang hedonis.

---

[363] Bruce Berkowitz, *The New Face of war: How War Will be Fought in the 21th Centure,* Sydney-Singapore:The Free Press, th. 2003, hal. 1-3.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, Collin Mac. dan Mas'ud, Mohtar. 1990. *Perbandingan Sistem Politik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anonim. 1998. *Year book of the Encyclopedia Americana.* The American Journal. USA.

Bhakti, Ikrar Nusa (et al.).1999. *Tentara Yang Gelisah.* Bandung: Mizan.

Bhakti, Ikrar Nusa. 2001. *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru.* Bandung: Mizan dan PPW LIPI.

Bogdan, R.C. dan Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods: a Phenomenological Approach to The Social Sciencies.* New York: John Wiley & Sons.

Boucher, Geoff. 2001. *State and the Violence*. Blackwood Project.

Bourchier dan John, Legge. 1994. *Democracy In Indonesia 1950 and 1990s.* Australia: Aristoc press Pty.

Brannen, Julia. 1993. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research.* USA: Ashgate Publishing Company.

Britton, Peter. 1996. *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Budiardjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiman, Arif (editor). 1990. *State and Society in Indonesia.* Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.

Bulkin, Farchan. 1983. *State and Society: Indonesian Politics Under the New Order (1966-1978).* Seattle: Ph.D. Diss. University of Washington.

Burhan, AS. dan Muhammad, Agus. 2001. *Demokratisasi dan Demiliterisasi: Wacana dan Pergulatan di Pesantren.* Jakarta: P3M.

Cobuild, Collin, *English Electronic Dictionary.*

_____. 1978. *The Army and Politics in Indonesia.* Ithaca: Cormell University Press.

_____. *The Regulation of Military - Bureaucratic Regime: The Indonesian Case.* RSPN, ANO.

Collier, D. 1979. *The New Authoritarian in Latin America.* Princeton, NJ: Princeton University Press.

Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions.* California: Thousand Oaks, Sage Publications, Inc.

Crouch, Harrold. 1978. *The Army and Politics in Indonesia.* United Kingdom: Cornell University Press.

Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy.* New Haven: Yale University Press.

Degraaff, P. Ant. 1997. *Napak Tilas Tentara Belanda dan TNI.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Deutch, Karl W. 1961. *Social Mobilization and Political Development.* USA: Science Review, LV.

Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy: Toward Consolidation,* terjemahan. Yogyakarta: IRE Press.

Diamond, Larry dan Plattner, Mare F. 2000. *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Donald S. dan Dupuy, Trevor N. (editor). *International Military and Defense Encyclopedia.*

Douglas, Ramage E. 1995. *Democracy: Islam and the Ideology of Tolerance.* London and New York: Routledge.

Dwipayana, Ari dkk. 2001. *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia.* Institue for Research and Empowerment (IRE).

Effendy, Muhadjir. 2003. *Reposisi Peran dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Era Reformasi.* Hasil Penelitian Yang Tidak Dipublikasikan.

Evers, Hans Dieter Evers dan Schiel, Tilman. 1992. *Kelompok-Kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang* Negara, *Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga,* Edisi II. Jakarta: Yayasan Obor.

Finer, E. S. 1970. *Comparative Government, An Introduction to the Study of Politics.* New York: Allen Lane The Penguin Press.

_____. 1985. *Comparative Government.* New Zealand: Penguin Books.

_____. 1988. *The Man on Housback: The Role of the Military in Politics Boulder*. Colo: Westview.

Finkle, Jason L. dan Gable, Richard W. 1971. *Political Development and Social Change*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Flybjerg, Bent. 1991. *Rationalitet og magt: Detconcretes Videnskab*. (Rationality and Power: The Science and The Concrete). Odenese Akademisk Forlag.

Gabriel, A. Almond. 1966. *Comparative Politics: a Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company.

Gaffar. 1989. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.

Galatfisher, Stephan. 1981. *Eastern Europe in The 1980*. London: West View Press.

Glick, Edward B. 1967. *Peacefull Conflict: The Non-Military Use of the Military*. Harrisburg, Pa: Stackpole Books.

Godechot, Jacques. 1989. *Revolusi Di Dunia Barat (1770-1799)*, terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Goodman, Louis W. "Peran Militer di Masa Lalu dan Sekarang" dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer*.

Gordon, Marshal. 1998. *Dictionary of Sociology*. Oxford University Press.

Graham, James R. 1993. *Non-Combat Roles for US: Military in the Post Cold War Era*. Washington DC: National Defence University Press,

Habib, Hasnan. 1997. *ABRI dan Demokratisasi Politik*, dalam Selamet Ginting, dkk. (eds.) *ABRI dan Demokrasi*. Bandung: Mizan.

Hadi, Nur dan Sutopo. 1997. *Perjuangan Total Brigade IV Pada Masa Perang Kemerdekaan Di Karesidenan Malang*. Malang: IKIP Malang Press.

Hafera, Andrias. 1999. *Membangkitkan Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia Utama.

Hague, Rod, Martin Harrop and Shaun Breslin. 1992. *Political Science: a Comparative Introduction*. Great Britain: The Macmillan Press.

Hamamsy, Laila Shukry El. 1973. "Belief System and Family Planning in Peasant Society" dalam Harrison Brown (ed.), *Are Our Descendants Doomed?* New York: The Viking Press.

Hatta, Mohammad. 1983. *Angkata Perang dan Rakyat I*. Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, ed., Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II. Jakarta: Inti Idayu Press.

_____. 1983. *SSKAD Lima Tahun I.* Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, ed., Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II. Jakarta: Inti Idayu Press.

Held, David. 1987. *Model of Democracy.* Stanford: Stanford University Press.

_____. 1996. "The Development of Liberal Democracy: For and Against the State" dalam *Models of Democracy.* Stanford: Standford University Press.

Hover, Eisen. *Perang Salib Di Eropa*, terjemahan Nugroho Noto Susanto. Jakarta: Bhratama.

Huntington, Samuel P. 1983. *Tertib Politik di Negara Yang Sedang Berkemabang*, Cetakan I dan II. Jakarta: CV. Rajawali .

_____. 1991. *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century.* Norman and London: University of Oklahoma Press.

_____. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga,* terjemahan. Jakarta: PT. Intermasa.

_____. 1998. *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-Military Relations.* Cambridge: Harvard University Press.

_____. 2003. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil,* terjemahan Deasy Sinaga. Jakarta: PT Grasindo.

Instruksi KSAD Nomer-2/KSAD/INSTR/52 tanggal 25 Januari 1952, sebagai pelaksanaan organisasi Angkatan Darat.

Intyre, Andrew Mac. 1990. *Business and Politics in Indonesia.* Australia: Asia Studies Associatio of Australia in Association with Allen and Unwin.

Jackson, Karl D. 1978. *Political Power and Communication in Indoensia.* London: University of California Press.

Janowitz, Morris. 1964. *The Military in the Political Development of New Nations* Chicago: University Press.

_____. 1977. *Military Institutions and Coercion in the Developing Nations.* Chicago and London: University of Chicago Press.

_____. 1985. *Hubungan-Hubungan Sipil-Militer.* Jakarta: PT. Bina Aksara.

Jarah Dam. 1977. *Sejarah Singkat Kodam VIII/Brawijaya (tahun 1945-1977),* Kodam VIII/Brawijaya.

Jejak Langkah Pak Harto. 1991. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Karim, Rusli M. 1986. *Peranan ABRI dalam Politik.* Jakarta: CV. H. Masagung.

King, D.Y. 1977. *Authoritarian Rule and State Corporatism in Indonesia.* Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington, (1-4 September).

_____. 1982. "Indonesia's New Order as a Bureaucratic Policy: a Neopatrimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Differentce Does it Make?" in Anderson, B. & Kahin A (eds*), Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate.* Ithaca: Cornell Modern Indoneisa Project.

Kockelmans, J.J. (ed.). 1967. *The Philosophy of Edmund Huserl.* New York.

Korem 083/Baladhika Jaya. Sejarah Singkat dan Data Satgas Yonif 512/QY, Komando Resor Militer 083/Baladhika Jaya, Batayon Infanteri 512/Quratara Yudha.

Kunarto. 1997. *Tri Brata, Catur Prasetya, Sejarah Perspektif dan Prospeknya.* Jakarta: Cipta Manunggal.

Kuntowijoyo. 2006. *Raja Priyayi dan Kawula,* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Leirissa, RZ. 1994. *PRRI Permesta.* Jakarta: Grafiti Pers.

Liddle, William R. *Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions.*

Longman Dictionary of Contemporary English. 1978. Longman Group Limited.

Magenda, Burhan. 2000. *Militer dan Politik,* (dalam Amos Perlmutter). Jakarta: Rajawali Pers.

Mangkoesoebroto, Gurtino. 1993. *Ekonomi Publik,* edisi III. Yogyakarta.

Malloy, James. 1977. "Aithoritarian and Corporatism in Latin America: The Modern Pattern" dalam James M. Malloy (ed.), *Authoritarianism and Corporatism in Latin America.* Pitburgh: University of Pittsburgh.

Markas Besar TNI. 1999. *Paradigma Baru Peran ABRI: Sebuah Upaya Sosialisasi,* edisi II. Jakarta.

_____. 1998. *ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa.*

Mas'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru* 1966-1971. Jakarta: LP3ES.

Moelang, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moore, B. 1966. *Social Origin Dicttorship and Democracy: Lord and Peasants in the Making of the Modern World.* Boston: Beacon Press.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi IV. Bandung: Rake Sarasin.

Muhaimin, Yahya dan Collin, Andrews Mac. 1985. *Masalah-Masalah Pembangunan Politik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 1990. *Bisnis dan Politik.* Jakarta: LP3ES.

Myrdal, Gunnar. 1969. *Objectivity in Social Research.* New York: A Division of Random House.

Nasution, A.H. 1997. *Sekitar Perang dan Kemerdekaan Indoensia,* III.

Nawawi, Hadari H. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Nordlinger, Eric A. 1994. *Militer dalam Politik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Notosusanto, Nugroho. 1985. *Angkatan Bersenjata Dalam Percaturan Politik Di Indonesia: Dalam Analisa Kekuatan politik Di Indonesia,* Seri Artikel Pilihan. Jakarta: LP3ES.

Nye, Joseph S. Jr. "Epilog: Tradisi Liberal" dalam Larry Diamon dan Mare F. Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer.*

O'Donnell, Guillermo. 1992. "Transition, Continuities, and Paradoxes". Mainwaring, O'Donnell dan Valenzua, eds., *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective.* Notre Dame: Universiry of Notre Dame.

_____. 1986. *Transition From Authoritarian Rule: Prospects for Democracy,* Vol. 3. Baltimore: John Hopkins Press.

_____. 1986. *Schmitter Transition from Authoritarian Rule: Tentatives Conclutions about Uncertain Democracies.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Palma, Di. 1990. *To Craft Democracies, An Essay on Democratic Transitions* Berkeley. Los Angelos, Oxford: University of Calipornia Press.

Palmer, Monte. 1989. *Dilemmas of Political Development.* Ithaca, Illiones: F. E. Peacock Publishers, Inc.

Patriadi, Himawan Bayu. 1997. *Transition from Military Rule: Thailand and Indonesia Compared, unpublished MA thesis*, Institute of Asian Studies. Adelaide: Flinders University.

Paz, Octavio. 1997. "Claude Levi-Strauss: an Introduction" dalam edisi terjemahan *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*. Yogyakarta: LKIS.

Perlmutter, Amos. 2000. *Militer dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Pesindo. 2000. *Sejarah TNI 1945-1949, Jilid I*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

Prawirosoebroto, Subijakto. 1996. Letnan Jendral (Purn.), *"Empat Benang Merah Dwifungsi"*, makalah dipresentasikan dalam workshop on "Armed Forces and Society in Southeast Asia". Canberra: Australian Defence Studies Centre.

Pridham, Geoffrey, (ed). 1991. *Encouraging Democracy, The International Contecx of Regime Transition in Southern Europe*. Licester, London: Leicester University Press.

Purwanto, Bambang. 2000. "Historiografi dan Legitimasi Peran Sosial Politik Militer di Indonesia", Edward Polinggomang & Suriadi Mappanagara, ed., *Dunia Militer Indonesia*. Yoyakrta: Gadjah Mada University Press.

Purwadi. 2004. *Strategi Politik Ken Arok*. Yogjakarta: Gelombang Pasang.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. 1990. *Sejarah Singkat Perjuangan ABRI 1945-1990*. Jakarta: Markas Besar ABRI.

Reifqi, M. 1999. Persepsi ABRI dan Sipil Terhadap Dwifungsi ABRI: Mengukur Dua Kategori Ganda. Makalah Pada Seminar CSIS.

Ricklefs, M. C. 1981. *A History of Modern Indonesia*. London: Macmillan.

Rinakit, Sukardi. 2005. *The Indonesia Military After The New Order*. Malaysia: NIAS Press.

Robison, Richard. 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. Asia Studies Association of Australia.

Said, Salim. 1993. *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49*. Singapore: ISEAS

_____. 2004. *Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fumgsi ABRI*. Jakarta: Gramedia.

Saidi, Anas. 2001. *Military Without Mitarism: Suatu Pengantar*. Jakarta: Tim PMB LIPI.

Salim, Peter. 2000. *Collegiate English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.

Samego, Indria. 1999. *TNI di Era Perubahan*. Jakarta: Erlangga.

Sayidiman. 1997. *Mengabdi Negara sebagai Prajurit TN*. Jakarta: Pustaka Sinar

Schawrz, Adam. 1994. *A Nation in Waiting*. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd.

Schwartz, Janet S.dan Segal, David R. 1981. *Professional Autonomy of the Military in the United State and the Soviet Union*. Air University Review.

Segal, David R. and Janet S. Schawart. 1981. *Professional Autonomy of Military in the United States and the Soviet Union*, www.airpower.maxwell.af.mi

Shin, Hwan Yoon. 1989. *Desmitisfying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interests, and Capitalists-In-Formation in Soeharto's Indonesia*. A Dissertation.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Singh, Bilveer. 1999. *Civil-Military Relationship Revisited: The Future of The Indonesian Armed Forces in Indonesian Politics*. Singapore: Crescent Design Associates.

_____. 1995. *Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Gramedia.

Skocpol, T. 1986. "Bringin the State Back in" dalam P. Evans, *et.al*, (eds.), *Bringin the State Back in*. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Steve, and Martin Hollis. 1991. *Explaining and Undertanding International Relation*. Oxford: Claredon Fress.

Spector, E. Paul. 1981. *Research Designs*. London: Sage Publications, Inc.

Steleno and Lars-Goran. 1980. *Foreign Policy Predictions*. Lund: Studentlitteratur.

Stepan, Alfred. 1988. *Rethinking Military Politics: Brazil and Southern Cone*. Princeton: Princeton University Press.

Stepan, Alfred. 1996. *Militer dan Demokrasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

Stepan, Alfred. 1996. *Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara Lain*. Jakarta: Grafiti.

Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sumarkidjo, Atmadji. 2001. *The Rise and Fall of The General: The Indonesian Military at The Crossroads*, Grayson Llyod & Shannon Smith, ed., Indonesia Today. Challenge of History. Singapura: ISEAS.

Sundhaussen, Ulf. 1989. "Past and Present Encounters With Democracy" in Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymor Martin Lipset (eds.), *Democracy in Developing Countries*, Vol. 3. London: Adamantine Press Limited.

_____. 1994. "The Inner Contradiction of the Soeharto Regime: a Starting Point for a Withdrawal to the Barracks" in David Bourchier & John Legge (eds.), *Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s*. Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, (Monash Papers on Southeast Asia No. 31).

_____. 1982. *The Road to Power*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

_____. 1982. *The Road To Power: Indonesian Military Politics* 1945-1967. Kualalumpur: Oxford University Press.

Supriyatmono, Hendri. 1994. *Nasution, Dwifungsi dan Konstribusi ke Arah Reformasi Politik*. Surakarta: Univ. Sebelas Maret Press.

Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*. Bandung: TARSITO.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Sutarto, Endriartono. 2002. *Memahami TNI dan Netralitasnya.* Jakarta: Puspen TNI.

Suwardono. 1996. *Monografi Sejarah Kota Malang*. Malang: CV. Sigma Media.

Syukur, Abdul. *Ensiklopedia Umum untuk Pelajar*, jilid 9. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Trimberger, A. 1986. "A Theory of Elite Revolutions" dalam J. Goldstone (eds.), *Revolutions: Theoritical, Comparative and Historicl Studies*. San Diego: Harcourt B. Jovanovich.

Uhlin, Under. 1995. *Democracy and Diffusion: Transitional Lesson-Drawing among Pro-Democracy Actors*. Sweden: Team Offset.

Undang-undang No.34 Tahun 2004, *Tentang Tentara Nasional Indonesia.* 2004. Bandung: Fokus Media.

Vatikiotis. 1993. *Indonesian Politics Under Soeharto, Order, Development and Pressure For Change*. London and New York: Routledge.

Yin, Robert K. 1989. *Case Study Research: Design and Methods*. Newbury Park: Sage.

Yudhoyono, Susilo Bambang. 1993. "*Profesionalisme Perwira Abri Masa Kini dan Masa Depan*". Herman Susakabe (ed.), *Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoad 1992-1993*. Jakarta: Forum Pengkajian Seskoad.

_____. 1996. *Ceramah Kepemimpinan pada Kursus Reguler Angakatan XXIII Sesko ABRI* Th 1996/1997. Bandung.

Yulianto, Arif. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zen, Kivlan. 2004. *Konflik dan Integrasi TNI-AD*. Jakarta: Institute for Policy Studies.

Zoetmulder, P.J. dan Robson, S.O. 1997. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia I,* cetakan ke-2. Jakarta: PT Gramedia.

Jurnal

Anonim. 1984. *Military Withdrawal from Government Responsibility.* Armed Force & Society, Vol. 10, No. 4, Summer.

Cobuild, Collin. 1994. "Democratic Prospects in Indonesia" in David Bourchier & John Legge (eds.), *Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s.* Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, (Monash Papers on Southeast Asia No. 31).

Crouch, Harold. 1978. *Patrimonialism and Military Rule In Indonesia.* World Politics, Vol. 31, No. 4, USA.

Girling, John. 1978. *Development and Democracy In Southeast Asia*. Pacific Review, Vol. 1, No. 4, Oxford University.

Jenkins, David. 1983. *The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi*. Southeast Asian Journal of Social Sciences, Vol.11, No. 2.

Jonson, Christer. *International Politics: Scandinavian Indentity Amids American Hegemony?* Scandinavian Political Studies, Vol. 16, No. 2.

Mantiri, AC. 2000. "Memelihara Profesionalisme Sepanjang Masa Penugasan" dalam *Majalah Akademi Tentara Nasional Indonesia*, Edisi Desember.

Nasution, A.H, Jendral TNI (Purn.). 1980. *"Dwifungsi: Pada Mulanya dan Kini"* Prisma, No. 12, tahun IX.

O'Donnel, Gulilermo. 1978. *Reflection on the Paterns of Change in the Bureaucratic Autnoritarian State.* Latin American Research Review 8.

Rose, Charlie. 1994. *Democratic Control of The Armed Forces: A Parliamentary Role in the Partnership for Peace.* NATO Review 42.

Rustow, Dankwart A. *Transition to Democracy: To Ward To Dynamic Model* Comparative Politics, Vol. 2, No. 3.

Sundhaussen, Ulf. 1995. *Penarikan Diri Militer Dari Pemerintahan.* Prisma No.7.

Tanter, Richard. 1990. "Oil, IGGI and US Hegemony: the Global Pre-conditions for Indonesian Rentier-Militarization" in Arif Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesi.* Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, (Monash Papers on Southeast Asia No. 22).

_____. 1990. "The Totalitarian Ambition: Intelligence and Security Agencies in Indonesia" in Arief Buniman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia.* Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, (Monash Papers on Southeast Asia No. 22).

Uhlin, Under. 1999. *Demokrasi di Indonesia: Peluang dan Hambatan.* Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA, No II. Yogyakarta: Insist.

Surat Kabar

Keith B. Richburg, 23 Mei 1998. *Seven Days in May That Toppled a Titan*, The Washington Post.

Sugiarto, Atok. 2004. "Bracketing Pada Kamera Digital", *Suara Pembaharuan Minggu*, 17 Oktober.

Jawa Pos, 7 Oktober 1999

Jawa Pos, 5 Oktober 2001.

Jawa Pos, 2 April.

Jawa Pos, 21 September.

Jawa Pos, 6 Oktober.

Kompas, 14 Maret 1996. (Siti Hardiyanti yang nama panggilannya Mbak Tutut adalah putri sulung Presiden Soeharto).

Kompas, (1.329 responden, via telepon) pada awal Oktober memberi hasil yang tidak jauh berbeda. Sebanyak 81% setuju jika ABRI hanya menjaga pertahanan dan keamanan, serta 62% melihat citra ABRI secara umum buruk.

Kompas, 20 Agustus 1998.

Kompas, 1 April 2003.

Suara Merdeka, Sabtu, 2 Maret 2002.

Dokumen

Departemen Pertahanan RI. 2003. *Buku Putih Pertahanan: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad Ke-21.* Jakarta.

Dinas Bimbingan Mental Angkatan Darat. 2005. *Sejarah TNI AD 1974-2004.* Jakarta.

Markas Besar Angkatan Darat. 2006 *Setia dan Menepati Janji serta Sumpah Prajuri.* Jakarta.

Sejarah Singkat KESDAM V/Brawijaya, Komando Daerah Militer V/Brawijaya Kesehatan

Sejarah Singkat KUDAM V/Brawijaya, KODAM V Brawijaya Keuangan.

Sejarah Singkat dan Data Satgas Yonif 512/QY, Korem 083/Baladhika Jaya, Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha.

Sejarah Singkat Kodam VIII/Brawijaya (tahun 1945-1977).

Sejarah Pertumbuhan Bintaldam V Brawijaya, Kodam V Brawijaya, Pembinaan Mental.

Sejarah Satuan Yon Zipur-5 Dam VIII/Brawijaya, KODAM VIII Brawijaya Batalyon Zeni Tempur 5.

Sejarah Singkat Balayon Kavaleri 3 / Serbu.

Sejarah Singkat Dohar Rudal Rapier, Pusat Kesenjataan Artileri Angkatan Darat, Depo Pemeliharaan Rudar Rapier.

Sejarah Pertumbuhan Pangkalan Udara Bugis hingga menjadi Pangkalan Udara Abdurachman Saleh.

Sejarah Singkat Korem 083/Baladika Jaya dalam Rangka HUT Ke-30, Komando Daerah Militer V Brawijaya Komando Resor Militer 083, 25 Nopember 1993

Sejarah Singkat Rumah Sakit Tk. II. 05.05.01 Dr. Soepraoen, Kesehatan Daerah Militer V Brawijaya Rumah Sakit Tk. II. 05.05.01 Dr. Soepraoen.

Situs Internet

http:// en.Wikipedia.org
http://www.geocities. com/persmahasiswa/3.4.2.html
www.detik.com
www.gatra.com
www.kompas.com
www.mabesad.mil.id
www.malangkab.go.id
www.pemkotmalang.go.id
www.republika.co.id

Lampiran 1

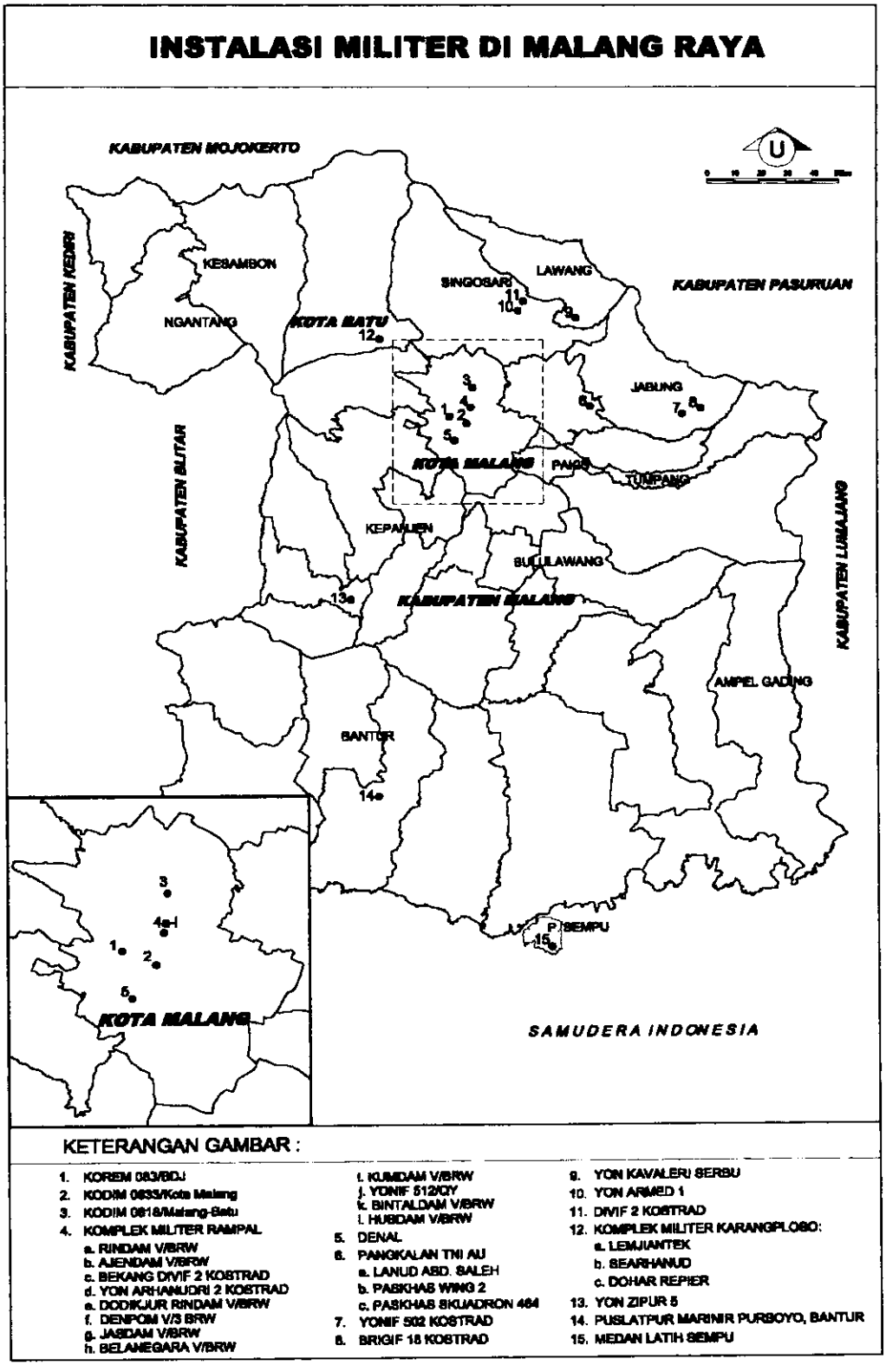
INSTALASI MILITER DI MALANG RAYA
KABUPATEN MOJOKERTO
KABUPATEN KEDIRI
KABUPATEN BLITAR
KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN LUMAJANG
KESAMBEN
NGANTANG
KOTA BATU
SINGOSARI
LAWANG
JABUNG
KOTA MALANG
PAKIS
TUMPANG
KEPANJEN
BULULAWANG
KABUPATEN MALANG
AMPEL GADING
BANTUR
P. SEMPU
SAMUDERA INDONESIA
KOTA MALANG
KETERANGAN GAMBAR :
1. KOREM 083/BDJ
2. KODIM 0833/Kota Malang
3. KODIM 0818/Malang-Batu
4. KOMPLEK MILITER RAMPAL
a. RINDAM V/BRW
b. AJENDAM V/BRW
c. BEKANG DIVIF 2 KOSTRAD
d. YON ARHANUDRI 2 KOSTRAD
e. DODIKJUR RINDAM V/BRW
f. DENPOM V/3 BRW
g. JASDAM V/BRW
h. BELANEGARA V/BRW
i. KUMDAM V/BRW
j. YONIF 512/QY
k. BINTALDAM V/BRW
l. HUBDAM V/BRW
5. DENAL
6. PANGKALAN TNI AU
a. LANUD ABD. SALEH
b. PASKHAS WING 2
c. PASKHAS SKUADRON 464
7. YONIF 502 KOSTRAD
8. BRIGIF 18 KOSTRAD
9. YON KAVALERI SERBU
10. YON ARMED 1
11. DIVIF 2 KOSTRAD
12. KOMPLEK MILITER KARANGPLOSO:
a. LEMJIANTEK
b. SEARHANUD
c. DOHAR REPIER
13. YON ZIPUR 5
14. PUSLATPUR MARINIR PURBOYO, BANTUR
15. MEDAN LATIH SEMPU

Lampiran 2

STRUKTUR ORGANISASI MABES TNI

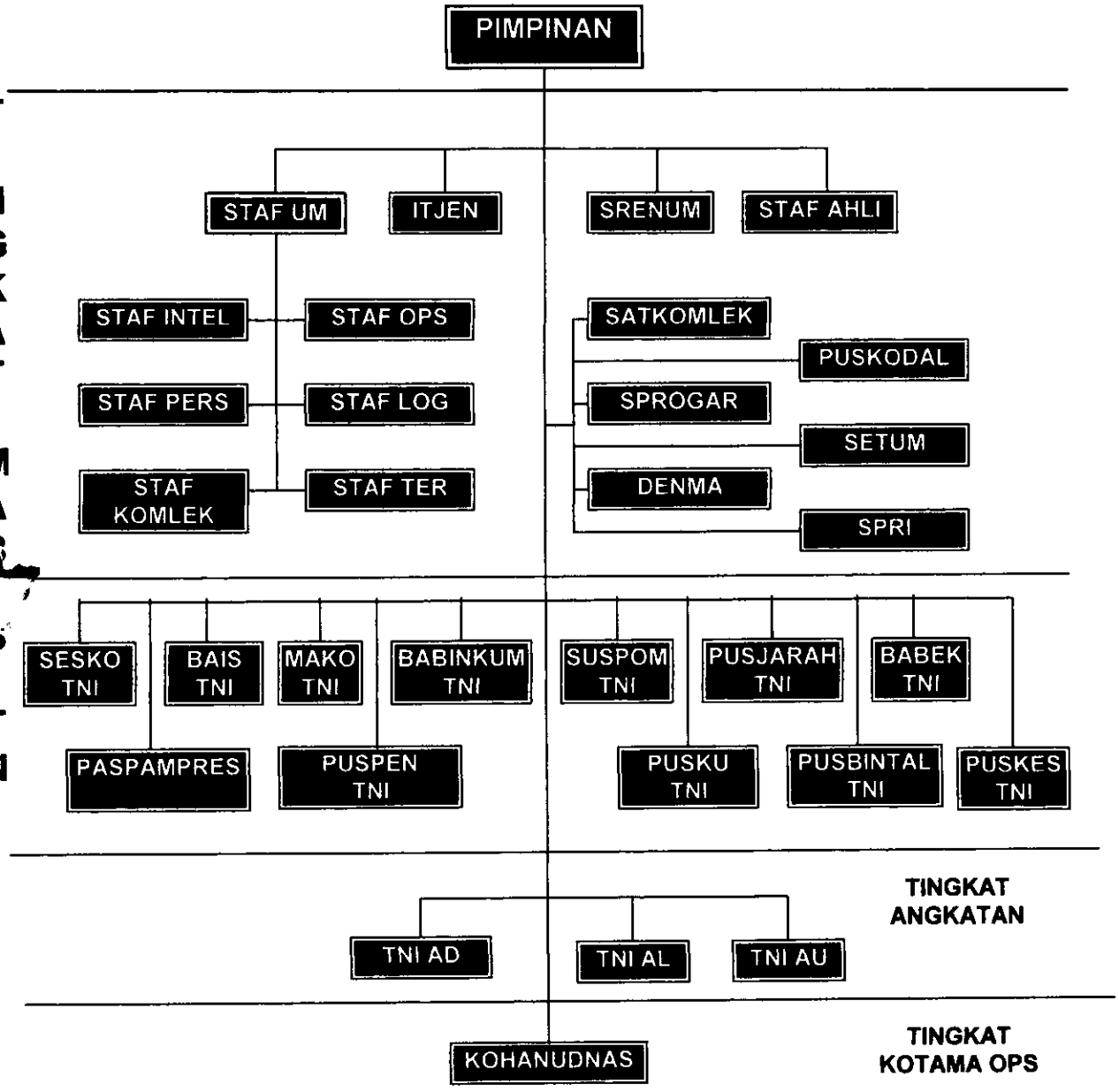

Sumber: http://www.tni.mil.id/organization.php

Lampiran 3

STRUKTUR ORGANISASI TNI AD

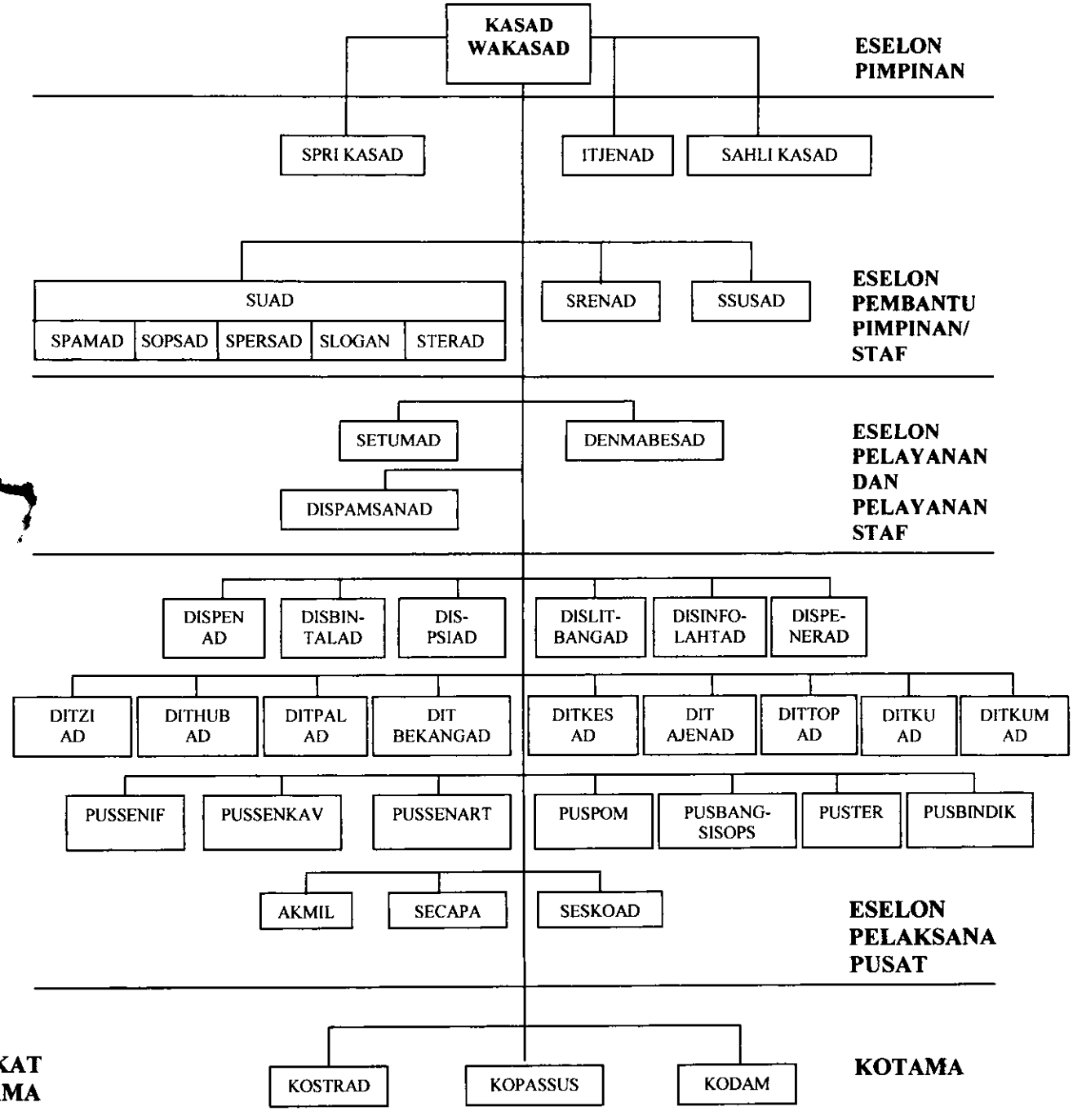

Sumber: http://www.tniad.mil.id/organisasi.php